M. SUDIBJO (Penyunting)

PEMILIHAN UMUM 1992

SUATU EVALUASI

AN KPA

NALAR AJAR TERUSAN BUDI
CSIS

PERPU

ISBN 979-8026-26-X

N. 153
PERPUSTAKAAN
KONSORSIUM PENDIDIKAN AGRARIA

M. SUDIBJO (Penyunting)

PEMILIHAN UMUM 1992

SUATU EVALUASI

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
JAKARTA

PEMILIHAN UMUM 1992: SUATU EVALUASI

Penyunting: M. Sudibjo
© Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Rancangan sampul dan perwajahan oleh Matari Inc.
Diterbitkan pertama kali oleh
Centre for Strategic and International Studies (CSIS),
Jakarta, 1995.

Cetakan Pertama: Januari 1995.

Dilarang mereproduksi sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PEMILIHAN UMUM 1992 - Suatu Evaluasi/
penyunting, M. Sudibjo. – Cet. 1. – Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995.
vi, 226 hlm.; 21 cm.

ISBN 979-8026-26-X

1. Pemilihan Umum - Indonesia - 1992
I. Sudibjo, M.

324.959 803 9

Prakata

PEMILIHAN Umum yang kelima dalam Orde Baru atau yang terakhir dalam Era Pembangunan Nasional Jangka Panjang 25 Tahun Pertama telah berlangsung pada tanggal 9 Juni 1992. Perhitungan suara secara resmi menunjukkan bahwa Golongan Karya mengalami kemunduran dalam perolehan suara ataupun kursi meskipun tetap memenangkan suara secara mayoritas, sebaliknya Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia keduanya mengalami kenaikan.

Kemunduran perolehan suara Golongan Karya itu juga semakin tampak dengan berkurangnya perolehan kursi DPR bila dibandingkan dengan hasil Pemilihan Umum 1987. Demikian pula untuk kursi DPRD, terutama untuk DPRD Tingkat II, Golongan Karya mengalami banyak kemunduran bila dibandingkan dengan perolehannya pada Pemilihan Umum 1987.

Meskipun kemunduran perolehan suara Golongan Karya dalam Pemilihan Umum 1992 itu telah diperkirakan oleh para pengamat politik, tetapi kemunduran perolehan suara Golongan Karya di sebagian besar daerah pemilihan, khususnya di Jawa, telah menimbulkan berbagai pertanyaan: Apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh Golongan Karya ini? Fenomena-fenomena apa yang dapat dibaca dari hasil Pemilihan Umum itu? Bagaimana suasana dan pelaksanaan kampanye yang mendahului waktu Pemilihan Umum tersebut?

Penerbitan CSIS kali ini merupakan kumpulan makalah yang disampaikan dalam seminar bertema "Membaca Hasil Pemilihan Umum 1992" yang diadakan di CSIS pada tanggal 9 Juli 1992.

Buku ini diharapkan berguna bagi masyarakat luas dan peminat masalah-masalah politik di Indonesia pada umumnya. Diharapkan pula pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalamnya akan berguna dalam meningkatkan kualitas Pemilihan Umum di Indonesia di masa mendatang.

Hadi Soesastro
Direktur Eksekutif

Daftar Isi

Prakata iii

1. Pendahuluan
   M. Sudibjo 1

2. Evaluasi Pemilihan Umum 1992
   Harry Tjan Silalahi 12

3. Pemilu 1992: Suatu Dinamika Perubahan Sosial
   Amir Santoso 39

4. Dinamika Pemilih dalam Pemilu 1992
   Riswandha Imawan 49

5. Evaluasi Pemilihan Umum 1992: Suatu Catatan
   Oka Mahendra 70

6. Dinamika Pemilih dalam Pemilu 1992: Suatu Tanggapan
   Kwik Kian Gie 76

7. Pemilu 1992 -- Suatu Dinamika Perubahan Sosial: Suatu Tanggapan
   H. Matori Abdul Djalil 83

8. Tinjauan Pelaksanaan Pemilihan Umum 1992 dan Prospeknya
   Harisoegiman 89

Lampiran: 151

1. Komposisi Suara dan Kursi, Hasil Pemilu 1992 152
2. Perbandingan Jumlah Kursi yang Diperoleh Masing-masing OPP pada Pemilu 1987 dan 1992 153
3. Perolehan Suara, dalam Pemilu 1992 154

4. Pemilu dalam Angka 155
5. Partisipasi Rakyat dalam Pemilu dan Perubahan Partisipasi Pemilu 158
6. Jumlah Penduduk dan Kursi DPR yang Diperebutkan 159
7. Jumlah Penduduk, Pemilih dan Suara Sah serta Persentasenya dalam Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 160
8. Jumlah Kursi yang Diperoleh Masing-masing OPP dalam Pemilu Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 161
9. Jumlah Perolehan dan Persentase Suara serta Jumlah Kursi yang Diperoleh Setiap OPP dalam Pemilu Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 163
10. Perolehan Suara dalam Pemilu Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 164
11. Pertambahan atau Penurunan Kursi DPR yang Diperoleh oleh Setiap OPP dalam Pemilu 1987 dan 1992 165
12. Pertambahan atau Penurunan Kursi DPR yang Diperoleh oleh Setiap OPP dalam Pemilu 1982 dan 1987 166
13. Perbandingan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan dan Persentasenya untuk Tahun 1987 dan 1992 167
14. Perbandingan Perolehan Suara Golongan Karya dan Persentasenya untuk Tahun 1987 dan 1992 168
15. Perbandingan Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia dan Persentasenya untuk Tahun 1987 dan 1992 169
16. Perolehan Suara PPP di Daerah Sumatera, Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 170
17. Perolehan Suara Golkar di Daerah Sumatera, Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 170
18. Perolehan Suara PDI di Daerah Sumatera, Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 171
19. Perolehan Suara OPP di Sumatera dalam Pemilu 1992 172
20. Tata Cara, Suasana dan Pandangan tentang Kampanye Pemilu 1992 173
21. Ringkasan Kampanye Golkar dalam Pemilu 1992 188
22. Ringkasan Kampanye PPP dalam Pemilu 1992 207
23. Ringkasan Kampanye PDI dalam Pemilu 1992 217

Kontributor 225

1. Pendahuluan

M. SUDIBJO

SEUSAI Pemilihan Umum 1992, bahkan sebelum "pesta demokrasi" ini diselenggarakan, banyak pendapat atau pemikiran mengenai Pemilihan Umum dilontarkan, baik melalui media massa maupun media elektronik, baik dalam suatu seminar, sarasehan ataupun wawancara. Gejala semacam ini merupakan angin segar dalam pembangunan politik di Indonesia. Ditinjau dari sudut pembangunan politik, ini semua dapat dipandang sebagai meningkatnya kepedulian atau peranan masyarakat dalam pembangunan politik nasional. Sedangkan bila ditinjau dari sudut pelaksanaan Pemilihan Umum, pendapat dan pemikiran-pemikiran ini dapat dijadikan masukan untuk semakin meningkatkan pelaksanaan Pemilihan Umum di masa mendatang. Meskipun pendapat atau pemikiran-pemikiran yang terungkap itu belum tentu sejalan, bahkan tidak jarang sangat berbeda, dengan sikap atau maksud pemerintah, hal itu tidak mengurangi arti pentingnya kepedulian atau peranan masyarakat itu. Apalagi sistem politik Pancasila tidak mentabukan adanya perbedaan pendapat, yang memang merupakan bagian dari demokrasi Pancasila. Dia diakui sebagai salah satu kekayaan atau kemajemukan budaya Nusantara yang mendorong peningkatan dinamika politik. Namun kesemuanya itu tetap dalam acuan *bhinneka tunggal ika*, dalam arti kemajemukan sebagai kekayaan dan pendorong peningkatan dinamika politik itu harus menjauhkan pemikiran-pemikiran atau usaha-usaha yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Peningkatan peranserta masyarakat dalam kehidupan politik merupakan salah satu tolok ukur peningkatan kehidupan politik di Indonesia, sehingga meningkatnya kuantitas maupun kualitas pendapat atau pemikiran-pemikiran itu menjadi sangat penting dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Oleh sebab itu perkembangan semacam ini perlu terus didorong dan dikembangkan agar nantinya dapat menjadi semacam bentuk sumbangan masyarakat dalam rangka pembinaan *nation and character building*.

Paparan mengenai Pemilihan Umum 1992 ini disajikan antara lain juga karena alasan tersebut di atas. Di samping itu, paparan atau penyajian ini dimaksudkan sebagai sumbangan bagi penyelenggara dan siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum di masa-masa mendatang. Hal ini kiranya menjadi semakin relevan mengingat pentingnya Era Kebangkitan Nasional II sebagai era tinggal landas yang sangat menekankan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, kalangan politisi, termasuk para pengamat politik dan tokoh-tokoh organisasi sosial politik, tidak sedikit yang berpendapat bahwa Pemilihan Umum 1992 ini menunjukkan kemajuan. Pemilihan Umum kali ini dirasakan lebih baik dari pemilihan-pemilihan sebelumnya, baik tahun 1971, 1977, 1982 maupun 1987. Dinamika politik tetap semarak, tanpa harus mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa. Suasana kebebasan terasa semakin meningkat. PPP dan terutama PDI semakin berani tampil untuk bersaing dengan Golongan Karya, baik dalam kampanye maupun dalam lontaran-lontaran isu. "Wasit" diakui semakin netral. Demikian pula, peranan ketiga organisasi kekuatan sosial politik dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan juga semakin nampak.

Namun demikian, tidak berarti bahwa Pemilihan Umum ini terbebas dari permasalahan. Sebagaimana pemilihan-pemilihan sebelumnya, Pemilihan Umum 1992 juga masih menghadapi beberapa masalah, baik yang sifatnya konsepsional maupun yang hanya teknis operasional. Masalah yang sering dilontarkan OPP itu antara lain:

a. *Penyelenggara Pemilihan Umum.* Diusulkan agar Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris MPR bersama-sama organisasi-organisasi kekuatan sosial politik, meskipun Ketetapan MPR 1988 tegas-tegas menyatakan bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris MPR";

b. *Sistem Pemilihan Umum.* Disarankan agar sistem Pemilihan Umum, yakni sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar yang pada dasarnya merupakan gabungan antara sistem proporsional *(multi members constituency)* dan sistem distrik *(single member constituency)* ditinjau kembali. Bahkan ada yang mengusulkan agar diganti dengan sistem distrik, meskipun sementara politisi juga tetap mengakui bahwa sistem Pemilihan Umum yang berlaku sekarang ini masih merupakan langkah terbaik dan adil untuk kondisi masyarakat Indonesia yang sangat kompleks meskipun mobilitas penduduk kini telah semakin meningkat. Perkembangan demografi dan kehidupan politik nasional karena pembangunan nasional masih mampu ditampung dengan sistem tersebut;

c. *Keanggotaan pegawai negeri dalam organisasi kekuatan sosial politik di luar Golongan Karya.* Dipertanyakan apa dasarnya pegawai negeri harus menjadi anggota Golongan Karya. Meskipun telah diadakan beberapa perubahan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan keanggotaan pegawai negeri itu, tetapi nampaknya belum juga memuaskan sikap para pimpinan PDI maupun PPP;

d. *Hak pilih untuk anggota ABRI*. Diusulkan agar anggota ABRI ikut memilih dalam Pemilihan Umum. Selama ini ABRI tidak mempergunakan hak memilihnya. Hal ini didasarkan pada konsensus nasional, yang telah dipertegas dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Selain itu keanggotaan ABRI dalam DPR/MPR melalui pengangkatan juga mulai dipertanyakan, karena ada OPP yang merasa bahwa ketentuan ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini;

e. *Kampanye Pemilihan Umum*. Dirasakan bahwa kampanye-kampanye yang selama ini telah dijalankan belum dapat digunakan sebagai sarana pendidikan politik dan penawaran program partai secara optimal. Diusulkan agar dicarikan bentuk kampanye yang dapat merealisasikan setidaknya mendekati tujuan diadakannya kampanye, meskipun bentuk kampanye yang selama ini dijalankan dengan pengerahan massa dan pawai nampaknya masih diperlukan.

Berkaitan dengan masalah di atas, masalah *hari pemungutan suara* yang ditetapkan sebagai bukan hari libur, dan *lokasi TPS-TPS* juga mendapat tanggapan organisasi kekuatan sosial politik. Diusulkan agar hari pemungutan suara ditetapkan sebagai hari libur nasional, dan lokasi TPS-TPS yang ada di halaman instansi-instansi pemerintah dipindahkan.

Sejalan dengan masalah-masalah yang muncul itu, masalah *kualitas anggota DPR RI* juga menjadi sorotan, meskipun yang menjadi tolok ukurnya juga masih memunculkan silang pendapat. Sehubungan dengan hal ini, *Peraturan Tata Tertib DPR* juga menjadi sorotan, karena dianggap justru peraturan itulah yang menyebabkan para anggota DPR RI kurang leluasa menyampaikan pendapatnya. Berkaitan dengan masalah ini, *rekruitmen calon anggota DPR/MPR* juga terangkat ke permukaan.

Di balik itu semua, masalah yang tampaknya perlu segera dibenahi adalah soal kemandirian organisasi kekuatan sosial politik. Berdasarkan isu-isu yang dilontarkan, tercermin adanya keinginan yang cukup kuat dalam diri organisasi kekuatan sosial politik untuk lebih mandiri. Tetapi suasana internal organisasi-organisasi kekuatan sosial politik itu sendiri kiranya yang ikut mengundang datangnya campur tangan dari luar. Pembenahan dan peningkatan kualitas organisasi kekuatan sosial politik mutlak diperlukan bila mereka menginginkan tumbuhnya kemandirian dalam dirinya. Telah tiba waktunya bagi organisasi kekuatan sosial politik untuk dikelola secara lebih profesional, dan sementara itu para anggotanya juga harus semakin menyadari apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sehatnya kehidupan organisasi dan meratanya kualitas anggota organisasi merupakan faktor yang akan sangat menentukan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Sehubungan ramainya pembicaraan mengenai kehidupan organisasi kekuatan sosial politik itu, Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya (UU No. 3/1985) juga mendapat sorotan, khususnya mengenai pasal tentang kepengurusan. Sementara politisi, terutama yang non Golongan Karya, mengusulkan agar kepengurusan partai politik dan Golongan Karya yang hanya sampai Daerah Tingkat II *(floating mass)* hendaknya ditinjau kembali. Namun demikian para politisi juga masih bersilang pendapat mengenai benarkah *floating mass* menghambat proses pendidikan politik rakyat. Berkaitan dengan masalah ini, juga diusulkan pembentukan partai politik baru, karena ketiga organisasi kekuatan sosial politik yang ada sekarang ini telah tidak mampu lagi menampung perkembangan aspirasi masyarakat.

Itulah beberapa masalah di sekitar Pemilihan Umum 1992, yang nampaknya masih akan muncul dalam Pemilihan Umum yang

akan datang. Masalah itu banyak dilontarkan dalam kampanye dan Sebagian masalah itu juga disinggung oleh para kontributor buku ini.

Harry Tjan Silalahi, wakil Ketua Dewan Direktur CSIS yang juga seorang pengamat politik, mencoba menganalisa pola memilih rakyat Indonesia. Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa ikut Pemilihan Umum bagi rakyat Indonesia masih dipandang sebagai kewajiban moral daripada mewujudkan hak politiknya. Hal ini disebabkan oleh masih melekatnya sisa-sisa budaya tradisonal, paternalisme, bapakisme ataupun sifat-sifat primordialisme lainnya pada sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga pola panutan masih cukup dominan. (Tetapi berdasarkan hasil penghitungan suara di beberapa daerah pemilihan nampak pula bahwa ikatan tradisional dan primordial yang semula merupakan faktor yang sangat menentukan pola memilih masyarakat ada kecenderungan untuk mulai ditinggalkan.) Meskipun demikian, Golongan Karya masih akan memenangkan Pemilihan Umum 1992, walaupun suaranya bakal menurun karena beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Sebaliknya suara PDI dan PPP akan meningkat. Munculnya fenomena baru yang menginginkan suatu perubahan merupakan salah satu faktor mundurnya perolehan suara Golongan Karya (terutama di daerah-daerah pemilihan Pulau Jawa, kecuali DKI Jaya), meskipun kondisi organisasinya relatif masih lebih solid daripada PDI maupun PPP.

Tetapi kemunduran suara dan kursi Golongan Karya, baik di pusat maupun di daerah-daerah, tidak akan mempengaruhi konstelasi politik nasional. Golongan Karya bersama ABRI masih akan menentukan percaturan politik nasional. Bahkan secara politis Pemilihan Umum itu tidak akan mengubah pemerintahan di Indonesia, selain karena Undang-Undangnya menegaskan demikian, juga pada prakteknya Presiden Soeharto tetap akan men-

jadi Presiden untuk masa jabatan 1993-1998 karena ketiga kontestan telah "memilihnya" sebelum pemilihan Presiden dilaksanakan. Bertitik tolak pada pengamatannya itu, dia juga memberikan saran atau alternatif-alternatif untuk memperbaiki pelaksanaan Pemilihan Umum di masa-masa mendatang.

Amir Santoso, Direktur Eksekutif LPPIS - FISIP Universitas Indonesia, juga berusaha menunjukkan adanya fenomena-fenomena yang mewarnai Pemilihan Umum 1992, seperti tumbuhnya mobilitas secara besar-besaran, baik horizontal maupun vertikal; serta semakin netralnya pihak ABRI. Untuk melihat fenomena-fenomena itu dicobanya melalui dua sudut pandang, dari sudut hubungan antara negara dan masyarakat *(state and society)* serta sudut kultur. Dari sudut hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sesungguhnya yang paling berhasil dalam Pemilihan Umum 1992 itu adalah pemerintah. Semua kontestan sesungguhnya tidak berbuat banyak, tidak membuat kemajuan dalam cara kerja, tidak ada yang baru dalam tema maupun cara kampanyenya. Mereka hanya membonceng situasi yang dihasilkan oleh program-program pemerintah dan menggunakannya sebagai isu dalam kampanye mereka. Mereka juga memanfaatkan sikap ABRI yang netral untuk memperbaiki perolehan suaranya. Sementara itu kelas menengah yang oleh sementara kalangan dianggap sebagai agen perubahan, terutama di Jakarta, menurutnya lebih suka mendukung Golongan Karya daripada kontestan lain. Alasannya bukan karena faktor emosional ataupun primordial, tetapi lebih kepada pragmatisme. Sedangkan dari sudut kultur, nampaknya ada gejala perubahan dalam *patron-client*.

Dalam rangka melihat prospek politik Indonesia di masa depan, ditekankan pula bahwa pendidikan politik harus ditujukan untuk membentuk sportivitas. Demokrasi bukan hanya meru-

pakan persoalan kelembagaan politik, melainkan lebih dari itu, yakni persoalan mental dan watak.

Riswandha Imawan, Guru Besar Ilmu Politik, FISIPOL - UGM, Yogyakarta, berpendapat bahwa hasil Pemilihan Umum 1992 menunjukkan adanya indikasi menguatnya garis-garis politik lama atau terjadinya *political realignment*. Bertitik tolak pada hasil suara yang didapat oleh ketiga kontestan dalam Pemilihan Umum 1992 dan berdasarkan pada indeks yang dibuatnya sendiri, ditunjukkannya bahwa Pemilihan Umum 1992 lebih kompetitif dibandingkan dengan Pemilihan Umum 1987. Artinya PPP dan PDI mempunyai kesempatan untuk mengimbangi Golongan Karya. Selain itu, selama kampanye Pemilihan Umum 1992 Golongan Karya ternyata bersikap sangat pasif dan defensif. Padahal banyak isu-isu besar kemasyarakatan yang perlu segera dijawab.

Disinggung pula perlunya ikatan psikologis antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili. Namun sayang, sistem *proportional representation* dengan stelsel daftar sebagai sistem Pemilihan Umum di Indonesia tidak memungkinkan masyarakat pemilih mengenal tokoh yang ditampilkan OPP. Mekanisme rekrutmen politik yang digunakan selama ini lebih banyak menghasilkan tokoh "karbitan".

Oka Mahendra, yang waktu itu sebagai salah seorang anggota DPP Golongan Karya, selain sependapat dengan pemikiran-pemikiran Harry Tjan Silalahi, juga memberi beberapa catatan antara lain sebagai berikut: (a) proses pelaksanaan Pemilihan Umum 1992 terlalu panjang, oleh sebab itu perlu dipersingkat. Sejalan dengan hal ini, para pakar politik juga perlu mengevaluasi mekanisme pencalonan. Proses pencalonan yang begitu panjang perlu disederhanakan pula; (b) pembaruan-pembaruan

perlu dilakukan untuk meningkatkan kehidupan demokrasi di Indonesia, walaupun tanpa perlu mengubah dasar negara ataupun sistem pemerintahan; (c) khusus mengenai Golput, perlu penelitian lebih cermat; (d) terobosan dalam kampanye, seperti kampanye dialogis, masih perlu penyempurnaan-penyempurnaan. Di masa mendatang perlu dicari bentuk-bentuk kampanye yang benar-benar dapat dijadikan sarana pendidikan politik.

Kwik Kian Gie, yang pada waktu itu sebagai Kepala Balitbang PDI, mengungkapkan visi Balitbang PDI yang jauh-jauh hari sebelum Pemilihan Umum telah melakukan kajian dan perkiraan mengenai hasil Pemilihan Umum 1992. Visi Balitbang PDI itu memang ada beberapa kesamaan dengan yang dikemukakan oleh Riswandha Imawan, antara lain bahwa rakyat telah lama merasakan tidak ada atau kurangnya demokrasi, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi. Hal ini disebabkan oleh lebih menonjolnya kepentingan-kepentingan yang lebih sempit daripada kepentingan bangsa secara keseluruhan. Mengenai pertambahan suara PDI telah lama diperkirakan. Ini bukan karena PDI mempunyai strategi yang hebat dalam memenangkan Pemilihan Umum, tetapi karena menerima tumpahan suara protes. Bahkan perolehan suara PDI yang lebih besar akan terjadi seandainya PDI tidak melakukan kampanye sama sekali.

Sementara itu, *H. Matori Abdul Djalil*, Sekjen DPP PPP, selain pada prinsipnya menerima analisis pemikiran Amir Santoso, juga berusaha melengkapi analisis tersebut. Melalui pendekatan historis dia berusaha menujukkan adanya kesenjangan pemikiran dan perilaku politik dalam kehidupan masyarakat. Lahirnya Orde Baru berusaha untuk memperbaiki kesenjangan itu. Namun demikian pada PJPT I perkembangan demokrasi baru mencapai tahap awal. Pertumbuhan demokrasi baru mencapai tahapan dari

dan oleh pemerintah untuk rakyat. Pada PJPT II, pertumbuhan demokrasi harus mampu mencapai dua tahap sekaligus secara simultan, yaitu tahap partisipatif dan tahap emansipatif.

Bertitik tolak pada analisis-analisisnya, dia juga optimis prospek politik di masa depan akan cerah. Namun bersamaan dengan itu, perlu dipikirkan realisasi pelaksanaan demokrasi Pancasila, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Sedangkan *Harisoegiman*, yang kala itu menjabat Dirjen Sospol Depdagri, mencoba untuk menjawab masalah yang timbul itu. Berdasarkan pengamatannya dan laporan-laporan dari lapangan, dia berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sekitar Pemilihan Umum 1992. Melalui pendekatan historis, dia juga berusaha menjembatani perbedaan-perbedaan antara kekuatan sosial politik di satu pihak dan pemerintah di pihak yang lain. Dia berusaha mendalami dan menjelaskan hakikat, prinsip-prinsip dan dasar-dasar kebijakan yang diambil untuk melakukan perubahan-perubahan atas ketentuan-ketentuan Pemilihan Umum. Melalui pendekatan historis itu, dia berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum itu bukanlah sesuatu yang berharga mati atau dalam arti tidak dapat diperbaiki atau diperbarui lagi. Peraturan perundang-undangan itu setiap saat terbuka untuk dikoreksi, diperbaiki dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Pada akhir paparannya itu, dia juga mengajukan beberapa saran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas Pemilihan Umum di masa-masa mendatang. Perbaikan tidak hanya terbatas pada peraturan perundangan-undangannya tetapi juga pada manusia-manusianya, dalam arti mental dan kesadaran politiknya harus semakin ditingkatkan.

Dengan demikian, lengkaplah paparan dalam buku ini. Pemilihan Umum 1992 diamati dan ditinjau tidak hanya oleh para pengamat politik, tetapi juga oleh unsur-unsur yang dapat disebutkan mewakili organisasi-organisasi kekuatan sosial politik dan pemerintah. Pemilihan Umum diamati dan ditinjau dari berbagai sudut pandang, oleh karena itu penilaiannya pun cukup bervariasi.

2. Evaluasi Pemilihan Umum 1992*

HARRY TJAN SILALAHI

PENDAHULUAN

PEMILIHAN Umum yang kelima atau terakhir dalam Era Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama telah berlangsung secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992. Pemilihan Umum yang didahului dengan masa kampanye selama 25 hari itu selain untuk memperebutkan 400 kursi di DPR, sekaligus juga untuk mengisi keanggotaan MPR periode 1992-1997. Hasil-hasilnya pun telah dapat diketahui.

Hasil perhitungan suara itu menunjukkan terjadinya perubahan perolehan suara maupun kursi setiap OPP. Namun demikian Golongan Karya masih tetap merupakan kontestan yang kuat, meskipun perolehan suaranya turun sekitar 5% dan kursinya turun 17 kursi. Sedangkan PPP dan PDI berhasil memperbaiki perolehan suara dan kursinya, meskipun posisi masing-masing tetap pada urutan kedua dan ketiga. Golkar mendapatkan 282 kursi (70,5%), PPP 62 kursi (15,5%) dan PDI 56 kursi (14%). [Lihat *Lampiran* 1 dan 2] Sedangkan perolehan suara yang didapat adalah sebagai berikut PPP 16.624.647 (17%), Golkar 66.599.331 (68.105%) dan PDI 14.565.556 (14.895%). [Lihat *Lampiran* 1, 2 dan 4].

*Pengumpulan data dan dokumentasi oleh Sudibjo.

Berdasarkan jumlah suara atau kursi yang didapat oleh tiap-tiap OPP itu dapat dibaca beberapa fenomena dalam kehidupan politik di dalam negeri. Muncul beberapa indikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, meskipun ada beberapa hal yang sifatnya konstan.

SEBELUM PEMILU

Hakikat Pemilihan Umum di Indonesia

Dua hakikat pokok dari Pemilihan Umum di Indonesia dewasa ini adalah: (1) Pemilihan Umum di Indonesia bukan merupakan suatu cara atau sarana untuk mengubah pemerintah atau negara Republik Indonesia; (2) Partisipasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia masih dianggap sebagai suatu kewajiban daripada hak.

Berbeda dengan Pemilihan Umum yang diselenggarakan di Jepang atau di beberapa negara Eropa Barat yang dapat dijadikan sarana mengubah pemerintahan, Pemilihan Umum di Indonesia pada hakikatnya *sampai pada saat ini* bukan merupakan cara atau sarana untuk menggantikan negara maupun pemerintahan RI, termasuk pula ideologinya maupun sistem politik yang dianutnya. Tetapi justru sebaliknya, Pemilihan Umum di Indonesia merupakan suatu sarana untuk memperkuat perjuangan bangsa dan negara Indonesia untuk menegakkan Pancasila dan mempertahankan UUD 1945. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam UU No. 15/1969 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah tiga kali, dan yang terakhir dengan UU No. 1/1985, yang menyebutkan antara lain bahwa:

> "... Pemilihan Umum tidak untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan dasar falsafat negara baru, tetapi

suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan, dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban Amanat Penderitaan Rakyat. Pemilihan Umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945 ...".

Berdasarkan penegasan UU tentang Pemilihan Umum itu jelas bahwa Pemilihan Umum tidak akan mengubah negara maupun pemerintahan di Indonesia. Secara politis Pemilihan Umum sekarang ini tidak akan mengubah pemerintah di Indonesia, karena pada prakteknya Presiden Soeharto akan tetap menjadi Presiden untuk masa jabatan 1993-1998. Berdasarkan sistem politik yang dianut dalam ketatanegaraan di Indonesia, Presiden itu selain sebagai Kepala Negara, ia juga berperan sebagai Kepala Pemerintah. Partai Persatuan Pembangunan tegas-tegas mencalonkan Presiden Soeharto untuk dipilih sebagai Presiden kembali, dan pada dasarnya Golongan Karya maupun Partai Demokrasi Indonesia pun juga demikian, meskipun pengungkapannya memakai "gaya bahasa sendiri".

Ditinjau dari sudut kesadaran politik masyarakat pada umumnya, *sampai saat ini* Pemilihan Umum di Indonesia masih dipandang sebagai suatu kewajiban moral daripada hak politis oleh masyarakat Indonesia. Meskipun pembangunan (pendidikan) politik yang telah dilaksanakan selama ini telah meningkatkan kesadaran politik rakyat, tetapi sisa-sisa budaya tradisional, paternalistik, bapakisme ataupun primordialistik masih cukup melekat pada sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga pola pa-

nutan masih cukup dominan dalam partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum. Karena itu anjuran para pemimpin, terutama para pemimpin formal, yang secara intensif menganjurkan agar masyarakat menggunakan hak-haknya, akan sangat berpengaruh atas sikap politik rakyat. (Di Australia secara kuantitatif partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum juga tinggi, karena ikut Pemilihan Umum itu diwajibkan bagi warga negara Australia. Siapa yang tidak ikut memilih dikenai denda. Tetapi sebaliknya di negara-negara yang telah maju, di mana kesadaran politik dan sistem Pemilihan Umum telah tinggi, yang warga negaranya telah menyadari bahwa ikut Pemilihan Umum itu merupakan hak politisnya, seperti di AS dan Belanda, justru secara kuantitatif partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum rendah, hanya sekitar 50%).

Sebagaimana pada Pemilihan-pemilihan Umum yang lalu, partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum 1992 akan tetap tinggi. Diperkirakan Pemilihan Umum 1992 akan diikuti oleh lebih 90% pemilih terdaftar. Pemilihan Umum 1977 diikuti oleh 90,934% pemilih terdaftar, tahun 1982: 92,033%, dan tahun 1987: 91,320%. Hanya dalam Pemilihan Umum 1971 suara sah mencapai 94,02% dari pemilih terdaftar, karena situasinya memang agak berbeda dengan Pemilihan-pemilihan Umum sesudahnya. [Lihat *Lampiran* 4, 5, 6 dan 7]

Sejalan dengan pola memilih masyarakat pada umumnya, diperkirakan Golongan Karya pada Pemilihan Umum kali ini tetap akan mempertahankan kemenangannya, meskipun jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara dilakukan telah diperkirakan bahwa Golongan Karya sulit untuk mempertahankan perolehan suara maupun kursinya. Justru sebaliknya diperkirakan bahwa jumlah suara yang diperoleh Golkar pada Pemilihan Umum 1992 akan

turun, yang tentunya juga akan diikuti oleh turunnya kursi Golkar di DPR maupun MPR. Suara Golkar akan turun sekitar 5% - 7% dari 73,17% suara yang didapatnya pada Pemilihan Umum 1987, sehingga menjadi sekitar 65% - 68% dari suara sah yang masuk.

Akan tetapi penurunan suara atau kursi yang diperoleh oleh Golkar bukan sesuatu yang berarti, melainkan merupakan peristiwa yang biasa. Memang Golkar mentargetkan 301 kursi DPR, setidak-tidaknya mempertahankan 299 kursi DPR yang diperolehnya pada Pemilihan Umum 1987, tetapi tampaknya terlalu sulit. Selain keadaan intern Golkar sendiri, beberapa faktor ekstern ikut mempengaruhinya. Diperkirakan kursi DPR Golkar akan turun sekitar 10-20 kursi. Namun demikian penurunan suara dan kursi yang diperoleh oleh Golkar itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu kekalahan bagi Golkar, karena kemenangan Golkar pada Pemilihan Umum tahun 1987 terlalu besar yang antara lain disebabkan oleh adanya gerakan "penggembosan" yang dilakukan oleh NU, terutama di Jawa Timur. Dibandingkan dengan jumlah kursi DPR yang didapat Golkar dalam Pemilihan Umum 1971 (236), 1977 (226 kursi), dan 1982 (246 kursi) [Lihat *Lampiran* 8], penurunan suara sekitar 5% - 7% atau kursi DPR sekitar 10-20 kursi itu masih memungkinkan bagi Golkar untuk memenangkan Pemilihan Umum secara mayoritas. Golkar (bersama ABRI) masih akan tetap mendominasi konstelasi politik nasional, yang pada gilirannya masih diperlukan untuk menjamin stabilitas politik nasional sebagai syarat mutlak bagi kelangsungan dan kesinambungan pembangunan nasional.

Sebaliknya perolehan suara PPP dan PDI pada Pemilihan Umum 1992 akan naik. Penurunan suara Golkar akan lari ke PPP dan PDI. Bahkan ada sementara kalangan berpendapat bahwa tanpa aneh-aneh pun suara PPP dan PDI akan naik, karena akan

mendapat "bola muntah" dari Golkar. PPP mentargetkan dapat memperoleh kursi sebagaimana didapatnya pada Pemilihan Umum 1982 (90 kursi), sedangkan PDI meskipun agak malu-malu mentargetkan perolehan sampai sekitar 100 kursi. Dilihat dari keadaan intern kedua OPP ini, target itu nampaknya sulit untuk dicapai.

Ada tanda-tanda bahwa suara generasi muda akan disedot oleh PDI. Gejala ini telah nampak dalam kampanye PDI di Jakarta pada tahun 1987. Hal ini terutama disebabkan bukan karena keberhasilan PDI menggalang kaum muda tetapi lebih oleh faktor-faktor eksternal, seperti lancarnya lalu lintas komunikasi dan transportasi, yang sangat membantu memperoleh informasi-informasi, serta semakin meningkatnya masyarakat yang memperoleh pendidikan. Hal ini sangat mempengaruhi terjadinya peningkatan kesadaran politik, terutama di kalangan kaum muda, lebih-lebih di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan Medan, serta para cendekiawan. Keinginan dari sementara generasi muda untuk berganti "mode" meskipun mode yang baru itu belum tentu lebih berkualitas daripada mode lama yang ditinggalkan merupakan faktor yang ikut mendorong generasi muda mencoba memilih PDI. Tetapi faktor ini tidak berarti bahwa Golkar lebih jelek daripada PDI atau generasi muda tidak suka pada Golkar, tetapi lebih pada suatu wujud fenomena baru yang menginginkan suatu pembaruan. Secara organisatoris justru harus diakui bahwa Golkar masih lebih solid daripada kedua OPP lainnya.

Hasil Pemilihan Umum 1992 diperkirakan sebagai berikut :

(1) Persentase perolehan suara Golongan Karya akan turun sekitar 5-8%. Penurunan suara Golongan Karya ini akan diambil oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Daerah-daerah yang diperkirakan Golongan

Karya mengalami penurunan adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, DKI Jaya, Riau, Kalimantan Barat, Bali dan Nusa Tenggara Timur, serta di beberapa daerah yang ada berbagai kasus yang dirasakan merugikan kepentingan rakyat kecil ataupun di daerah-daerah yang kurang harmoninya hubungan antara DPD-DPD Golongan Karya dengan Dewan Pertimbangan atau Dewan Penasehatnya;

(2) Penurunan perolehan suara Golongan Karya ini akan diikuti oleh penurunan kursinya sekitar 10-20 kursi. Bila hanya turun 10 kursi akan diambil oleh Partai Demokrasi Indonesia, tetapi bila turun sekitar 10-20 kursi akan dibagi oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia;

(3) Peningkatan perolehan kursi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni Partai Persatuan Pembangunan: 90 kursi, dan Partai Demokrasi Indonesia: 100 kursi. Tetapi target ini nampaknya sulit tercapai, karena keadaan intern mereka yang masih belum memungkinkan untuk melakukan penggalangan-penggalangan secara baik.

Untuk Pemilihan Umum 1992 diperkirakan bahwa jumlah Golongan Putih yang lebih dikenal dengan Golput (termasuk suara yang tidak sah) akan naik. Bagi sementara kalangan peningkatan jumlah Golput itu dianggap sebagai suatu indikasi ketidakberhasilan suatu Pemilihan Umum. Bagi kita, Pemilihan Umum itu masih dipandang sebagai suatu mobilisasi, oleh sebab itu salah satu tolok ukur kesuksesan atau keberhasilan Pemilihan Umum itu adalah bila secara kuantitatif partisipasi masyarakat dalam pemilihan itu tinggi. Dengan kata lain Pemilihan Umum itu berhasil bila Golputnya sedikit, karena Golput tidak dipandang sebagai tidak suka kepada OPP tetapi lebih dikategorikan se-

bagai suatu sikap yang menentang pemerintah, yakni tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Tetapi mengkategorikan Golput sebagai tindakan yang berdosa adalah suatu yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, kampanye Pemilihan Umum harus dijadikan salah satu awal pendidikan politik masyarakat. Kampanye selain merupakan ajang untuk memenuhi pelampiasan emosi politis dan sebagai pertanda akan diselenggarakannya pemungutan suara, juga harus dapat dijadikan sarana untuk menjelaskan cita-cita partai politik maupun Golongan Karya.

Kondisi Setiap OPP

Kondisi Partai Persatuan Pembangunan

Semenjak muktamarnya yang terakhir dengan terpilihnya Ismail Hassan Metareum, kegiatan OPP yang berlambang bintang ini nampak tenang, dan justru ada kesan terlalu tenang. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa PPP tidak melakukan persiapan menghadapi Pemilihan Umum 1992. Konsolidasi dan penggalangan-penggalangan untuk merebut massanya kembali yang lari pada Pemilihan Umum 1987 telah dilakukan. Silaturahmi dengan para ulama yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin masyarakat pemilih tradisional PPP telah pula dijalankan.

Dalam kaitan itu pula, Partai Persatuan Pembangunan telah berusaha menampilkan citranya sebagai partai yang tidak ekstrem dalam wawasan, program, gaya dan perilaku. Partai berlambang bintang ini selalu berusaha meyakinkan masyarakat, bahwa dia bukan suatu kekuatan oposan.

Tuntutan adanya budaya politik yang partisipatif, emansipatif dan terbuka juga merupakan bagian dari usaha PPP untuk mencari peranan yang lebih berarti dalam kehidupan politik di Indonesia. Di samping itu, semboyan "tidak dikenal adanya oposisi" dalam sistem politik di Indonesia akan terus dilanjutkan oleh PPP. Langkah ini nampaknya merupakan strategi PPP agar diikutsertakan dalam susunan Kabinet yang akan datang.

Sejalan dengan langkah di atas, jauh-jauh hari sebelum diadakannya kampanye Pemilihan Umum, Partai Persatuan Pembangunan juga telah mencalonkan Presiden Soeharto sebagai Presiden RI untuk periode 1993-1998. Langkah ini secara sepintas ada garis singgungnya dengan langkah yang diambil oleh para "tokoh" Islam di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu, yang juga mencalonkan Presiden Soeharto sebagai Presiden RI untuk periode 1993-1998.

Untuk menarik simpatisannya, Partai Persatuan Pembangunan telah menempatkan kader-kader dari daerah bagi caleg (calon legislatif) tetapnya. PPP merupakan satu-satunya OPP yang paling sedikit merekrut calon asal tempat tinggal Jakarta, hanya 63 orang (9,17%) dari caleg tetapnya.

Partai Persatuan Pembangunan tampaknya masih akan menggunakan isu-isu agama dalam kampanye, lebih-lebih oleh para juru kampanyenya yang berasal dari daerah. Pengaitan perjuangan partai dengan berbagai dalil yang diambil dari Al Qur'an dan Hadis Nabi masih menjadi salah satu ciri kampanye juru kampanye PPP di daerah-daerah, meskipun tidak seintensif kampanye-kampanye sebelumnya.

Langkah terpenting yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan adalah upaya-upaya untuk menarik kembali warga

NU dan MI serta ormas-ormas lain yang semula bercirikan Islam, agar mereka pulang "kandang". Usaha ini terkait erat dengan usaha Partai Persatuan Pembangunan untuk menetralisasikan "politik penggembosan" yang dilakukan oleh NU pada Pemilihan Umum 1987. Keberhasilan langkah-langkah ini akan sangat mempengaruhi bahkan dapat dikatakan sangat menentukan perolehan suara maupun kursi Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Umum 9 Juni 1992 itu.

Sementara itu, secara ideologis intern Partai Persatuan Pembangunan, terutama di kalangan para tokohnya, nampaknya sedang berada dalam persimpangan jalan, antara konsekuen dengan UU No. 3/1985 ataukah secara terselubung tetap memegang ciri keagamaannya. Konsekuen dengan UU No. 3/1985 berarti harus mengembangkan Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai terbuka dengan selalu meningkatkan wawasan kebangsaan sesuai dengan penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Sebaliknya berpegang teguh atau secara terselubung memegang ciri keagamaan diperkirakan masih akan menarik para pemilih, karena secara tradisional "anggota" atau pemilih Partai Persatuan Pembangunan adalah warga masyarakat yang beragama Islam. Keadaan seperti itu nampaknya akan mempengaruhi gerak perjuangan Partai Persatuan Pembangunan di masa-masa mendatang, jika tidak segera dicarikan pemecahannya.

Berkaitan dengan hal ini, Partai Persatuan Pembangunan terkesan tidak kaya dengan isu-isu politik sebagaimana dilontarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan mengesankan sebagai partai yang "*low profile*".

Kondisi Golongan Karya

Konsolidasi Golongan Karya tampak lebih solid bila dibandingkan dengan kedua OPP lainnya. Hanya persoalannya jalur-jalur organisasi Golongan Karya lebih kompleks daripada kedua OPP itu. Konsolidasi organisasi, baik vertikal maupun harisontal, serta koordinasi yang erat di antara tiga jalur berhasil menghilangkan kesan adanya friksi-friksi sebagaimana yang tampak menjelang Munas tahun 1988. Koordinasi di tingkat pusat nampak lebih jernih daripada di beberapa daerah. Keadaan yang demikian ini memungkinkan penggalangan-penggalangan dilakukan dengan baik, terutama yang dilakukan oleh Jalur A dan Jalur B. Pembinaan dan penggalangan melalui Jalur G, khususnya di organisasi-organisasi kemasyarakatan atau organisasi-organisasi sejenisnya nampaknya masih mengalami beberapa permasalahan, dan justru terkesan tidak sebaik masa kepengurusan periode 1983-1988.

Berkaitan dengan penggalangan yang dilakukan oleh Jalur A dan Jalur B, Golongan Karya juga masih berhasil menggarap "Bapak Panutan". Meskipun pembangunan politik telah berhasil meningkatkan kesadaran politik masyarakat, tetapi sisa-sisa budaya paternalisme masih cukup melekat di masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat kelas bawah yang merupakan sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam budaya yang demikian ini, peranan Bapak Panutan, baik yang menduduki jabatan formal maupun informal, masih sangat berpengaruh atas pola memilih masyarakat. Saran-saran ataupun himbauan bapak-bapak panutan itu sangat besar pengaruhnya pada partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum.

Di samping itu, tersedianya dana bagi kegiatan organisasi memungkinkan Golongan Karya untuk melakukan kegiatan-ke-

giatan yang dapat menarik para pemilih, seperti karya-karya nyata yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun pemantapan-pemantapan organisasi.

Namun demikian tidak berarti bahwa Golongan Karya tidak menghadapi kendala-kendala dalam memenangkan Pemilihan Umum 1992. Beberapa masalah diperkirakan dapat mengurangi, setidak-tidaknya menghambat perolehan suara Golongan Karya dalam Pemilihan Umum itu, di antaranya:

(1) Hubungan dan koordinasi antara DPD-DPD Golkar dan Dewan-dewan Pertimbangan atau Dewan-dewan Penasehatnya di beberapa daerah, seperti di Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur tampak kurang begitu lancar;

(2) Perilaku Golongan Karya, yang secara sadar ataupun tidak, dirasakan tidak begitu lagi memperhatikan bekas aktivis-aktivisnya, seperti purnawirawan-purnawirawan ABRI dan ribuan bekas kepala desa. Terkesan Golongan Karya melupakan jasa-jasa mereka; yang dirasakan tidak *nge-wong-ke* (menghormati manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya) lagi. Purnawirawan dan bekas kepala-kepala desa ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh OPP lain untuk merebut massa. Meskipun jumlah purnawirawan ABRI yang menyatakan masuk menjadi anggota suatu partai politik relatif sedikit tetapi mempunyai dampak psikologis yang cukup luas;

(3) Di samping itu, Golongan Karya tampaknya juga belum mempunyai kiat untuk menarik "golongan menengah" dan para pemilih pemula yang diperkirakan jumlahnya mencapai 17 juta;

(4) Masalah lain yang dihadapi Golongan Karya adalah memanasnya isu-isu politik yang ditujukan kepada pribadi-pribadi

tertentu serta tuntutan-tuntutan bagi peningkatan penghormatan atas keterbukaan, kebebasan, pluralisme dan hak-hak asasi manusia. Ada kesan bahwa Golongan Karya berada di pihak yang defensif dan sulit untuk melancarkan kontra isu yang sifatnya ofensif;

(5) Sementara itu ada masalah eksternal yang tampaknya juga cukup berpengaruh atas usaha Golongan Karya untuk merebut massa, yakni perilaku aparat pemerintah yang kurang berkualitas, kurang berwibawa ataupun kurang jujur. Sejalan dengan hal ini, adanya kebijaksanaan oknum-oknum pemerintah, yang nota bene juga kader-kader Golongan Karya, yang dirasakan merugikan rakyat, seperti penggusuran, larangan pedagang asongan, dan pemutusan hubungan kerja yang tanpa ditindaklanjuti dengan kebijaksanaan untuk memecahkan masalah itu dapat menimbulkan antipati terhadap Golongan Karya. Berkaitan dengan hal ini, isu mengenai BPPC, tembakau, kacaunya lalu lintas perdagangan (tata niaga) jeruk, khususnya di Kalimantan Barat dan tidak konsistennya cara penarikan iuran TV, dapat berpengaruh atas perolehan suara Golongan Karya. Dengan kata lain, terkesan bahwa Golongan Karya tidak tanggap terhadap aspirasi atau nasib masyarakat kecil. Isu-isu keadilan sepertinya tidak terserap oleh Golkar; akibatnya organisasi ini ditempatkan pada posisi yang sulit.

Kondisi Partai Demokrasi Indonesia

Sejak konggresnya di tahun 1986, Partai Demokrasi Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan persatuan dan kesatuannya melalui konsolidasi-konsolidasi. Meskipun sampai dengan ta-

hun 1991 masih bergema tuntutan beberapa daerah mengenai perlunya Konggres Luar Biasa untuk menurunkan Ketua Umum dan Sekjen PDI dari tampuk pimpinan partai, tetapi menjelang Pemilihan Umum suara-suara ini terkesan menurun. Konflik-konflik intern untuk sementara ditunda.

Dalam rangka mempersiapkan partisipasi dalam Pemilihan Umum, PDI berusaha menampilkan dirinya sebagai partainya orang muda dan "*wong cilik*". Langkah ini kiranya dipergunakan untuk memanfaatkan momentum di mana rasa ketidakpuasan di sementara kalangan yang terkena oleh suatu kebijaksanaan sedang mencari wadah melampiaskan ketidakpuasannya itu. Di samping itu, penampilan PDI dengan warna-warna merah darahnya secara psikologis dapat dijadikan daya tarik kaum muda yang ingin menunjukkan dinamika dan kreativitasnya.

Untuk menunjukkan kesan bahwa dirinya merupakan partai politik yang paling nasionalis, Partai Demokrasi Indonesia vokal melontarkan masalah yang berkaitan dengan pemerataan, anti bantuan asing, hapusnya kesenjangan sosial, peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa, pembaruan, keterbukaan, Pemilihan Umum yang jurdil (jujur dan adil) dan bahkan mengusulkan perlunya "Pengadilan Pemilu". Lontaran-lontaran isu semacam ini sedikit banyak juga dapat dijadikan daya tarik para pemilih muda yang pada dasarnya juga kurang mengetahui perkembangan politik di dalam negeri, serta kelompok-kelompok tertentu yang merasa tidak mendapatkan tempat dalam sistem politik sekarang ini. Sejalan dengan isu-isu itu, PDI juga mengusulkan agar kebijakan mengenai *floating mass* dihapuskan.

Seperti halnya pada Pemilihan Umum 1987, untuk Pemilihan Umum 1992 Partai Demokrasi Indonesia tampaknya juga akan

memanfaatkan keluarga maupun karisma Bung Karno. Hal ini tampaknya merupakan suatu usaha untuk menarik kembali warga eks PNI yang diperkirakan telah menyeberang ke Golongan Karya.

Itulah kira-kira situasi setiap OPP yang berlaga dalam Pemilihan Umum 9 Juni 1992. Apakah hal ini benar, dapat kita simak dalam persiapan Pemilihan Umum maupun kampanye.

SETELAH PEMILIHAN UMUM

Berdasarkan dari keadaan intern setiap OPP, kita dapat memperoleh gambaran mengenai apa yang akan dan perlu dilakukan oleh setiap OPP agar suara dan kursi yang ditargetkan tercapai, memang masih ada faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhinya. Pemantauan selama ini menunjukkan bahwa konsolidasi yang dilakukan oleh Golkar terkesan lebih mantap daripada dua OPP lainnya, tetapi akibat-akibat dari kondisi sebagaimana dipantau di atas cukup banyak yang mendekati kenyataan, seperti misalnya di daerah-daerah yang ada kasus-kasus yang dirasakan menempatkan Golongan Karya di tempat yang sulit, perolehan suara Golongan Karya benar-benar mengalami penurunan tajam, contohnya di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Timor Timur.

Indikasi-Indikasi Atas Hasil Pemilihan Umum

Sebagaimana disebutkan di atas, hasil perhitungan final menunjukkan perolehan suara dan kursi dari ketiga OPP sebagai berikut: *PPP* memperoleh 16.624.647 (17%), 62 kursi (15,5%), naik satu kursi bila dibandingkan dengan perolehan kursi Pemilu 1987;

Golkar memperoleh 66.599.331 (68,105%), 282 kursi (70,5%) turun 17 kursi bila dibandingkan dengan perolehan kursi Pemilu 1987; dan *PDI* memperoleh 14.565.556 (14,895%), 56 kursi (14%), naik 16 kursi bila dibandingkan dengan perolehan kursi Pemilu 1987. [Lihat *Lampiran* 2, 3, 9 dan 10] Perolehan kursi dan suara setiap OPP sejak Pemilihan Umum 1971 sampai dengan 1992 menunjukkan perubahan-perubahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. [Lihat *Lampiran* 4, 7, 8, 13, 14 dan 15]

Hasil perhitungan suara itu menunjukkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan mengalami kenaikan 1 kursi, dengan perincian *naik 7 kursi* (di Jawa Barat: 1 kursi, Jawa Tengah: 3 kursi, dan Jawa Timur: 3 kursi) dan *turun 6 kursi* (di Daista Aceh: 1 kursi, Sumatera Utara: 1 kursi, Sumatera Barat: 1 kursi, Jambi: 1 kursi, Bengkulu: 1 kursi, dan Lampung: 1 kursi). Dengan kata lain, penurunan kursi PPP justru terjadi di Luar Jawa, khususnya Sumatera, dan justru kenaikan kursinya terjadi di Jawa. Berdasarkan perolehan kursi DPR itu, pada periode 1992-1997 untuk 9 (sembilan) daerah pemilihan yaitu Jambi, Bengkulu, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Irian Jaya, Partai Persatuan Pembangunan tidak mempunyai wakilnya, karena di daerah-daerah itu dia tidak mendapatkan kursi. [Lihat *Lampiran* 2 dan 11]

Sementara itu, Golkar mengalami penurunan 17 kursi dengan perincian *naik 7 kursi* (di DKI Jaya: 1 kursi, Daista Aceh: 1 kursi, Sumatera Utara: 1 kursi, Jambi 1 kursi, Bengkulu: 1 kursi, Sulawesi Utara: 1 kursi, dan Maluku: 1 kursi), dan *turun 24 kursi* (di Riau: 1 kursi, Jawa Barat: 1 kursi, Jawa Tengah: 8 kursi, DIY: 1 kursi, Jawa Timur: 10 kursi, Bali: 1 kursi, NTB: 1 kursi, dan Timtim: 1 kursi). Dengan kata lain kenaikan kursi Golkar hanya 1 kursi di Jawa dan 6 kursi di Luar Jawa, sedangkan 20 kursi pe-

nurunannya terjadi di Jawa dan hanya 4 kursi di Luar Jawa. [Lihat *Lampiran* 2 dan 11]

PDI naik 16 kursi, dengan perincian *naik 17 kursi* (di Sumatera Utara: 1 kursi, Sumatera Barat: 1 kursi, Riau: 1 kursi, Jawa Tengah: 4 kursi, Jawa Timur: 5 kursi, Kalimantan Barat: 1 kursi, Bali: 1 kursi, NTB: 1 kursi, dan Timtim: 1 kursi), dan hanya *turun 1 kursi* di DKI Jaya. Dengan kata lain kenaikan 9 kursi di 2 Dati I di Jawa dan 8 kursi di 8 Dati I Luar Jawa, sedangkan penurunan 1 kursi di DKI Jaya. Seperti halnya Partai Persatuan Pembangunan, terdapat enam Dati I yang tidak mempunyai wakil Partai Demokrasi Indonesia di DPR RI. [Lihat *Lampiran* 2 dan 11]

Berdasarkan perhitungan di atas itu, menunjukkan bahwa penurunan 6 kursi PPP justru terjadi di 6 Dati I Luar Jawa dan kenaikan 7 kursi terjadi di 3 Dati I Jawa. Sementara itu penurunan 24 kursi Golkar terjadi di 4 Dati I Luar Jawa (4 kursi) dan 4 Dati I Jawa (20 kursi), sedangkan kenaikan 7 kursinya Golkar itu terjadi di satu Dati I di Jawa dan 6 Dati I di Luar Jawa. Sedangkan kenaikan 17 kursi PDI terjadi di 2 Dati I Jawa (9 kursi) dan di 8 Dati I Luar Jawa (8 kursi). Penurunan 1 kursi PDI terjadi di DKI Jaya.

Berdasarkan perhitungan suara yang sah, kenaikan persentase suara *Partai Persatuan Pembangunan* terjadi di DKI Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTT, Maluku dan Timor Timur. Sementara itu, penurunan persentase suara Partai Persatuan Pembangunan terjadi di Daista Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara

Barat dan Irian Jaya. Kenaikan persentase suara *Golongan Karya* terjadi di Daista, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, DKI Jaya dan Sulawesi Utara. Sedangkan penurunan persentase suara Golongan Karya terjadi di Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Irian, dan Timor Timur. [Lihat *Lampiran* 11, 13, 14 dan 15]

Berdasarkan hasil perhitungan suara itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa perkiraan yang telah saya katakan di atas mendekati kebenaran. Memang ada kasus-kasus tertentu yang kiranya menyebabkan perkiraan saya meleset. Tetapi yang lebih menarik di samping keberhasilan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia meningkatkan perolehan suara dan kursinya, adalah munculnya fenomena-fenomena baru, seperti terjadinya perubahan pola memilih dalam masyarakat. Ikatan tradisional ataupun primordial yang semula merupakan faktor yang sangat menentukan pola memilih masyarakat, ternyata di beberapa daerah telah mulai ditinggalkan. Ikatan keagamaan yang semula menjadi ikatan penentu pilihan di beberapa daerah juga telah mulai ditinggalkan. Kasus yang menarik adalah Sumatera yang semula dikenal sebagai basis tradisionalnya Partai Persatuan Pembangunan, justru di beberapa daerah pemilihan partai ini mengalami penurunan, baik dalam perolehan suara maupun kursi. Justru di daerah-daerah ini suara Partai Demokrasi Indonesia naik. [Lihat *Lampiran* 16, 17, 18 dan 19]

Sementara itu, tajamnya peningkatan suara maupun kursi yang didapat oleh Partai Demokrasi Indonesia selain diperkirakan karena kembalinya "warga Partai Demokrasi Indonesia"

juga disebabkan oleh keadaan-keadaan setempat yang dirasakan menempatkan Golongan Karya pada kedudukan yang sulit. Di satu pihak perubahan ini dapat diartikan sebagai kembalinya pemilih-pemilih lama (pemilih konstan), namun di pihak lain dapat pula diartikan sebagai akibat diberlakukan dan "berhasilnya" *floating mass*. Masyarakat pemilih cenderung memilih OPP yang dianggapnya dapat dijadikan saluran untuk menyampaikan aspirasinya, dan tidak terpaku pada OPP-nya secara tradisional.

Kasus yang sangat menarik justru kegagalan Partai Demokrasi Indonesia untuk mempertahankan perolehan suara dan kursinya di daerah pemilihan DKI Jaya. Setiap kampanye yang dilakukan partai ini boleh dikatakan lebih semarak dan diikuti oleh massa yang begitu besar melebihi jumlah massa Golongan Karya maupun Partai Persatuan Pembangunan. Satu dan lain hal disebabkan oleh pola kampanye partai ini yang *vulgar*, *over acting*, yang disertai dengan keberingasan dan kebrutalan, serta isu-isu yang cenderung mendiskreditkan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik Orde Baru, yang menjadi bumerang sendiri. Masyarakat yang semula simpati kepada Partai Demokrasi Indonesia berbalik menjadi antipati. Kasus di DKI ini justru menunjukkan suatu indikasi bahwa Golongan Karya tidak dijauhi oleh "kawula muda". TPS-TPS di sekitar sekolah-sekolah negeri maupun swasta pada umumnya dimenangkan oleh Golongan Karya. Tentu saja bagi Partai Demokrasi Indonesia hal ini didalihkan adanya tekanan politis di kalangan pelajar.

Di samping itu, pemantauan menunjukkan bahwa peserta kampanye pawai Partai Demokrasi Indonesia lebih banyak diikuti oleh anak-anak yang belum mempunyai hak pilih, yang ikut berkampanye karena ingin hura-hura dan melampiaskan kejenuhan sehabis mengikuti EBTA maupun EBTANAS, ataupun ingin melepaskan diri dari ikatan-ikatan dan pembatasan-pem-

batasan yang selama ini dirasakan menghalang-halangi atau mengurangi kebebasannya. Bahkan ada tendensi ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengacau jalannya kampanye, seperti munculnya perilaku yang tidak simpatik, bahkan dapat dikatakan lebih bersifat kriminil, seperti misalnya perampasan, penganiayaan, baik kepada individu-individu tertentu maupun aparat keamanan.

Dari pemantauan yang dilakukan juga terbukti bahwa pengikut massa kampanye Partai Demokrasi Indonesia itu tidak semuanya berasal dari daerah pemilihan DKI Jaya, justru banyak yang datang dari daerah Bekasi, Bogor dan Tangerang yang di daerah-daerah itu Partai Demokrasi Indonesia terbukti tidak dapat menyelenggarakan kampanye di tingkat-tingkat Kecamatan, dan kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia di daerah itu tidak baik. Sementara itu, banyaknya warga yang berdiam di daerah pemilihan DKI Jaya yang mudik waktu hari pemungutan suara nampaknya juga mempengaruhi turunnya perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia. Diperkirakan sekitar 200 ribu warga Jakarta *mudik* ke Jawa Tengah.

Kasus kampanye Partai Demokrasi Indonesia di daerah pemilihan DKI Jaya ini menunjukkan bahwa kampanye itu bukan satu-satunya cara untuk menarik simpati massa. Penggalangan dan pembinaan yang dilakukan selama sebelum berlangsungnya kampanye kiranya sangat menentukan perolehan suara atau kursi setiap OPP.

Sementara itu, kemunduran suara Golongan Karya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, selain banyaknya pergantian Kepala Desa, penggusuran tanah, soal BPPC, juga disebabkan oleh keberhasilan Partai Persatuan Pembangunan untuk menetralisasikan politik penggembosan. Meskipun jauh-jauh hari, NU dan Muha-

madiyah telah menyatakan untuk mengambangkan anggotanya, dengan menegaskan bahwa anggota-anggotanya tidak terikat pada salah satu OPP, termasuk Partai Persatuan Pembangunan, dan mereka justru dipersilahkan memilih suatu OPP yang sekiranya mampu menampung aspirasinya, hasil perolehan suara di daerah-daerah yang dulu dianggap sebagai kantung-kantung tradisional Partai Persatuan Pembangunan dapat dijadikan indikasi berkurangnya pengaruh politik penggembosan. Dan secara makro mungkin dapat pula dijadikan indikasi semakin berhasilnya *floating mass*. Masyarakat akan memilih suatu OPP yang sekiranya menguntungkannya, baik dipandang dari segi politis maupun kedudukan beberapa anggotanya.

Masalah Kampanye

Meskipun dalam evaluasi dinyatakan bahwa kampanye Pemilihan Umum 1992 ini jauh lebih baik dari kampanye-kampanye sebelumnya, tetapi tujuan kampanye sebagai suatu wahana pendidikan politik dan penawaran-penawaran program OPP boleh dikatakan tidak mengena, bahkan di beberapa daerah justru suasana kampanye lebih diwarnai oleh kebrutalan dan keberingasan ataupun suasana yang "*chaotic*". Isi kampanye ketiga OPP pada dasarnya sama, hanya berbeda pada penekanan "kalimat pendahuluan", dan bahkan dapat dikatakan bahwa ketiga OPP itu membonceng program-program pemerintah. Program yang spesifik dari OPP belum tampak. [Lihat *Lampiran* 20, 21, 22 dan 23] Kampanye Pemilihan Umum 1992 hampir tidak ada bedanya dengan suasana kampanye tahun 1955, 1971, 1982 dan 1987, belum menampakkan kemajuan yang berarti dan boleh dikatakan masih tetap mempergunakan cara-cara tradisional dengan ciri-ciri: (a) *show of forces* dan hura-hura daripada suasana penawaran program;

(b) pelampiasan emosi individu maupun massa; (c) pelanggaran aturan kampanye maupun tata-tertib lalu-lintas; (d) menjelek-jelekkan OPP lain maupun pelemparan janji-janji; (e) pengrusakan maupun penganiayaan terhadap anggota OPP lain, bahkan juga atas beberapa aparat keamanan.

Sehubungan dengan hal ini muncul saran-saran yang menghendaki agar kampanye yang sifatnya terbuka itu sebaiknya ditiadakan saja, sekurang-kurangnya dikurangi waktunya dan jumlahnya. Namun demikian ada sementara pihak mengharapkan agar kampanye terbuka ini diteruskan saja, karena kampanye yang demikian ini masih diperlukan dan dapat dimanfaatkan untuk mendengar suara-suara langsung dari rakyat.

Dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Umum yang akan datang kiranya perlu dipikirkan pola-pola kampanye baru yang lebih efektif, yang memungkinkan tujuan kampanye itu tercapai, seperti misalnya: (a) diperbanyak kampanye-kampanye dialogis, diperbanyak sarasehan-sarasehan dan rapat-rapat kampanye tertutup dalam ruang yang tidak begitu luas sehingga memungkinkan terjadinya dialog dan penjelasan mengenai program-program OPP yang bersangkutan; (b) kampanye dilakukan jauh-jauh hari sebelum Pemilihan Umum. Diusahakan jauh-jauh hari, sekitar satu dua tahun, calon-calon legislatif telah dapat membuka semacam kantor di daerah pemilihannya, selain untuk mengenal daerah pemilihannya juga agar lebih dikenal oleh masyarakat yang akan diwakilinya. Pengalaman membuktikan bahwa terdapat calon-calon legislatif yang menurut penilaian adalah calon yang sungguh-sungguh berkualitas dan dikenal oleh golongan elit ternyata tidak dikenal oleh masyarakat pemilih pada umumnya. Untuk menghindari hal ini, maka para calon legislatif itu harus sebanyak mungkin bertatap muka dengan para calon pemilih di

daerah pemilihannya, seperti membuka kantor ataupun sesering mungkin berkunjung ke daerah yang akan diwakilinya. Mungkin untuk Pemilihan Umum 1997 belum dapat dilaksanakan, tetapi untuk jangka panjangnya pola-pola seperti ini semakin diperlukan.

Khusus tentang kampanye terbuka, tampaknya juga masih sulit untuk ditiadakan, karena suasana keramaian sebagai salah satu wujud pesta demokrasi tetap diperlukan, meskipun waktunya perlu diatur dan dikurangi kuantitasnya agar semuanya tidak terkonsentrir hanya beberapa hari menjelang Pelaksanaan Pemilihan Umum. Kampanye yang sifatnya terbuka misalnya dapat diadakan pada waktu "Harlah" atau "Ultah", karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan setiap partai politik atau Golongan Karya itu juga dapat dipandang sebagai semacam bentuk kampanye, sedangkan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum cukup dilakukan tiga hari di putaran pertama dan tiga hari di putaran akhir.

Pemantauan yang diadakan selama kampanye yang lalu itu juga menunjukkan bahwa pada dasarnya masalah yang dilontarkan oleh ketiga OPP itu tidak ada bedanya, hanya nuansanyalah yang berbeda. Di samping itu isi kampanye ketiga OPP itu juga belum dapat dikatakan sebagai wujud program-program mereka, boleh dikatakan hanya merupakan janji-janji.

Satu hal yang menarik dalam kampanye Pemilihan Umum 1992 adalah tidak ditanggapinya yel-yel sporadis yang cukup kasar yang ditujukan kepada pejabat-pejabat atau golongan tertentu. Respons ataupun *echo* (gema) dari yel-yel itu tidak terdengar. Hal ini dapat dijadikan petunjuk mengenai kedewasaan masyarakat untuk memilah-milah suatu isu agar tidak terperangkap ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

Akhirnya yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah munculnya protes atas kerja aparat Pemilihan Umum. Cukup banyak dikeluhkan mengenai aparat yang kurang bertanggung-jawab atau kurang mengerti tugas kewajibannya, terutama di daerah-daerah. Sehubungan dengan hal ini, protes yang cukup banyak dilancarkan adalah tentang fungsi pengawasan yang dikatakan masih lemah. Disarankan agar OPP diikutsertakan dalam fungsi pengawasan, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, lebih-lebih di TPS-TPS. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam Pemilihan Umum itu, sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab pada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sebaiknya para pengawas, para saksi, dan para KPPS itu "disantiaji" lebih dahulu secara bersama. Dengan demikian mereka akan semakin mengerti hak dan kewajibannya, serta terampil menangani tugasnya, yang pada gilirannya kita harapkan Pemilihan Umum dapat terlaksana secara lebih berkualitas sebagai wujud peningkatan perwujudan demokrasi Pancasila.

PENUTUP

Akhirnya, dapat dikatakan bahwa Pemilihan Umum di Indonesia pada saat ini tetap belum untuk mengubah pemerintahan ataupun bentuk negara maupun sistem politik yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Umum adalah sarana untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi Pancasila.

Di samping itu, berdasarkan hasil perolehan kursi di DPR dapat disimpulkan bahwa selain masalah intern OPP, masalah eksternal cukup mempunyai pengaruh dalam perolehan suara. Namun demikian dengan kemunduran perolehan kursi yang didapat Golongan Karya, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah,

tidak akan mempengaruhi konstelasi politik nasional secara keseluruhan. Hal ini disebabkan kursi Fraksi Karya Pembangunan, apalagi bila digabungkan dengan kursi Fraksi ABRI, jumlahnya masih dominan, dengan demikian Golongan Karya dan ABRI masih akan menentukan percaturan politik nasional.

Kasus-kasus di setiap daerah nampaknya sangat mempengaruhi perolehan suara di tiap-tiap OPP, meskipun secara nasional dapat dilihat munculnya fenomena-fenomena baru. Sehubungan dengan hal ini, ada tanda-tanda berkembangnya *floating mass* di kalangan masyarakat, terutama di daerah perkotaan.

Masalah yang kini perlu segera mendapatkan perhatian antara lain adalah: (1) memperbarui bentuk-bentuk kampanye di masa mendatang sebagaimana telah disebutkan di halaman 24 dan 25; (2) *program oriented* dari setiap OPP harus semakin jelas; (3) *floating mass* perlu dipertahankan. Hal ini sejalan dengan sifat keterbukaan yang sekarang dimiliki oleh setiap OPP; (4) perlu peningkatan dan perbaikan kerja dari aparat pemilihan, terutama aparat pengawasan, di daerah-daerah. Begitu pula peran para saksi, dan ketidakmampuan sesuatu OPP untuk menyediakan saksi-saksinya jangan sampai dijadikan dalih terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Aparat pemilihan dan para saksi sebaiknya disantiaji bersama, sehingga mereka semakin jelas akan hak dan tanggung-jawabnya.

Demikian pula, meskipun ada kekurangan-kekurangan dalam UU Pemilu yang kini masih diperlukan, termasuk sistem dan tujuannya, kiranya masih perlu dipertahankan. Perubahan sistem pemilihan umum menjadi sistem distrik tampaknya belum sesuai dengan kondisi maupun kesadaran politik masyarakat Indonesia pada umumnya (terutama masyarakat kalangan bawah, yang biasanya masih rendah pendidikannya). Penyempurnaan atas

peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan Pemilihan Umum perlu terus diadakan, sehingga Pemilihan Umum benar-benar semakin berkualitas sebagai salah satu wujud aktualisasi demokrasi Pancasila.

Berkaitan dengan ini semua, masalah politik nasional sebagai wujud aktualisasi demokrasi Pancasila yang pantas juga untuk diikuti secara mendalam adalah suksesnya Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1993. Kini telah nampak beberapa persoalan yang perlu mendapatkan pemecahan secara konkret, seperti misalnya masalah: (1) susunan GBHN; (2) *voting*; (3) sistem politik berdasarkan demokrasi Pancasila; (4) kedudukan ketua DPR-MPR, dipisah atau tetap menjadi satu seperti sekarang ini; (5) kedudukan BP MPR, permanen atau seperti sekarang ini ada jika akan mempersiapkan bahan-bahan untuk Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sebagai penutup dapat saya gambarkan komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat masa bhakti 1992-1997, sebagai berikut:

1. Fraksi Utusan Golongan= **100**
2. Fraksi Utusan Daerah= **149**
3. Fraksi Karya Pembangunan= 282 + MPR hasil imbangan
   = 282 + (282:500 x 251) = 282 + 141 = **423**
4. Fraksi Persatuan Pembangunan= 62 + MPR hasil imbangan = 62 + (62:500 x 251) = 62 + 31 = **93**
5. Fraksi Demokrasi Indonesia = 56 + MPR hasil imbangan = 56 + (56:500 x 251) = 56 + 28 = **84**
6. Fraksi ABRI = 100 + MPR hasil imbangan
   = 100 + (100:500 x 251) = 100 + 50 = **150**

Dengan demikian komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah sebagai berikut: (1) Yang diangkat berjumlah 250 (Fraksi ABRI ditambah Fraksi Utusan Golongan); (2) Yang dipilih berjumlah 750 (jumlah dari Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Demokrasi Indonesia dan Fraksi Utusan Daerah yang dipilih oleh DPRD I).

3. Pemilu 1992: Suatu Dinamika Perubahan Sosial

AMIR SANTOSO

PEMILU 1992 telah usai dan kita semua telah mengetahui hasilnya. Golkar sekalipun tetap mampu mempertahankan mayoritasnya di dalam DPR tetapi mengalami penurunan suara. PPP mampu menaikkan jumlah suara yang diperolehnya sekalipun tidak banyak, sedangkan PDI bisa dianggap sebagai partai yang paling sukses dalam Pemilu 1992 yang lalu.

Pemilu 1992 adalah Pemilu pertama yang diselenggarakan ketika kita sedang berada di tengah situasi perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Ini adalah Pemilu pertama yang diselenggarakan dalam era pembaruan ekonomi yang dilancarkan sejak 1988 dalam bentuk deregulasi ekonomi. Deregulasi tersebut telah menghasilkan peningkatan kegiatan industri, perdagangan dan perbankan secara menakjubkan. Bersamaan dengan itu peningkatan pelayanan transportasi, pendidikan dan komunikasi telah menimbulkan mobilitas sosial secara besar-besaran baik horizontal maupun vertikal. Fenomena lain yang mewarnai Pemilu 1992 adalah semakin netralnya pihak ABRI terutama polisi, meskipun kenetralan sikap ini belum diikuti sepenuhnya oleh birokrasi pemerintah.

Dengan adanya tiga fenomena yang menonjol tadi, tulisan ini bermaksud menghubungkannya dengan hasil-hasil Pe-

milu. Yang menjadi pertanyaan adalah: sejauh mana ketiga fenomena tersebut mempengaruhi hasil Pemilu? Memang jawaban atas pertanyaan ini masih bersifat hipotetik, karena sesungguhnya masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Data dan informasi yang digunakan adalah berupa perkiraan-perkiraan dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan oleh orang lain. Data dan informasi tersebut juga sebenarnya masih memerlukan verifikassi melalui penelitian. Tetapi karena penelitian tersebut belum dimungkinkan pada saat ini, maka analisis yang dikemukakan oleh beberapa pakar dan pengamat terhadap hasil Pemilu dianggap benar.

Dalam upaya melihat dampak dari ketiga fenomena di atas, tulisan ini mencoba melihat dalam dua sudut pandang yaitu dari sudut hubungan antara negara dengan masyarakat (*state and society*) serta sudut kultur.

DARI PERSPEKTIF HUBUNGAN NEGARA-MASYARAKAT

Hingga penghujung dasawarsa 1980-an para analis politik, terutama yang sinis, berpendapat bahwa *polity* Indonesia masih bisa digolongkan ke dalam salah satu di antara beberapa nama: *bureaucratic polity, bureaucratic patrimonialism, bureaucratic authoritarianism, restricted pluralism*, atau *corporatism.*

Nama-nama tersebut diberikan setelah mereka mengamati bahwa dalam rangka hubungan antara negara dengan masyarakat, ternyata negara berperan sangat dominan. Negara mengatur hampir semua segi kehidupan masyarakat baik segi sosial, ekonomi maupun politik. Kekuasaan negara hampir tidak memperoleh imbangan dari masyarakat sehingga negara boleh dikata

hanya dikendalikan oleh niat baik para penyelenggara negara karena pengawasan sosial relatif tidak berjalan.

Kebijakan di bidang politik untuk menekan partisipasi tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan timbulnya situasi sosial politik yang stabil, aman dan tertib agar pembangunan ekonomi bisa dilaksanakan dengan lancar. Peningkatan kesejahteraan memang terjadi, tetapi bersamaan dengan itu timbul pula suasana kepengapan politik karena banyak aspirasi yang tidak tersalurkan.

Tetapi menjelang akhir dasawarsa 1980-an, pemerintah mulai mengubah sikapnya. Genggaman politik mulai dikendurkan dan kampanye keterbukaan mulai diperdengarkan. ABRI, misalnya, sejak 1987 mulai bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu. Perubahan sikap politik pemerintah itu tampaknya terjadi karena kearifan setelah melihat kecenderungan sosial secara global yang mengarah ke arah demokratisasi, serta kearifan untuk mengantisipasi tuntutan yang meningkat akibat peningkatan kesejahteraan yang timbul sebagai hasil dari program-program ekonomi pemerintah.

Masyarakat melalui kelompok-kelompok dan melalui orsospol kemudian memanfaatkan momentum ini. Terjadi "geliatan-geliatan" politik, yang antara lain tercermin pula dalam proses Pemilu 1992 melalui kampanye yang lebih berani, protes-protes terhadap kejurdilan proses pemungutan suara, dan protes terhadap proses perhitungan suara.

Berdasarkan hasil-hasil Pemilu 1992, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya yang paling berhasil dalam Pemilu yang lalu adalah pemerintah. Boleh dikata, semua OPP sesungguhnya tidak berbuat banyak, tidak membuat kemajuan dalam cara kerja mereka, tidak ada yang baru dalam tema maupun cara kampanye

mereka. Mereka hanya membonceng situasi yang dihasilkan oleh program-program pemerintah dan menggunakannya sebagai isu dalam kampanye mereka. Mereka juga hanya memanfaatkan sikap ABRI yang netral.

Program-program pemerintah itu telah menghasilkan perubahan sosial, ekonomi, dan politik, dan perubahan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh ketiga OPP untuk menarik dukungan bagi mereka. Dalam jangka waktu dua puluh lima tahun terakhir ini, tidak ada seorang pun yang akan menyangkal bahwa berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah telah memperlihatkan hasilnya dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan perdagangan dan industri, perkembangan sarana telekomunikasi, pertambahan sarana pendidikan baik negeri maupun swasta, perbaikan sarana transportasi dan sebagainya.

Berbagai kemajuan tersebut telah menghasilkan perubahan sosial. Dari data mengenai lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi, jelas terlihat pertambahan jumlah mereka yang terdidik pada saat ini dibandingkan dengan masa awal Orde Baru dahulu. Mereka kini, setidaknya sebagian, telah menjadi kelompok kelas menengah intelektual baru. Di bidang ekonomi, kebijakan ekonomi yang dilancarkan sejak 1969 dan mencapai puncaknya mulai tahun 1988 telah menghasilkan pertumbuhan industri, perdagangan, dan perbankan yang menakjubkan.

Kombinasi antara perkembangan pendidikan dan perkembangan ekonomi tadi telah menghasilkan kelas menengah intelektual dan kelas menengah ekonomi baru yang memiliki wawasan sosial dan politik yang lebih luas dibandingkan kelompok-kelompok sosial lainnya. Walaupun masih ada kesimpangsiuran

definisi mengenal siapa yang bisa dimasukkan sebagai kelas menengah, tetapi kelompok intelektual baru dan kelompok pengusaha serta karyawan agaknya bisa dikategorikan sebagai kelas menengah.

Salah satu ciri dari kelas menengah adalah kemandirian mereka dalam menetapkan pendirian politik. Artinya, mereka tidak begitu terikat lagi pada pilihan-pilihan tradisional dalam menentukan partai yang akan didukungnya. Pilihan politik mereka lebih didasarkan atas pragmatisme ketimbang alasan-alasan emosional dan primordial. Dan yang lebih penting dari itu adalah kemampuan mereka untuk mengatasi rasa takut terhadap birokrasi pemerintah dalam menentukan partai yang akan didukungnya.

Pragmatisme kelas menengah ini telah menghasilkan dukungan maupun penolakan terhadap OPP peserta Pemilu. Mereka yang besar karena hubungan dekat dengan birokrasi tentunya akan mendukung Golkar, sebab payung Golkar masih mereka perlukan untuk kesinambungan posisi dan bisnis mereka. Sebagian dari kelas menengah intelektual, misalnya adalah pegawai negeri yang kehidupannya tergantung pada gaji dari pemerintah. Begitu pula, sebagian dari kelas menengah bisnis adalah mereka yang disebut sebagai *ersatz kapitalist* [Kunio, 1991] yang juga menggantungkan nasib bisnis mereka pada dukungan fasilitas birokrasi pemerintah.

Mungkin saja dukungan mereka kepada Golkar memiliki unsur takut, tetapi untuk sebagian, kemungkinan alasannya adalah pragmatisme. Mereka memilih Golkar dengan alasan yang logis bahwa hanya Golkar-lah yang akan mampu menjamin kelangsungan posisi dan bisnis mereka. Mereka tentunya berpikir siapa yang akan mengambil risiko dengan memilih PPP dan PDI, padahal mereka tidak yakin bahwa kedua partai tersebut akan mampu menghasilkan pemerintahan yang stabil dan efektif.

Namun sebagian kalangan cendekiawan dan pengusaha di luar Jakarta tampaknya lebih mandiri dibandingkan rekan mereka di Jakarta. Jika analisis mengenai pertambahan suara PDI dan pengurangan suara Golkar di beberapa daerah di luar Jakarta adalah benar, maka sebagian dari suara itu mungkin datang dari kelas menengah yang kecewa terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Di Surabaya, menurut laporan media massa, suara PDI dan PPP meningkat tajam di kawasan perumahan mewah, walaupun Golkar tetap menang. Kecenderungan yang sama juga terjadi di Semarang dan Yogyakarta, terutama di kampus-kampus universitas. Ini berarti bahwa sudah mulai ada kelompok-kelompok kelas menengah yang berani menyatakan "tidak" terhadap beberapa kebijakan pemerintah.

Walaupun kelas menengah di Jakarta relatif kritis terhadap pemerintah, tetapi tampaknya tidak banyak dari mereka yang terkena dampak negatif dari kebijakan pemerintah. Karena itu, sekalipun mungkin saja mereka merasa tidak puas atau jengkel terhadap sikap pejabat atau anak pejabat, sejauh sikap tersebut tidak merugikan mereka, mereka akan lebih suka mendukung Golkar. Sebab risiko untuk tidak mendukung Golkar bisa besar, dan mereka tetap merasa perlu untuk memelihara hubungan baik dengan para pejabat pemerintah melalui dukungan terhadap Golkar.

Sebaliknya dari beberapa daerah dilaporkan bahwa kebijakan pemerintah dalam bidang tata niaga cengkeh, jeruk, juga kebijakan di bidang pertanahan telah menghasilkan gelombang protes yang dinyatakan melalui pemberian suara kepada Parpol non-Golkar.

Kelas menengah terdidik, terutama mahasiswa, sudah semakin banyak yang berani menyatakan kecaman mereka terhadap pemerintah. Sebagian dari mereka, menurut beberapa ana-

lis, ikut menyumbang terhadap suara Golput, meskipun kemudian ternyata suara Golput sangat kecil dalam Pemilu yang lalu.

DARI PERSPEKTIF KULTUR

Kemajuan di bidang pendidikan, transportasi, komunikasi dan sebagainya itu, mengakibatkan peningkatan mobilitas sosial secara vertikal maupun horizontal. Mobilitas vertikal tersebut membawa pengaruh terhadap pola hubungan sosial. Dalam hal ini kita mengamati perubahan pola hubungan *patron-client*, sekurang-kurangnya di beberapa daerah tertentu.

Analisis hasil pemilu memperkirakan bahwa di beberapa daerah di Jawa Timur, misalnya, para santri tidak lagi terlampau patuh terhadap pilihan politik kiyai mereka. Salah satu faktor kekalahan Golkar di Jawa Timur dikatakan sebagai akibat dari sikap beberapa santri untuk tidak memilih Golkar, walaupun kiyai mereka mendukung Golkar.

Namun di lain pihak, apa yang disebut sebagai *rank culture* (budaya jenjang, atasan-bawahan) masih menunjukkan eksistensinya. Ini tampak misalnya dalam proses penentuan caleg (calon legislatif). Meskipun ada upaya agar DPD Parpol dan Golkar diikutsertakan dalam pengusulan nama-nama caleg, tetapi tampaknya wewenang DPP tetap lebih menentukan dibandingkan kekuasaan DPD. Akibatnya, tetap saja sebagian besar caleg merupakan orang-orang yang kurang atau tidak dikenal di daerah pemilihan mereka.

Contoh lain adalah adanya kekhawatiran dari sebagian kepala desa kalau-kalau Golkar mengalami kekalahan di desa mereka. Beberapa kepala desa dilaporkan oleh media massa telah

meletakkan jabatan setelah Golkar ternyata kalah di desa mereka. Tetapi di daerah yang lain, para mantan kepala desa telah memberikan suara kepada PDI atau PPP setelah mereka dicopot dari jabatannya. Kekhawatiran yang sama juga melanda sebagian besar pimpinan Kantor dan Kepala Sekolah, sehingga mereka tetap melakukan upaya untuk memenangkan Golkar di kantor atau di sekolah.

Contoh lain lagi dari kuatnya *rank culture* tersebut ditunjukkan oleh Dr. Din Sjamsudin tokoh muda PP Muhammadiyah. Dikatakannya bahwa sebagian pimpinan ormas Islam bukanlah mereka yang memiliki akar di kalangan massa. Mereka menjadi pimpinan karena memiliki hubungan dekat dengan "orang-orang di atas". Akibatnya, mereka kurang memiliki pengaruh dan kharisma yang mencukupi sehingga tidak mampu memobilisasi dukungan massa. Salah satu faktor dari tidak banyaknya pertambahan suara PPP, dikatakan sebagai akibat dari hal ini.

PEMILU DAN PROSPEK POLITIK DI MASA DEPAN

Mulai munculnya "suara-suara berani dan berbeda" dalam Pemilu 1992 di atas menyebabkan lembaga pemerintahan dan politik di masa depan yang tidak terlampau lama, harus bercorak dan bersikap lebih demokratis. Sebab di masa yang akan datang, jumlah massa yang kritis sudah tentu akan bertambah, karena peningkatan pendidikan, pertambahan sarana transportasi dan komunikasi serta kemajuan di bidang-bidang lainnya, tidak mungkin dihambat. Peningkatan kesadaran politik yang diakibatkan oleh berbagai kemajuan itu menuntut penyesuaian sikap dan perilaku politik. Karena itu apa yang harus kita lakukan?

Pertama, adalah pendidikan politik yang ditujukan untuk membentuk sportivitas. Demokrasi bukan hanya merupakan per-

soalan kelembagaan politik, melainkan lebih dari itu adalah persoalan mental atau watak. Kita boleh menciptakan berbagai lembaga penunjang sistem politik demokratis, tetapi selama watak bangsa ini belum demokratis, tampaknya sedikit kemungkinan bahwa lembaga-lembaga yang diciptakan tersebut akan beroperasi secara demokratis pula.

Sportivitas adalah sikap pribadi yang selalu bersedia untuk mengakui kesalahan, kekalahan dan kekurangan diri serta mengakui dan menghargai kebenaran, kemenangan, dan kelebihan orang atau kelompok lain. Sikap ini mencerminkan kematangan pribadi yang sangat diperlukan dalam suatu sistem politik demokratis. Sebab, demokrasi pada dasarnya adalah suatu sistem politik yang mengakui adanya keanekaragaman kelompok untuk ikut serta dalam berbagai aktivitas politik.

Setiap kelompok haruslah diberi kesempatan yang sama untuk melakukan kompetisi secara sehat dan konstitusional melalui Pemilu dalam rangka politik tersebut. Di dalam rangka kompetisi itulah akan muncul masalah menang atau kalah yang bisa berbahaya jika tidak disertai dengan adanya sikap dan watak yang sportif. Kestabilan politik di negara industri maju, bukan hanya ditentukan oleh perangkat dan lembaga politik yang memadai, tetapi juga disebabkan oleh kematangan pribadi para pelaku politik.

Kedua, secara lambat laun birokrasi sebagai lembaga hendaknya dibuat netral. Sebagai perangkat administrasi negara, birokrasi hendaknya hanya menjalankan fungsi-fungsi administrasi yang sifatnya merupakan *supporting agencies* yang tidak boleh memihak kepada salah satu golongan. Pimpinan birokrasi tersebut (pimpinan departemen atau menteri-menteri) boleh dijabat oleh pimpinan politik yang bisa berganti, tetapi jabatan itu harus dibedakan dengan jabatan karier pada birokrat. Dengan

kata lain, birokrasi harus selalu setia terhadap siapa pun yang sedang mengendalikan pemerintahan.

Ketiga, perlu diupayakan agar kebijakan pemerintah bersifat responsif terhadap tuntutan masyarakat. Perlu pula dikurangi kesan adanya kebijakan yang dibuat hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal ini bisa diperbaiki dengan cara membuka peluang bagi DPR dan kelompok-kelompok sosial politik untuk berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Keempat, berkaitan dengan hal ketiga tadi, haruslah dibuka kesempatan bagi Mahkamah Agung dan BPK untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara wajar, serta memberi kesempatan bagi DPR dan organisasi sosial politik lainnya untuk berperan sebagai *agent of social control*. Hal ini perlu dilakukan untuk menciptakan adanya *checks and balances* yang sangat diperlukan dalam kerangka sistem politik demokratis.

Kelima, partai politik seharusnya melakukan kampanye berkesinambungan untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat serta untuk membina ikatan batin dengan masyarakat. Mengamati aktivitas Parpol selama ini, saya berkesimpulan bahwa Parpol tidak banyak melakukan aktivitas untuk membangun hubungan dengan massa. Selama ini kita mengamati bahwa Parpol non-Golkar hanya aktif setiap lima tahun sekali pada saat Pemilu. Pada waktu selebihnya, Parpol lebih sibuk mengurus masalah internalnya. Padahal pembinaan hubungan dan silaturahmi dengan massa merupakan hal penting yang harus dibina secara berkesinambungan jika Parpol ingin memperoleh kepercayaan dari massa. Karena itu bisa dimaklumi jika Golkar berhasil mempertahankan mayoritasnya karena memang hanya Golkar yang melakukan kampanye secara berkesinambungan.

4. Dinamika Pemilih dalam Pemilu 1992

RISWANDHA IMAWAN

PEMUNGUTAN suara dalam Pemilu 1992 telah berakhir, dan hasilnya juga telah ditetapkan. Penyelenggaraan Pemilu kali ini memiliki tiga ciri khusus.

Pertama, untuk pertama kalinya Golkar mengalami penurunan suara yang besar.[1] Umumnya pakar ilmu politik berpendapat bahwa penurunan ini merupakan keharusan, demi lebih hidupnya demokrasi dalam proses politik di Indonesia. Walaupun Golkar ternyata tetap memegang mayoritas suara di DPR, sehingga inisiatif penyusunan agenda politik tetap di tangan Golkar, naiknya perolehan suara PPP dan PDI dipandang sebagai kemajuan proses demokratisasi yang cukup berarti. Namun, banyak tokoh Golkar (terutama di daerah-daerah) yang "merasa teran-

[1]Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan hasil Pemilu 1992. Pada daerah *urban*, tercatat enam faktor: sikap Golkar terlalu defensif, dampak modernisasi, sikap elit Golkar yang arogan, keterbukaan LPU-DEPDAGRI, *political realignment*, dan identifikasi Golkar dengan birokrasi. Lihat artikel Riswandha Imawan, "Mengapa Suara Golkar Turun?", *Suara Merdeka*, 15 Juni 1992. Pada daerah *rural*, setidaknya ada tiga faktor: menurunnya nilai tukar produk pedesaan, kampanye negatif calon lurah terpilih tetapi tidak ditunjuk menjadi lurah, dan imbas urbanisasi musiman. Lihat hasil diskusi panel *Bernas*, 18-20 Juni 1992.

cam" kedudukannya dalam jajaran birokrasi, sebagai akibat penurunan suara Golkar ini. Penurunan suara Golkar ini tidak dipandang *merisaukan,* melainkan hanya *memalukan.* Sebab dengan segala keunggulan yang dimiliki, secara teknis hampir mustahil suara Golkar turun dalam Pemilu 1992.

Kedua, muncul *indikasi* menguatnya kembali garis-garis politik "lama", atau garis politik yang terbentuk pada tahun 1950-an. Ini sangat mengherankan, sebab dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 1985 dan UU No. 5 Tahun 1985, seharusnya penguatan ke arah garis politik 1950-an tidak lagi dapat terjadi. Indikasi ini yang diyakini sebagai terjadinya *political realignment* dalam politik Indonesia.

Ketiga, ada indikasi bahwa para pemilih di daerah pedesaan tidak kalah kritis dibandingkan pemilih di perkotaan. Dengan kata lain, masyarakat desa mulai sadar akan hak-hak politiknya. Mereka mulai sulit dimobilisir untuk mendukung OPP tertentu. Indikasi ini tidak tampak dalam Pemilu-pemilu sebelumnya.

Berdasarkan ketiga ciri khusus tersebut, tulisan ini mencoba untuk "membaca" perilaku pemilih berdasarkaan hasil Pemilu 1992. Sebenarnya, pembahasan mengenai hasil Pemilu 1992 (dan juga Pemilu lainnya) akan lebih menarik bila menggunakan level Kabupaten/Dati II; sebab variasi yang ada pada level ini jauh lebih banyak dibandingkan variasi pada level Provinsi/Dati I. Namun, karena terbatasnya data untuk Kabupaten/Dati II, maka tulisan ini didasarkan pada data pada level provinsi.

KERANGKA KONSEPTUAL

Lima puluh tahun lampau, Prof. Schattsneider memulai bukunya dengan kalimat: *Political party is the product of democratic movement, and modern democracy is by product of a party competition.*[2] Kalimat ini merangkum satu bahasan panjang, bahwa kehadiran partai politik sejalan dengan tumbuhnya kesadaran anggota masyarakat akan hak-hak politiknya. Tumbuhnya kesadaran ini tidak dapat dihindari. Sebab kesadaran ini berjalan seiring dengan makin modernnya satu masyarakat.

Partai dibentuk untuk mengorganisir aneka macam kepentingan dalam masyarakat. Bila variasi kepentingan itu tidak diorganisir, besar kemungkinan konflik menampakkan diri dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bila konflik dipandang sebagai manifestasi tuntutan yang saling berbeda tidak "disederhanakan" oleh partai, besar kemungkinan sistem politik yang berlaku tidak berfungsi. Kehadiran partai, dengan demikian, dapat dipandang sebagai sarana pengendali konflik dalam masyarakat.[3]

Sebagai satu *ide*, partai *tidak* dibentuk untuk "mempromosikan" konflik dalam masyarakat. Apalagi kalau dalam tubuh partai itu sendiri tumbuh serangkaian konflik internal. Namun, sebagai satu *ajang permainan politik,* partai justru merupakan sumber awal terjadinya konflik dalam masyarakat. Karena itulah, setidaknya sejak akhir tahun 1970-an, muncul gelombang ketidakpuasan terhadap partai. Partai lebih dipandang sebagai *sarana*

---

[2]E.E. Schattsneider, *Party Government* (New York: Holt Rinehart and Winson, 1942), 1.

[3]Schattsneider, *The Semisovereign People* (New York: Holt, Rinehart, and Winson, 1960), 64-66.

bagi segelintir orang untuk menjadi elit dalam masyarakat, demi mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi.[4] Keadaan inilah, yang dicurigai sebagai salah satu penyebab utama menurunnya minat warga negara USA memberikan suaranya dalam satu Pemilu. Persepsi masyarakat tentang "murni atau tidak murninya" motivasi elit partai mengendalikan organisasi, merupakan faktor penentu naik atau turunnya *voting turnout,* serta dukungan yang diterima satu partai dalam satu Pemilu.[5]

Dalam tatanan sistem politik, partai lebih banyak berfungsi pada sisi *input* dibandingkan pada sisi *output*. Artinya, partai dituntut untuk lebih melaksanakan fungsi-fungsi: sosialisasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan masyarakat, komunikasi politik, dan rekrutmen politik. Dalam pelaksanaannya, kelima fungsi ini saling berkaitan.

Sosialisasi politik merupakan proses pengenalan nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam proses ini antara lain dikenalkan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, serta cara-cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik. Dengan bekal pengetahuan ini, anggota masyarakat mulai merumuskan (mengartikulasi) kepentingan mereka. Sadar bahwa kepentingan pada tingkat individual akan sangat bervariasi, maka muncul keinginan menyatukan kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam satu tema yang sama. Penyatuan ini biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, yang dalam istilah politik disebut "kelompok ke-

---

[4]Angelo Panebianco, *Political Parties: Organization and Power* (Cambridge, NY: Cambridge UP, 1982), 26-27.

[5]James Sundquist, *Dynamics of the Party System* (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1983), 408.

pentingan" dan "kelompok penekan." [6] Kegiatan kedua kelompok inilah yang dimaksud agregasi kepentingan.

Rangkuman kepentingan ini yang kemudian "diambil-alih" atau "diramu kembali" oleh partai politik, sesuai dengan ideologi mereka. Kemudian, partai *menjual* ramuannya itu dalam satu pasar, *mengkompetisikan* ramuannya dengan ramuan partai lain, yang kita kenal dengan proses kampanye dan Pemilu. Tujuannya jelas untuk meningkatkan jumlah dukungan terhadap *demand* yang diramu partai. Proses ini merupakan salah satu bentuk komunikasi politik. Setelah itu, partai menempatkan wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan. Tugas mereka adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat yang sudah mereka rangkum, agar kepentingan tersebut tertuang dalam "daftar tugas" yang harus dilaksanakan oleh pemerintah (eksekutif).

Dari rangkaian tugas yang harus dilaksanakan oleh partai seperti digambarkan di atas, tampak jelas bahwa partai harus terus-menerus membina hubungan dengan anggota masyarakat. Hubungan ini selain untuk membuka saluran informasi, juga berguna sekali untuk "memelihara" dukungan anggota masyarakat. Sebab, dalam alam demokrasi, legitimasi politik itu datangnya dari rakyat, dari bawah, *bukan* dari atas.

Dari kenyataan keharusan partai memelihara hubungan dengan masyarakat pemilih ini, muncul setidaknya lima pendekatan untuk menganalisa tingkah laku memilih warga masyara-

---

[6]Dalam khasanah politik Indonesia, kedua kelompok ini *tidak* dibedakan. Keduanya disebut saja sebagai Organisasi Masa (Ormas). *Ini jelas merupakan kekeliruan yang harus segera diperbaiki.* Sebab kedua kelompok itu memiliki fungsi yang berbeda.

kat. Secara ringkas kelima pendekatan itu dapat digambarkan sebagai berikut:[7]

1. *Structural Approach.* Di sini struktur sosial dipandang sebagai basis dari pengelompokan politik. Pendekatan ini percaya bahwa tingkah laku politik seseorang, termasuk menentukan pilihan politiknya, sangat ditentukan oleh pengelompokan sosialnya. Pengelompokan ini umumnya didasarkan atas: kelas sosial, agama, desa-kota, bahasa dan nasionalisme.

2. *Sociological Approach.* Hampir sama dengan pendekatan struktural. Keduanya berpendapat bahwa tingkah laku politik seseorang, sangat dipengaruhi oleh identifikasi mereka terhadap satu kelompok, serta norma-norma yang dianut oleh kelompok itu. Bedanya, dalam pendekatan sosiologis, mobilitas seseorang untuk keluar dari satu kelompok dan bergabung dengan kelompok yang lain masih dimungkinkan.

3. *Ecological Approach.* Pendekatan ini percaya bahwa faktor-faktor yang bersifat ekologis, seperti daerah, sangat menentukan tingkah laku politik seseorang. Misalnya, pendekatan ini percaya bahwa mereka yang lahir dan dibesarkan di daerah pesisir pantai, lebih bersikap demokratis dibandingkan dengan mereka yang berada di daerah pegunungan.

4. *Social Psychological Approach.* Pendekatan ini percaya bahwa tingkah laku dan keputusan politik seseorang, sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor-faktor internal, seperti sistem kepercayaan, dan faktor eksternal, seperti pengalaman politik. Kebalikan dari pendekatan sosiologis, pendekatan psikologi sosial ini percaya bahwa tingkah laku dan kepercayaan individu menentukan dan membentuk norma-norma kelompok. Bukan

---

[7]Dennis Kavanagh, *Political Science and Political Behavior* (London: George Allen and Unwin, 1983), 83-88.

sebaliknya, norma kelompok menentukan norma dan tingkah laku individu.

5. *Rational Choice Approach.* Sebenarnya pendekatan ini merupakan "kelanjutan" dari pendekatan psikologi sosial. Di sini orang percaya, bahwa dengan makin modernnya masyarakat, makin tinggi tingkat pendidikan mereka, maka warga masyarakat akan selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh bila melakukan satu tindakan politik.

Di antara kelima pendekatan di atas, Kavanagh menilai pendekatan *Social Psychology* sebagai yang paling unggul untuk meneliti tingkah laku politik seseorang, termasuk menentukan pilihan mendukung satu partai tertentu. Alasannya, persoalan tingkah laku politik lebih merupakan persoalan individual dibanding kelompok. Di antara kelima pendekatan di atas, pendekatan psikologi dan rasionalisme bergerak pada tingkatan individual. Namun, seperti banyak ditemukan oleh berbagai penelitian, tindakan politik lebih banyak diwarnai oleh *gejolak emosional* daripada menggunakan rasio.

Pendekatan rasionalisme untuk meneliti tingkah laku politik, diawali oleh hasil kerja Anthony Downs.[8] Downs menyatakan bahwa modernisasi akan meningkatkan daya nalar warga masyarakat. Peningkatan daya nalar ini berpengaruh ke tindakan politik mereka. Warga masyarakat akan selalu berpikir memberikan dukungan terhadap satu partai, dalam kerangka berpikir *costandbenefit.* Keuntungan yang akan diperolehnya dengan mendukung satu partai dijadikan pertimbangan utama untuk menentukan sikap.

---

[8]Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy* (New York: Harper and Bros., 1957).

Masalahnya, untuk dapat bersikap rasional, orang harus benar-benar memperoleh informasi yang tepat (*fully informed)*. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam dunia politik praktis, sebab penguasaan terhadap informasi merupakan bagian penting dari kekuasaan. Bahkan penelitian Robertson menyebutkan bahwa bila pengetahuan warga masyarakat tentang politik meningkat, mereka tidak mau berpikir secara ekonomis, mereka cenderung mengkaitkannya dengan ideologi.[9]

Di sini tampak bahwa faktor psikologis lebih mewarnai keputusan seseorang untuk menentukan pilihan politiknya. Kecenderungan orang untuk melihat apakah elit partai memiliki motivasi "murni atau tidak murni" seperti diutarakan Sundquist di atas, merupakan refleksi dari sistem kepercayaan seseorang tentang politik.

Dari sudut pandang pendekatan psikologis, banyak faktor yang menentukan tindakan memilih yang dilakukan warga masyarakat.[10]

Namun pada dasarnya ada tiga faktor utama: *identifikasi ke satu partai; isu yang berkembang;* dan *kandidat yang ditampilkan* (untuk mengatasi isu tersebut).[11] Identifikasi ke satu

---

[9]David Robertson, *A Theory of Party Competition* (New York: John Wiley and Sons, 1976), 44-49.

[10]Kavanagh menyebut tiga faktor: sosial, psikologi, dan pengaruh politik yang diterima seseorang. Meyer menyebut dua faktor utama. Pertama, faktor *individual,* yang terdiri dari: *values, ideology, social status, occupation interests, personality.* Kedua, faktor *lingkungan,* yang terdiri dari: *political culture, institutions, class structure, economy, standard of living.* Lihat William Meyer, *The Political Experience* (New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1978), 68.

[11]Angus Campbell, et al., *The American Voter* (New York: John Wiley and Sons, 1964).

partai merupakan basis dari keputusan politik seseorang. Seperti diutarakan di muka, partai melakukan fungsi sosialisasi politik. Melalui fungsi ini, partai secara transparan (namun efektif) membentuk sistem kepercayaan seseorang terhadap politik. Identifikasi ini dapat secara langsung mempengaruhi seseorang menentukan pilihan politiknya. Dampak langsung ini, terutama ditemukan pada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah dibandingkan tingkat pendidikan rata-rata penduduk. Orang seperti ini kurang mendapatkan informasi tambahan, sehingga sulit untuk membangun beberapa alternatif sebelum menentukan satu pilihan.[12]

Kejadian yang sering tampak adalah identifikasi terhadap satu partai, dapat melemah atau menguat bila seseorang sanggup mengevaluasi isu yang berkembang dalam masyarakat, serta kemampuan kandidat yang ditampilkan partai untuk mengatasi isu tersebut. Dapat saja seseorang ikut atau mengidentifikasikan dirinya dengan satu partai. Namun, bila dia menilai partainya tidak menanggapi isu-isu yang berkembang, atau bahkan menampilkan kandidat yang dipandang tidak memiliki kemampuan menyelesaikan isu tersebut; dapat saja orang tersebut memberikan suaranya kepada partai lain. Hasil penelitian Page dan Jones misalnya, secara tegas menemukan bahwa faktor *isu* dan *kandidat* lebih penting kedudukannya dibandingkan faktor identifikasi ke partai.[13]

Dari seluruh uraian di atas, terlihat bahwa perpindahan memberikan dukungan (suara) terhadap satu partai, dapat saja berubah dari satu Pemilu ke Pemilu berikutnya. Perubahan ini kemungkinan akan terjadi bila:

---

[12]Richard Niemi and Herbert Weisberg, *Controversies in Voting Behavior* (Washington, D.C.: CQ Press, 1984), 319.

[13]Benjamin Page and Calvin Jones, *Reciprocal Effects of Policy Preferences, Party Loyalties and the Vote*, dalam Niemi and Weisberg (1984).

1. Terbuka *kompetisi* antarpartai untuk memperebutkan sebanyak mungkin suara;
2. Ada partai (terutama yang sedang berkuasa, *in power*), lupa atau tidak memperhatikan secara serius *isu-isu* yang berkembang dalam masyarakat;
3. *Kandidat* yang ditampilkan partai, tidak sesuai dengan harapan masyarakat pemilih.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, tulisan berikut mencoba "membaca" hasil Pemilu 1992.

PEMILU 1992

Ketika diumumkan bahwa Golkar mengalami penurunan suara yang cukup tajam serta kehilangan 17 kursi di DPR dalam Pemilu 1992, banyak orang yang membayangkan bahwa Golkar benar-benar *babak-belur*. Sebenarnya, hasil perolehan suara masing-masing OPP menunjukkan kenaikan atau penurunan suara yang "membingungkan" pengamat politik Indonesia.

Dalam Pemilu 1992, suara PPP [lihat Tabel 1] ternyata masih terus menurun di Sumatera. Di beberapa kantong tradisional PPP, seperti Aceh, Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan, suara PPP bahkan turun cukup besar (8,46% untuk Aceh, 5,21% untuk Sumbar, dan 3,76% untuk Kalsel). PPP memang berhasil menaikkan suaranya di Jawa Timur, yang dikatakan para ahli sebagai indikasi terjadinya *political realignment*.[14] Namun kenaik-

[14] *Political Realignment* adalah penguatan kembali garis-garis politik ke pola lama.

Tabel 1

PERSENTASE PEROLEHAN SUARA **PPP** DALAM PEMILU 1971-1992
(Tingkat Provinsi)

Provinsi	1971	1977	1982	1987	1992
D.I. Aceh	48,88	52,48	59,08	42,97	34,51
Sumatera Utara	15,82	20,08	20,44	13,48	10,90
Sumatera Barat	34,53	28,82	38,77	19,63	14,42
Riau	20,56	29,99	25,79	15,04	14,33
Sumatera Selatan	30,05	36,34	28,05	18,82	11,94
Jambi	10,41	14,68	13,81	8,20	4,88
Bengkulu	15,44	19,66	26,14	10,25	5,75
Lampung	22,05	28,60	30,02	7,33	3,72
Jawa Barat	20,15	27,00	27,17	13,81	14,93
D.K.I. Jakarta	37,10	38,26	39,20	21,42	23,81
Jawa Tengah	28,72	24,19	27,72	18,21	22,91
D.I. Yogyakarta	21,66	20,95	23,34	14,49	20,42
Jawa Timur	39,39	33,39	36,64	20,78	25,21
Kalimantan Barat	18,74	20,14	20,73	15,20	14,61
Kalimantan Tengah	16,43	24,59	14,55	8,46	7,82
Kalimantan Selatan	33,94	42,47	39,65	24,81	21,05
Kalimantan Timur	30,12	30,40	31,85	21,11	17,86
Sulawesi Utara	22,91	16,71	6,76	5,41	4,48
Sulawesi Tengah	18,97	17,98	15,52	11,95	10,96
Sulawesi Tenggara	5,78	3,08	2,56	1,99	1,84
Sulawesi Selatan	18,79	13,42	10,23	8,87	7,71
Bali	2,28	1,48	1,94	1,66	1,99
Nusa Tenggara Barat	24,74	30,70	28,15	11,88	11,05
Nusa Tenggara Timur	3,14	1,89	1,30	1,31	1,84
Maluku	24,93	18,03	18,96	13,28	16,02
Irian Jaya	—	4,00	3,17	2,74	2,39
Timor Timur	—	—	0,22	0,73	1,43

Keterangan: Data 1971 merupakan penggabungan suara partai-partai yang berfusi menjadi PPP tahun 1973

Tabel 2

PERSENTASE PEROLEHAN SUARA **GOLKAR** DALAM PEMILU 1971-1992
(Tingkat Provinsi)

Provinsi	1971	1977	1982	1987	1992
D.I. Aceh	49,71	37,72	39,97	51,96	58,41
Sumatera Utara	70,13	60,08	72,54	72,76	71,29
Sumatera Barat	63,22	59,08	60,41	78,65	82,07
Riau	76,72	63,32	71,69	79,73	76,56
Sumatera Selatan	62,62	49,82	65,12	69,26	70,24
Jambi	88,21	83,49	84,80	88,87	90,69
Bengkulu	82,68	76,44	70,61	84,81	86,07
Lampung	71,82	61,84	59,35	87,03	90,46
Jawa Barat	76,12	66,27	63,33	71,31	70,48
D.K.I. Jakarta	46,67	34,57	44,99	50,23	54,41
Jawa Tengah	50,32	52,62	60,47	68,21	55,46
D.I. Yogyakarta	71,62	56,58	60,55	70,19	58,60
Jawa Timur	54,91	58,84	56,78	71,21	58,82
Kalimantan Barat	66,66	68,88	70,99	68,73	63,85
Kalimantan Tengah	81,84	69,86	84,22	89,19	86,27
Kalimantan Selatan	64,83	49,40	59,25	71,82	69,66
Kalimantan Timur	54,77	56,96	61,30	67,82	61,49
Sulawesi Utara	60,72	72,88	87,13	87,49	88,23
Sulawesi Tengah	76,82	79,31	81,30	83,12	80,77
Sulawesi Tenggara	92,36	96,10	96,94	97,15	94,35
Sulawesi Selatan	78,36	85,18	89,18	90,01	89,77
Bali	82,81	85,37	88,35	87,74	78,48
Nusa Tenggara Barat	69,82	57,49	68,61	82,56	78,50
Nusa Tenggara Timur	61,48	90,28	96,35	94,74	91,21
Maluku	47,73	71,86	75,24	81,48	73,86
Irian Jaya	—	86,85	92,48	92,95	86,61
Timor Timur	—	—	99,45	93,68	82,62

an itu belum mendekati perolehan suara PPP pada Pemilu 1992. Bahkan kenaikan suara di Jatim sebesar 4,43% (dibandingkan Pemilu 1987), masih kalah oleh kenaikan suara PDI di daerah ini yang mencapai 7,96%.

Secara keseluruhan, perolehan suara PPP membaik di Pulau Jawa dan Maluku. Untuk Pulau Jawa, kenaikan suara PPP tidak begitu mengherankan. Sebab, dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia, Jawa memang merupakan pulau yang paling *urbanized.* Pemilih yang bersikap kritis terdapat di Jawa. Kenaikan suara PPP di Maluku justru menarik. Sebab Maluku selama ini kurang terdengar sebagai basis kelompok pemilih muslim. Jadi, yang terjadi pada PPP adalah, mereka berhasil "masuk" ke basis kelompok lain, tetapi *kecolongan* di beberapa basis tradisional mereka sendiri. Karena itu, argumentasi dalam Pemilu 1992 telah terjadi *political realignment,* tampaknya baru sampai pada tahap indikasinya saja.

Penampilan Golkar di Sumatera [lihat Tabel 2], kecuali di Sumut dan Riau, sebenarnya lebih baik dibandingkan Pemilu 1987. Di Jawa, penampilan Golkar membaik hanya di DKI Jaya. Itu pun hanya dengan kenaikan suara 3,18%. Dari Tabel 2 ini, suara Golkar turun di seluruh provinsi di Indonesia bagian Tengah dan Timur, kecuali di Sulut.

Penampilan terbaik ditunjukkan PDI dalam Pemilu 1992 ini [lihat Tabel 3]. Kecuali di Jabar dan DKI Jaya, PDI menguat di seluruh provinsi di Indonesia. Dari Tabel 3 ini terlihat bahwa PDI sukses menembus daerah-daerah basis PPP dan Golkar. Kenaikan suara PDI sebesar 8,92% di Kalsel, atau 10,36% di Timtim, merupakan bukti. Di Jawa Timur, yang selama ini "dikapling" PPP dan Golkar, PDI berhasil menaikkan suaranya sebesar

Tabel 3

PERSENTASE PEROLEHAN SUARA **PDI** DALAM PEMILU 1971-1992
(Tingkat Provinsi)

Provinsi	1971	1977	1982	1987	1992
D.I. Aceh	1,41	9,80	0,95	5,07	7,08
Sumatera Utara	14,05	19,84	7,02	13,76	17,81
Sumatera Barat	2,25	12,10	0,82	1,72	3,51
Riau	2,72	6,69	2,52	5,23	9,11
Sumatera Selatan	7,33	13,84	6,83	11,92	17,82
Jambi	1,38	1,83	1,39	2,93	4,43
Bengkulu	1,88	3,90	3,25	4,94	8,18
Lampung	6,13	9,56	10,63	5,64	5,82
Jawa Barat	3,73	6,73	9,50	14,88	14,59
D.K.I. Jakarta	16,23	10,94	15,81	28,35	21,78
Jawa Tengah	20,96	23,19	11,81	13,58	21,63
D.I. Yogyakarta	6,72	22,47	16,11	15,32	20,98
Jawa Timur	5,70	7,77	6,58	8,01	15,97
Kalimantan Barat	14,60	10,98	8,28	16,07	21,51
Kalimantan Tengah	2,16	5,55	1,23	2,35	5,91
Kalimantan Selatan	1,23	8,13	1,10	3,37	9,29
Kalimantan Timur	15,11	12,64	6,85	11,07	20,65
Sulawesi Utara	16,37	10,41	6,11	7,10	7,29
Sulawesi Tengah	4,21	2,71	3,18	4,93	8,27
Sulawesi Tenggara	1,86	0,82	0,50	0,86	3,81
Sulawesi Selatan	2,85	1,40	0,59	1,12	2,52
Bali	14,91	12,69	9,71	10,60	19,53
Nusa Tenggara Barat	5,44	11,81	3,24	5,56	10,45
Nusa Tenggara Timur	35,38	7,83	2,35	3,95	6,95
Maluku	27,34	10,11	5,80	5,24	10,12
Irian Jaya	—	9,15	4,35	4,31	10,46
Timor Timur	—	—	0,33	5,59	15,95

Keterangan: Data 1971 adalah penggabungan suara partai yang berfusi menjadi PDI pada tahun 1973.

7,96%. Bahkan untuk NTT, yang terkenal dengan pernyataan sebagian Kepala Desa di sana bahwa desa mereka "bebas Parpol", PDI berhasil menembus barikade Golkar dengan kenaikan suara 3%.

Kisah sukses PDI dibandingkan PPP dan Golkar, dapat dilihat dari Tabel 4. Kita lihat bahwa di bawah komando Buya Ismail, penampilan PPP sudah mulai membaik. Sekalipun masih banyak terjadi penurunan suara, namun penurunan itu tidak sampai mendekati penurunan suara dalam Pemilu 1987. Dalam Pemilu 1987, misalnya untuk provinsi Lampung, suara PPP anjlok sebesar 309,54%. Dalam Pemilu 1992 ini, suaranya anjlok "hanya" 97,04%. Contoh lain adalah D.I.Y. Pada Pemilu 1987, suara PPP turun sebesar 61,07%. Namun pada Pemilu 1992, PPP berhasil menaikkan suaranya sebesar 29,04%. Ini jelas satu prestasi yang baik sekali.

Tabel 4 membuktikan bahwa penampilan Golkar sangat buruk. Golkar hanya berhasil menaikkan suaranya di 8 provinsi. Itu pun dengan kenaikan suara yang minim. Tertinggi di Aceh, naik sebesar 11,04%. Tabel 4 juga menunjukkan bahwa Golkar mengalami penurunan di tiga provinsi strategis: Jateng (-22,98%), DIY (-19,77%), dan Jatim (-21,06%) dibandingkan suara yang dicapai pada Pemilu 1987. Bahkan, untuk daerah yang selama ini dikategorikan "mutlak milik Golkar", Timtim, suara Golkar turun sebesar 13,38%.

Kebalikan dari Golkar dan PPP, seperti terlihat dalam Tabel 4, suara PDI hanya turun di DKI Jaya dan Jabar. Penurunan terbesar terjadi di DKI Jaya, sebesar 30,16%. Namun PDI berhasil menaikkan suaranya secara cukup meyakinkan di 25 provinsi lainnya. Kenaikan suara PDI terbesar terjadi di Sulawesi Tenggara, yakni 77,42%. Menarik untuk disimak di sini, PDI ber-

Tabel 4

PERSENTASE KENAIKAN DAN PENURUNAN SUARA OPP
ANTARA PEMILU 1982 DAN 1987 SERTA PEMILU 1987 DAN 1992
(Tingkat Provinsi)

Provinsi	PPP		GOLKAR		PDI	
	82-87	87-92	82-87	87-92	82-87	87-92
D.I. Aceh	-37,49	-34,51	23,07	11,04	81,26	28,38
Sumatera Utara	-51,63	-23,67	00,30	-02,06	48,98	22,74
Sumatera Barat	-97,50	-36,13	23,19	04,16	52,32	50,99
Riau	-71,47	-04,95	10,08	-04,14	51,81	42,59
Sumatera Selatan	-49,04	-57,62	05,97	01,39	42,70	33,10
Jambi	-68,41	-68,03	04,57	02,00	16,19	33,86
Bengkulu	-15,502	-78,26	16,74	01,46	34,21	39,60
Lampung	-30,954	-97,04	31,80	03,79	-88,47	16,65
Jawa Barat	-96,74	07,50	11,19	-01,17	36,15	-01,98
D.K.I. Jakarta	-83,00	10,03	10,43	05,84	44,23	-30,16
Jawa Tengah	-52,22	20,51	11,34	-22,98	13,03	37,21
D.I. Yogyakarta	-61,07	29,04	13,73	-19,77	05,15	26,97
Jawa Timur	-76,32	17,57	20,26	-21,06	17,85	49,84
Kalimantan Barat	-36,38	04,03	-03,28	-07,64	48,47	25,29
Kalimantan Tengah	-71,98	08,18	05,57	-03,38	47,65	60,23
Kalimantan Selatan	-59,81	-17,86	17,50	-03,10	67,35	63,72
Kalimantan Timur	-50,87	-18,19	09,61	-10,29	38,12	46,39
Sulawesi Utara	-24,95	20,75	00,41	00,80	13,94	02,60
Sulawesi Tengah	-23,00	-09,03	02,18	-02,90	35,49	40,38
Sulawesi Tenggara	-64,64	-08,15	00,21	-02,96	72,00	77,42
Sulawesi Selatan	-15,33	-15,04	00,92	-00,26	47,32	55,55
Bali	-16,86	16,58	00,69	-11,79	08,39	45,72
Nusa Tenggara Barat	-13,695	-07,51	16,89	-05,17	41,73	46,79
Nusa Tenggara Timur	-00,76	-28,80	01,69	-03,87	40,50	43,16
Maluku	-42,72	17,10	07,65	-1031	-10,68	48,22
Irian Jaya	-15,69	-14,64	00,50	-07,32	-00,40	58,79
Timor Timur	-69,86	48,95	-06,15	-13,38	94,09	02,19

hasil menerobos kantong PPP di Aceh (28,38%) dan Sumbar (50,99%). Demikian pula, misalnya, PDI berhasil mendongkrak suaranya sebesar 58,79% di Irja. Daerah ini sejak Pemilu 1971 dianggap mutlak milik Golkar.

Pertanyaannya sekarang, mengapa semua ini terjadi? Sesuai dengan arahan konsep yang dibangun dalam makalah ini, mungkin terjadi "sesuatu" terhadap ketiga faktor yang dikemukakan di atas, dalam Pemilu 1972.

Tabel 5 menunjukkan bahwa berdasarkan indeks yang saya buat sendiri, tampak bahwa Pemilu 1992 *lebih kompetitif* dibandingkan Pemilu 1987. Artinya, PPP dan PDI memiliki kesempatan untuk mengimbangi Golkar. Tabel 5 menunjukkan bahwa perubahan ke arah Pemilu yang lebih kompetitif, terlihat jelas pada kasus Jateng dan DIY.

Indeks ini saya susun dengan asumsi bahwa suara yang diperlukan Golkar untuk mempertahankan dominasi politiknya adalah 60%. Dengan demikian saya berasumsi, bahwa kalau Pemilu dilaksanakan secara *fair,* PPP dan PDI dapat mencapai 20% suara. Angka 20% ini yang saya jadikan patokan. Bila ada OPP yang berhasil mencapai angka 20% atau lebih, dia mendapat nilai 1. Jadi, misalnya di DKI Jaya, suara PPP (23,81%), Golkar (54,41%), dan PDI (21,78%). Di sini, ketiga OPP mendapat suara masing-masing di atas 20%. Jadi, untuk DKI mendapat nilai 3, yang menunjukkan adanya kompetisi di daerah itu. Nilai 2 menunjukkan kompetisi tingkat sedang. Sedangkan nilai 1 menunjukkan daerah itu tidak kompetitif.

Menarik untuk disimak, bahwa daerah yang kompetitif terpusat di Pulau Jawa *(urbanized area)*. Tiga daerah kunci (DKI

Tabel 5

STATUS KOMPETITIF ATAU NON-KOMPETITIF
DALAM PEMILU 1987 DAN 1992
(Tingkat Provinsi)

Provinsi	Pemilu 1987	Pemilu 1992
D.I. Aceh	2	2
Sumatera Utara	1	1
Sumatera Barat	1	1
Riau	1	1
Sumatera Selatan	1	1
Jambi	1	1
Bengkulu	1	1
Lampung	1	1
Jawa Barat	1	1
D.K.I. Jakarta	3	3
Jawa Tengah	1	3
D.I. Yogyakarta	1	3
Jawa Timur	2	2
Kalimantan Barat	1	2
Kalimantan Tengah	1	1
Kalimantan Selatan	2	2
Kalimantan Timur	2	2
Sulawesi Utara	1	1
Sulawesi Tengah	1	1
Sulawesi Tenggara	1	1
Sulawesi Selatan	1	1
Bali	1	1
Nusa Tenggara Barat	1	1
Nusa Tenggara Timur	1	1
Maluku	1	1
Irian Jaya	1	1
Timor Timur	1	1

Keterangan: 1 = tidak kompetitif
2 = kompetitif sedang
3 = kompetitif tinggi

Jaya, Jateng dan DIY) mendapatkan nilai 3. Kalau saja ada kebebasan yang lebih luas bagi PPP dan PDI untuk melaksanakan fungsi mereka sebagai partai politik, bukan mustahil bahwa dalam Pemilu 1997 nanti akan semakin banyak provinsi mendapatkan nilai 2 atau 3. Artinya kita semakin maju dalam proses pembangunan politik, khususnya dalam proses penumbuhan kehidupan politik yang lebih demokratis.

Selain Pemilu yang lebih kompetitif, selama kampanye Pemilu 1992 Golkar ternyata bersikap sangat pasif dan defensif. Padahal banyak *isu-isu* besar kemasyarakatan yang perlu segera dijawab. Isu penggusuran tanah, BPPC, regenerasi politik, merupakan sebagian dari isu-isu tersebut. Pimpinan Golkar boleh saja mengatakan bahwa seluruh isu itu merupakan "urusan birokrasi". Namun masyarakat tidak bisa membedakan antara tokoh Golkar dan tokoh Birokrasi. Akibatnya, kalaupun mau dikatakan sebagai kesalahan birokrasi, itu identik dengan kesalahan Golkar.

Sebagai *the party in power*, Golkar seharusnya lebih agresif menampilkan dan mengupas isu-isu yang ada. Namun, sepanjang masa kampanye para Jurkam Golkar hampir selalu minta maaf atas kesalahan dan kekurangan pelaksanaan pembangunan selama ini. Cara ini bisa saja efektif menarik perhatian pemilih. Namun bila intensitasnya tinggi menjadi tidak efektif. Orang malah berpikir sudah sekian lama menjadi pelopor pelaksanaan pembangunan, setiap Pemilu diutarakan "tahu kesalahannya dan siap memperbaikinya", tetapi mengapa kesalahan itu tetap terjadi?

Karena bobot informasi yang dimiliki PPP dan PDI tidak sebaik yang dimiliki Golkar, masyarakat merasa kehilangan sumber informasi untuk menyusun alternatif pilihan. Isu-isu besar yang ada, gagal dijadikan alat untuk memperoleh suara seba-

nyak-banyaknya. Ini yang menyebabkan para pemilih dalam Pemilu 1992 lebih mengutamakan faktor emosi daripada rasionalitas. Pemilih lebih suka menerjemahkan isu-isu tersebut, berdasarkan atas sentimen primordialisme yang sudah mereka pahami. Ini yang menyebabkan di beberapa provinsi, tampak adanya indikasi pembentukan *political realignment.*

Para pemilih dalam Pemilu 1992 (dan Pemilu-pemilu berikutnya) adalah pemilih yang makin tinggi kualitasnya. Mereka (mulai) sadar akan demokrasi. Ajaran politik yang universal ini menuntut adanya *penyertaan* anggota masyarakat dalam urusan politik, termasuk memilih elit politik. Sayang, sistem *proportional representation* dengan stelsel daftar yang kita anut, tidak memungkinkan masyarakat pemilih mengenal tokoh yang ditampilkan OPP. Apalagi mereka dapat terlibat dalam *menguji* kemampuan tokoh itu untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Mekanisme rekrutmen politik yang kita gunakan selama ini lebih banyak menghasilkan tokoh "karbitan". Cara ini jelas sudah tidak sesuai dengan tingkat pendidikan dan daya nalar para pemilih. Mereka mulai faham bahwa orang yang duduk dalam lembaga perwakilan, tidak sekedar mencerminkan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Lebih dari itu, mereka harus dapat mewakili emosi dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Harus ada ikatan psikologis antara pihak yang mewakili dan yang diwakili. Ikatan psikologis ini tidak dapat dibentuk dalam waktu sekejap. Dalam 25 hari kampanye, misalnya. Ikatan ini terbentuk melalui proses interaksi yang intensif, di mana pihak wakil dan yang diwakili bersedia untuk saling mengisi dan memperkuat kelemahan masing-masing.

PENUTUP

Hal-hal yang saya kemukakan dalam makalah ini, bukanlah merupakan pemikiran yang final. Apa yang saya kemukakan, baru merupakan percikan pemikiran yang masih harus disempurnakan dan diharapkan dapat memancing diskusi lebih jauh.

5. Evaluasi Pemilihan Umum 1992: Suatu Catatan

OKA MAHENDRA

TULISAN berikut ini merupakan catatan-catatan kecil yang diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran. Berdasarkan pengamatan, dapat dikatakan bahwa makalah Harry Tjan Silalahi hanya mengevaluasi masalah yang pokok-pokok saja. Oleh sebab itu ada baiknya bila dilakukan evaluasi yang menyeluruh dari 12 kegiatan Pemilihan Umum, sejak pendaftaran pemilih sampai dengan pengambilan sumpah pelantikan anggota DPR. Berkaitan dengan hal itu akan lebih baik bila tolok ukurnya ditentukan terlebih dahulu untuk mengukur apakah pelaksanaan Pemilihan Umum 1992 ini berhasil atau tidak, baik dilihat dari segi prosesnya maupun segi hasil-hasilnya. Masalah ini tampaknya tidak disinggung dalam makalah tersebut.

Sedikit catatan mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum dari segi proses barangkali perlu dipikirkan, mengingat panjangnya proses penyelenggaraannya yang terhitung sejak pendaftaran pemilih yang dimulai 1 Mei, pemungutan suaranya pada tanggal 9 Juni, dan pelantikan anggota DPR-nya baru pada tanggal 1 Oktober. Ini merupakan rentang waktu yang cukup panjang. Oleh sebab itu, apakah tidak mungkin proses itu dipersingkat.

Selain itu mengenai mekanisme pencalonan, baik dilihat dari masing-masing OPP, apakah di dalam tubuh OPP sendiri

itu sudah cukup demokratis proses pencalonannya. Ini juga perlu dievaluasi oleh para pakar, sebab kalau kita yang mengevaluasinya mungkin Golkar akan mengatakan, Golkar sudah cukup demokratis, karena daftar calonnya itu telah "*bolak-balik*" dari pusat ke daerah dan sebaliknya. Begitu pula mengenai persyaratan-persyaratan, surat-surat yang harus dilengkapi oleh para calon. Ini sangat menyibukkan, seperti anak SD yang mau mendaftar ke SMP saja. Tidak kurang dari delapan surat yang harus diselesaikan dalam proses pencalonan ini; bahkan bagi pegawai negeri tambah lagi beberapa surat pernyataan lain dari instansi yang bersangkutan, yang kadang-kadang memerlukan waktu. Ini perlu disederhanakan, barangkali perlu dilakukan deregulasi.

Juga mengenai waktu penyusunan daftar calon. Kalau tadi diusulkan agar caleg diumumkan satu atau dua tahun sebelum Pemilihan Umum, mungkin dari satu sisi ada positifnya. Tetapi dari sisi lain, dapat dibayangkan bagaimana kehidupan lembaga DPR kita bila satu dua tahun sebelumnya orang sudah mengetahui bahwa tidak akan masuk daftar calon lagi. Hal ini merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan.

Kemudian mengenai hakikat Pemilihan Umum yang telah disinggung dalam makalah Harry Tjan Silalahi, hal ini tidak dapat dipungkiri; karena Pemilihan Umum menurut ketentuan Undang-Undang itu bukan merupakan sarana untuk menyusun negara baru atau falsafah baru. Atau menurut istilah Harry Tjan, Pemilihan Umum di Indonesia itu bukan merupakan suatu cara atau suatu sarana untuk mengubah pemerintah atau negara Republik Indonesia. Penegasan tersebut tentu saja dapat diterima. Tetapi perlu diketahui bahwa Pemilihan Umum itu merupakan suatu sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dalam permusyawaratan

perwakilan sebagaimana digariskan oleh UUD negara kita. Maka kalau diperhatikan lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum UU No. 15/1969 ditegaskan secara jelas bahwa kekuasaan negara yang lahir dengan Pemilihan Umum adalah kekuasaan negara yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat sebagai kewibawaan yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan seterusnya. Kiranya hal ini yang perlu ditekankan.

Pembaruan-pembaruan perlu dilakukan untuk semakin meningkatkan kehidupan demokrasi kita, walaupun tanpa perlu mengubah dasar negara ataupun sistem pemerintahan kita. Karena itu perlu disadari bahwa Pemilihan Umum harus mampu melahirkan sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat, yang lahir dari bawah, yang demokratis, artinya Pemilihan Umum itu harus mampu membawa perubahan ke arah kemajuan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan kita yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dan ini menjadi tanggung kita bersama -- baik OPP, pemerintah maupun masyarakat luas -- agar tetap komit untuk menegakkan demokrasi. Di sini sistem kekuasaan negara yang demokratis seperti tadi telah ditegaskan antara lain adanya kontrol rakyat terhadap pemerintah. Ini yang harus diperkuat.

Partisipasi politik rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat, dalam arti agar rakyat dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan adalah penting. Jangan sampai terjadi seperti sekarang ini di mana rakyat digusur tanahnya tanpa menurut aturan yaitu mengajak mereka musyawarah, melainkan hanya diberi pengarahan lalu digusur dengan ganti rugi ala kadarnya. Dan Prof. Dr. Hogeberg dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa tingkat demokrasi di suatu masyarakat lebih tinggi apabila dasar-dasar demo-

krasi, seperti kebebasan, persamaan, keterbukaan, lebih sering dan lebih intensif didukung -- tidak hanya diucapkan tetapi didukung dalam praktek. Sebab sering terjadi bahwa banyak orang yang mengucapkan persamaan, keterbukaan dan kebebasan, tetapi dalam prakteknya mengekang kebebasan. Misalnya, untuk mementaskan seni saja dilarang. Karenanya sulit dikatakan bahwa sungguh-sungguh ada kemauan untuk mendukung kebebasan mengekspresikan diri, kebebasan untuk bersuara dan sebagainya. Selain itu juga ditegaskan bahwa demokrasi menganggap adanya kemampuan warga negara untuk melancarkan kritik sama pentingnya dengan kesediaan untuk memberikan kepercayaan kepada pemimpin politik. Jadi perlu ditekankan agar mereka yang menduduki kekuasaan jangan alergi terhadap kritik, jangan hanya minta dukungan, tetapi juga terbuka untuk dikritik demi perbaikan kita bersama. Sebab kalau Pemilihan Umum tidak berhasil membawa perubahan-perubahan, pembaruan-pembaruan dalam memantapkan kedaulatan rakyat, dikhawatirkan bahwa Pemilihan Umum itu hanya akan memperkuat ilusi tentang persamaan dengan hanya sekedar memberikan hak pilih.

Pemilihan Umum secara simbolis memberikan suatu keyakinan kepada warga negara bahwa mereka tetap mempunyai kekuasaan dan hak, paling tidak dalam teori, untuk memilih atau tidak memilih para pemimpin mereka sendiri seperti dikatakan oleh Toffler dalam bukunya "Gelombang Ketiga". Tetapi menurut Toffler, upacara keyakinan kembali ini ternyata seringkali dianggap lebih penting daripada hasil Pemilihan Umum itu sendiri. Jadi asal Pemilihan Umum itu sudah berjalan aman dan tertib, sudah dianggap membanggakan, tanpa melihat *output*-nya lebih lanjut.

Sedangkan mengenai kesadaran politik masyarakat, yang memandang Pemilihan Umum sebagai kewajiban moral daripada hak politik, hal itu dapat dipahami. Tetapi yang penting untuk di-

kaji ialah asal kewajiban itu lazim atas kesukarelaan, walaupun setelah mendapat petunjuk dari panutannya, atau karena dimobilisasikan. Ini barangkali yang perlu lebih dijelaskan.

Walaupun kita telah lima kali melaksanakan Pemilihan Umum dalam Orde Baru ini, tetapi pendidikan politik masih perlu terus dilakukan, untuk menyerasikan budaya politik kita dengan lembaga-lembaga demokrasi yang telah kita bangun. Kelembagaaan politik harus diikuti dengan pembentukan sikap dan watak demokratik.

Kemudian mengenai Golput, tidak benar apabila mereka yang tidak hadir ke TPS pada hari pemungutan suara dikatakan sebagai Golput, apalagi memasukkan suara tidak sah itu ke dalam Golput. Perlu dilakukan satu penelitian lebih cermat mengenai Golput ini, karena adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya perlu diklasifikasikan menurut motivasinya. Ada yang tidak menggunakan hak pilihnya itu sebagai tindakan politis, ada yang karena tidak mendapat panggilan, ada juga karena kelalaian dan lain-lain. Munculnya Golput ini memang merupakan suatu fenomena yang cukup menarik sejak tahun 1971, dan sampai sekarang ini pun masih ada. Tetapi satu hal yang perlu diketahui juga bahwa apabila tindakan-tindakan seseorang yang telah sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya Pemilihan Umum atau sengaja dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang melakukan hak pilihnya sudah tergolong tindak pidana. Hal ini kiranya perlu juga diketahui.

Sedangkan mengenai kampanye, kalau dilihat dari segi keamanannya memang lebih baik. Tetapi dalam Pemilihan Umum 1992 ini memang tampak ada upaya untuk melakukan

terobosan, seperti pelaksanaan kampanye dialogis atau debat politik yang dilakukan oleh PDI, cuma sayangnya Golkar tidak hadir pada waktu itu. Tetapi ini baru merupakan tahap awal yang memang masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam pengembangannya. Sehubungan dengan kegiatan kampanye, kiranya tidak benar apabila dikatakan bahwa OPP, organisasi kekuatan sosial politik itu selama empat tahun terus tidur pulas. Organisasi-organisasi kekuatan sosial politik terus-menerus melakukan kegiatan, hanya saja tingkat efektivitas kegiatannya yang berbeda. Seperti misalnya, Litbang PDI itu sangat aktif, hingga soal mandataris pun akan dicoret. Dalam kampanye Pemilihan Umum 1992 ini tampaknya tiap-tiap OPP masih menampilkan asas cirinya. PPP dengan asas ciri Islamnya, PDI dengan asas ciri demokrasinya bahkan dapat dikatakan ideologi demokrasi-lah yang dibawa oleh PDI. Sedangkan Golkar dengan asas ciri pembangunan atau *establishment* dan justru karena dia menampilkan ciri-ciri pembangunan sebagai pembela pembangunan telah menempatkan Golkar dalam posisi defensif. Barangkali hal ini mempunyai kaitan erat dengan peroleh suara Golkar di dalam Pemilihan Umum yang lalu.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pada waktu yang akan datang memang masih perlu dicarikan bentuk-bentuk kampanye yang benar-benar dapat dijadikan sarana pendidikan politik bagi rakyat.

6. Dinamika Pemilih dalam Pemilu 1992: Suatu Tanggapan

KWIK KIAN GIE

SETELAH membaca makalah Riswandha Imawan mengenai Pemilu 1992, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurunnya perolehan suara Golkar adalah karena:

- Keharusan demi lebih hidupnya demokrasi dalam proses politik Indonesia;
- Menguatnya garis-garis politik lama atau terjadinya *political realignment;*
- Pemilih di daerah pedesaan tidak kalah kritis dibandingkan di perkotaan.

Untuk dapat membaca hasil Pemilu 1992, Riswandha memilih satu dari 5 buah metodologi pendekatan, yaitu *social psychological approach,* ketimbang 4 pendekatan lainnya, yaitu *structural, sociological, ecological* dan *rational choice approach.* Alasan-alasannya mengapa memilih pendekatan ini dikemukakan cukup panjang di dalam makalahnya, sehingga tidak perlu diulang lagi. Dikemukakannya juga bahwa berbagai penelitian membuktikan bahwa tindakan politik lebih banyak diwarnai oleh gejolak emosional daripada menggunakan rasio.

Dari sudut pandang psikologis yang dipilihnya, dikenal pula adanya tiga faktor utama yang dapat menjelaskan hasil Pemilu

1992, yaitu: identifikasi ke satu partai; isu yang berkembang; dan kandidat yang ditampilkan.

Riswandha menduga "mungkin terjadi sesuatu" terhadap ketiga faktor tersebut di dalam Pemilu 1992, yaitu:

1. Pemilu 1992 lebih kompetitif dibandingkan tahun 1987. PPP dan PDI mempunyai kesempatan untuk mengimbangi Golkar;

2. Golkar bersikap lebih pasif dan defensif. Isu-isu besar gagal dijadikan alat untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya, sehingga para pemilih lebih mengutamakan faktor emosi daripada rasionalitas. Maka di beberapa tempat tampak adanya indikasi pembentukan *political realignment* berdasarkan primordialisme yang lebih mereka pahami;

3. Adapun mengenai kandidat yang ditampilkan, pada bagian akhir makalahnya antara lain dikemukakan bahwa "Harus ada ikatan psikologis antara pihak yang mewakili dan yang diwakili. Ikatan psikologis ini tidak dapat dibentuk dalam waktu sekejap. Dalam 25 hari kampanye, misalnya. Ikatan ini terbentuk melalui proses interaksi yang intensif, di mana pihak wakil dan yang diwakili bersedia untuk saling mengisi dan memperkuat kelemahan masing-masing." Dalam hal ini tidak jelas apa yang diartikannya bahwa kandidat Golkar adalah kandidat karbitan, sehingga tidak mempunyai ikatan batin pada para pemilihnya ketimbang para kandidat yang ditampilkan oleh PPP dan PDI.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan bantahan atau dukungan terhadap makalah Riswandha. Tidak jelas pula apa yang dimaksud mengenai perilaku emosional dari pihak pemilih yang cenderung menghasilkan *political realignment* dan

masih berperannya primordialisme di dalam perilaku memilih di tahun 1992, seperti yang dikenali oleh Riswandha di satu pihak, dengan penjelasannya yang rasional dalam mengemukakan tiga aspek identifikasi partai, isu yang berkembang dan kandidat yang ditampilkan. Kalau tiga faktor ini memang menentukan bagi hasil Pemilu 1992, bukankah hasil ini karena perilaku pemilih yang rasional daripada emosional?

Kiranya cukup menarik untuk mengamati visi Balitbang PDI yang jauh-jauh hari sebelum Pemilu sudah melakukan kajian dan perkiraan mengenai hasil-hasil Pemilu 1992. Dari visi Balitbang PDI ini memang ada beberapa kesamaan dengan yang dikemukakan oleh Riswandha, antara lain bahwa rakyat telah lama merasakan tidak ada atau kurangnya demokrasi, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi.

Salah satu sebab utama dari tidak berjalannya demokrasi yang lebih murni adalah adanya kepentingan-kepentingan yang lebih sempit daripada kepentingan bangsa secara keseluruhan. Jelasnya adalah kepentingan dari kedudukan yang mapan, yang membuahkan hasil-hasil materi yang sangat besar. Maka akan sulit bagi golongan yang sudah mapan ini, baik dalam kekuatan politik maupun di dalam kekuatan ekonominya untuk melepaskannya demi kepentingan bangsa secara keseluruhan secara adil. Oleh sebab itu, akan selalu ada kecenderungan mempertahankan kekuasaan politik itu dengan segala cara, atau atas pijakan "tujuan menghalalkan segala cara". Secara lebih jelas lagi dapat dikatakan bahwa kekuatan anti demokrasi yang terbesar adalah kerja sama atau kolusi antara kekuasaan dan ekonomi, atau kolusi antara penguasa dan pengusaha. Dengan demikian bersikap demokratis yang selalu mengandung risiko akan kehilangan sebagian dari kekuasaannya berarti otomatis kehilangan kepentingan ekonominya.

Lebih tajam lagi, ketakutan dari pihak yang sudah mapan bukan hanya ketakutan kehilangan kekuasaan politiknya, tetapi juga kalau belum kehilangan kekuasaan politiknya, tetapi sudah harus mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mendahulukan kepentingan orang banyak, karena hampir semua kebijaksanaan yang memenangkan kepentingan orang banyak justru tidak memungkinkan baginya melakukan pengangkangan secara semena-mena dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Namun karena kita telah bersama-sama bersepakat bahwa negara kita dibangun atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, semua kebijaksanaan yang anti demokrasi dikemukakan dan dijelaskan kepada rakyat di dalam bungkusan yang seolah-olah demokratis, atau dicarikan kepentingan-kepentingan umum lainnya yang lebih besar sebagai alasan mengapa kebijaksanaan tertentu yang sangat tidak demokratis diberlakukan.

Namun rekayasa yang demikian tidak selalu mudah, bahkan mempunyai kecenderungan yang semakin lama semakin sulit. Hal itu disebabkan karena berlakunya dalil yang mengatakan bahwa kita hanya dapat membohongi sebagian dari rakyat untuk selama-lamanya, atau membohongi seluruh rakyat untuk sementara, tetapi kita tidak dapat membohongi seluruh rakyat untuk selama-lamanya. Maka semakin lama akan menjadi semakin sulit memberlakukan kebijaksanaan yang jelas untuk kepentingan kantongnya sendiri, tetapi selalu disajikan kepada rakyat sebagai untuk kepentingan umum. Semakin lama, argumentasi yang dikemukakan semakin terlihat dicari-cari dan direkayasa.

Ketentuan di dalam UUD 1945 mengenai "barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak" tidak pernah didefinisikan secara jelas dalam bentuk daftar kon-

kret dari "barang dan jasa yang bersangkutan." Pengertian mengenai "dikuasai oleh negara" juga tidak pernah dirumuskan secara jelas dan tegas. Dengan menafsirkannya sebagai diatur atau dikendalikan, maka bentuk pengaturan dan pengendalian yang seberapa lunak pun akan dapat dianggap sebagai sudah dikusai oleh negara, sehingga rakyat sudah harus menerimanya sebagai segala sesuatunya sudah konsisten dengan UUD 1945. Maka rakyat merasakan aneh bahwa tanah berpuluh-puluh ribu hektar dikuasakan kepada satu keluarga untuk dikelola dan dikembangkan. Kredit ratusan milyar sampai trilyunan dapat diberikan kepada satu keluarga. Listrik, transportasi, telekomunikasi, pulau-pulau bisa diserahkan kepada perusahaan swasta untuk pengelolaannya. Perusahaan dagang swasta bisa diberi tugas untuk ikut mengurus negara seperti halnya dengan BPPC dan jeruk. Alasan-alasan yang dikemukakan semakin lama semakin terdengar sebagai tidak masuk akal.

Untuk mendukungnya, semua jajaran dan jenjang birokrasi dapat mengambil keputusan-keputusan yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus diatur oleh undang-undang, apa oleh peraturan pemerintah, apa oleh surat keputusan Presiden, apa oleh surat keputusan menteri, Dirjen, Gubernur Bank Indonesia, Bapepam dan sebagainya. Setiap pejabat boleh menerbitkan SK-nya dan barang siapa yang bertindak menyimpang dapat dihukum, sehingga setiap SK ini mempunyai kekuatan hukum. Kesemerawutan hukum adalah salah satu gejala dari mempertahankan kemapanan yang anti demokratis sifatnya, karena dengan demikian, banyak kekuasaan legislatif diambil alih oleh birokrasi.

Seperti telah disinggung sebelumnya, kita tidak akan mungkin bisa membohongi seluruh rakyat untuk selama-lamanya. Perwujudannya adalah protes yang mengambil berbagai macam

bentuk. Kita boleh sangat bersyukur bahwa rakyat kita sudah cukup matang dan dewasa, sehingga protesnya dikemukakan dalam bentuk memberikan suaranya kepada kekuatan orsospol lain, asal tidak kepada yang mapan, atau dalam hal ini Golkar. Maka bagi kami para pengurus Litbang PDI, perolehan suara yang bertambah bagi PDI sudah lama kami perkirakan. Bukan karena PDI mempunyai strategi yang hebat dalam memenangkan Pemilu, tetapi karena menerima tumpahan suara protes. Gejala ini terlihat lebih tajam kalau kita melihatnya sejak tahun 1982. Dari 1982 ke 1987 perolehan suara PDI meningkat dua kali lipat dari 20 kursi di DPR menjadi 40. Golkar juga sangat meningkat. Tetapi dari 1987 ke 1992 Golkar turun, sedangkan PDI tetap menanjak dari 40 kursi menjadi 56 kursi.

Maka jauh-jauh hari Balitbang PDI sudah menyimpulkan bahwa perolehan suara PDI yang lebih besar juga akan terjadi seandainya PDI tidak melakukan kampanye sama sekali. Kepada beberapa wartawan asing saya katakan bahwa perolehan suara yang lebih besar bagi PDI adalah nasib sejarah bagi PDI atau *historical fate*. Bukan karena PDI yang hebat.

Karena itu, perolehan suara yang lebih banyak bagi PDI adalah tantangan yang sangat besar, bagaimana PDI memainkan bola yang mau tidak mau sekarang dilemparkan ke dalam tangan PDI. Benarkah PDI akan lebih mampu berdemokrasi, benarkah PDI akan lebih mampu menjabarkan segala sesuatu secara jernih, konkret dan operasional.

Jawabannya dapat saya berikan, tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk itu, karena jawabannya memang ada dan cukup banyak. Dengan mengatakan bahwa PDI memang mempunyai cukup banyak konsep pemikiran mengenai bagaimana mengurus

negara yang lebih baik, saya sekaligus juga ingin merelativir apa yang saya katakan tadi bahwa perolehan suara PDI yang lebih besar semata-mata adalah karena mujur menerima suara protes, atau semata-mata karena nasib sejarah. Sedikit banyak, PDI memang mampu menampilkan gagasan pemikiran yang konkret dan dimengerti oleh rakyat banyak. Disuarakannya memang tidak dalam kurun waktu kampanye yang 25 hari itu, tetapi terus-menerus selama 5 tahun. Hal ini bisa dibuktikan melalui clippings koran-koran. Ini berarti bahwa ternyata Balitbang PDI selama lima tahun itu cukup teratur dan konsisten menanggapi berbagai macam masalah dengan mengemukakan gagasan pemecahannya .

Mungkin para pakar politik dapat meluangkan waktu untuk mengkaji clipping yang khusus mengenai apa saja yang pernah dilakukan dan dikatakan oleh PDI selama lima tahun. Kalaupun materi kampanye ingin ditelaah, sebaiknya melalui naskah tertulisnya, karena yang diucapkan di panggung-panggung tentunya tidak bisa dijadikan ukuran karena gaduhnya suasana dan massa yang akan marah kalau pidato berkepanjangan dan "*njelimet*". Di samping itu, para pakar politik biasanya memang tidak mengikuti pidato-pidato kampanye di panggung-panggung.

7. Pemilu 1992 -- Suatu Dinamika Perubahan Sosial: Suatu Tanggapan

H. MATORI ABDUL DJALIL

PADA prinsipnya, analisis pemikiran Dr. Amir Santoso tentang Pemilu 1992 dapat diterima, yaitu yang menggunakan pendekatan hubungan negara dan masyarakat serta kultur politik dalam melihat pelaksanaan Pemilu 1992. Dari analisis tersebut, prospek politik di masa depan mulai harus dipikirkan lebih serius, agar lembaga pemerintahan dan lembaga politik bersikap lebih demokratis.

Tulisan berikut ini dimaksudkan untuk melengkapi analisis tersebut, terutama dalam aspek hubungan negara dan masyarakat, kultur politik dan prospek politik di masa depan, sebagaimana telah diuraikan secara runtut dan jelas oleh Amir Santoso dalam makalahnya.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 47 tahun yang silam dengan bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat, sesungguhnya telah melahirkan kesenjangan pemikiran dan perilaku politik dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui, pada saat proklamasi dikumandangkan, masyarakat Indonesia masih hidup dalam suasana legitimasi religius-tradisional, yang ditandai dengan masih lekatnya nilai-nilai tradisional dalam pemikiran dan perilaku politik masyarakat.

Oleh karena itu, pada saat diberlakukannya UUD Sementara 1950 sampai dengan pelaksanaan Pemilu 1955 terlihat bahwa terjadi ketimpangan dan ketegangan yang sangat besar di antara kekuatan-kekuatan sosial politik, yang tampak pada beragamnya ideologi yang berkembang saat itu dalam masyarakat. Ketegangan ideologis yang mencapai titik kulminasinya pada macetnya Sidang-sidang Konstituante, menunjukkan bahwa kesenjangan pemikiran, orientasi dan perilaku politik masyarakat, sesungguhnya karena belum siapnya masyarakat untuk hidup dalam alam modern yang berkedaulatan rakyat. Untuk itu, masa-masa sepanjang diberlakukannya UUDS 1950 sampai dengan terselenggaranya Pemilu yang pertama tahun 1955 adalah masa-masa uji coba bagi aktualisasi sebuah negara merdeka yang berbentuk republik dengan sistem politik yang berkedaulatan rakyat.

Pengalaman historis yang menimpa pemerintahan UUDS 1950 dan Orde Lama menjadi inspirasi bagi Orde Baru untuk melakukan pembenahan terhadap kebijakan politik yang lalu. Orde Baru tampil dengan kerangka pemikiran yang terstruktur dan terencana untuk menyiapkan masyarakat Indonesia yang mampu hidup dalam alam modern dengan nilai-nilai modernitas untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin dinamik dan berkembang.

Dalam konteks ini, Orde Baru sesuai dengan komitmennya menyadari, bahwa pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 adalah suatu proses. Kemudian agar proses itu berjalan sesuai dengan modernisasi yang dicita-citakan diperlukan rekayasa. Agar rekayasa tersebut dapat berlangsung dengan efektif, maka pemerintah harus kuat. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintah yang didukung oleh Angkatan Bersenjata yang kokoh dan loyal terhadap pemerintah; administrasi pemerintahan yang tertata baik;

kekuatan ekonomi yang tangguh serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya-upaya tersebut dalam pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama (PJPT I) di bawah panji Orde Baru, telah menunjukkan hasilnya dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan Orde Baru, terutama dalam membangun pemerintah yang kuat dan efektif, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemantapan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, merupakan landasan yang kokoh bagi pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua.

Dalam hal pembangunan demokrasi, agar kehidupan politik dapat mendukung modernisasi bangsa, tampaknya pemerintah memandang bahwa tahapan demokrasi yang sesuai adalah tahap *inisial.* Dalam tahap ini, pemerintah merupakan pengambil inisiatif tunggal dalam memodernisasikan bangsa. Oleh karena itu, pertumbuhan demokrasi berlangsung dari dan oleh pemerintah untuk rakyat. Pada PJPT II, pertumbuhan demokrasi harus mampu mencapai dua tahap sekaligus secara simultan, yaitu tahap *partisipatif* dan *tahap emansipatif.* Pada tahap partisipatif, peran pemerintah bergeser dari pengambil inisiatif tunggal menjadi bersama rakyat. Oleh karena itu, pertumbuhan demokrasi berlangsung dari dan oleh pemerintah bersama rakyat untuk rakyat dan masyarakat. Sementara pada tahap emansipatif, peran rakyat sentral dalam perkembangan demokrasi. Untuk itu, dilakukan sepenuhnya dari, oleh dan untuk rakyat dengan dukungan pemerintah.

Kecenderungan pemikiran dan perilaku politik dewasa ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran budaya politik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dengan

mencairnya pola-pola hubungan atas dasar *patron-client* dan munculnya *rank culture* dalam pelaksanaan Pemilu 1992 yang lalu. Hasil Pemilu 1992 merupakan refleksi dari perubahan situasi dan kondisi masyarakat yang cenderung semakin kritis dan rasional dalam menentukan pilihan politiknya.

Perubahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari adanya perkembangan global dalam bidang informasi dan komunikasi yang membawa implikasi pada besarnya tuntutan terhadap keterbukaan dan demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan masyarakat akan pentingnya informasi yang jujur dan obyektif dari proses pembangunan yang berlangsung selama ini, juga merupakan dampak dari arus perkembangan global tersebut.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam transformasi sosial telah mendorong tumbuhnya daya kritis masyarakat dan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Kesadaran politik tersebut tumbuh seiring dengan tingkat pertumbuhan demokrasi dalam kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kesadaran politik yang tinggi akan mendorong pertumbuhan demokrasi semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya.

Fenomena di atas semakin memberikan keyakinan bahwa budaya politik merupakan persoalan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang harus diantisipasi sesuai dengan tantangan masa depan. Oleh karena itu, tumbuhnya budaya politik baru yang demokratis merupakan jawaban yang tepat dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga politik dalam perspektif sistem politik demokrasi Pancasila.

Budaya politik baru yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan adalah budaya politik yang emansipatif, partisipatif

dan terbuka. Budaya politik yang emansipatif diperlukan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang dialogis dan egaliter serta bebas dari penindasan yang diskriminatif dalam segala bentuk. Dengan demikian, penegakan hak dan kewajiban warga negara dilakukan atas dasar kesamaan, persamaan dan kebersamaan.

Budaya politik yang partisipatif dikembangkan agar seluruh potensi masyarakat dapat diaktualisasikan dan didayagunakan secara efektif bagi kepentingan bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekayaan sumber daya manusia yang potensial akan dapat diefektifkan untuk mendorong akselerasi pembangunan. Kecuali itu, diversifikasi peran dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat akan terwujud, sesuai dengan posisi dan bidang pengabdian masing-masing.

Budaya politik yang terbuka merupakan tuntutan yang tak terelakkan lagi dalam konstalasi politik di masa depan. Arus keterbukaan semakin deras dan nyaris tidak dapat dibendung dalam segala aspek kehidupan, baik ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. Pancasila sebagai ideologi nasional harus mampu tampil sebagai ideologi terbuka yang luwes dan elastis. Namun keterbukaan Pancasila harus dipandang sebagai wujud aktualisasi dari dinamika dan interaksi budaya antar bangsa yang semakin intens dalam era globalisasi kini dan mendatang. Nilai-nilai lama yang baik tetap dipelihara dan nilai-nilai baru yang lebih baik dikembangkan untuk memperkaya khazanah pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam budaya politik yang demikian itulah, daya kritis dan kreativitas masyarakat akan tumbuh dan berkembang serta dapat tersalurkan secara konstitusional dalam lembaga-lembaga politik formal yang telah tertata selama ini.

Bertolak dari analisis di atas, saya optimis prospek politik di masa depan akan cerah. Namun, bersamaan dengan itu, perlu dipikirkan tentang realisasi pelaksanaan demokrasi Pancasila, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Saat ini tampaknya laju pembangunan ekonomi Indonesia begitu pesat dan jauh meninggalkan bidang-bidang pembangunan lainnya, termasuk bidang politik. Pembangunan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik, akibat kebijakan ekonomi pasar dan efisiensi, menyebabkan keberadaan demokrasi Pancasila berada di persimpangan jalan, antara liberalisme yang terefleksi dalam orientasi ekonomi dengan orientasi politik yang Pancasila.

Kecuali itu, masalah aktual yang memerlukan perhatian bersama adalah bagaimana meletakkan asas kebersamaan dan kekeluargaan sebagai substansi dari demokrasi Pancasila, yang dapat berjalan paralel, selaras dan serasi dengan pengawasan masyarakat *(social control)*. Sudah saatnya dirumuskan alternatif pengawasan masyarakat yang tidak mengganggu, bahkan mampu mendukung kebersamaan dalam proses pembangunan dan proses penyelenggaraan kekuasaan negara.

Oleh karena itu, fungsi dan peran orsospol perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan secara kreatif, agar mampu menjawab berbagai tuntutan dan tantangan bangsa yang semakin kompleks dan kualitatif. Fungsionalisasi orsospol, baik secara internal maupun eksternal mutlak dilakukan untuk mewujudkan kemandirian, agar orsospol mampu meningkatkan *angka tawar* dan mengembangkan partisipasi politik secara utuh serta menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

8. Tinjauan Pelaksanaan Pemilihan Umum 1992 dan Prospeknya

HARI SOEGIMAN

PENDAHULUAN

BAGI negara demokrasi, Pemilihan Umum adalah sarana yang amat penting bahkan dianggap sebagai suatu keharusan untuk mewujudkan cita-cita demokrasi itu. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka bangsa Indonesia secara konsisten menyelenggarakan Pemilihan Umum dan secara bertahap terus berusaha meningkatkan kualitasnya.

Pemilihan Umum Kelima atau terakhir dalam Era Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah berakhir. Secara nasional, Golongan Karya masih tetap mendapat kepercayaan rakyat dengan memenangkan Pemilihan Umum tersebut. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia tetap bertahan pada posisi kedua dan ketiga. Meskipun demikian, berdasarkan perhitungan secara resmi, di beberapa daerah pemilihan telah terjadi pergeseran perolehan suara OPP. Pergeseran itu disebabkan oleh banyak faktor, dan bukan karena direkayasa sebagaimana dilontarkan oleh sementara kalangan. Tetapi pergeseran itu justru dapat diartikan sebagai dinamika

politik yang tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya mobilitas masyarakat peserta pemilihan umum.

Salah satu masalah yang cukup mendapat sorotan dan perhatian, baik dari pemerintah, kalangan OPP maupun dari pengamat-pengamat politik, adalah pelaksanaan Pemilihan Umum itu sendiri. Pemerintah sebagai pihak penyelenggara sangat berkepentingan untuk menyimak pelaksanaan Pemilihan Umum itu, sebagai usaha untuk menilai pelaksanaan Pemilihan Umum, termasuk pengaruhnya terhadap kedewasaan politik masyarakat. Hasilnya selain merupakan bahan dokumentasi yang sangat berharga juga dapat dijadikan bahan masukan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum di masa-masa mendatang. OPP memandang tertib dan baiknya atau kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum itu, dalam arti diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sedikit mungkin terjadinya pelanggaran, tetap mempunyai arti yang penting, karena diperhitungkan akan menjadi salah satu faktor penentu perolehan suara. Sedangkan para pengamat politik lebih banyak memberikan perhatian kepada hubungan antara pelaksanaan Pemilihan Umum dan dinamika politik di dalam negeri, seberapa jauh hubungan dan pengaruh pelaksanaan Pemilihan Umum dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Mereka menilai bahwa kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum adalah cermin dari perkembangan dan perwujudan demokrasi itu. Oleh sebab itu telah pada tempatnya bila pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut ditinjau dan disimak, yang pada gilirannya nanti kelemahan dan kekurangan-kekurangannya dapat diperkecil, sehingga pelaksanaannya di masa mendatang menjadi semakin baik.

Ditinjau dari sejarah kebangsaan Indonesia, cita-cita menyelenggarakan Pemilihan Umum itu telah muncul sejak awal

kemerdekaan 1945. Tetapi keadaan politik di dalam negeri menyebabkan baru pada tahun 1955 untuk pertama kali Pemilihan Umum pertama dapat dilaksanakan. Juga karena perkembangan politik di dalam negeri, Pemilihan Umum berikutnya baru dapat dilaksanakan pada Era Orde Baru.

Ditinjau dari perkembangan demokrasi Pancasila, pelaksanaan Pemilihan Umum pada dasarnya merupakan sebuah proses. Sebagai suatu proses yang diharapkan dapat menopang perkembangan demokrasi, ia butuh iklim serta tatanan yang berisi prinsip-prinsip ataupun pedoman-pedoman sebagai acuan sekaligus yang memperlancar jalannya proses tersebut.

Namun demikian, tersedianya dasar-dasar kebijakan, prinsip-prinsip atau baiknya pedoman-pedoman itu tidak berarti bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum itu tidak tanpa permasalahan. Sesuai dengan dinamika dan perkembangan kesadaran atau kedewasaan politik masyarakat terbuka kemungkinan munculnya permasalahan, baik yang bersifat konsepsional maupun yang hanya teknis operasional.

Munculnya permasalahan itu menimbulkan pertanyaan bagaimana prospek Pemilihan Umum di masa mendatang. Masih relevankah Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 15/1969) yang sampai saat ini masih diberlakukan? Haruskah diperbaiki, bagian mana yang harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya?

Bertitik tolak atas pemikiran di atas, maka uraian mengenai Tinjauan Pelaksanaan Pemilihan Umum 1992 dan Prospeknya dibagi dengan urutan sebagai berikut: (1) Sejarah dan Dasar-dasar Kebijakan; (2) Pelaksanaan Pemilihan Umum Sebagai Proses; (3) Jadwal Waktu dan Perkembangan Politik: (a) Pelaksana-

an Program, (b) Mengakomodasi Perkembangan Politik; (4) Permasalahan Yang Timbul: (a) Teknis Pelaksanaan, (b) Konsepsi (Peraturan Perundang-undangan); (5) Prospek Pemilihan Umum di Masa Mendatang; (6) Penutup.

SEJARAH DAN DASAR-DASAR KEBIJAKAN

Sejarah Singkat Pemilihan Umum di Indonesia

Meskipun Pancasila dan UUD 1945 tidak secara implisit mengamanatkan adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum, tetapi secara eksplisit justru mengharuskan diselenggarakan Pemilihan Umum. Bahkan ditinjau dari sudut sejarah kebangsaan Indonesia, Pemilihan Umum itu bukan merupakan peristiwa politik yang baru. Cita-cita, niat atau gagasan untuk menyelenggarakan pemilihan itu telah muncul sejak tahun 1945. Hal ini nampak jelas dalam Pengumuman Pemerintah tertanggal 5 Oktober 1945, yang menegaskan antara lain, "*memenuhi UUD yang mengenai aturan-aturan tentang kedaulatan rakyat, pada waktu itu Pemerintah Republik Indonesia sedang mengadakan persiapan untuk melakukan Pemilihan Umum*".

Cita-cita untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum sebagai bagian mekanisme sosio-politik untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu merupakan reaksi terhadap masa penjajahan. Dalam arti bahwa dengan proklamasi kemerdekaan, maka kedaulatan negara RI berada di tangan rakyat bukan di tangan penjajah. Rakyatlah yang menentukan arah perjuangannya sendiri, suatu cita-cita yang telah dimanifestasikan dalam sila keempat dari Pancasila. Disamping itu, isu Pe-

milihan Umum juga digunakan sebagai suatu kampanye untuk konsumsi luar negeri dalam rangka memperjuangkan agar negara Republik Indonesia diakui dan dihormati oleh dunia internasional. Di dalam negeri sendiri, isu itu digunakan sebagai salah satu cara untuk menggalang kekuatan rakyat guna mempertahankan kemerdekaan negara RI yang baru saja diproklamasikan.

Selanjutnya dengan Maklumat Pemerintah tertanggal 3 November 1945 ditegaskan bahwa pada awal tahun 1946 akan diselenggarakan Pemilihan Umum, dan sebelum pemilihan itu diselenggarakan disetujui untuk dibentuk partai-partai politik. Tetapi karena perkembangan keadaan negara, antara lain masih berkecamuknya Perang Kemerdekaan, konsolidasi internal dan perselisihan di dalam negeri, Pemilihan Umum belum dapat diselenggarakan pada bulan Januari 1946. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa niat menyelenggarakan Pemilihan Umum berakhir pula.

Sebagai konsekuensi dari cita-cita, tekad, melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila, khususnya sila keempat, gagasan dan upaya untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum terus dilakukan meskipun terjadi perubahan konstitusi. Bahkan Kabinet Halim (21 Januari - 6 September 1950), Kabinet RIS (20 Desember 1949 - 6 September 1950), Kabinet Natsir (6 September 1950 - 27 April 1951), Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952), Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 Juli 1953), Kabinet Ali Wongso (30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955) dan sudah tentu Kabinet Burhanuddin Harahap sendiri (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956), mencantumkan Pemilihan Umum sebagai salah satu programnya. Pada tahun 1953, Kabinet Wilopo berhasil menyusun Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU No.7/ 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat). Tetapi Kabinet ini bubar sebelum

sempat menyelenggarakan Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang yang telah berhasil dibentuknya itu, dan harus menyerahkan tugas ini kepada kabinet penggantinya.

Dua tahun kemudian, pada tahun 1955 Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Pemilihan pada waktu itu diikuti oleh sedikitnya 172 tandagambar,[1] karena selain partai politik, organisasi kemasyarakatan (non-partai politik) dan perseorangan diperbolehkan ikut. Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, NU dan Partai Komunis Indonesia (PKI) muncul sebagai empat besar perolehan suara dalam pemilihan tersebut. Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang semula diperkirakan bakal memperoleh banyak suara (kursi), karena dianggap sebagai tempat kumpulnya para cerdik cendekia ternyata hanya sedikit mendapat suara.

---

[1] Alfian, *Hasil Pemilihan Umum 1955 (Untuk Dewan Perwakilan Rakyat)*, Jakarta: LEKNAS, 1971, menyebutkan bahwa Pemilihan Umum 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakyat diikuti oleh 172 tandagambar. Data ini pun dikatakannya agak kecil karena 12 tanda gambar untuk daerah pemilihan Kalimantan Selatan terlalu sedikit. Diketahui bahwa jumlah tandagambar terendah untuk Pemilihan Umum pada waktu itu ada di Maluku dan Nusa Tenggara Barat yakni 18 buah. Tanda-tanda gambar itu ialah: PNI, GPP, Prabu Kresno, Masyumi, NU, PKI, Parkindo, PSII, PSI, Partai Katholik, H. Soejono, Oh Lay Him, Mr. P.W. Blogg, Notosoedirdjo, IPKI, PRN, Perti, PIR (W), B.W. Lapian, PIR (H), Permai, PPPRI, Murba, Baperki, Partai Buruh, Acoma, PRI, Partai Republik, Partai Wanita Rakyat, Parindra, Kumpulan Pemilih Bulan Bintang, Gerakan Banteng RI, Gerakan Rakyat Indonesia, Parki, Gerpis, Dra. Thung Sin Ho, Partai Patriot Indonesia, RK.I. Kel. Ps. Baru (Gunung Sahari), PPB, PRIM, M. Husein dkk, Persatuan Rakyat Desa, Pensiunan, PBPNI, Angkatan Baru Indonesia, PTI, R. Odo Suramihardja, Komite Pemilih Rakyat Seluruh Indonesia, Aman Abdurachman Kartadiputra, Central Komite Pemuda Negara, Sarbupri, Radja Kaprabonan, Himpunan Kemanusiaan, Ny. Kartowijono, Front Rakyat Tidak Berpartai, Tani Makmur, Sumantri dkk, M. Soerowijoto, Djokotirtono, Suradjiman, Notokusumo, Margodiharjo, Wirohardjo, Pak Darso,

Pemilihan Umum 1955 itu juga menghasilkan Konstituante yang kemudian mengadakan sidang di Bandung, 1956-1959. Sidang ini bertugas antara lain menyusun UUD yang tetap untuk menggantikan UUDS 1950. Tetapi karena perbedaan ideologi di antara partai-partai politik begitu tajam, tugas ini gagal dilaksanakan. Kegagalan sidang ini, memaksa Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali ke UUD 1945. Sejak itu, Indonesia berada dalam Era Demokrasi Terpimpin. Cita-cita atau gagasan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk sementara waktu ditunda. Pentas politik Indonesia memasuki era baru, dengan ciri "jor-joran Manipol USDEK", "Nasakom Jiwaku" dan proyek Mercu Suar. Di balik ini semua justru terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, yang akhirnya bermuara pada pemberontakan G.30.S/PKI.

Tjokroatmodjo, Siswoatmodjo al Pak Sis, Sarsadi Arjokudojo, Mayor Muhono, R. Soeroto, M. Prawirosoebroto, Hadiprebowo, R. Maktal Dipodirdjo, Front Bebas, Gerindra, Sudjono Prawirosudarso, Barisan Kesadaran Rakyat, Pak Said Hidayat, P.M. Kusadi, Kwe Mo Liang, Akui, R. Sudjono, PIN, K.H. Kusnun dkk, R. Moh. Al Mangundipodjo, Sastrosoepardjo, Wadijo, Soekardi Kardi, K.H. Daud Rasjidi, PKT, Sawi Hanafiah, PPTI, Ali Gart=myr, PARI, Halimah Ishak, Mr. Makmur Sulaiman, T.Z. St. Radja Lelo, Ishak Effendi, Dr. A. Rivai, Mauman Djamil D.c. M. Amel, Wirjodihardjo, Kamil, Mohammad, Sudarsono, Adat Lembaga Djambi, Permsji, Suran Injik Djambek, L.M. Isa, Abd. Moeloek, PPII, Ikrupins, MTKAAM, Mr. Moh. Yamin, Mr. Nasrun, R. Atmosaputro, Mr. Noer Achmad, Moh. Sajang, Sjamsu Tahrun, Rambah Husin, T. Tomo, Jusuf Nasri, Partai Alam Indonesia, Kario Siregar, Gulmat Siregar, St. Oloan Hutagalung, H. Simorangkir, Zendrato Taharo Taungi, Kumpulan Rakyat Djelata, Gereja Pantekosta, Akrap Sumatera Timur, SKI, Pambi, Saruhun, Zaga Taododo Amatro, HKI, T. Sjahrul Amani, Kebangunan Rakyat Simelungun Sumatera Timur, Margalen Purba, Daulay Baginda Kali Djundjungan Amir Husain, Gajus Marpaung, Persatuan Masyarakat Atjeh, Biro Pantjasila, Front Rakjat, A. Ch. J. Amolo, Front Nasional, R. St. Lawur, Mutung, A. Tjatjo, R. Soewarman Sg, Persatuan Daya, Hadariyah M., KPI, Biro PPRI, PKR, Rengku Sumendap, Gerakan Angkatan Muda, D.E. Mogot, Buruh Tani, La Ode Hadi, H.A. Ambo Dallo, H. Darwis Zakaria, Andi Mangga, Komite Pemilih Lansirang, PKKSS, Perkis, Peri Kemanusiaan, La Ode Ida Effendy, BPB, Kaligis W.G.J., P.M. Daeng Djarung, PPDMT, dan Nusa Ina.

Orde Baru lahir sebagai reaksi atas keadaan politik seperti itu, serta bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Era Demokrasi Terpimpin ditinggalkan, dan Era Demokrasi Pancasila menandai babakan baru sejarah demokrasi di Indonesia. Cita-cita, niat dan gagasan untuk melaksanakan Pemilihan Umum hidup kembali. Hal ini nampak dengan jelas dalam Ketetapan MPRS RI No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum. Ketetapan ini menegaskan, "*Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia diselenggarakan dengan pemungutan suara selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968*".[2] Akan tetapi perkembangan keadaan negara pada waktu itu belum memungkinkan ketetapan ini dilaksanakan. Ketetapan MPRS RI No. XLII/MPRS/1968 tentang Perubahan Ketetapan MPRS RI No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa "*Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia diselenggarakan dengan pemungutan suara selambat-lambatnya pada 5 Juli 1971*".[3] Sebagai konsekuensinya, disusunlah Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (yang pada waktu itu

---

[2]Konsideran Ketetapan ini menegaskan antara lain: (a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat seperti tercantum dalam azas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) Bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu diperlukan lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dibentuk dengan Pemilihan Umum; (c) Bahwa akibat dari belum terbentuknya lembaga-lembaga tersebut dengan Pemilihan Umum, kehidupan demokrasi Indonesia belum berjalan secara wajar; (d) Bahwa dalam rangka kembali pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, perlu segera dibentuk lembaga-lembaga dengan Pemilihan Umum.

[3]Konsideran Ketetapan MPRS RI No. XLII/MPR/1968 antara lain menegaskan: (a) Bahwa usaha untuk menyusun Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang lainnya untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum belum dapat dilaksanakan; (b) Bahwa oleh karenanya belum dapat diselenggarakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketentuan pasal 1 Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966.

menjadi satu paket dengan Rancangan Undang-Undang Kepartaian dan Keormasan). Pada tahun 1969 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum terbentuk (UU No. 15/1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat). Tetapi tajamnya perbedaan dalam pembahasan rancangan itu, Undang-Undang tentang Kepartaian dan Keormasan belum berhasil disepakati. Undang-Undang No. 15/1969 ini menjadi acuan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1971.

Pemilihan Umum 1971 hanya diikuti oleh 9 partai politik (PNI, NU, Parmusi, PSII, Perti, Partai Katolik, Parkindo, Murba, IPKI) dan satu Golongan Karya, atau biasa disebut dengan 10 kontestan, berbeda dengan Pemilihan Umum 1955 yang diikuti oleh 172 tandagambar.[4] Golongan Karya secara nasional memenangkan Pemilihan Umum ini. Bahkan dia memperoleh lebih dari separoh jumlah suara yang sah. Golongan Karya berhasil memenangkan Pemilihan Umum sebagai *single mayority*.

Untuk selanjutnya, Pemilihan Umum menjadi semacam kalender nasional, yang secara konsisten diadakan setiap lima tahun sekali, sesuai dengan Ketetapan MPR, yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur melalui Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan Umum dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Pemilihan Umum 1977 didasarkan pada Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan No. VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum serta UU No. 4/1975 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15/1969. Pemilihan Umum

---

[4]Ketetapan MPR RI No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan, mengisyaratkan perlunya penyederhanaan kepartaian. Lengkapnya ketetapan ini berbunyi, "Pemerintah bersama-sama DPR-GR segera membuat Undang-undang yang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada peyederhanaan".

tahun 1982 didasarkan pada Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan No. VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum serta UU No. 2/1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15/1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 4/1975. Pemilihan Umum tahun 1987 didasarkan pada Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan No. III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum serta UU No. 1/1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15/1969, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Dengan Undang-Undang No. 4/1975 Dan Undang-Undang No. 2/1980. Sedangkan Pemilihan Umum tahun 1992 didasarkan pada Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan No.III/MPR 1988 tentang Pemilihan Umum serta UU No. 1/1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15/1969 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Dengan Undang-Undang No. 4/1975 Dan Undang-Undang No. 2/1980.

Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987 dan 1992 berbeda dengan Pemilihan Umum 1955, misalnya dalam sistemnya, daerah pemilihannya, ataupun jumlah kontestannya. Tetapi pemilihan-pemilihan itu mempunyai kesamaan yakni sebagai pengejawantahan mekanisme kedaulatan rakyat.

Dasar-dasar Kebijakan dan Prinsip-prinsip Pemilihan Umum 1992

Sebagaimana disinggung di atas, Pemilihan Umum 1992 itu diselenggarakan berdasarkan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan No. III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum, yang kemudian dijabarkan

lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, baik yang berbentuk Undang-Undang,[5] Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri. Di dalam dasar-dasar hukum itu tercantum ketentuan-ketentuan maupun tujuan Pemilihan Umum itu.

Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara menegaskan,

> "Pemilihan Umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam demokrasi Pancasila dilaksanakan setiap lima tahun dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia yang diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris MPR dengan memberikan peranan secara lebih efektif kepada organisasi kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum yang terdiri dari Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat pusat sampai daerah."

Sedangkan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum, menegaskan antara lain:

> (1) Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia; (2) Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia; (3) Pemungutan suara ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.[6] (4) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris MPR dengan memberikan peranan secara lebih efektif kepada ketiga organisasi kekuatan sosial politik dalam kegiatan pelak-

---

[5]Untuk Pemilihan Umum 1992 disepakati untuk tidak membuat Undang-Undang yang baru, cukup mempergunakan Undang-Undang No. 1/1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15/1969, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Dengan Undang-Undang No. 4/1975 Dan Undang-Undang No. 2/1980.

[6]Lihat Pasal 1 Ketetapan MPR RI No. III/MPR/1988.

sanaan dan pengawasan dari tingkat pusat sampai daerah yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang.[7]

Dibandingkan dengan ketetapan-ketetapan MPRS/MPR sebelumnya, ketetapan MPR 1988 ini mengalami perubahan, baik rumusannya maupun peranan organisasi kekuatan sosial politik dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.[8]

Berdasarkan dua ketetapan MPR RI 1988 itu dibentuk perangkat-perangkat yang diperlukan, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Perangkat lunak berupa peraturan perundang-undangan yang diperlukan, baik sebagai dasar kegiatan lebih lanjut maupun penuntun pelaksanaan Pemilihan Umum itu sendiri. Sedangkan perangkat keras berupa rekruitmen aparat penyelenggara Pemilihan Umum, termasuk aparat pengawasan dan para saksi, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Persiapannya telah dilakukan sejak tahun 1989.

Bertitik tolak pada Ketetapan MPR RI No. III/MPR/1988, tentang Pemilihan Umum itu, khususnya Pasal 8, yang menegaskan, "*Pelaksanaan Pemilihan Umum diatur lebih*

---

[7]Lihat Pasal 3 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/1988.

[8]Ketetapan MPRS RI No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum menegaskan, "Menugaskan kepada Pemerintah untuk melaksanakan ketetapan ini". Ketetapan MPRS RI No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara menegaskan, "Pemilihan Umum sebagai saran Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia yang diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris dimana organisasi sosial politik peserta Pemilu ikut serta secara efektif dalam pelaksanaan Pemilu". Sedangkan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 6, menegaskan, "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris dengan peningkatan peranan Partai Politik dan Golongan Karya dalam pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat Pusat sampai Daerah yang diatur dengan Undang-undang Pemilihan Umum".

lanjut dengan Undang-Undang", maka logikanya untuk Pemilihan Umum 1992 perlu disusun Undang-Undang Pemilihan Umum yang baru, tetapi kenyataannya tidak dilakukan. Undang-Undang Pemilihan Umum No. 1 Tahun 1985 (Undang-Undang No. 1/1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15/1969, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Dengan Undang-Undang No. 4/1975 Dan Undang-Undang No. 2/1980) disepakati menjadi dasar dan acuan Pemilihan Umum 1992. Pada awalnya masalah ini menimbulkan perbedaan pendapat mengenai perlu tidaknya disusun Undang-Undang yang baru atau cukup mempergunakan Undang-Undang yang telah tersedia, yakni Undang-Undang No. 15/1969 yang telah diperbarui itu.. Musyawarah antara pemerintah dengan pimpinan ketiga OPP dan ABRI sepakat bahwa untuk Pemilihan Umum 1992 cukup memakai Undang-Undang Pemilihan Umum yang telah tersedia itu, yakni Undang-Undang No. 1/1985 tersebut.

Atas dasar kesepakatan pimpinan ketiga OPP dan ABRI itu pula, maka pada tanggal 7 Agustus 1990 pemerintah mengundangkan "Peraturan Pemerintah No. 37/1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35/1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15/1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah". Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini maka Undang-Undang tentang Pemilihan Umum itu memiliki ketentuan peraturan pelaksanaan yang telah diubah untuk kedua kalinya yang akan dipergunakan sebagai piranti hukum untuk melaksanakan Pemilihan Umum 1992. Pada dasarnya Peraturan Pemerintah No. 37/1990 itu merupakan penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah No. 35/1985 jo Peraturan Pemerintah No. 43/1985 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum, dengan demikian prinsip-prinsip dasar

yang mendukung lancarnya pelaksanaan Pemilihan Umum dan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan peran kekuatan-kekuatan sosial politik dapat diteruskan.

Dengan kata lain, dasar kebijaksanaan untuk mengundangkan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk merealisasikan kemauan politik dalam rangka semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988 dan No. III/MPR/1988. Karena Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang telah dimiliki tidak diubah, ini berarti Pemilihan Umum 1992 diselenggarakan berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang No. 15/1969 yang telah diubah tiga kali yang terakhir dengan Undang-Undang No. 1/1985, dan Peraturan Pemerintah No. 35/1985 yang telah diubah dan disempurnakan dua kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 37/1990. Dengan demikian Pemilihan Umum 1992 diselenggarakan tetap berdasarkan pada Pancasila sebagai satu-satunya asas yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (*luber*) dengan menggunakan sistem perwakilan berimbang dan stelsel daftar.

Ketetapan MPR serta Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mendukungnya itu secara jelas memuat hakikat, asas dan tujuan Pemilihan Umum, yang secara rinci menegaskan sebagai berikut:

a. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perlu disusun Undang-Undang Pemilihan Umum bagi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sesuai dengan cita-cita dan asas-asas demokrasi Pancasila;[9]

b. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia;

c. Pemilihan Umum bukan hanya sekedar bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, melainkan merupakan suatu sarana untuk mencapai kemenangan Orde Baru dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;[10]

d. Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II, serta untuk mengisi keanggotaan MPR;

e. Untuk pemilihan anggota DPR, daerah pemilihan adalah Daerah Tingkat I. Untuk pemilihan anggota DPRD I, Daerah Tingkat I merupakan satu daerah pemilihan, dan untuk pemilihan anggota DPRD II, Daerah Tingkat II merupakan satu daerah pemilihan;

f. Dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam Pancasila/Undang-Undang Dasar 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan Pemilihan Umum. Dengan demikian, diadakannya Pemilihan Umum itu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan dasar falsafah negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan, dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban Amanat Penderitaan Rakyat. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang

---

[9]Lihat: bagian Menimbang, huruf a dari UU No. 15/1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

[10]Lihat: bagian Menimbang, huruf b dari UU No. 15/1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945;[11]

g. Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia;

h. Pemilihan Umum diikuti oleh tiga organisasi kekuatan sosial politik, yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan, yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama;[12]

i. Pemilihan Umum dilaksanakan oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden;

j. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih; sebaliknya Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia juga tidak menggunakan hak dipilihnya; Oleh sebab itu, keanggotaan ABRI dalam MPR maupun DPR/DPRD berdasarkan pengangkatan;

k. Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dipakai sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Dengan demikian maka besarnya/kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD adalah sejauh mungkin berimbang dengan besarnya dukungan dalam masyarakat pemilih. Untuk mencapai tujuan ini suatu organisasi yang nama-nama calonnya disusun dalam sesuatu daftar calon mendapat jumlah kursi berdasarkan suatu bilangan Pembagi Pemilihan, ialah suatu bilangan yang diperoleh dengan membagi jumlah seluruh suara yang masuk dengan jumlah kursi yang tersedia. Begitu pula sistem Pemilihan Umum itu menggambarkan adanya pengakuan terhadap stelsel organisasi yang ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan. Tiap-tiap Daerah Tingkat II mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil, yang dite-

---

[11]Lihat: Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Bagian Umum, 2.

[12]Pemilihan Umum 1971 diikuti oleh sembilan partai politik dan satu Golongan Karya, lengkapnya sebagai berikut: (1) Partai Katolik; (2) Partai Nasional Indonesia; (3) NU; (4) Partai Kristen Indonesia; (5) PSII; (6) PERTI; (7) Parmusi; (8) Partai Murba; (9) IPKI; dan (10) Golongan Karya

tapkan berdasarkan sistem perwakilan berimbang yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah;[13]

l. Dalam mengajukan calon untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD organisasi yang bersangkutan mengajukan nama dan tanda gambar organisasi;

m. Hari pemungutan suara bukan merupakan hari libur atau hari yang diliburkan.

Pokok-pokok pikiran inilah yang menjadi dasar atau prinsip-prinsip pokok dilangsungkannya Pemilihan Umum di Indonesia, yang tidak hanya untuk Pemilihan Umum tahun 1992 tetapi juga untuk Pemilihan Umum 1971, 1977, 1982 dan 1988. Prinsip-prinsip inilah yang merupakan faktor yang sangat penting sehingga Pemilihan Umum di Indonesia dapat dilaksanakan secara aman dan tertib, yang relatif jauh lebih tenang dari Pemilihan Umum yang dilaksanakan di beberapa negara berkembang lainnya, seperti misalnya di India, Pakistan atau Filipina. Prinsip-prinsip inilah yang mampu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan perorangan ataupun golongan. Prinsip-prinsip ini pula yang telah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa harus menghilangkan dinamika dan kreativitas politik masyarakat. Meskipun demikian, harus diakui besarnya peranan pemerintah, sebagai bapak panutan, dan peranan ABRI yang melaksanakan fungsi hankamnya yang didasari oleh falsafah dwifungsinya itu juga merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan, yang mampu menciptakan iklim bagi terlaksananya Pemilihan Umum dengan aman dan tertib.

---

[13]Lihat: Penjelasan UU No. 15/1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Dalam penyusunan Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum itu, pemerintah mempunyai peranan yang besar. Sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, peranan pemerintah dalam pembinaan politik tidak dapat diabaikan, bahkan dapat dikatakan dominan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah tercapainya kesepakatan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum pada awal-awal Orde Baru. Pada waktu itu terdapat perbedaan di antara kekuatan sosial politik dan pimpinan Orde Baru. Beberapa kekuatan sosial politik mengusulkan agar Pemilihan Umum ditunda dahulu, menunggu matangnya kesadaran politik masyarakat. Tetapi usul ini ditolak oleh pimpinan Orde Baru, dengan menegaskan bahwa Pemilihan Umum harus dilaksanakan, bila menunggu kedewasaan politik masyarakat kapan Pemilihan Umum akan dilaksanakan? Sementara itu kekuatan politik dan massa Orde Lama juga masih kuat, sehingga perlu dicarikan upaya konstitusional demi tegaknya Orde Baru. Pemikiran seperti ini disetujui oleh kekuatan-kekuatan sosial politik pendukung Orde Baru, sehingga lahirlah Konsensus Nasional pada awal Orde Baru itu. Dengan dasar Konsensus Nasional inilah disusun Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum di Indonesia, yang disetujui pada tahun 1969, yang kemudian diadakan perubahan-perubahan seperlunya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sampai dengan Pemilihan Umum 1992.

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SEBAGAI SUATU PROSES

Dipandang dari sudut muara kehidupan politik di Indonesia, pemilihan umum itu bukan merupakan tujuan ataupun muara terakhir dari kehidupan politik, tetapi lebih pada suatu jalan atau proses politik untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang

terkandung dalam demokrasi Pancasila. Sebagai suatu proses, maka ia akan selalu berkembang dan mungkin sekali berubah wujudnya sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara serta kedewasaan politik masyarakat, meskipun tanpa harus menyimpang dari tujuan pemilihan umum itu diadakan. Untuk mendalami jalannya proses itu, sekurang-kurangnya ada dua masalah yang perlu mendapatkan perhatian, yakni teknis operasional (pelaksanaan) pemilihan umum dan proses kehidupan politik itu sendiri.

Secara teknis, pelaksanaan Pemilihan Umum diartikan tidak hanya terbatas pada kegiatan pemungutan suara (pelaksanaan pencoblosan), tetapi mencakup seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sejak persiapan (awal) sampai dengan akhir kegiatan Pemilihan Umum tersebut, yakni pengambilan sumpah/janji para anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Jadi pelaksanaan itu merupakan suatu proses yang panjang. Berdasarkan program kerja yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 15/1988, kegiatan persiapan Pemilihan Umum yang kelima dalam masa Orde Baru ini ternyata telah dimulai sejak tahun 1988 dan berakhir pada tanggal 1 Oktober 1992. Bahkan bila pembuatan musium Pemilihan Umum, penyelesaian penyusunan buku dokumentasi Pemilihan Umum 1992 serta penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbekalan, angkutan, perhubungan, administrasi, personil dan hal-hal materiil lainnya, digolongkan ke dalam kegiatan Pemilihan Umum, maka pelaksanaan Pemilihan Umum itu baru benar-benar berakhir pada bulan Juni 1993.

Dengan meniadakan kegiatan yang terakhir itu, maka pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1992 itu meliputi kegiatan-kegiatan: (1) persiapan Pemilihan Umum, yang dipenuhi dengan kegiatan penyediaan perangkat-perangkat lunak dan perangkat-perangkat keras, serta kegiatan-kegiatan lain seperti: (a) pendaf-

taran pemilih/jumlah penduduk warga negara Republik Indonesia; (b) penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan; (c) pengajuan nama dan tanda gambar organisasi; (d) pengajuan nama calon (pencalonan); (e) penelitian calon; (f) penetapan calon/penyusunan daftar calon; (g) pengumuman daftar calon; (2) kampanye Pemilihan Umum; (3) pemungutan suara (pencoblosan); (4) kegiatan pengawasan; (5) penghitungan suara dan pengumuman hasil suara; (6) penetapan hasil Pemilihan Umum, yang meliputi: (a) pembagian kursi, jumlah kursi untuk setiap Organisasi Sosial Politik Peserta Pemilihan Umum (OPP) sesuai dengan hasil suara yang diperoleh dalam Pemilihan Umum; (b) penetapan terpilih; dan (c) penetapan/peresmian menjadi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat; (7) pengambilan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat.[14]

Daftar kegiatan ini, selain menunjukkan macam dan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan, juga menunjukkan urut-urutan atau tahap-tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum. Banyaknya kegiatan yang dilakukan itu, selain mencerminkan besarnya tanggung jawab, juga dapat dijadikan semacam cermin betapa banyaknya persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Belajar dari pengalaman pelaksanaan Pemilihan-pemilihan Umum sebelumnya, 1971, 1977, 1982 dan 1987, pemerintah menyadari besarnya kemungkinan munculnya perbedaan pendapat antara pemerintah dan OPP, di kalangan OPP sendiri ataupun dalam kelompok-kelompok di masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum 1992. Terdapat OPP dan kelompok-kelompok yang merasa puas dan senang atas pelaksanaan Pemilihan Umum selama ini, karena dirasakan benar-benar berjalan sebagaimana

[14]Lihat Peraturan Pemerintah No. 37/1990.

yang diharapkan. Begitu pula sebaliknya, terdapat OPP atau kelompok-kelompok tertentu yang merasa tidak puas dan tidak senang dengan pelaksanaan Pemilihan Umum selama ini, selain hasilnya tidak seperti yang diharapkan, pelaksanaannya pun dianggap masih kurang berkualitas. Tetapi munculnya perbedaan-perbedaan itu tidak berarti bahwa Pemilihan Umum harus ditunda apalagi dibatalkan menunggu semua OPP dan semua kelompok merasa puas.

Namun demikian pemerintah juga tidak gegabah mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum 1992, baik dalam persiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan maupun rekruitmen personalia yang dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Umum. Pemerintah tetap berusaha secara arif dan bijak menampung dan memanfaatkan saran-saran itu untuk memperbaiki pelaksanaan pemilihan tersebut. Pemerintah menyadari, setiap kebijakan pasti ada risikonya, oleh karena itu akan selalu diupayakan secara arif untuk mencari kebijakan dengan risiko sekecil mungkin. Untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan, Pemerintah cq. Departemen Dalam Negeri/Lembaga Pemilihan Umum secara optimal mengadakan dialog, komunikasi dan konsultasi dengan berbagai pihak serta menghimpun saran, pendapat ataupun sumbangan pemikiran dari ketiga organisasi kekuatan sosial politik, ABRI, Departemen-departemen teknis yang terkait, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan beberapa pakar hukum, yang kemudian diramu dengan pengalaman LPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum selama ini.

Saran, pendapat ataupun sumbangan pemikiran itu tidak sedikit yang sama substansi atau esensinya, arti atau tujuannya, namun sebaliknya tidak sedikit pula saling bertentangan. Atas dasar ini, penyusunan setiap kebijaksanaan diupayakan secara

maksimal untuk mengakomodasi pendapat atau pemikiran dari berbagai pihak itu dengan tetap menggunakan tolok ukur Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988, Ketetapan MPR RI No. III/MPR/1988, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Undang-Undang tentang Parpol dan Golkar, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan konsensus antara fraksi-fraksi Komisi II DPR-RI dengan pemerintah pada waktu membahas RUU Bidang Politik tahun 1985. Dengan tolok ukur itu disusunlah suatu kebijakan yang diharapkan dapat memberikan landasan dan pedoman terlaksananya Pemilihan Umum secara baik dan semakin berkualitas.

Dipandang dari sudut kehidupan politik, Pemilihan Umum dapat disebut sebagai salah satu sarana dimana proses pendewasaan dan pendidikan politik rakyat berlangsung dan berkembang. Pelaksanaan Pemilihan Umum dapat diartikan sebagai salah satu interaksi beberapa komponen politik dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan demokrasi Pancasila, yang di dalamnya juga menyangkut makna pendidikan politik. Interaksi antara struktur dan kultur, untuk menemukan bentuk-bentuk baru bagi pengembangan demokrasi tanpa harus menghilangkan esensi dari demokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu, kegiatan ini tidak mungkin berdiri sendiri, justru sebaliknya akan selalu terkait dengan kegiatan-kegiatan lain yang ada hubungannya dengan demokrasi, dan hasil dari interaksi itu pun juga akan mempengaruhi kehidupan politik yang lain pula.

Pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai salah satu wujud interaksi politik dalam kegiatan dan pengembangan demokrasi Pancasila akan dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti:

a. *Manusia dengan kulturnya*. Manusia sebagai pemilih yang sadar politik atau sebaliknya yang masih rendah kesadaran politiknya, pola panutan dan sifat paternalistik yang masih sangat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak sebagian besar warga masyarakat, terutama di pedesaan, akan sangat mempengaruhi jalannya pelaksanaan Pemilihan Umum, bahkan sampai pada hasilnya pula. Meskipun kesadaran politik masyarakat tidak merupakan satu-satunya faktor penentu hasil pemungutan suara, tetapi kesadaran ini membuka kemungkinan terciptanya suasana yang memungkinkan pelaksanaan Pemilihan Umum terselenggara sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Demikian pula kesadaran ataupun kualitas aparat-aparat penyelenggara Pemilihan Umum yang melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjadi faktor penting yang memungkinkan pelaksanaan Pemilihan Umum ini berlangsung sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga asas langsung, umum, bebas dan rahasia (*luber*) berjalan dengan baik;

b. *Sarana penunjang yang tersedia*. Sarana penunjang seperti kesepakatan bersama yang telah disahkan atau dikuatkan menjadi peraturan perundang-undangan dan iklim politik yang diciptakan atau berkembang pada waktu itu, memungkinkan berlangsungnya interaksi politik maupun kegiatan-kegiatan pelaksanaan Pemilihan Umum itu berlangsung di dalam satu kerangka mekanisme politik yang telah disepakati bersama. Sarana-sarana itu secara bertahap akan menjadi wahana agar aspirasi yang berkembang di masyarakat tersalur secara nyata. Meskipun dapat mempengaruhi kemenangan suatu OPP, tetapi yang penting di sini sarana-sarana penunjang dapat memberikan persamaan kedudukan, hak dan kewajiban kepada setiap OPP untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum;

c. *Kuantitas dan kualitas kegiatan organisasi kekuatan sosial politik.* Bobot atau isi pemikiran masing-masing OPP, terutama dalam kampanye, dapat dipandang sebagai salah satu tolok ukur sejuah mana mereka dapat mengantisipasi perkembangan dan menampung aspirasi masyarakat, serta ke mana arah perjuangan OPP itu tertuju, meskipun tidak selalu ada korelasinya dengan hasil pemungutan suara. Meskipun bukan pula merupakan satu-satunya tolok ukur besarnya peran serta masyarakat dalam Pemilihan Umum, tetapi kuantitas kegiatan OPP itu akan memberi warna tersendiri, suatu nilai plus pada kegiatan Pemilihan Umum itu. Di samping itu pemusatan domisili para pemimpin dan pemerataan domisili anggota OPP, yang ditunjang dengan dana yang mencukupi, akan sangat mempengaruhi intensitas kegiatan OPP itu. Tinggi rendahnya kegiatan OPP mewarnai dinamika politik selama Pemilihan Umum. Dengan menghindari atau mengurangi kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang tersedia, dalam arti kreativitas, kebebasan, keterbukaan, perkembangan dan dinamika tetap diperlukan, semua ini dapat dijadikan pendorong terjadinya pembaruan-pembaruan di masa mendatang.

Selain itu, tersedianya peraturan perundang-undangan diharapkan masing-masing organisasi kekuatan sosial politik maupun aparat penyelenggara Pemilihan Umum dapat melakukan kegiatannya dengan maksimal tanpa harus menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang telah dibangun. Peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan yang disediakan itu diharapkan dapat menampung hakikat dari struktur yang diinginkan tanpa harus menghilangkan esensi kultur politik yang selalu berubah. Esensi kestabilan harus tetap terpelihara tanpa harus menghalang-halangi terjadinya dinamika politik ataupun kreativitas masyarakat.

Sebagai pendidikan politik, Pemilihan Umum menempatkan dirinya sebagai wahana untuk meningkatkan kesadaran dan kedewasaan masyarakat akan hak dan kewajiban politiknya. Di samping sebagai penyelenggara pendidikan politik itu, pemerintah bersama dengan dua partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan, serta satu Golongan Karya mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan iklim yang memungkinkan warga masyarakat membina dan membangun dirinya agar semakin sadar dan berperan serta dalam pembangunan politik di Indonesia. Pemilihan Umum bukan tujuan dari pembangunan politik di Indonesia. Dia hanyalah salah satu alat yang dapat dijadikan tolok ukur atau sarana mengembangkan demokrasi di Indonesia. Seperti diketahui, ada tidaknya atau tinggi rendahnya demokrasi suatu negara acapkali diukur dengan baik tidaknya penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam arti selain menjadi kalender nasional, pelaksanaan Pemilihan Umum itu terhindar dari pemaksaan-pemaksaan, dengan demikian asas luber sungguh-sungguh terlaksana.

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memberikan legitimasi atas arah perjuangan suatu bangsa, yang kemudian dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Oleh sebab itu dapatlah dimengerti mengapa peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum dirumuskan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 15 tahun 1969, yang telah diubah tiga kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang No. 1/1985. Undang-Undang Pemilihan Umum itu di satu pihak menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk mempertahankan Pancasila, UUD 1945 dan kelangsungan kepemimpinan Orde Baru secara konstitusional, tetapi di pihak lain juga ingin menampung ataupun mengakomodasikan pemikiran-pemikiran baru sebagai konsekuensi dari hasil pembangunan politik yang semakin hari semakin

menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajiban politiknya. Dengan demikian pelaksanaan dan hasil Pemilihan Umum akan dapat dijadikan semacam indikasi perkembangan aktualisasi demokrasi di Indonesia. Terkait dengan hal ini, maka rumusan pasal-pasal Undang-Undang tentang Pemilihan Umum tidak akan terlepas arah tujuan politik suatu bangsa dan situasi kapan Undang-Undang itu disepakati untuk disahkan, seperti misalnya amanat MPRS/MPR[15] dan Konsensus Nasional.[16] Bahkan peranan pimpinan nasional, lebih-lebih pada awal Orde Baru sulit untuk tidak dikatakan amat penting. Penegasan pimpinan Orde Baru itu nampaknya mempengaruhi konsideran Ketetapan MPRS RI No. XLII/MPR/1968.

---

[15]Ketetapan MPRS RI No. XLII/MPRS/1968 tentang PEMILIHAN UMUM menegaskan antara lain: (1) susunan DPR dan DPRD terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya; (2) menugaskan kepada Presiden/Mandataris MPRS untuk melaksanakan ketetapan ini. Demikian juga Ketetapan MPR RI No. III/MPR/1988 tentang PEMILIHAN UMUM menegaskan antara lain: (1) Pemilihan Umum diikuti oleh tiga organisasi sosial politik, yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan; (2) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris MPR dengan peningkatan peranan Partai Politik dan Golongan Karya dalam hal pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat pusat sampai daerah yang diatur dengan undang-undang.

[16]Pada awal Orde Baru tercapai Konsensus Nasional antara pimpinan Orde Baru dan kekuatan-kekuatan sosial politik, yang menegaskan antara lain: (1) Jumlah anggota DPR tidak boleh *ngombro-ombro*; (2) Adanya *balance*/ perimbangan yang baik antara jumlah perwakilan Pulau Jawa dan luar Jawa; (3) Faktor jumlah penduduk diperhatikan; (4) Adanya anggota yang diangkat disamping anggota yang dipilih; (5) Tiap kabupaten dijamin minimal mendapat satu wakil; (6) Persyaratan mengenai domisili dihapus; (7) Yang diangkat adalah perwakilan ABRI dan non-ABRI; dan yang non-ABRI harus nonmassal; (8) Jumlah yang diangkat untuk MPR adalah sepertiga dari seluruh anggota; (9) Jumlah anggota DPR ditetapkan 460 anggota, yang terdiri dari 360 anggota dipilih melalui Pemilihan Umum dan 100 anggota diangkat; (10) Sistem pemilihan ialah: *proportional representation* yang sederhana; (11) Stelsel pemilihan ialah: *lijsten-stelsel*; dan (12) Daerah pemilihan adalah: Daerah Tingkat I.

Sehubungan dengan hal ini, patut pula dicatat peranan pimpinan nasional dan ABRI dalam rangka terlaksananya Pemilihan Umum secara luber dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk ini, ditekankannya bahwa sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, maka merupakan hak, kewajiban dan juga kehormatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memilih wakil-wakil yang dipercayai untuk duduk dan bermusyawarah dalam Lembaga Tertinggi Negara yang akan terbentuk. Karena rakyat yang berdaulat, maka rakyat sendiri pula yang berhak menentukan tawaran yang paling sesuai dengan akal dan hati nuraninya, baik secara nasional maupun untuk daerahnya sendiri. Dalam rangka ini, seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) yang akan melaksanakan tugasnya, beserta seluruh saksi yang mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, diminta untuk melaksanakan tugasnya secara tertib, sungguh-sungguh dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga para pemilih dapat mempergunakan hak pilihnya tanpa hambatan dan gangguan apapun juga.[17]

Terkait dengan penegasan pimpinan nasional itu, juga diakui besarnya peranan jajaran ABRI untuk menyukseskan pesta demokrasi ini. Diakui bahwa dalam Pemilihan Umum 1992, ABRI semakin mampu menempatkan dirinya sebagai "wasit" yang adil, meskipun pada dasarnya kekuatan politik ini tidak dapat dipisahkan dari Golongan Karya. ABRI tampil secara lebih simpatik. Jajaran ABRI diangap mampu melaksanakan perannya sebagai wasit sekaligus menjadi pengayom masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab, lebih-lebih pada

---

[17]Lihat amanat Presiden Soeharto menjelang pemungutan suara dalam Pemilihan Umum 1992, tanggal 8 Juni 1992.

masa kampanye. ABRI mampu meredam kecenderungan-kecenderungan kebringasan politik tanpa harus mematikan semarak dan dinamisnya kampanye. ABRI mampu mengontrol dan mengendalikan situasi, sehingga mampu menghadirkan keamanan selama Pemilihan Umum 1992, sehingga rakyat merasa tenang menyalurkan aspirasinya tanpa merasa berkurang atau kehilangan haknya.[18]

JADWAL WAKTU DAN PERKEMBANGAN POLITIK

Secara keseluruhan harus diakui bahwa pemerintah bersama seluruh kekuatan sosial politik dan rakyat Indonesia telah berhasil mengemban amanat MPR mengenai Pemilihan Umum dengan baik. Meskipun diakui di sana sini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut, baik yang menyangkut perangkat-perangkat lunak maupun keras, tetapi tidak sampai mengganggu kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum. Namun demikian penyempurnaan tetap perlu dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut. Meningkatnya suhu politik sebagai konsekuensi dari dinamika dan kreativitas politik yang terkait erat dengan meningkatnya kegiatan OPP masih tetap berada dalam batas-batas yang wajar, meskipun tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang kurang bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan. Namun demikian kesadaran dari setiap OPP untuk mengendalikan massanya serta peranan aparat

---

[18]Baca penegasan-penegasan pimpinan ABRI maupun komentar para pengamat politik mengenai peranan ABRI dalam Pemilihan Umum 1992. Panglima ABRI Jendral TNI Try Sutrisno menegaskan, saat pencoblosan tanggal 9 Juni 1992 itu tidak ada penekanan, intimidasi dan teror yang mempengaruhi agar seseorang memilih salah satu OPP. Juga tidak ada usaha untuk menakut-nakuti OPP.

keamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban tetap mampu menjaga panasnya suhu politik untuk tidak tergelincir ataupun terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dinamika dan kreativitas politik tetap berkembang tanpa harus menghilangkan esensi dari stabilitas nasional demi kepentingan nasional.

Dipandang dari persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, Pemilihan Umum 1992 ini juga tidak begitu berbeda dengan Pemilihan Umum sebelumnya, 1971, 1977, 1982, ataupun 1987. Para pemilih yang menggunakan hak pilihnya tetap tinggi yakni 102.250.348, atau 95,06% dari jumlah pemilih sebesar 107.565.697. Sedangkan jumlah suara sah juga tetap tinggi, yakni 92.219.589 atau 90,19% jumlah pemilih. Memang sering dipertanyakan persentase setinggi itu apakah karena tingginya kesadaran rakyat atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti masih kuatnya budaya paternalistik ataupun bapak panutan. Tidak perlu disangkal, bahwa kedua-duanya merupakan faktor yang saling bersinggungan dan besar pengaruhnya atas tingginya persentase jumlah pemilih yang menggunakan haknya. Besarnya persentase itu merupakan keberhasilan usaha-usaha pemerintah, seluruh kekuatan sosial politik, dan pemuka-pemuka masyarakat, baik formal maupun nonformal, untuk menyadarkan masyarakat berpartisipasi mensukseskan Pemilihan Umum dengan datang dalam pemungutan suara ke TPS-TPS.

Diakui masih diketemukan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut. Tetapi hal itu dapat dikatakan relatif kecil dan tidak sampai mengganggu kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum apalagi mengganggu stabilitas nasional ataupun persatuan dan kesatuan bangsa. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia telah berhasil

melaksanakan Pemilihan Umum yang kelima (1992) dalam Orde Baru ini, yang seterusnya akan tetap mengupayakan peningkatan kualitasnya sehingga melalui Pemilihan Umum dapat dijaring wakil-wakil rakyat yang benar-benar dapat membela dan memperjuangkan nasib rakyat. Perkembangan dan tuntutan kebutuhan akan selalu menuntut perbaikan-perbaikan, baik dalam konsepsi maupun operasionalnya. Penyimakan lebih lanjut juga menunjukkan, kekurangan-kekurangan yang masih terjadi itu bukan hanya disebabkan oleh aparat penyelenggara Pemilihan Umum, tetapi juga dari warga masyarakat anggota OPP yang kurang memahami makna Pemilihan Umum.

Pernyataan keberhasilan ini secara langsung maupun tidak, telah memunculkan pertanyaan: apakah tolok ukur keberhasilan itu, faktor-faktor mana saja yang mempengaruhi keberhasilan itu, serta bagaimana prospek masa depannya?

Bertitik tolak pada batasan arti Pemilihan Umum dan dasar hukum diselenggarakannya Pemilihan Umum, maka untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum itu, selain suasana ketenangan yang telah dicapai seperti disinggung di atas, sekurang-kurangnya terdapat dua hal yang perlu pula diperhatikan, yakni: (1) *Ketetapan jadwal waktu*. Sejauh mana program-program Pemilihan Umum dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang disediakan; (2) *Mengakomodasi perkembangan politik*. Sejauh mana peraturan perundang-undangan yang disediakan mampu mengakomodasi perkembangan politik yang ada. Oleh sebab itu, pelaksanaan Pemilihan Umum dapat dikatakan berhasil antara lain bila maksud atau tujuan kedua unsur di atas dapat tercapai.

Pelaksanaan Program

Ditinjau dari segi waktu, Pemilihan Umum telah berjalan sebagaimana jadwal yang telah disediakan. Mulai dari tahap pendaftaran pemilih sampai dengan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang disediakan. Keduabelas tahap sebagaimana yang tercantum dalam Bab III (Tahap-Tahap Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum) dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 dan Penjelasan Tentang Pokok-Pokok Muatan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, telah dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[19]

---

[19]Penjelasan Tentang Pokok-Pokok Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berurutan terdiri atas 12 tahap pelaksanaan, yakni: (1) Pendaftaran pemilih/jumlah penduduk warga negara Republik Indonesia; (2) Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan; (3) pengajuan nama dan tanda gambar organisasi; (4) pengajuan nama calon (pencalonan); (5) Penelitian calon; (6) Penetapan calon/penyusunan daftar calon; (7) Pengumuman daftar calon; (8) Kampanye Pemilihan Umum; (9) Pemungutan suara; (10) Penghitungan suara; (11) Penetapan hasil Pemilihan Umum, meliputi: (a) Pembagian kursi (jumlah kursi untuk tiap OPP); (b) Penetapan terpilih; (c) Penetapan/peresmian menjadi anggota; (12) Pengambilan sumpah/janji anggota Badan Permusyawatan/Perwakilan Rakyat.

Selama penyelenggaraan Pemilihan Umum, sejak kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir, tidak terjadi gejolak politik atau friksi politik yang berarti, meskipun diakui terjadi peningkatan suhu politik yang memuncak pada masa kampanye. Stabilitas politik nasional, persatuan dan kesatuan bangsa tetap dapat terjaga dan terpelihara. Demikian pula kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari berjalan normal dalam suasana aman dan tenteram.

Khusus mengenai program kerja dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam "Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 1988" yang secara rinci memuat jadwal penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum telah dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Masyarakat, khususnya yang sangat berkepentingan dengan hasil Pemilihan Umum, dalam waktu yang relatif singkat sebagaimana dijadwalkan dapat segera mengetahui hasil Pemilihan Umum tersebut.

Pada umumnya pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS-TPS berjalan lancar, tidak ada hal-hal yang menyebabkan batalnya atau tertundanya pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara itu. Pukul 08.00 waktu setempat dimulai pemungutan suara dan pukul 14.00 setempat berlangsung penghitungan suara sampai selesai. Pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung di TPS-TPS secara serentak dan selesai dalam satu hari, merupakan prestasi tersendiri bagi masyarakat bangsa Indonesia. Hasil penghitungan suara di TPS-TPS segera diinformasikan melalui sarana komunikasi yang ada untuk kemudian diteruskan secara hirarkis dengan menggunakan alat komunikasi di bawah kendali BAKORSISKOM ke PPI Jakarta. Pada tanggal 9 Juni 1992 pukul 19.30 WIB, PPI dapat mulai

mengumumkan hasil sementara perolehan suara ketiga OPP dari beberapa daerah pemilihan. Pada tanggal 29 Juni 1992, seluruh perolehan suara ketiga OPP telah dapat diumumkan dalam Rapat PPI di Jakarta, sebagaimana angka-angkanya menunjukkan pergeseran-pergeseran perolehan suara bagi ketiga OPP di berbagai daerah pemilihan. Secara nasional perolehan suara dan kursi DPR hasil Pemilihan Umum 1992 itu adalah sebagai berikut: Golongan Karya mendapat 66.599.331 suara (68.105%) dan 282 kursi, Partai Persatuan Pembangunan mendapat 16.624.647 suara (17%) dan 62 kursi, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia mendapat 14.565.556 suara (14.895%) dan 56 kursi. Sesuai dengan ketentuan yang disepakati ABRI mendapat 100 kursi untuk DPR.

Ditinjau dari segi waktu dan ketertiban-keamanan masyarakat selama berlangsungnya Pemilihan Umum, apalagi bila dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum di beberapa negara berkembang, Pemilihan Umum di Indonesia jauh lebih baik, meskipun tetap perlu ditingkatkan kualitasnya. Di samping sebagai formalitas, Pemilihan Umum akan semakin berarti bagi pengembangan demokrasi di Indonesia bila dia semakin dapat memberi peranan kepada semua kekuatan sosial politik sesuai dengan hak dan kewajibannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik. Dengan demikian Pemilihan Umum dapat menjadi medan berlaga bagi kekuatan-kekuatan politik untuk melakukan manuver-manuver politik tanpa meninggalkan tata krama maupun etika politik.

Mengakomodasi Perkembangan Politik

Meskipun jadwal waktu dipegang teguh, demi menjaga tertib administrasi dan menghindari perdebatan yang tiada ujung pangkalnya, tetapi ini tidak berarti bahwa perkembangan, pemi-

kiran-pemikiran yang baru atau saran-saran yang muncul diabaikan. Sesuai dengan perkembangan politik yang timbul, peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum itu pun telah diusahakan untuk disempurnakan antara lain dengan menampung ataupun mengakomodasikan perkembangan maupun kebutuhan yang diperlukan. Meskipun penyempurnaan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini diusahakan demi tercapainya peningkatan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum, sehingga asas-asas Pemilihan Umum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Secara khusus hal ini dapat ditunjukkan dalam Peraturan Pemerintah No. 37/1990, yang menegaskan antara lain sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum di Irian Jaya dan Timor Timur pelaksanaannya disamakan dengan Pemilihan Umum di provinsi-provinsi lainnya;
2. Keikutsertaan Organisasi Sosial Politik dalam Panitia Pemilihan, termasuk Panitia Pengawas, bersama-sama unsur pemerintah dan ABRI diperbesar keanggotaannya dengan kesamaan hak dan kewajiban dalam menjalankan fungsi dan tugas Panitia sebagai satu kesatuan;
3. Ketiga Organisasi Peserta Pemilihan Umum ikut mengawasi pelaksanaan pendaftaraan pemilih dan jumlah penduduk warga negara Republik Indonesia melalui mekanisme PANWASLAKCAM. Kepada semua pemilih yang terdaftar diberi tanda bukti bahwa namanya telah didaftar sebagai pemilih;
4. Penyediaan saksi Organisasi Peserta Pemilihan Umum di TPS-TPS diperluas. Keberadaan saksi adalah merupakan bagian organik dari KPPS yang bertugas untuk mengikuti dan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS yang bersangkutan;
5. Organisasi Kekuatan Sosial Politik mengawasi pelaksanaan distribusi formulir Model C dan formulir Model AB kepada para pemilih yang berhak;
6. Saksi-saksi Organisasi Peserta Pemilihan Umum mendapatkan salinan satu lembar Catatan Penghitungan Suara (formulir Model CA 1) di seluruh tingkatan kepanitiaan: KPPS, PPS, PPD II, PPD I dan PPI;

7. Penggunaan jadwal waktu dan tempat kampanye Pemilihan Umum ditetapkan atas dasar kesepakatan antara ketiga Organisasi Peserta Pemilihan Umum dengan Panitia Pemilihan dan Aparat Keamanan;
8. Kampanye Pemilihan Umum dilarang menggunakan pawai berkendaraan ataupun menampilkan tanda gambar perseorangan.

Peraturan Pemerintah ini disusun terutama berdasarkan masukan dari kekuatan-kekuatan sosial politik dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum. Dengan demikian diharapkan tujuan pasal 3 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/1988 dapat semakin terwujud.[20] Tetapi perlu diakui bahwa semua ini adalah tetap dalam proses menuju ke kesempurnaan. Didalam perjalanan waktu dengan mengingat kebutuhan-kebutuhan yang berkembang dan pemikiran-pemikiran ke depan, kiranya akan ditemukan cara-cara penyelenggaraan Pemilihan Umum yang semakin baik, dalam arti: (a) masyarakat semakin berperan serta dalam kegiatan-kegiatan politik ini sebagai subyek-subyek demokrasi yang terkait erat dengan pembinaan *nation and character building*; dan (b) dapat semaksimal mungkin menampung aspirasi yang ada dalam masyarakat dan sedikit mungkin terjadinya pelanggaran-pelanggaran.

Selain ketepatan waktu terpenuhi dan usaha-usaha mengakomodasikan kemauan atau perkembangan politik ke dalam peraturan perundang-undangan telah dilakukan, maka sasaran utama sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yakni mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

---

[20]Pasal 3 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/1978 menegaskan, "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan memberikan peranan secara lebih efektif kepada ketiga organisasi kekuatan sosial politik dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat pusat sampai daerah yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang".

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu pun tercapai. Kesepakatan untuk tidak mengubah tujuan dilaksanakannya Pemilihan Umum 1992, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, tetap menjadi komitmen kekuatan-kekuatan sosial politik yang mengaku dirinya sebagai bagian dari kekuatan Orde Baru.

Namun yang lebih penting untuk masa yang akan datang, adalah bagaimana menjaga dan mengisi iklim yang telah diciptakan itu bagi peningkatan perkembangan politik nasional, sehingga semua kekuatan sosial politik mampu berperan serta dalam pembangunan politik tersebut sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Pengaktualisasian demokrasi semakin dimasyarakatkan yang sekaligus ditingkatkan kualitasnya, sehingga semakin nampak asas pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945 tetap dijadikan landasan perkembangan demokrasi dalam mengiringi perjalanan bangsa untuk mengatasi sekaligus menjawab tantangan-tantangan di masa depan. Pembangunan politik belum selesai, justru dapat dikatakan masih dalam taraf awal, oleh karena itu masih sangat memerlukan kepedulian semua kekuatan sosial politik. Pengaktualisasian hasil Pemilihan Umum dalam wujud pelaksanaan program-program bagi kesejahteraan rakyat, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan dan hankamnas masih perlu ditingkatkan agar semakin menyentuh kepentingan rakyat banyak. Hasil Pemilihan Umum harus dijadikan modal untuk melakukan langkah lebih lanjut dalam rangka mencapai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan demikian Pemilihan Umum bukan hanya sekadar alat legitimasi, tetapi benar-benar akan melahirkan pemerintahan yang jujur, berwibawa dan tetap komitmen pada amanat penderitaan rakyat.

PERMASALAHAN YANG TIMBUL

Panasnya suhu politik selama Pemilihan Umum 1992 tidak menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun dinamika dan kreativitas politik tetap semarak. Sendi-sendi kehidupan politik masih berjalan seturut dengan pedoman atau acuan yang digariskan oleh konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Pemilihan Umum yang antara lain nampak dalam perolehan suara dan pembagian kursi di DPR/MPR, ketenangan, ketertiban dalam masyarakat dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum itu menjadi modal yang penting untuk melakukan langkah-langkah politik berikutnya. Tetapi penyimakan secara mendalam menunjukkan bahwa Pemilihan Umum itu tidak tanpa permasalahan. Beberapa permasalahan muncul, yang dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yakni (1) *teknis pelaksanaan* dan (2) *konsepsi* yang antara lain nampak dalam peraturan perundang-undangan; meskipun kedua permasalahan itu pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling bersinggungan. Oleh sebab itu pembagian ini hanyalah untuk mempermudah melihat permasalahan dan bukan untuk melakukan pemisahan.

Teknis Pelaksanaan

Dari data yang terkumpul, permasalahan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan telah muncul sejak pendaftaran pemilih sampai penghitungan suara, meskipun relatif sedikit jumlahnya. Sedikitnya masalah tidak berarti tidak perlu diperhatikan atau diselesaikan, justru sebaliknya, karena dari sinilah pada dasarnya awal suatu karya yang lebih besar, seperti misalnya:

1. Penduduk yang mempunyai hak pilih tidak terdaftar sebagai pemilih, sehingga tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Sebaliknya ada pemilih yang didaftar lebih dari satu kali, karena yang bersangkutan mempunyai alamat lebih dari satu. Demikian juga dapat terjadi pemilih yang belum cukup umur justru mendapat formulir sebagai pemilih;

2. Penentuan urutan nama-nama calon dalam daftar calon tetap untuk anggota DPR, DPRD I maupun DPRD II menjadi persoalan intern OPP yang sering mencuat ke permukaan. Kelompok-kelompok atau "faksi-faksi" dalam OPP saling berusaha untuk menempatkan calonnya di daftar nomor urut jadi, dan menghindarkan masuk dalam apa yang disebut "nomor sepatu". Masalah ini juga banyak menyita waktu dan pemikiran. Dalam rangka mencapai kepentingan-kepentingan politiknya, tidak segan-segan pula demi mendapat nomor urut "kecil" terjadi pemindahan calon dari satu tempat pemilihan ke tempat pemilihan yang lain yang justru menambah rumitnya persoalan, baik di tataran intern OPP maupun di LPU;

3. Kampanye, baik dalam pelaksanaannya maupun dalam kedudukannya sebagai wahana menawarkan program dan pendidikan politik, dalam implementasi maupun pelaksanaannya telah mengundang permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penanganan-penanganan secara bijak tetapi tegas. Semaraknya kampanye Pemilihan Umum 1992, seperti halnya kampanye Pemilihan Umum 1971, 1977, 1982 dan 1987, telah mengakibatkan naiknya suhu politik. Hal ini disebabkan antara lain oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi maupun kerasnya para juru kampanye menawarkan program-program partai atau golongannya untuk mencari pengaruh. Demikian pula isi kampanye, yang tidak jarang masih juga dijadikan sarana untuk mendiskreditkan pihak lain, termasuk pemerintah,

daripada mengemukakan program-program OPP. Terkait dalam kampanye ini, juga tak terhindarkan dampak-dampak negatif selama kampanye, seperti pelanggaran lalu-lintas dan tindakan-tindakan kriminil yang dilakukan oleh sementara kelompok yang tidak bertanggungjawab;

4. Selain dijumpai terjadinya kekurangan saksi, terutama dari PPP dan PDI, pengawas dan saksi masih belum dapat menjalankan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun satu tahun menjelang pemungutan suara dilaksanakan, ketiga kontestan telah diminta untuk menyediakan saksi-saksi secukupnya, tetapi masih ada kontestan yang tidak mengindahkannya. Akibatnya ada kontestan yang tidak mempunyai saksi di beberapa TPS. Situasi semacam ini sering dijadikan alat untuk mendiskreditkan pemerintah, yang dituduhnya tidak memberikan peran kepada OPP sebagaimana telah menjadi kesepakatan yang telah dituangkan dalam Ketetapan MPR RI tentang Pemilihan Umum. Situasi semacam ini dapat terjadi, yang antara lain disebabkan oleh: (a) OPP tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sekalipun batas waktu pengajuan saksi telah diperpanjang; (b) nama-nama saksi yang diajukan tidak ada orangnya karena telah pindah alamat; (c) beberapa orang yang diajukan sebagai saksi tidak bersedia menjadi saksi, karena merasa tidak pernah diminta oleh OPP yang bersangkutan; (d) kelengkapan persyaratan saksi tidak diselesaikan oleh DPC atau saksi sendiri;

5. Kebenaran penghitungan hasil suara memakai alat komputer yang dilakukan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan disaksikan oleh wakil-wakil OPP dirasakan masih dapat direkayasa oleh petugas komputer yang bersangkutan. Padahal diketahui bahwa wakil-wakil OPP yang bersangkutanlah yang

membuka data angka dari daerah yang dikirimkan ke LPU. Data angka dari daerah disegel dikirim ke LPU, dibuka oleh wakil-wakil OPP dan baru diproses komputer. Setiap selesai penghitungan dipaparkan di layar komputer, ditandatangani oleh wakil-wakil OPP dan baru sah.[21]

Pengamatan dan pengecekan atas masalah yang timbul menunjukkan bahwa manusianyalah yang terutama menimbulkan masalah, bukan peraturan perundang-undangannya sebagaimana diisukan oleh sementara kalangan. Meskipun demikian diakui pula bahwa untuk semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum, peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum sebaiknya setiap saat ditinjau, dengan demikian dapat dievaluasi apakah pasal-pasal yang ada masih mampu menampung perkembangan yang terjadi, setidaknya masih sesuai dengan kebutuhan (masih relevankah suatu kebijakan yang dituangkan dalam peraturan itu). Bila peraturan-peraturan itu dinilai telah tidak sesuai dengan kebutuhan atau telah usang (tidak relevan lagi), kiranya perlu dicarikan penggantinya atau disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, asalkan tetap berpijak pada tujuan utama Pemilihan Umum.

Pengecekan menunjukkan bahwa bukan aparat penyelenggara Pemilihan Umum yang banyak menimbulkan masalah, tetapi justru dari warga masyarakat pemilih sendiri dan unsur-unsur OPP yang menimbulkannya, seperti saksi atau pengawas Pemilihan Umum. Diakui ada aparat penyelenggara Pemilihan

---

[21]Pada waktu perhitungan suara di LPU di Jalan Diponegoro, Jakarta, terjadi peristiwa yang kurang simpatik. Ada wakil suatu OPP dipersilakan memperhatikan dan melihat pelaksanaan perhitungan suara dengan komputer yang dilakukan oleh aparat LPU. Wakil OPP tersebut tidak bersedia, dan justru duduk di lantai dengan alasan tidak mengetahui cara kerja komputer.

Umum yang kurang bertanggung jawab atas tugasnya itu, seperti misalnya pada waktu pendaftaran pemilih di kota-kota, yang sebagian besar warganya adalah para karyawan, baik negeri maupun swasta, yang ternyata sulit dijumpai untuk didaftar sebagai pemilih. Bila ada justru pembantu rumah tangganya yang dapat ditemui, yang pada umumnya tidak dapat atau sulit menjelaskan data majikannya. Ada contoh lain yang sebaliknya, karena petugas pendaftar berhalangan lalu menyuruh orang lain (anggota keluarganya) untuk melakukan pendaftaran pemilih, akibatnya pelaksanaannya kurang dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pendaftaran pemilih maupun penduduk di pedesaan relatif jauh lebih mudah daripada di perkotaan, meskipun sulitnya transportasi sering menjadi hambatan. Sifat hubungan antara masyarakat pemilih dan Panitia Pendaftaran Pemilih di pedesaan, yang pada umumnya adalah aparat desa atau kelurahan, merupakan faktor yang sangat mempermudah terlaksananya pendaftaran pemilih di pedesaan. Selain itu, perpindahan alamat (tempat tinggal) pemilih tanpa memberitahu aparat desa dan keengganan warga masyarakat untuk memeriksa daftar pemilih di desa-desa (kelurahan) serta kurang rapinya administrasi pendaftaran pemilih merupakan faktor-faktor yang memungkinkan seorang pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih maupun mendapat panggilan untuk pencoblosan.

Kekurangsiapan unsur-unsur OPP itu, karena kurang mengetahui isi peraturan perundang-undangan yang tersedia, menyebabkan timbulnya beberapa masalah di atas, seperti misalnya tentang saksi. Sampai batas waktu yang disediakan saksi belum datang, akibatnya tidak dapat mengikuti penghitungan suara. Kejadian lain menunjukkan, nama saksi tidak sesuai dengan nama yang didaftarkan, sehingga mereka ditolak menjadi

membuka data angka dari daerah yang dikirimkan ke LPU. Data angka dari daerah disegel dikirim ke LPU, dibuka oleh wakil-wakil OPP dan baru diproses komputer. Setiap selesai penghitungan dipaparkan di layar komputer, ditandatangani oleh wakil-wakil OPP dan baru sah.[21]

Pengamatan dan pengecekan atas masalah yang timbul menunjukkan bahwa manusianyalah yang terutama menimbulkan masalah, bukan peraturan perundang-undangannya sebagaimana diisukan oleh sementara kalangan. Meskipun demikian diakui pula bahwa untuk semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum, peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum sebaiknya setiap saat ditinjau, dengan demikian dapat dievaluasi apakah pasal-pasal yang ada masih mampu menampung perkembangan yang terjadi, setidaknya masih sesuai dengan kebutuhan (masih relevankah suatu kebijakan yang dituangkan dalam peraturan itu). Bila peraturan-peraturan itu dinilai telah tidak sesuai dengan kebutuhan atau telah usang (tidak relevan lagi), kiranya perlu dicarikan penggantinya atau disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, asalkan tetap berpijak pada tujuan utama Pemilihan Umum.

Pengecekan menunjukkan bahwa bukan aparat penyelenggara Pemilihan Umum yang banyak menimbulkan masalah, tetapi justru dari warga masyarakat pemilih sendiri dan unsur-unsur OPP yang menimbulkannya, seperti saksi atau pengawas Pemilihan Umum. Diakui ada aparat penyelenggara Pemilihan

---

[21]Pada waktu perhitungan suara di LPU di Jalan Diponegoro, Jakarta, terjadi peristiwa yang kurang simpatik. Ada wakil suatu OPP dipersilakan memperhatikan dan melihat pelaksanaan perhitungan suara dengan komputer yang dilakukan oleh aparat LPU. Wakil OPP tersebut tidak bersedia, dan justru duduk di lantai dengan alasan tidak mengetahui cara kerja komputer.

Umum yang kurang bertanggung jawab atas tugasnya itu, seperti misalnya pada waktu pendaftaran pemilih di kota-kota, yang sebagian besar warganya adalah para karyawan, baik negeri maupun swasta, yang ternyata sulit dijumpai untuk didaftar sebagai pemilih. Bila ada justru pembantu rumah tangganya yang dapat ditemui, yang pada umumnya tidak dapat atau sulit menjelaskan data majikannya. Ada contoh lain yang sebaliknya, karena petugas pendaftar berhalangan lalu menyuruh orang lain (anggota keluarganya) untuk melakukan pendaftaran pemilih, akibatnya pelaksanaannya kurang dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pendaftaran pemilih maupun penduduk di pedesaan relatif jauh lebih mudah daripada di perkotaan, meskipun sulitnya transportasi sering menjadi hambatan. Sifat hubungan antara masyarakat pemilih dan Panitia Pendaftaran Pemilih di pedesaan, yang pada umumnya adalah aparat desa atau kelurahan, merupakan faktor yang sangat mempermudah terlaksananya pendaftaran pemilih di pedesaan. Selain itu, perpindahan alamat (tempat tinggal) pemilih tanpa memberitahu aparat desa dan keengganan warga masyarakat untuk memeriksa daftar pemilih di desa-desa (kelurahan) serta kurang rapinya administrasi pendaftaran pemilih merupakan faktor-faktor yang memungkinkan seorang pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih maupun mendapat panggilan untuk pencoblosan.

Kekurangsiapan unsur-unsur OPP itu, karena kurang mengetahui isi peraturan perundang-undangan yang tersedia, menyebabkan timbulnya beberapa masalah di atas, seperti misalnya tentang saksi. Sampai batas waktu yang disediakan saksi belum datang, akibatnya tidak dapat mengikuti penghitungan suara. Kejadian lain menunjukkan, nama saksi tidak sesuai dengan nama yang didaftarkan, sehingga mereka ditolak menjadi

saksi. Hal ini disebabkan oleh masalah internal OPP sendiri, seperti kekurangan anggota yang dianggap dapat dijadikan saksi. Sejalan dengan ini, muncul masalah lain yaitu pengawasan. Di beberapa tempat aparat pengawasan belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Kurang efektifnya pengawasan ini terutama disebabkan oleh kurang didalaminya tugas-tugas pengawasan tersebut.

Masalah lain yang cukup serius ditanggapi, baik dari OPP sendiri, pengamat-pengamat politik maupun masyarakat, adalah tentang kampanye, karena tiada sedikit pelaksanaan kampanye yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Pelanggaran atas aturan pelaksanaan kampanye terjadi di mana-mana, yang tidak saja meningkatkan suhu politik tetapi juga menimbulkan ekses-ekses yang merugikan masyarakat, seperti terganggunya lalu lintas, kecelakaan, perkelahian, perusakan bangunan-bangunan, perampasan hak milik dan tindakan-tindakan kriminil lainnya. Kampanye sebagai sarana penawaran program OPP dan medan pendidikan politik belum dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan justru sebaliknya telah berubah menjadi tempat hura-hura, pelampiasan pembuka sumbat-sumbat kebebasan atau "*uneg-uneg*" masyarakat serta terkesan sebagai suasana kebebasan tanpa aturan, yang di beberapa tempat cenderung menjurus kepada kebringasan.

Kekurangan-kekurangan itu perlu dibenahi, sehingga pelaksanaan Pemilihan Umum di masa mendatang betul-betul semakin berkualitas dan dapat semakin meningkatkan peran serta masyarakat pada kehidupan politik bangsa. Berbicara mengenai peningkatan peranserta masyarakat dalam kehidupan politik adalah bukan monopoli pemerintah, setiap kekuatan sosial politik, bahkan seluruh warga masyarakat, bertanggungjawab atas hal itu sesuai dengan fungsi dan kedudukan yang diembannya. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan itu pembenahan dan penyempurnaan

atas perangkat-perangkat yang terkait dengan Pemilihan Umum itu perlu dilakukan, seperti umpamanya:

1. Peningkatan pemasyarakatan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang Pemilihan Umum. Waktu dan intensitas pemasyarakatannya perlu mendapatkan perhatian, dengan demikian pengertian mengenai Pemilihan Umum dan maksud kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam aturan perundang-undangan itu semakin dipahami sehingga kesalah-pahaman dapat semakin terhindarkan. Dalam rangka ini, santi-aji-santiaji yang diikuti oleh aparat penyelenggara pemilihan umum bersama-sama dengan wakil-wakil OPP, termasuk yang duduk sebagai aparat pengawasan maupun saksi, perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Dalam rangka ini, media cetak, seperti suarat-surat kabar dan majalah-majalah, serta media elektronika, seperti radio dan TV dapat sangat berperanan membantu usaha ini;

2. Pimpinan-pimpinan OPP selain menyiapkan anggota-anggotanya yang akan bertugas sebagai panitia pengawas maupun saksi-saksi dalam jumlah yang memadai, juga harus menjelaskan secara rinci tugas mereka sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum;

3. Khusus bagi para aparat penyelenggara, para saksi dan para pengawas Pemilihan Umum perlu ditingkatkan pengetahuannya mengenai peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum dan mutu kerjanya, dengan demikian mereka dapat semakin baik menjalankan tugasnya. Meningkatnya tanggung jawab ini diharapkan akan membantu tertibnya keadministrasian mengenai Pemilihan Umum. Hal ini menjadi semakin perlu, di samping karena keharusan juga untuk menghindarkan tuduhan-tuduhan negatif yang dilancarkan oleh pihak-pihak

tertentu yang dapat menjatuhkan nama aparat Pemilihan Umum pada khususnya maupun pemerintah sebagai penyelenggara Pemilihan Umum pada umumnya;

4. Perlu dipikirkan dan dicarikan bentuk-bentuk kampanye yang baru, sehingga tujuan kampanye sebagai sarana penawaran program OPP dan pendidikan politik dapat secara maksimal tercapai. Untuk itu bentuk-bentuk kampanye yang bersifat dialogis perlu diperbanyak. Media massa maupun media elektronik kiranya dapat semakin berperanan untuk membantu lancarnya kampanye semacam ini. Namun demikian mengingat iklim dan tingkat kedewasaan politik masyarakat Indonesia, bentuk kampanye yang sifatnya terbuka sebagaimana berlangsung pada Pemilihan Umum yang baru lalu kiranya masih perlu diadakan meskipun waktu dan lamanya perlu dipikirkan secara masak, sehingga ekses-ekses negatif dapat dieliminir tanpa harus menghilangkan eksistensi kebebasan itu sendiri. Namun demikian suatu peraturan tanpa sanksi akan mengundang untuk dilanggar. Oleh sebab itu perlu dipikirkan adanya sanksi-sanksi tanpa harus menghalangi terjadinya dinamika dan kreativitas dalam berkampanye. Di samping itu, juga dibutuhkan aparat-aparat keamanan dalam jumlah yang memadai untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, baik dari para peserta kampanye sendiri maupun pihak-pihak lain yang ingin mencari keuntungan pribadi atau ingin mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masa kampanye itu.

Konsepsi (Peraturan Perundang-undangan)

Sementara itu dari sudut konsepsi, seperti misalnya peraturan perundang-undangan, telah pula terjadi perbedaan, yang

tidak hanya terjadi pada waktu penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi juga di tataran pelaksanaannya. Bahkan perbedaan-perbedaan pendapat mengenai beberapa materi tentang Pemilihan Umum itu terlontar pula di kampanye-kampanye. Menilik persoalannya, yang oleh sementara OPP dianggap sebagai masalah yang prinsipiil serta dapat mempengaruhi hasil suara, maka persoalan itu tidak tertutup untuk juga diangkat ke dalam pembahasan GBHN maupun Ketetapan MPR tentang Pemilihan Umum. Masalah itu antara lain menyangkut:

1. *Sistem Pemilihan Umum agar diubah menjadi sistem distrik.* Keinginan untuk mengubah sistem itu didasari pada perimbangan agar pemilih dapat memilih langsung wakil-wakilnya dan bukan memilih tanda gambar OPP. Dengan sistem pemilihan distrik diharapkan akan terjadi sambung komunikasi antara pemilih dan wakil-wakilnya yang ada di DPR ataupun DPRD. Namun para pendahulu bangsa Indonesia secara arif untuk tidak memilih sistem distrik, karena di dalamnya mengandung prinsip dominasi mayoritas yang jelas-jelas tidak sejalan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang dianut masyarakat Indonesia.[22] Berikut ini akan disampaikan beberapa catatan hasil kajian analitis, bahwa perubahan sistem Pemilihan Umum menjadi sistem distrik murni akan menimbulkan beberapa persoalan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini, seperti misalnya:

   a. Ketidakadilan jumlah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan antara Jawa dan luar Jawa, antara daerah yang padat dan jarang penduduknya. Contohnya: Pulau Jawa yang luasnya hanya 10% wilayah Nusantara,

---

[22]Lihat Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: CSIS, 1981, bagian Pemilihan Umum 1971: Demokratisasi dan Pemantapan Orde Baru, hal. 175-189.

tetapi dengan beban penduduk 60% (106.270.540 jiwa), akan mempunyai sedikit wakil di lembaga perwakilan jika dibandingkan dengan daerah luar Jawa yang merupakan 90% wilayah Nusantara tetapi hanya menanggung beban penduduk 40% (71.177.052 jiwa), terutama jika kabupaten menjadi daerah pemilihan. Jumlah kabupaten di Jawa hanya 82 buah, sedangkan di luar Jawa mencapai 161 buah. Contoh lain, daerah pemilihan Yapen Waropen (Irian Jaya), yang jumlah penduduknya hanya 61.390 jiwa, akan mempunyai wakil yang sama jumlahnya dengan daerah pemilihan Bogor (Jawa Barat), yang jumlah penduduknya mencapai 3.466.332 jiwa. Dengan demikian sistem distrik tidak memberikan arti bagi makna proses Pemilihan Umum karena sistem ini tidak lebih dari sekedar pemilihan teritori, dalam arti yang luas yang menang tanpa mempertimbangkan jumlah penduduknya. Keputusan yang demikian ini dapat menimbulkan instabilitas nasional, yang pada akhirnya dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional. Sebaliknya sistem perwakilan berimbang dengan sistem daftar yang berupaya memadukan keadaan geografi dan demografi telah menghasilkan keseimbangan jumlah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan. Pulau Jawa, 10% wilayah Indonesia dengan 60% jumlah penduduk Indonesia memperoleh 200 kursi sedangkan luar Jawa, 90% wilayah Indonesia dengan 40% jumlah penduduk Indonesia juga memperoleh 200 kursi untuk Pemilihan Umum 1992 (untuk Pemilihan Umum 1987, Pulau Jawa mendapatkan 205 kursi dan luar Jawa 195 kursi);

b. Besar kemungkinan wakil-wakil rakyat hanya dikuasai oleh satu OPP yang menang saja. Meskipun hal ini tidak menyalahi Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dipandang dari sudut kehidupan de-

mokrasi Pancasila hal ini tidak sehat. Dinamika dan kreativitas kehidupan politik cenderung statis karena tidak ada tantangan dan kompetisi;

c. Wakil-wakil OPP yang kalah tidak lagi mendapatkan tempat di badan-badan legislatif. Sistem Pemilihan Umum yang berlaku sekarang ini justru memberikan tempat kepada wakil-wakil OPP yang kalah dalam pemilihan. Hal ini mengandung arti yang lebih dalam, yakni pengakuan eksistensi partai yang ada sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan. Tidak adanya wakil-wakil OPP yang kalah dalam pemilihan tidak mencerminkan keadaaan sosial politik maupun situasi kemasyarakatan bangsa Indonesia yang bhinneka tunggal ika. Seperti halnya permasalahan di atas, keadaan semacam ini dapat mengurangi dinamika dan kreativitas kehidupan demokrasi Pancasila;

d. Di samping itu, memberlakukan sistem distrik memungkinkan sekali terpilihnya wakil-wakil rakyat yang sangat sempit wawasanmya, sebagaimana pernah terjadi dalam Pemilihan Umum 1955. Tokoh-tokoh, intelektual dan pemimpin-pemimpin partai politik yang sebagian besar berdomisili di Jakarta kemungkinan sekali dikalahkan oleh pemuka-pemuka nonformal di daerah-daerah pemilihan yang sangat terbatas wawasannya. Hal ini kemungkinan sekali terjadi, karena domisili calon menjadi salah satu syarat pencalonan. Bila hal ini terjadi, maka sangat terbuka kemungkinan bahwa wakil-wakil rakyat yang terpilih untuk tingkat nasional justru pemimpin yang sangat sederhana, baik dalam kualitas maupun wawasannya, serta lebih sebagai wakil daerah daripada wakil nasional.

Kekurangan-kekurangan dari sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar nampaknya disebabkan bukan oleh kesenjangan antara sistem itu dengan kondisi masyarakat, melainkan oleh distorsi-distorsi dalam implementasinya. Menyimak keadaan organisasi sosial politik dewasa ini, nampaknya bukan persoalan mendasar mengenai Pemilihan Umum yang menjadi masalah utama, tetapi justru bagaimana membenahi kondisi organisasi sosial politik yang sangat mendesak untuk dilakukan. Kemandirian dan kematangan wawasan adalah dua hal yang perlu diatasi oleh organisasi sosial politik.

2. *Penyelenggara Pemilihan Umum*. Diusulkan agar penyelenggara Pemilihan Umum tidak hanya Presiden/Mandataris MPR, tetapi Presiden/Mandataris MPR bersama OPP. Usul ini menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan OPP. Jika sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, maka OPP itu kedudukannya setingkat dengan Presiden. Karena Presiden itu Mandataris MPR, apakah OPP juga berkedudukan sebagai Mandataris MPR? Suatu pertanyaan yang perlu direnungkan jawabannya. Padahal Mandataris MPR itu hanya satu, yaitu Presiden. Adanya dua Mandataris MPR bertentangan dengan UUD 1945, oleh sebab itu usul agar penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Presiden/Mandataris MPR bersama OPP tidak relevan, tidak sesuai dengan amanat GBHN atau Ketetapan MPR tentang Pemilihan Umum;

3. *Agar ABRI ikut Pemilihan Umum*. Usul ini muncul bersama dengan dilansirnya isu-isu yang mengatakan, PDI dan PPP yang ikut Pemilihan Umum saja masing-masing hanya memperoleh kurang dari 100 kursi, mengapa justru ABRI yang tidak ikut Pemilihan Umum mendapat jatah 100 kursi di DPR RI. Usul ini secara selintas kelihatan sebagai usul yang demokratis, tetapi pendalaman secara tenang atas usul ini menun-

jukkan bahwa usul itu mengandung akibat yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. ABRI diakui sebagai kekuatan stabilisator, dinamisator dan faktor pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Bila ABRI ikut Pemilihan Umum, berarti anggota ABRI dapat dipecah belah ke dalam ABRI sendiri, Golongan Karya, PPP dan PDI. Hal yang demikian ini akan menyebabkan hilangnya fungsi ABRI tersebut, karena anggota-anggota ABRI akan berkelompok-kelompok, berbeda-beda pilihan atau pendukungnya dalam masyarakat. Oleh sebab itu anggota ABRI tidak menggunakan hak pilihnya. Demi tujuan yang lebih luhur, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta stabilisasi dan dinamisasi nasional, maka usul agar ABRI ikut Pemilihan Umum juga tidak bisa diterima;

4. *Asas Pemilihan Umum di samping luber juga harus jurdil* (jujur dan adil). Usul ini nampaknya dilandasi oleh penilaian bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum yang pernah dilaksanakan selama ini tidak jujur dan tidak adil dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara sesama OPP dan mengarah kepada menguntungkan salah satu OPP tertentu. Prasangka ini sesungguhnya tidak perlu terjadi, karena pada penyusunan perangkat lunak dan pelaksanaannya, OPP dilibatkan langsung melalui mekanisme kepanitiaan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain dari pada itu, pada dasarnya pengertian jujur dan adil itu telah terkandung dalam asas langsung, umum, bebas dan rahasia (*luber*);

5. *Supaya pemungutan suara diselenggarakan pada hari libur atau hari yang diliburkan*. Usul ini nampaknya juga didasari oleh prasangka ada rekayasa penggiringan pemilih untuk memenangkan salah satu OPP tertentu. Peraturan perundang-undangan sesungguhnya telah memuat ketentuan yang

mengatur pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang tidak memungkinkan ada rekayasa yang diprasangkakan tersebut, yaitu:

a. TPS tidak boleh dibangun di gedung dan halaman kantor pemerintah atau sekolah;

b. TPS diperuntukkan bagi masyarakat sekitar, dalam arti penduduk setempat dan para pemilih yang dalam perjalanan;

c. Pemberian formulir AB (untuk pemilih yang ada diperjalanan dan tidak dapat melakukan pemungutan suara di tempat domisili) dan formulir C (pemanggilan pemilih untuk melakukan pemungutan suara) diawasi oleh OPP.

Lain dari pada itu usulan tersebut juga akan memperkecil makna Pemilihan Umum sebagai wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan demokrasi Pancasila. Karenanya hari Pemilihan Umum (pemungutan suara) bukan hari libur atau hari yang diliburkan, melainkan merupakan hari krida nasional. Seandainya hari Pemilihan Umum adalah hari libur, maka dapat diperkirakan tidak akan menjamin para pemilih yang sedang menjalani libur bersedia datang ke TPS-TPS, sehingga secara langsung akan mengurangi kuantitas pemilih yang akan menggunakan hak memilihnya. Semua kekuatan sosial politik tentunya sependapat agar kuantitas pemilih yang menggunakan hak memilihnya itu tetap tinggi seperti pada pemilihan-pemilihan sebelumnya;

6. *Pemilihan tanda gambar dan nomor urut untuk Pemilihan Umum* sepertinya merupakan persoalan yang mudah, tetapi dalam kenyataannya pada Pemilihan Umum 1992 menjadi masalah yang pelik. Ada OPP yang ingin mengganti tanda gambar dan bahkan ada yang menginginkan perubahan urutan

tanda gambar dalam Pemilihan Umum. Masalah ini ternyata menjadi pembicaraan yang alot antara LPU dan ketiga OPP, meskipun akhirnya disepakati bahwa urutan tanda gambar seperti pada Pemilihan-pemilihan Umum yang lalu. Masalah ini baru dapat diatasi setelah terjadi pembicaraan selama kurang lebih empat bulan. Memecahkan masalah itu ternyata tidak semudah yang diduga;

7. *Kriteria calon*. Masalah kriteria calon legislatif juga mencuat lagi ke permukaan, lebih-lebih di beberapa daerah di mana jumlah suara atau kursi OPP tertentu mengalami penurunan, misalnya Golkar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, PDI di DKI Jaya, dan PPP di Aceh. Salah satu faktor penyebabnya disebutkan karena pemilih tidak mengetahui calon-calon wakilnya yang akan dipilih, dan sebaliknya sang calon juga tidak mengetahui kondisi daerah pemilihannya maupun pemilihnya. Jika anggapan ini benar, maka untuk pemilihan-pemilihan yang akan datang perlu dicarikan cara bagaimana pemilih dapat lebih mengetahui calon wakilnya dengan baik, dan sebaliknya si calon wakil rakyat juga harus mengetahui daerah pemilihannya dengan baik, termasuk keadaan pemilihnya. Dengan demikian rakyat tidak tertipu oleh propaganda kampanye, dan sebaliknya si wakil rakyat dapat membuat program-program yang lebih nyata mengenai daerah pemilihannya. Oleh karena itu ada baiknya bila jauh-jauh hari (sekitar setahun/dua tahun) calon-calon wakil rakyat telah mulai diperkenalkan kepada pemilih-pemilih di daerah pemilihannya. Meskipun diperkirakan pada awalnya akan menimbulkan perasaan tidak senang pada para anggota DPR/MPR yang tidak dicalonkan lagi, tetapi untuk masa mendatang seiring dengan semakin matangnya kesadaran politik masyarakat, pengenalan semacam itu nampaknya menjadi semakin relevan untuk dipikirkan dan dicoba pelaksanaannya.

Dengan asumsi setiap diperlukan akan ditinjau untuk disempurnakan ataupun dilengkapi dengan muatan-muatan baru yang sesuai dengan konsensus nasional, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang kini diberlakukan kiranya masih perlu dipertahankan. Bahkan masih ada prinsip-prinsip yang mempunyai daya laku yang panjang sesuai dengan perjuangan Orde Baru. Menilik perkembangan politik dan kedewasaan politik masyarakat, demografi dalam arti pertambahan penduduk dan geografi dalam arti pemekaran Dati I dan Dati II, sistem Pemilihan Umum yang kini diberlakukan di Indonesia nampaknya belum perlu untuk diganti. Sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar yang sebenarnya merupakan gabungan antara sistem proporsional (*multi members constituency*) dan sistem distrik (*single member constituency*), yang dibangun berdasarkan kompromi dan konsensus sejarah pada awal Orde Baru, masih merupakan langkah terbaik dan adil untuk kondisi masyarakat bangsa Indonesia. Perkembangan-perkembangan sosial politik, demografis dan geografis masih dapat ditampung dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang ada sekarang ini. Pembangunan dan pendidikan politik yang telah dilaksanakan telah meningkatkan taraf kehidupan bangsa Indonesia, termasuk kemajuan dan kesadaran politik masyarakat akan hak dan kewajibannya. Tetapi perlu disadari pula bahwa kemajuan dan perkembangan-perkembangan itu belum berarti bahwa kondisi sosial politik dan demografis Indonesia berubah sedemikan rupa sehingga memerlukan sistem Pemilihan Umum yang baru ataupun mengusangkan sistem Pemilihan Umum yang kini diberlakukan itu.

PROSPEK PEMILIHAN UMUM DI MASA MENDATANG

Pemilihan Umum merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu Pemilihan Umum adalah juga merupakan sarana untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat. Dengan demikian akan terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, menurut sistem permusyawaratan rakyat.

Bagi bangsa Indonesia, Pemilihan Umum itu juga merupakan suatu sarana untuk menegakkan, menumbuhkan dan mengembangkan demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada kepribadian sendiri, sekalipun bukan merupakan satu-satunya sarana. Pemilihan Umum merupakan suatu sarana untuk menyehatkan demokrasi dan sekaligus untuk menunjukkan adanya kehidupan demokrasi.

Melalui Pemilihan Umum diharapkan pembangunan demokrasi menjadi semakin sehat dan kuat, dalam arti esensi-esensi yang terkandung dalam demokrasi itu semakin teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dimaklumi pula bahwa kesadaran dan tanggung jawab setiap warga masyarakat untuk betul-betul menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi menjadi faktor yang sangat penting dalam pengembangan demokrasi Pancasila. Moral, etika dan tata krama juga menjadi pendorong sekaligus pengendali semaraknya kehidupan demokrasi. Demokrasi bukan merupakan sesuatu bentuk atau sistem pemerintahan yang berkembang sekali jadi. Dia berproses, melalui tahapan-tahapan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat pendukungnya. Oleh sebab itu,

tidak heran bila aktualisasi demokrasi dalam setiap masyarakat, bangsa atau negara tidak selalu seragam.

Bagi bangsa Indonesia, Pemilihan Umum merupakan amanat yang harus dilaksanakan dalam rangka mengawali siklus kepemimpinan nasional lima tahunan berdasarkan konstitusi, UUD 1945. Di dalam ketatanegaraan Indonesia, Pemilihan Umum berfungsi sebagai suatu alat legitimasi dalam rangka pergantian pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum menegaskan pula bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan Umum bukan untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan dasar falsafah negara baru. Bagi bangsa Indonesia, Pemilihan Umum merupakan suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi ataupun menimbulkan hal-hal yang menyengsarakan rakyat. Oleh sebab itu, Pemilihan Umum harus menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

Disimak dari sudut perjuangan bangsa Indonesia, keinginan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum itu bukan baru muncul di jaman Orde Baru. Tetapi telah menjadi cita-cita bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaannya. Hanya karena perkembangan politik pada waktu itu, Pemilihan Umum di Indonesia baru terlaksana dalam tahun 1955. Demikian pula karena perkembangan demokrasi terpimpin yang menyeleweng dari relnya Pancasila, Pemilihan Umum baru diadakan kembali sejak bangsa Indonesia bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam jaman

Orde Baru. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Pemilihan Umum itu juga merupakan aktualisasi tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Mengingat arti pentingnya Pemilihan Umum dalam kehidupan dan pengembangan demokrasi Pancasila, baik dalam arti sebagai suatu keharusan dalam negara demokrasi untuk menunjukkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengawali siklus kepemimpinan lima tahunan, sebagai sarana mengembangkan demokrasi Pancasila ataupun cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, maka Pemilihan Umum di jaman Orde Baru ini akan tetap diselenggarakan, dengan tekad semakin ditingkatkan kualitasnya. Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang baru lalu itu maupun di tahun-tahun sebelumnya telah memperkaya kehidupan demokrasi dan kehidupan konstitusional bangsa Indonesia.

Ada yang merasakan masih ada kelemahan, tetapi sebaliknya tiada sedikit yang menilai secara obyektif yang menyatakan, tiada ternilai hasil yang diperoleh dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum itu, apalagi bila dikaitkan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Ada tema-tema baru yang diangkat ke permukaan oleh ketiga kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum, yang belum pernah muncul sebelumnya. Ada yang setuju dan sebaliknya ada yang tidak setuju dengan tema-tema itu. Hal ini adalah wajar dalam kehidupan demokrasi dan alam keterbukaan. Oleh sebab itu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam semaraknya demokratisasi dan keterbukaan, yang perlu dilakukan bukan menyingkirkan perbedaan pemikiran atau pola kehidupan yang tidak seragam itu yang kadang kala dapat berkembang sebagai potensi konflik, tetapi mencarikan dan menyusun tatacara dan tata-krama untuk menjembataninya secara damai, etis, adil, dewasa, arif dan berkeadaban.

Kelemahan dan kekurangan penyelenggaraan Pemilihan Umum diakui ada, tetapi bukan menjadi alasan untuk tidak mengakui hasil Pemilihan Umum apalagi menghentikan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum akan tetap diadakan dengan selalu meningkatkan kualitasnya. Kebijakan atau peraturan-peraturannya akan selalu ditinjau untuk terus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan jaman.

Sehubungan dengan hal itu, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa Pemilihan Umum 1992 itu merupakan pengejawantahan dari Ketetapan MPR RI tahun 1988, yang merupakan bagian dari salah satu kebijaksanaan pembangunan politik nasional. Dengan memperhatikan hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, maka sasaran utama pembangunan nasional jangka panjang 25 tahun tahap kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berkaitan dengan sasaran ini, maka pembangunan politik yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan politik nasional yang semakin berkualitas. Dalam rangka mencapai sasaran itu, pembangunan politik di masa-masa mendatang perlu lebih diarahkan kepada memacu pertumbuhan dan perkembangan kehidupan demokrasi Pancasila. Kehidupan demokrasi Pancasila sendiri tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dengan demikian penyelenggaraan Pemilihan Umum yang semakin baik dan semakin berkualitas di masa mendatang akan memberikan konstribusi yang sangat besar bagi perkembangan kehidupan demokrasi Pancasila itu.

Dari pelaksanaan seluruh tahap kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat disimak pengaturan-pengaturan yang telah baik dan mapan yang perlu dipelihara, dan sebaliknya

terdapat pengaturan-pengaturan yang tidak efektif yang perlu diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan akan memberikan pedoman kepada masyarakat bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di masa mendatang. Pemilihan yang baru lalu itu menambah keyakinan bangsa bahwa tema-tema pembangunan yang dimanifestasikan dalam wujud program-program organisasi telah dapat menggairahkan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat untuk semakin meningkatkan kualitas kehidupan politik nasional. Warga masyarakat yang mempunyai hak memilih pada umumnya telah memperoleh kesempatan untuk ikut memberikan sumbangan positif bagi suksesnya dan berkualitasnya krida nasional, Pemilihan Umum, yang merupakan bagian dari pembangunan politik sebagai pengamalan Pancasila. Dengan demikian Pemilihan-pemilihan Umum yang akan datang dan seterusnya akan tetap diikuti oleh para pemilih yang berhak dengan persentase lebih dari 90%. Hal ini dapat tercapai antara lain karena adanya kesadaran politik masyarakat yang cukup sebagai hasil dari pembangunan politik yang selama ini dilaksanakan, sekalipun ada anggapan bahwa rakyat ikut Pemilihan Umum karena kewajiban.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas dan lebih baik, tidak cukup hanya dengan memperbaiki perangkat lunaknya, melainkan harus dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas aparat penyelenggaranya, kualitas organisasi kekuatan sosial politik sekaligus kualitas masyarakat bangsa Indonesia. Itulah beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam rangka mencapai prospek penyelenggaraan Pemilihan Umum di masa mendatang untuk semakin memantapkan kehidupan demokrasi Pancasila.

PENUTUP

Dari rangkaian uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa secara historis Pemilihan Umum itu bukan merupakan peristiwa baru bagi sejarah bangsa Indonesia. Pemilihan Umum adalah suatu proses politik yang panjang, baik ditinjau dari segi teknis operasionalnya maupun konsepsionalnya dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, Pemilihan Umum bukan sekadar tujuan pembangunan politik, tetapi lebih pada suatu alat atau sarana untuk mengaktualisasikan dan mengembangkan demokrasi Pancasila. Oleh sebab itu, Pemilihan Umum di Indonesia juga tidak diharapkan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibangun di atas landasan Pancasila.

Dalam Orde Baru ini Pemilihan Umum telah menjadi kalender politik nasional, dan tidak berlebihan bila dikatakan peristiwa politik ini telah semakin membudaya. Pemilihan Umum 1992 menunjukkan semakin terbukanya perbaikan-perbaikan, baik dalam hal-hal yang bersifat konsepsional maupun teknis operasionalnya. Kekurangan dan kelemahan diakui ada, tetapi sebaliknya keberhasilannya juga sulit untuk tidak diakui.

Dalam rangka pengembangan demokrasi Pancasila, melalui Pemilihan Umum 1992 telah diusahakan untuk sebanyak mungkin menampung pemikiran-pemikiran baru atau saran-saran dari organisasi-organisasi kekuatan sosial politik yang ada. Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan berusaha sebanyak mungkin mengakomodasikan perkembangan dan kebutuhan yang diperlukan.

Dari seluruh uraian di atas, yang merupakan perpaduan antara keinginan untuk menganalisa dan menyimak praktek-praktek di lapangan, dirasakan masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Sehubungan dengan hal itu, ada beberapa catatan yang kiranya bermanfaat untuk Pemilihan Umum yang akan datang, antara lain:

1. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, beserta sistem pemilihannya, yang kini masih diberlakukan, dinilai masih mampu menampung perkembangan politik, demografi maupun geografi Indonesia. Oleh karena itu Undang-Undang tersebut dinilai masih perlu dipertahankan;

2. Peraturan-peraturan pelaksanaan yang setiap saat ditinjau muatannya itu, di sana-sini terasa masih ada kelemahan-kelemahan atau kekurang-kurangannya yang perlu diperbaiki. Perbaikan-perbaikan itu dilakukan terutama untuk semakin menampakkan peningkatan keikutsertaan ketiga OPP dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum tersebut;

3. Mengingat praktek-praktek yang lalu, terjadinya pelanggaran-pelanggaran disebabkan antara lain oleh kurangnya pengertian mengenai aturan-aturan Pemilihan Umum. Oleh sebab itu untuk masa-masa mendatang pemasyarakatan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum perlu ditingkatkan, baik kepada aparat dan pelaksana Pemilihan Umum maupun kepada para pemimpin organisasi kekuatan sosial politik dan masyarakat. Dengan demikian mereka mampu memahami dan bahkan ikut menyebarluaskan isi peraturan perundang-undangan itu dengan tepat;

4. Rasa tanggung jawab para aparat pelaksana Pemilihan Umum dan OPP, lebih-lebih di tingkat desa, anggota pengawas dan para saksi perlu ditingkatkan. Untuk ini perlu diselenggara-

kan santiaji-santiaji secara bersama-sama. Selain untuk menghindarkan terjadinya kecurigaan, santiaji itu diharapkan semakin memperjelas hak dan kewajiban subyek-subyek yang terkait dalam Pemilihan Umum. Dengan demikian akan terjalin kerja sama dan kekompakan secara benar dalam pelaksanaan Pemilihan Umum;

5. Mengingat masih sering terjadi pelanggaran dalam setiap kampanye, maka untuk Pemilihan-pemilihan Umum di masa yang akan datang perlu dicarikan bentuk-bentuk kampanye yang baru yang benar-benar mampu meningkatkan peranan kampanye, yang tidak saja sebagai sarana menawarkan program OPP tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik yang sehat. Kampanye-kampanye dialogis dalam ruang-ruang terbatas tanpa dihadiri massa, tetapi oleh pemuka-pemuka masyarakat yang mampu diajak berdialog (bisa diajak "*mbat-mbatan rembug*") kiranya perlu ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Namun demikian, mengingat kehidupan politik sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih menganggap *show of forces* dan pengerahan massa ("arak-arakan") itu sebagai wujud penampakan eksistensinya, maka kampanye-kampanye semacam itu, yang biasanya dilakukan dengan pawai-pawai masih perlu dipertahankan, meskipun waktunya dibatasi dan pengamanannya perlu diperketat untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum tertentu, seperti tindak kriminal dan lain-lainnya.[23] Agar setiap kampanye Pemilihan Umum tidak selalu menjadi kulminasi pengerahan massa, maka

---

[23]Bagi sebagian masyarakat, kampanye dengan pengerahan massa dan pawai itu menjadi tontonan masyarakat yang sangat menarik. Sebaliknya bagi pemerintah, lontaran-lontaran yang muncul dalam kampanye itu dapat dijadikan semacam petunjuk apa sebenarnya yang terjadi di lapisan bawah, berkembang dan menjadi beban masyarakat.

sebagai gantinya agar hari-hari nasional atau hari penting suatu daerah diperingati dengan acara-acara pawai yang secara optimal mengikutsertakan potensi masyarakat, terutama generasi muda. Dengan demikian potensi-potensi yang sifatnya distruktif yang selalu muncul dalam setiap kampanye diharapkan dapat dieliminir;

6. Perangkat lunak dan aparat pelaksana administrasi pendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, baik ketrampilan maupun pengetahuan teknisnya agar bantuan dan kegiatannya dapat semakin memperlancar jalannya operasi seluruh tahap penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Bentuk-bentuk formulir administrasi Pemilihan Umum nampaknya perlu dikaji dan diteliti untuk kemungkinan disempurnakan dan disederhanakan agar memudahkan penggunaan dan pengisiannya oleh aparat penyelenggara Pemilihan Umum ditingkat paling bawah;

8. Penyediaan saksi-saksi di TPS-TPS yang menjadi tanggung jawab OPP agar diajukan lebih awal melalui prosedur dan mekanisme yang lebih sederhana dengan memberi pelimpahan wewenang kepada Camat a/n Ketua PPD II, sehingga jalur pengurusannya menjadi lebih pendek (menjadi lebih cepat). Dengan kemudahan seperti itu diharapkan keperluan saksi-saksi dari OPP di TPS-TPS akan menjadi lebih terpenuhi;

9. Para calon anggota DPR/MPR sebaiknya adalah mereka yang sungguh-sungguh mengenal daerah pemilihannya, dan sebaliknya juga dikenal oleh masyarakat daerah pemilihannya, meskipun calon tersebut tidak berdomisili di daerah pemilihannya.

Dengan perbaikan-perbaikan itu, diharapkan pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan datang akan semakin berkualitas dan tetap semarak. Tetapi semua ini terpulang kembali kepada kesadaran semua pihak untuk mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Sesempurnanya peraturan perundang-undangan yang tersedia hampir tiada artinya tanpa diikuti oleh kesadaran semua pihak untuk mematuhinya. Selain pemerintah, ketiga OPP juga berhak dan berkewajiban untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk semakin mengerti hak dan kewajiban politiknya. Dengan demikian Pemilihan Umum benar-benar dapat menjadi sarana pengembangan demokrasi Pancasila ataupun sarana dinamika dan kreativitas politik masyarakat tanpa harus meninggalkan esensi stabilitas ataupun persatuan dan kesatuan bangsa.

Lampiran

Lampiran 1

KOMPOSISI SUARA DAN KURSI, HASIL PEMILU 1992

Daerah Pemilihan	Pemilih Terdaftar	Persentase Suara Masuk	Perolehan Suara			Perolehan Kursi		
			PPP	Golkar	PDI	PPP	Golkar	PDI
DI Aceh	1.927.890	94,46	628.508	1.063.623	128.896	3	6	1
Sumatera Utara	5.438.086	93,45	553.846	3.622.891	904.966	2	16	4
Sumatera Barat	2.295.044	94,90	314.088	1.787.435	76.421	2	11	1
Riau	1.845.227	92,87	245.536	1.311.893	156.227	1	5	1
Jambi	1.132.251	96,65	53.463	992.438	48.469	0	6	0
Sumatera Selatan	3.540.232	90,91	384.04	2.260.716	573.657	2	9	2
Bengkulu	662.384	95,51	36.389	544.529	51.728	0	4	0
Lampung	3.293.864	96,91	118.761	2.887.420	185.823	0	10	1
DKI Jakarta	5.104.473	93,48	1.136.110	2.596.286	1.039.123	3	8	3
Jawa Barat	20.998.299	90,45	2.836.243	13.387.077	2.769.952	9	43	9
Jawa Tengah	17.770.458	87,33	3.556.412	8.606.820	3.355.268	13	32	12
DI Yogyakarta	1.911.164	88,09	343.803	986.517	353.209	1	4	1
Jawa Timur	21.173.457	88,91	4.746.782	11.073.118	3.006.100	16	36	10
Kalimantan Barat	1.833.888	89,68	240.221	1.050.112	354.253	1	5	2
Kalimantan Tengah	799.190	98,23	61.358	677.245	46.442	1	5	0
Kalimantan Timur	1.091.614	84,66	165.035	568.302	190.842	1	4	1
Kalimantan Selatan	1.545.740	92,35	300.457	994.298	132.694	2	7	1
Bali	1.855.666	92,58	34.225	1.348.153	335.550	0	6	2
Nusa Tenggara Barat	1.865.460	89,00	183.427	1.303.310	173.580	1	5	1
Nusa Tenggara Timur	1.839.135	96,28	32.610	1.615.130	123.026	0	11	1
Timor Timur	416.002	89,01	5.291	305.930	59.007	0	3	1
Sulawesi Selatan	4.043.948	94,31	294.214	3.424.003	95.814	2	21	0
Sulawesi Tengah	969.781	95,96	102.009	751.662	76.885	1	3	0
Sulawesi Utara	1.543.760	96,43	66.717	1.313.421	108.443	0	6	1
Sulawesi Tenggara	717.655	98,67	13.035	668.135	26.978	0	4	0
Maluku	1.021.924	92,22	150.982	696.109	95.336	1	4	0
Irian Jaya	929.105	94,78	21.085	762.758	96.797	0	8	1
JUMLAH	107.565.697	90,91	16.624.647	66.599.331	14.565.556	62	282	56

Sumber LPU/PPI

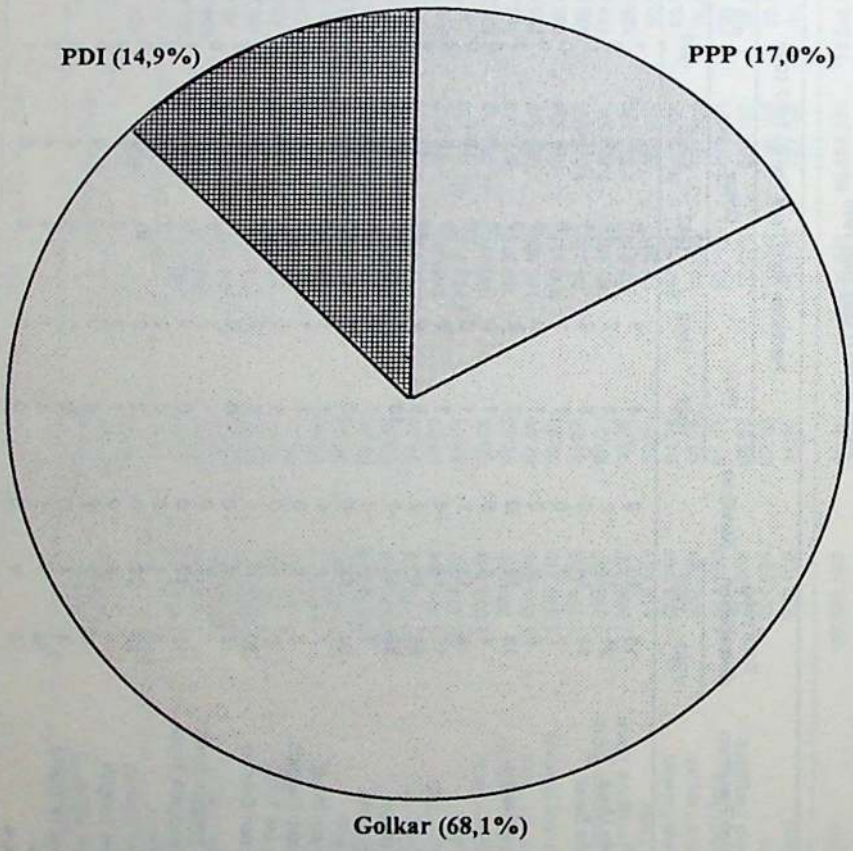
Lampiran 2

PERBANDINGAN JUMLAH KURSI YANG DIPEROLEH MASING-MASING OPP
PADA PEMILU 1987 DAN 1992

No.	Daerah Pemilihan	Kursi yang diperebutkan		Kenaikan	Perolehan Kursi Pada Pemilu 1987–1992						Prestasi OPP 1992		
					PPP		Golkar		PDI		PPP	Golkar	PDI
		1987	1992		1987	1992	1987	1992	1987	1992			
1	DI Aceh	10	10	0	4	3	5	6	1	1	–1	+1	tetap
2	Sumatera Utara	21	22	1	3	2	15	16	3	4	–1	+1	+1
3	Sumatera Barat	14	14	0	3	2	11	11	0	1	–1	tetap	+1
4	Riau	7	7	0	1	1	6	5	0	1	tetap	–1	+1
5	Jambi	6	6	0	1	0	5	6	0	0	–1	+1	tetap
6	Sumatera Selatan	13	13	0	2	2	9	9	2	2	tetap	tetap	tetap
7	Bengkulu	4	4	0	1	0	3	4	0	0	–1	+1	tetap
8	Lampung	10	11	1	1	0	9	10	0	1	–1	+1	+1
9	Jakarta	15	14	–1	3	3	8	8	4	3	tetap	tetap	–1
10	Jawa Barat	61	61	0	8	9	44	43	9	9	+1	–1	tetap
11	Jawa Tengah	58	57	–1	10	13	40	32	8	12	+3	–8	+4
12	DI Yogyakarta	7	6	–1	1	1	5	4	1	1	tetap	–1	tetap
13	Jawa Timur	64	62	–2	13	16	46	36	5	10	+3	–10	+5
14	Kalimantan Barat	7	8	1	1	1	5	5	1	2	tetap	tetap	+1
15	Kalimantan Tengah	6	6	0	1	1	5	5	0	0	tetap	tetap	tetap
16	Kalimantan Timur	6	6	0	1	1	4	4	1	1	tetap	tetap	tetap
17	Kalimantan Selatan	10	10	0	2	2	7	7	1	1	tetap	tetap	tetap
18	Bali	8	8	0	0	0	7	6	1	2	tetap	–1	+1
19	Nusa Tenggara Barat	7	7	0	1	1	6	5	0	1	tetap	–1	+1
20	Nusa Tenggara Timur	12	12	0	0	0	11	11	1	1	tetap	tetap	tetap
21	Timor Timur	4	4	0	0	0	4	3	0	1	tetap	–1	+1
22	Sulawesi Selatan	23	23	0	2	2	21	21	0	0	tetap	tetap	tetap
23	Sulawesi Tengah	4	4	0	1	1	3	3	0	0	tetap	tetap	tetap
24	Sulawesi Utara	6	7	1	0	0	5	6	1	1	tetap	+1	tetap
25	Sulawesi Tenggara	4	4	0	0	0	4	4	0	0	tetap	tetap	tetap
26	Maluku	4	5	1	1	1	3	4	0	0	tetap	+1	tetap
27	Irian Jaya	9	9	0	0	0	8	8	1	1	tetap	tetap	tetap
	JUMLAH	400	400	0	61	62	299	282	40	56	+1	–17	+16

Lampiran 3

Perolehan Suara
dalam Pemilu 1992



Diolah dari sumber: LPU/PPI.

Lampiran 4

PEMILU DALAM ANGKA

A. PEMILIHAN UMUM 1992

1. Pemilih terdaftar 107.565.697 jiwa, yang terdiri atas:
   Jawa : 66.957.851 suara (62,25%)
   luar Jawa : 40.607.846 suara (37,75%)

2. Berdasarkan perhitungan suara yang telah disahkan, jumlah suara sah mencapai 97.789.534 suara (90,91% dari pemilih terdaftar), yang terdiri atas:
   Jawa : 59.792.820 suara (61,144%)
   luar Jawa : 37.996.714 suara (38,856%)

3. Jumlah kursi yang diperebutkan 400 kursi, dengan perincian untuk daerah pemilihan,
   Jawa : 200 kursi
   luar Jawa : 200 kursi

4. Perolehan kursi dan suara setiap OPP adalah sebagai berikut:
   PPP : 62 kursi (15,5%), 16.624.647 suara (17%)
   Golkar : 282 kursi (70,5%), 66.599.331 suara (68,105%)
   PDI : 56 kursi (14%), 14.565.556 suara (14,895%)

5. a. Dari 62 kursi PPP itu, 42 kursi diperoleh di Jawa, dan 20 kursi diperoleh di luar Jawa.

   b. Dari 282 kursi Golkar itu, 123 kursi diperoleh di Jawa, dan 159 kursi diperoleh di luar Jawa.

   c. Dari 56 kursi PDI, 35 kursi diperoleh di Jawa, dan 21 kursi diperoleh di luar Jawa.

6. a. Dari 16.624.647 suara yang diperoleh PPP,
12.619.350 suara (75,91%) diperoleh di Jawa, dan
4.005.297 suara (24,09%) diperoleh di luar Jawa.

b. Dari 66.599.331 suara yang diperoleh Golkar,
36.649.818 suara (55,03%) diperoleh di Jawa, dan
29.949.513 suara (44,97%) diperoleh di luar Jawa.

c. Dari 14.565.556 suara yang diperoleh PDI,
10.523.652 suara (72,25%) diperoleh di Jawa, dan
4.041.904 suara (27,75%) diperoleh di luar Jawa.

B. PEMILIHAN UMUM 1971-1992

1. Sesuai dengan pertambahan penduduk di Indonesia, jumlah penduduk pada saat pendaftaran pemilih adalah sebagai berikut:
1971 = 114.190.218 jiwa*
1977 = 129.977.596 jiwa**
1982 = 146.530.911 jiwa
1987 = 162.921.989 jiwa
1992 = 177.447.592 jiwa

2. Sesuai dengan pertambahan penduduk, maka jumlah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih (yang mempunyai hak pilih sesuai dengan peraturan yang berlaku) adalah sebagai berikut:
1971 = 58.179.245 jiwa*
1977 = 70.378.750 jiwa**
1982 = 81.629.250 jiwa
1987 = 93.965.953 jiwa
1992 = 107.565.697 jiwa

3. a. Jumlah suara sah yang masuk adalah sebagai berikut:
1971 = 54.696.887 suara (94,02%)*
1977 = 63.998.344 suara (90,93%)**
1982 = 75.126.306 suara (92,03%)
1987 = 85.809.816 suara (91,3%)
1992 = 97.789.534 suara (90,91%)

---

*Tidak termasuk Irian Jaya.

**Tidak Termasuk Timor Timur

b. Ini juga berarti bahwa persentase suara tidak sah (termasuk Golput) mengalami perubahan, dan ada kecenderungan naik,

1971 = 5,98%
1977 = 9,07%
1982 = 7,97%
1987 = 8,7%
1992 = 9,09%

4. Berdasarkan data yang ada, perolehan kursi dan suara setiap OPP ternyata mengalami perubahan sebagai berikut:

a. Partai Persatuan Pembangunan:

Tahun	Perolehan Kursi	Perolehan Suara
1971	96* kursi (26,67%)	14.833.942 suara (25,50%)
1977	99 kursi (27,5%)	18.722.138 suara (26,70%)
1982	94 kursi (23,50%)	20.871.880 suara (27,78%)
1987	61 kursi (15,25%)	13.701.428 suara (15,97%)
1992	62 kursi (15,5%)	16.624.647 suara (17%)

b. Golongan Karya:

Tahun	Perolehan Kursi	Perolehan Suara
1971	236 kursi (65,56%)	34.348.673 suara (59,04%)
1977	232 kursi (64,44%)	39.313.354 suara (56,07%)
1982	242 kursi (60,5%)	48.334.724 suara (64,38%)
1987	299 kursi (74,75%)	62.783.680 suara (73,17%)
1992	282 kursi (70,5%)	66.599.331 suara (68,105%)

c. Kursi Partai Demokrasi Indonesia:

Tahun	Perolehan Kursi	Perolehan Suara
1971	30 kursi** (8,33%)	5.516.894 suara (9,48%)**
1977	29 kursi (8,06%)	5.459.987 suara (7,79%)
1982	24 kursi (6%)	5.919.702 suara (7,88%)
1987	40 kursi (10%)	9.324.708 suara (10,87%)
1992	56 kursi (14%)	14.565.556 suara (14,895%)

---

*Jumlah ini sebenarnya merupakan jumlah yang didapat oleh NU, MI, PSII, Perti, yang sebenarnya merupakan unsur-unsur partai yang kemudian berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan.

**Jumlah ini sebenarnya jumlah yang didapat oleh Partai Katolik, Parkindo, PNI, Murba dan IPKI, yang sebenarnya merupakan unsur-unsur partai yang kemudian berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

Lampiran 5

PARTISIPASI RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM

	1971	1977	1982	1987	1992
A	114.190.218	129.977.596	146.530.911	162.921.989	177.447.592
B	58.179.245	70.378.750	81.629.250	93.965.953	107.565.697
C	54.699.549	63.998.344	75.126.306	85.809.816	97.789.534
D	3.479.696	6.380.406	6.502.944	8.156.137	9.776.163
E	50,95	54,15	55,71	57,68	60,62
F	47,90	49,24	51,27	52,67	55,11
G	94,02	90,93	92,03	91,32	90,91
H	5,98	9,07	7,97	8,68	9,09

Catatan: A Jumlah Penduduk
B Jumlah Pemilih
C Jumlah Suara Sah
D Jumlah Suara Tidak Sah (B/C)
E Persentase Penduduk Terdaftar Untuk Pemilu (B/A)
F Persentase Penduduk Yang Memberikan Suara Sah (C/A)
G Persentase Pemilih Terdaftar Yang memberikan Suara Sah (C/B)
H Persentase Pemilih Terdaftar Yang Memberikan Suara Tidak Sah (D/B)

PERUBAHAN PARTISIPASI PEMILIHAN UMUM

Partisipan	Tahun 71-77	Tahun 77-82	Tahun 82-87	Tahun 87-92
AA	15.787.378	16.553.315	16.391.078	14.525.603
BB	12.199.505	11.250.500	12.336.703	13.599.744
CC	9.298.795	11.127.962	10.683.510	11.979.718
DD	2.900.710	122.538	1.653.193	1.620.026
Persentase				
AA	13,83	12,47	11,19	8,92
BB	3,20	1,56	1,97	2,94
CC	-3,09	1,1	-0,71	-0,41
DD	3,09	-1,1	0,71	0,41

Catatan: AA Kenaikan Jumlah Penduduk
BB Kenaikan Jumlah Pemilih Terdaftar
CC Kenaikan Jumlah Pemilih Memberikan Suara Sah
DD Kenaikan Jumlah Pemilih Memberikan Suara Tidak Sah

Lampiran 6

JUMLAH PENDUDUK DAN KURSI DPR YANG DIPEREBUTKAN

No.	Daerah Tingkat I	Keadaan Pemilu 1987		Keadaan Pemilu 1992		
		Jumlah Penduduk WNRI	Jumlah Anggota DPR-RI	Jumlah Penduduk WNRI	Pemilih Terdaftar Tahun 1992	Jumlah Anggota DPR-RI
1	DI Aceh	3.036.264	10	3.378.424	1.927.890	10
2	Sumatera Utara	9.267.643	21	10.045.649	5.438.086	22
3	Sumatera Barat	3.757.132	14	3.997.167	2.295.044	14
4	Riau	2.688.944	7	3.263.065	1.845.227	7
5	Jambi	1.740.746	6	1.985.126	1.132.251	6
6	Sumatera Selatan	5.546.056	13	6.263.883	3.540.232	13
7	Bengkulu	984.247	4	1.185.893	622.384	4
8	Lampung	5.251.173	10	5.929.606	3.293.864	11
9	DKI Jakarta	7.361.570	15	7.639.026	5.104.473	14
10	Jawa Barat	30.971.070	61	34.922.077	20.998.299	61
11	Jawa Tengah	27.070.136	58	28.799.603	17.770.458	57
12	DI Yogyakarta	2.841.476	7	2.918.547	1.911.164	6
13	Jawa Timur	30.484.419	64	31.991.287	21.173.457	62
14	Kalimantan Barat	2.864.369	7	3.237.041	1.833.888	8
15	Kalimantan Tengah	1.239.674	6	1.417.269	799.190	6
16	Kalimantan Selatan	2.329.424	10	2.559.882	1.545.740	10
17	Kalimantan Timur	1.521.539	6	1.860.390	1.091.614	6
18	Sulawesi Utara	2.303.019	6	2.453.682	1.543.760	7
19	Sulawesi Tengah	1.538.704	4	1.700.887	969.781	4
20	Sulawesi Tenggara	1.117.980	4	1.352.049	717.655	4
21	Sulawesi Selatan	6.459.362	23	6.930.698	4.043.948	23
22	Bali	2.647.376	8	2.754.335	1.855.666	8
23	Nusa Tenggara Barat	3.018.696	7	3.344.574	1.865.460	7
24	Nusa Tenggara Timur	3.021.909	12	3.265.499	1.839.135	12
25	Maluku	1.640.973	4	1.815.161	1.021.924	5
26	Irian Jaya	1.469.090	9	1.680.822	929.105	9
27	Timor Timur	628.998	4	755.950	416.002	4
	JUMLAH	162.801.989	400	177.447.592	107.565.697	400

Lampiran 7

JUMLAH PENDUDUK, PEMILIH DAN SUARA SAH SERTA PERSENTASENYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1971, 1977, 1982, 1987, 1992

No.	Daerah Pemilihan	1971				1977				1982			
		Penduduk	Pemilih	Suara	Persentase	Penduduk	Pemilih	Suara	Persentase	Penduduk	Pemilih	Suara	Persentase
1	D.I. Aceh	1.969.417	1.031.602	971.834	94,21	2.236.029	1.221.853	1.119.638	91,63	2.599.632	1.409.886	1.308.809	92,77
2	Sumatera Utara	6.247.898	2.725.843	2.546.564	93,42	7.033.542	3.517.707	3.178.776	90,37	8.146.163	4.210.774	3.919.563	93,08
3	Sumatera Barat	2.719.028	1.312.189	1.203.995	91,75	3.071.056	1.595.815	1.417.601	88,83	3.384.718	1.807.745	1.588.410	87,86
4	Riau	1.477.155	718.104	671.914	93,57	1.767.042	901.477	797.020	88,41	2.160.844	1.181.456	1.072.881	90,81
5	Jambi	979.613	490.949	462.900	94,29	1.183.319	638.751	598.950	93,77	1.453.714	786.328	762.517	96,97
6	Sumatera Selatan	3.239.839	1.554.290	1.414.446	91,00	3.803.260	1.962.674	1.673.551	85,27	4.620.311	2.497.512	2.226.119	89,13
7	Bengkulu	506.720	235.666	223.424	94,84	618.534	303.064	272.987	90,06	776.129	404.602	363.196	89,76
8	Lampung	2.664.491	1.265.502	1.211.124	95,70	3.598.702	1.837.766	1.706.807	92,87	4.676.196	2.429.545	2.204.059	90,71
9	DKI Jakarta	4.304.553	2.221.732	1.955.010	87,99	5.193.414	2.793.114	2.460.697	88,02	6.107.307	3.447.510	3.157.425	91,59
10	Jawa Barat	20.965.775	10.487.120	10.017.708	95,52	23.896.116	12.641.657	11.959.500	94,60	27.311.074	14.770.851	13.572.006	91,88
11	Jawa Tengah	21.326.413	11.019.628	10.283.307	93,32	23.424.142	12.742.967	10.898.716	85,53	25.280.966	14.232.371	13.130.290	92,25
12	D.I. Yogyakarta	2.247.970	1.247.970	1.162.654	93,16	2.621.644	1.453.251	1.310.792	90,20	2.739.513	1.625.342	1.442.181	88,73
13	Jawa Timur	24.080.152	13.285.676	12.462.912	93,81	26.917.700	15.665.710	14.510.485	92,63	28.759.533	17.229.789	15.647.405	90,81
14	Kalimantan Barat	1.736.535	880.612	829.333	94,18	2.003.101	1.084.686	1.000.878	92,27	2.508.191	1.366.996	1.257.593	91,99
15	Kalimantan Tengah	702.703	345.395	331.149	95,90	815.827	432.482	399.272	92,32	975.509	549.460	525.024	95,55
16	Kalimantan Selatan	1.655.701	854.776	796.630	93,20	1.826.661	983.129	845.239	85,97	2.085.443	1.178.437	1.075.715	91,28
17	Kalimantan Timur	680.429	359.422	328.898	91,50	943.196	535.001	459.099	85,81	1.200.064	678.748	575.444	84,78
18	Sulawesi Utara	1.659.780	808.951	778.939	96,29	1.921.460	987.622	936.447	94,82	2.135.290	1.158.815	1.124.212	97,01
19	Sulawesi Tengah	907.226	442.241	424.777	96,06	1.073.600	570.298	531.782	93,25	1.297.668	685.570	672.190	98,04
20	Sulawesi Tenggara	707.651	345.802	341.759	98,96	816.045	414.486	409.473	98,79	965.804	505.131	498.841	98,75
21	Sulawesi Selatan	4.980.823	2.614.235	2.514.648	96,19	5.537.539	2.933.067	2.793.738	95,25	6.024.198	3.252.294	3.105.669	95,49
22	Bali	2.061.160	1.105.552	1.048.090	94,96	2.313.562	1.300.301	1.173.936	90,28	2.468.176	1.441.160	1.361.754	94,49
23	Nusa Tenggara Barat	2.152.380	1.114.777	1.055.217	94,66	2.435.578	1.296.957	1.086.976	83,81	2.704.962	1.454.553	1.319.502	90,71
24	Nusa Tenggara Timur	2.242.237	1.177.043	1.149.005	97,62	2.490.274	1.347.115	1.309.383	97,20	2.753.461	1.499.363	1.472.960	98,23
25	Maluku	1.057.266	534.168	510.645	95,60	1.226.781	641.755	608.007	94,74	1.411.860	752.545	709.798	94,31
26	Irian Jaya	824.064	379.531	–	–	1.034.740	533.080	502.865	94,33	1.215.927	666.674	642.759	96,41
27	Timor Timur	–	–	–	–	–	–	–	–	564.890	311.796	311.325	99,84
	JUMLAH	115.014.282	58.558.776	54.696.887	94,02	129.977.596	70.378.750	63.998.344	90,93	146.530.911	81.629.250	75.126.306	92,03

Sumber: LPU

Lampiran 7 *(lanjutan)*

JUMLAH PENDUDUK, PEMILIH DAN SUARA SAH SERTA PERSENTASENYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1971, 1977, 1982, 1987, 1992

No.	Daerah Pemilihan	1987				1992			
		Penduduk	Pemilih	Suara	Persentase	Penduduk	Pemilih	Suara	Persentase
1	D.I. Aceh	3.036.264	1.645.982	1.537.613	93,4	3.378.424	1.927.890	1.821.027	94,91
2	Sumatera Utara	9.267.643	4.839.765	4.500.345	93,0	10.045.649	5.438.086	5.081.703	93,45
3	Sumatera Barat	3.757.132	2.061.688	1.912.869	92,8	3.997.167	2.295.044	2.177.944	94,90
4	Riau	2.688.944	1.444.743	1.353.307	93,7	3.263.065	1.845.227	1.713.656	92,87
5	Jambi	1.740.746	944.677	910.638	96,4	1.985.126	1.132.251	1.094.370	96,65
6	Sumatera Selatan	5.546.056	2.989.835	2.699.366	90,3	6.263.883	3.540.232	3.218.413	90,91
7	Bengkulu	984.147	528.823	502.667	95,0	1.185.893	662.384	632.646	95,51
8	Lampung	5.251.173	2.751.223	2.685.883	97,6	5.929.606	3.293.864	3.192.004	96,91
9	DKI Jakarta	7.361.570	4.435.120	3.975.152	89,6	7.639.026	5.104.473	4.771.519	93,48
10	Jawa Barat	30.971.070	17.582.857	15.911.962	90,5	34.922.077	20.998.299	18.993.272	90,45
11	Jawa Tengah	27.070.136	16.039.205	14.284.597	89,1	28.799.603	17.770.458	15.518.500	87,33
12	D.I. Yogyakarta	2.841.476	1.776.717	1.572.111	88,5	2.918.547	1.911.164	1.683.529	88,09
13	Jawa Timur	30.484.419	19.096.967	17.174.064	89,9	31.991.287	21.173.457	18.826.000	88,91
14	Kalimantan Barat	2.924.369	1.603.559	1.451.606	90,5	3.237.041	1.873.888	1.644.586	89,68
15	Kalimantan Tengah	1.239.674	675.398	664.873	98,4	1.417.269	799.190	785.045	98,23
16	Kalimantan Selatan	2.329..424	1.334.953	1.228.102	92,0	2.559.882	1.545.740	1.427.449	92,35
17	Kalimantan Timur	1.521.539	874.127	746.005	85,3	1.860.390	1.091.614	924.179	84,66
18	Sulawesi Utara	2.303.019	1.348.093	1.312.077	97,4	2.453.682	1.543.760	1.488.581	96,43
19	Sulawesi Tengah	1.538.704	822.992	787.678	95,7	1.700.887	969.781	930.556	95,96
20	Sulawesi Tenggara	1.177.980	602.425	600.517	99,7	1.352.049	717.655	708.148	98,67
21	Sulawesi Selatan	6.459.362	3.574.325	3.387.439	94,8	6.930.698	4.043.948	3.814.031	93,31
22	Bali	2.647.376	1.632.600	1.525.896	93,5	2.754.335	1.855.666	1.717.928	92,58
23	Nusa Tenggara Barat	3.018.696	1.646.441	1.475.290	89,6	3.344.574	1.865.460	1.660.317	89,00
24	Nusa Tenggara Timur	3.021.909	1.671.657	1.629.216	97,5	3.265.499	1.839.135	1.770.766	96,28
25	Maluku	1.640.973	870.914	825.124	94,7	1.815.161	1.021.924	942.427	92,22
26	Irian Jaya	1.469.090	806.743	793.827	98,2	1.680.822	929.105	880.640	94,78
27	Timor Timur	628.988	360.900	352.898	100,0	755.950	416.002	370.298	89,01
	JUMLAH	162.921.989	93.965.953	85.809.816	91,3	177.447.592	107.565.697	97.789.534	90,91

Sumber: LPU

Lampiran 8

JUMLAH KURSI YANG DIPEROLEH MASING-MASING ORGANISASI PESERTA
PEMILIHAN UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1971, 1977, 1982, 1987, 1992

No. Daerah Pemilihan	1971										1977			1982			1987			1992		
	Partai Katolik	PSII	NU	Parmusi	Golkar	Perkindo	Murba	PNI	Perti	IPKI	PPP	Golkar	PDI	PPP	Golkar	PDI	PPP	Golkar	PDI	PPP	Golkar	PDI
1 D.I. Aceh	.	1	1	1	5	.	.	.	1	.	6	4	.	6	4	.	4	5	1	3	6	1
2 Sumatera Utara	.	1	1	1	12	1	.	1	.	.	4	12	2	4	14	1	3	15	3	2	16	4
3 Sumatera Barat	.	.	1	5	9	.	.	.	1	.	5	9	.	5	9	.	3	11	.	2	11	1
4 Riau	.	.	.	1	5	.	.	.	.	.	2	4	.	2	4	.	1	6	.	1	5	1
5 Jambi	.	.	1	.	5	.	.	.	.	.	1	5	.	1	5	.	1	5	.	0	6	–
6 Sumatera Selatan	.	1	1	1	6	.	.	1	.	.	4	5	1	4	6	1	2	9	2	2	9	2
7 Bengkulu	.	.	.	1	3	.	.	.	.	.	1	3	.	1	3	.	1	3	.	0	4	–
8 Lampung	.	.	1	1	5	.	.	.	.	.	2	5	1	2	5	1	1	9	.	–	10	1
9 DKI Jakarta	.	2	6	2	35	.	.	1	.	.	5	5	2	5	6	2	3	8	4	3	8	3
10 Jawa Barat	.	1	13	3	29	.	.	1	.	.	14	33	3	13	32	5	8	44	9	9	43	9
11 Jawa Tengah	.	.	1	1	4	.	.	11	.	.	15	27	10	14	31	6	10	40	8	13	32	12
12 D.I. Yogyakarta	.	1	22	2	35	.	.	1	.	.	1	4	1	1	4	1	1	5	1	1	4	1
13 Jawa Timur	1	.	1	.	5	.	.	3	.	.	21	35	3	21	32	4	13	46	5	16	36	10
14 Kalimantan Barat	.	.	1	.	5	.	.	.	.	.	1	5	1	1	3	1	1	5	1	1	5	2
15 Kalimantan Tengah	.	.	2	1	7	.	.	.	.	.	2	4	.	1	5	.	1	5	.	1	5	–
16 Kalimantan Selatan	.	.	1	1	3	1	.	.	.	.	5	5	.	4	6	.	2	7	1	2	7	1
17 Kalimantan Timur	.	1	.	.	4	1	.	.	.	.	2	3	1	2	4	.	1	4	1	1	4	1
18 Sulawesi Utara	.	1	.	.	3	.	.	.	.	.	1	4	1	1	5	.	.	5	1	–	6	1
19 Sulawesi Tengah	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	1	3	.	1	3	.	1	3	.	1	3	–
20 Sulawesi Tenggara	.	1	2	2	18	.	.	.	.	.	.	4	.	.	4	.	.	4	.	–	4	–
21 Sulawesi Selatan	.	.	.	.	8	.	.	1	.	.	3	20	.	2	21	.	2	21	.	2	21	–
22 Bali	.	.	1	1	4	.	.	.	.	.	.	7	1	.	7	1	.	7	1	–	6	2
23 Nusa Tenggara Barat	2	.	.	.	8	2	.	.	.	.	2	4	.	2	4	.	1	6	.	1	5	1
24 Nusa Tenggara Timur	.	.	.	1	2	1	.	.	.	.	.	11	1	.	12	.	.	11	1	–	11	1
25 Maluku	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	1	3	.	1	3	.	1	3	.	1	4	–
26 Irian Jaya	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	.	8	1	.	8	1	–	8	1
27 Timor Timur	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	4	.	–	3	1
	3	10	56	26	236	7	.	20	2	.	99	232	29	94	242	24	61	299	40	62	282	56

Sumber: LPU

Lampiran 9

JUMLAH PEROLEHAN DAN PERSENTASE SUARA
SERTA JUMLAH KURSI YANG DIPEROLEH SETIAP OPP DALAM
PEMILU 1971, 1977, 1982, 1987, 1992

Tahun	Penduduk	Terdaftar	Suara Sah
1971	114.190.218	58.179.245	54.699.549
1977	129.977.596	70.378.750	63.998.344
1982	146.530.911	81.629.250	75.126.306
1987	162.921.989	93.965.953	85.809.816
1992	177.477.592	107.565.697	97.789.534

PEROLEHAN SUARA

Tahun	P P P	Golkar	P D I
1971	14.833.942	34.348.673	5.516.894
1977	18.722.138	39.313.354	5.459.987
1982	20.871.880	48.334.724	5.919.702
1987	13.701.428	62.783.680	9.324.708
1992	16.624.647	66.599.331	14.565.556

PERSENTASE SUARA

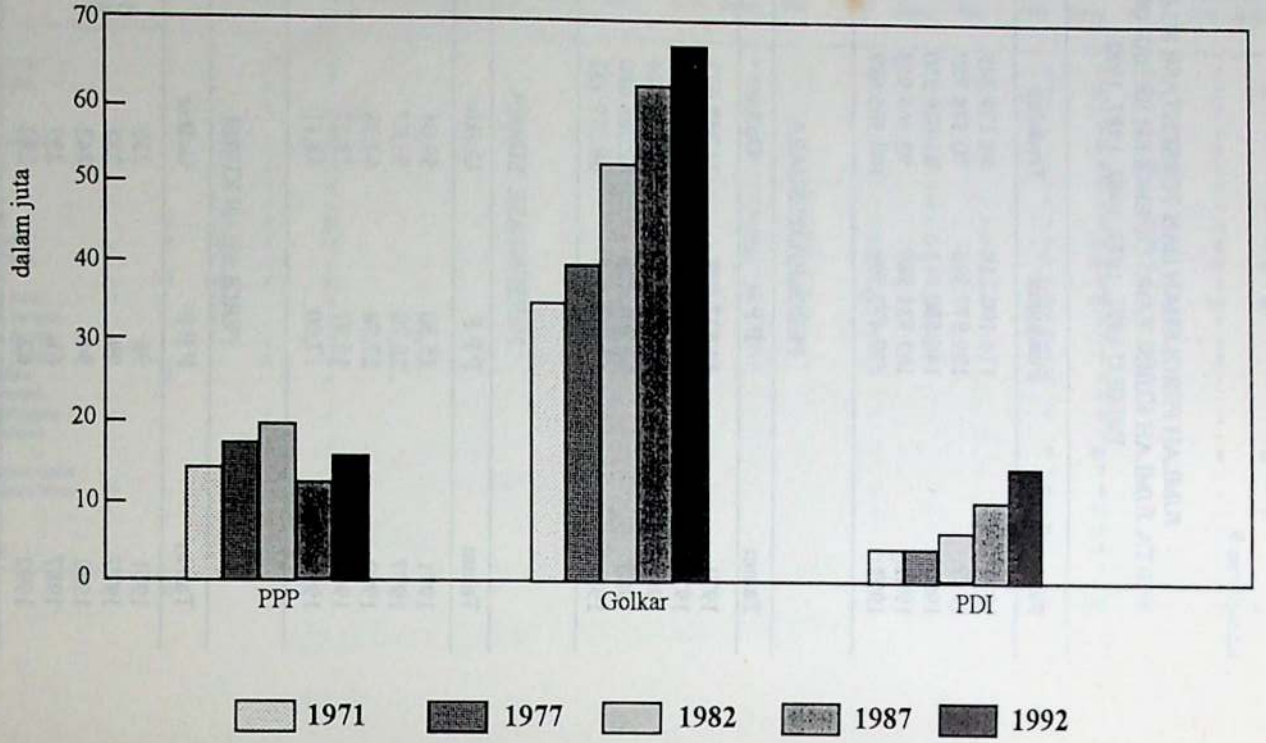
Tahun	P P P	Golkar	P D I
1971	25,50	59,04	9,48
1977	26,70	56,07	7,79
1982	27,78	64,38	7,88
1987	15,97	73,17	10,87
1992	17,00	68,11	14,90

PEROLEHAN KURSI

Tahun	P P P	Golkar	P D I
1971	96	236	30
1977	99	232	29
1982	94	242	24
1987	61	299	40
1992	62	282	56

Lampiran 10

PEROLEHAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM 1971 - 1992



Lampiran 11

PERTAMBAHAN ATAU PENURUNAN KURSI DPR YANG DIPEROLEH SETIAP OPP
DALAM PEMILIHAN UMUM 1987 DAN 1992

No.	Daerah Pemilihan	Kursi yang diperebutkan dalam Pemilu			1987			1992			Perubahan		
		1987	1992	Kenaikan	PPP	Golkar	PDI	PPP	Golkar	PDI	PPP	Golkar	PDI
1	DI Aceh	10	10	0	4	5	1	3	6	1	–1	+1	tetap
2	Sumatera Utara	21	22	1	3	15	3	2	16	4	–1	+1	+1
3	Sumatera Barat	14	14	0	3	11	0	2	11	1	–1	tetap	+1
4	Riau	7	7	0	1	6	0	1	5	1	tetap	–1	+1
5	Sumatera Selatan	13	13	0	2	9	2	2	9	2	tetap	tetap	tetap
6	Jambi	6	6	0	1	5	0	0	6	0	–1	+1	tetap
7	Bengkulu	4	4	0	1	3	0	0	4	0	–1	+1	tetap
8	Lampung	10	11	1	1	9	0	0	10	1	–1	+1	+1
9	DKI Jakarta	15	14	–1	3	8	4	3	8	3	tetap	tetap	–1
10	Jawa Barat	61	61	0	8	44	9	9	43	9	+1	–1	tetap
11	Jawa Tengah	58	57	–1	10	40	8	13	32	12	+3	–8	+4
12	DI Yogyakarta	7	6	–1	1	5	1	1	4	1	tetap	–1	tetap
13	Jawa Timur	64	62	–2	13	46	5	16	36	10	+3	–10	+5
14	Kalimantan Barat	7	8	1	1	5	1	1	5	2	tetap	tetap	+1
15	Kalimantan Tengah	6	6	0	1	5	0	1	5	0	tetap	tetap	tetap
16	Kalimantan Selatan	10	10	0	2	7	1	2	7	1	tetap	tetap	tetap
17	Kalimantan Timur	6	6	0	1	4	1	1	4	1	tetap	tetap	tetap
18	Sulawesi Utara	6	7	1	0	5	1	0	6	1	tetap	+1	tetap
19	Sulawesi Tengah	4	4	0	1	3	0	1	3	0	tetap	tetap	tetap
20	Sulawesi Tenggara	4	4	0	0	4	0	0	4	0	tetap	tetap	tetap
21	Sulawesi Selatan	23	23	0	2	21	0	2	21	0	tetap	tetap	tetap
22	Bali	8	8	0	0	7	1	0	6	2	tetap	–1	+1
23	Nusa Tenggara Barat	7	7	0	1	6	0	1	5	1	tetap	–1	+1
24	Nusa Tenggara Timur	12	12	0	0	11	1	0	11	1	tetap	tetap	tetap
25	Maluku	4	5	1	1	3	0	1	4	0	tetap	+1	tetap
26	Irian Jaya	9	9	0	0	8	1	0	8	1	tetap	tetap	tetap
27	Timor Timur	4	4	0	0	4	0	0	3	1	tetap	–1	+1
	Jumlah	400	400	0	61	299	40	62	282	56	+7-6	+7-24	+17-1

PPP tidak memperoleh kursi DPR di 9 Dati I (1987 kosong di 6 Dati I)
Golkar memperoleh kursi DPR di setiap Dati I
PDI tidak memperoleh kursi DPR di 7 Dati I (1987 kosong di 12 Dati I)

Diolah dari Sumber LPU

Lampiran 12

PERTAMBAHAN ATAU PENURUNAN KURSI DPR YANG DIPEROLEH OLEH SETIAP OPP
DALAM PEMILIHAN UMUM 1982 DAN 1987

No.	Daerah Pemilihan	Kursi yang diperebutkan dalam Pemilu			1982			1987			Perubahan		
		1982	1987	Kenaikan	PPP	Golkar	PDI	PPP	Golkar	PDI	PPP	Golkar	PDI
1	D.I. Aceh	10	10	0	6	4	0	4	5	1	–2	+1	+1
2	Sumatera Utara	19	21	2	4	14	1	3	15*	3	–1	+1	+2
3	Sumatera Barat	14	14	0	5	9	0	3	11*	0	–2	+2	tetap
4	Riau	6	7	1	2	4	0	1	6*	0	–1	+2	tetap
5	Sumatera Selatan	11	13	2	4	6	1	2	9*	2	–2	+3	1
6	Jambi	6	6	0	1	5	0	1	5*	0	tetap	tetap	tetap
7	Bengkulu	4	4	0	1	3	0	1	3*	0	tetap	tetap	tetap
8	Lampung	8	10	2	2	5	1	1	9*	0	–1	+4	–1
9	D.K.I. Jakarta	13	15	2	5	6	2	3	8*	4	–2	+2	+2
10	Jawa Barat	50	61	11	13	32	5	8	44*	9	–5	+12	+4
11	Jawa Tengah	51	58	7	14	31	6	10	40*	8	–4	+9	+2
12	D.I. Yogyakarta	6	7	1	1	4	1	1	5*	1	tetap	+1	tetap
13	Jawa Timur	57	64	7	21	32	4	13	46*	5	–8	+14	+1
14	Kalimantan Barat	7	7	0	1	5	1	1	5*	1	tetap	tetap	tetap
15	Kalimantan Tengah	6	6	0	1	5	0	1	5*	0	tetap	tetap	tetap
16	Kalimantan Selatan	10	10	0	4	6	0	2	7*	1	–2	+1	+1
17	Kalimantan Timur	6	6	0	2	4	0	1	4*	1	–1	tetap	+1
18	Sulawesi Utara	6	6	0	1	5	0	0	5*	1	–1	tetap	+1
19	Sulawesi Tengah	4	4	0	1	3	0	1	3*	0	tetap	tetap	tetap
20	Sulawesi Tenggara	4	4	0	0	4	0	0	4*	0	tetap	tetap	tetap
21	Sulawesi Selatan	23	23	0	2	21	0	2	21*	0	tetap	tetap	tetap
22	Bali	8	8	0	0	7	1	0	7*	1	tetap	tetap	tetap
23	Nusa Tenggara Barat	6	7	1	2	4	0	1	6*	0	–1	+2	tetap
24	Nusa Tenggara Timur	12	12	0	0	12	0	0	11*	1	tetap	–1	+1
25	Maluku	4	4	0	1	3	0	1	3*	0	tetap	tetap	tetap
26	Irian Jaya	9	9	0	0	8	1	0	8*	1	tetap	tetap	tetap
27	Timor Timur	4	4	0	0	4	0	0	4*	0	tetap	tetap	tetap
												+54–1	+17–1
	Jumlah	364	400	36	94	246	24	61	299	40	–33	+53	+16

Keterangan : + Kenaikan (pertambahan)
– Penurunan
.. Tetap (tidak ada perubahan)
* Golkar memenangkan mayoritas mutlak

Lampiran 13

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DAN PERSENTASENYA UNTUK TAHUN 1982, 1987 DAN 1992

No.	Daerah Pemilihan	1982		1987		1992		Naik	Turun
		P P P	%	P P P	%	P P P	%		
1	DI Aceh	772.819	59,08	660.644	42,97	637.571	35,05		•
2	Sumatera Utara	801.296	20,44	606.677	13,48	556.442	11,04		•
3	Sumatera Barat	615.789	38,76	375.529	19,63	314.485	14,50		•
4	Riau	276.678	25,78	203.555	15,04	249.249	14,61		•
5	Sumatera Selatan	847.045	38,05	508.006	18,82	384.895	12,01		•
6	Jambi	105.337	13,81	74.706	8,20	53.497	4,92		•
7	Bengkulu	94.959	24,78	51.547	10,25	35.830	5,75		•
8	Lampung	661.719	30,02	196.820	7,33	115.052	3,63		•
9	DKI Jakarta	1.268.878	39,20	851.456	21,42	1.088.357	24,21	**	
10	Jawa Barat	3.687.132	27,16	2.179.846	13,81	2.843.349	15,02	**	
11	Jawa Tengah	3.640.383	27,72	2.600.746	18,21	3.559.199	22,95	**	
12	DI Yogyakarta	336.664	23,34	277.846	14,49	343.649	20,40	**	
13	Jawa Timur	5.732.623	36,63	3.568.918	20,78	4.741.745	25,24	**	
14	Kalimantan Barat	260.722	20,72	224.996	15,50	238.943	14,52		•
15	Kalimantan Tengah	76.392	14,55	56.237	8,46	62.019	7,98		•
16	Kalimantan Selatan	426.485	39,64	304.716	24,81	301.261	21,24		•
17	Kalimantan Timur	183.280	31,85	157.474	21,11	165.290	17,90		•
18	Sulawesi Utara	76.060	6,76	71.064	5,41	66.485	4,49		•
19	Sulawesi Tengah	104.343	15,52	94.150	11,95	103.265	11,06		•
20	Sulawesi Tenggara	12.775	2,56	11.927	1,97	12.993	1,84		•
21	Sulawesi Selatan	317.824	10,23	300.629	8,87	294.306	7,75		•
22	Bali	26.444	2,00	25.398	1,66	34.466	1,99	**	
23	Nusa Tenggara Barat	371.509	28,15	175.337	11,88	183.721	11,08		•
24	Nusa Tenggara Timur	19.100	1,29	21.339	1,31	32.976	1,85	**	
25	Maluku	134.597	18,96	109.570	13,28	150.300	15,81	**	
26	Irian Jaya	20.354	3,16	21.716	2,76	21.107	2,40		•
27	Timor Timur	673	0,20	2.648	0,73	5.196	1,41	**	
	Nasional	20.871.880	27,78	13.701.428	15,97	16.595.648	17,06		

Sumber LPU

Lampiran 14

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA GOLONGAN KARYA
DAN PERSENTASENYA UNTUK TAHUN 1982, 1987 DAN 1992

No.	Daerah Pemilihan	1982		1987		1992		Naik	Turun
		Golkar	%	Golkar	%	Golkar	%		
1	D.I. Aceh	483.570	36,97	798.983	51,96	1.049.021	57,67	**	
2	Sumatera Utara	2.843.427	72,54	3.274.533	72,76	3.583.953	71,13		*
3	Sumatera Barat	959.492	60,41	1.504.457	78,65	1.776.469	81,91	**	
4	Riau	769.131	71,69	1.078.942	79,73	1.298.863	76,13		*
5	Sumatera Selatan	1.247.287	56,02	1.869.635	69,26	2.234.941	69,76	**	
6	Jambi	649.591	84,80	809.299	88,87	982.974	90,41	**	
7	Bengkulu	256.485	70,62	426.301	84,81	535.169	85,88	**	
8	Lampung	1.308.274	59,36	2.337.563	87,03	2.866.456	90,41	**	
9	D.K.I. Jakarta	1.456.216	44,99	1.996.837	50,23	2.381.766	52,97	**	
10	Jawa Barat	8.596.458	63,33	11.347.051	71,31	13.318.954	70,36		*
11	Jawa Tengah	7.940.158	60,47	9.743.228	68,21	8.599.186	55,44		*
12	D.I. Yogyakarta	873.260	60,55	1.103.429	70,19	987.232	58,61		*
13	Jawa Timur	8.884.252	56,78	12.290.362	71,21	11.038.479	58,77		*
14	Kalimantan Barat	892.801	70,99	997.707	68,73	1.051.969	63,92		*
15	Kalimantan Tengah	442.197	84,22	592.973	89,19	668.055	85,93		*
16	Kalimantan Selatan	637.397	59,25	881.987	71,82	984.099	69,38		*
17	Kalimantan Timur	352.746	61,29	505.919	67,82	568.138	61,52		*
18	Sulawesi Utara	979.486	87,12	1.148.651	87,49	1.309.470	88,35	**	
19	Sulawesi Tengah	546.468	81,29	654.742	83,12	753.289	80,69		*
20	Sulawesi Tenggara	483.598	96,94	583.386	97,15	666.737	94,36		*
21	Sulawesi Selatan	2.769.736	89,18	3.049.126	90,01	3.410.740	89,82		*
22	Bali	1.203.101	88,34	1.338.876	87,74	1.352.903	78,29		*
23	Nusa Tenggara Barat	905.280	68,60	1.217.950	82,56	1.300.132	78,42		*
24	Nusa Tenggara Timur	1.419.204	96,35	1.543.497	94,74	1.624.535	91,05		*
25	Maluku	534.086	75,24	672.281	81,48	705.078	74,15		*
26	Irian Jaya	594.415	92,47	737.887	92,95	762.250	86,60		*
27	Timor Timur	309.608	99,44	338.078	93,68	305.401	82,75		*
	Nasional	48.334.724	64,38	62,783,680	73,17	599.331	68,105%		

Sumber LPU

Lampiran 15

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
DAN PERSENTASENYA UNTUK TAHUN 1982, 1987 DAN 1992

No.	Daerah Pemilihan	1982		1987		1992		Naik	Turun
		PDI	%	PDI	%	PDI	%		
1	DI Aceh	51.700	3,95	77.986	5.07	132,495	7.28	**	
2	Sumatera Utara	274.840	7,01	619.195	13.76	898,092	17.82	**	
3	Sumatera Barat	13.129	0,83	32.883	1.72	77,900	3.59	**	
4	Riau	27.072	2,52	70.810	5.23	157,962	9.26	**	
5	Sumatera Selatan	131.787	5,92	321.625	11.92	583,832	18.22	**	
6	Jambi	10.589	1,34	26.633	2.93	50,733	4.67	**	
7	Bengkulu	11.752	3,24	24.819	4.94	52,189	8.37	**	
8	Lampung	234.066	10,62	151.500	5.64	188,933	5.96	**	
9	DKI Jakarta	511.710	15,81	1.126.859	28.35	1,026,070	22.82		
10	Jawa Barat	1.288.416	9,46	2.367.065	14.88	2,768,015	14.62		
11	Jawa Tengah	1.549.749	11,20	1.940.623	13.58	3,353,127	21.62	**	
12	DI Yogyakarta	232.257	16,10	240.836	15.32	353,532	20.99	**	
13	Jawa Timur	1.030.530	6,59	1.374.784	8.01	3,003,235	15.99	**	
14	Kalimantan Barat	109.070	8,28	228.903	15.77	354,865	21.56	**	
15	Kalimantan Tengah	6.435	1,22	15.663	2.35	47,354	6.09	**	
16	Kalimantan Selatan	11.833	1,10	41.399	3.37	132,970	9.38	**	
17	Kalimantan Timur	39.418	6,85	82.612	11.07	190,141	20.59	**	
18	Sulawesi Utara	68.666	6,10	93.162	7.10	106,268	7.17	**	
19	Sulawesi Tengah	21.379	3,18	38.778	4.93	77,047	8.25	**	
20	Sulawesi Tenggara	2.468	0,49	5.204	0.88				
21	Sulawesi Selatan	28.109	0,58	37.684	1.12	92,079	2.42	**	
22	Bali	132.209	0,97	161.622	10.60	340,761	19.72	**	
23	Nusa Tenggara Barat	42.713	5,23	82.003	5.56	174,053	10.56	**	
24	Nusa Tenggara Timur	34.656	2,35	64.389	3.95	126,677	7.10	**	
25	Maluku	4.111	5,79	43.273	5.24	95,486	10.04	**	
26	Irian Jaya	27.990	4,35	34.224	4.29	96,812	11.00	**	
27	Timor Timur	1.044	0,33	20.174	5.59	58,449	15.84	**	
	Nasional	5.919.702	7,88	9.324.708	10.87	14.565.933	14,895		

Sumber LPU

Lampiran 16

PEROLEHAN SUARA PPP DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA 1971, 1977, 1982, 1987, 1992

No. Daerah Pemilihan	1971	1977	1982	1987	1992
1 DI Aceh	475.099	641.256	772.819	660.644	628.508
2 Sumut	402.866	706.289	801.296	606.677	553.846
3 Sumbar	415.755	460.024	615.789	375.529	314.088
4 Riau	138.131	270.374	276.678	203.555	245.536
5 Jambi	48.177	93.797	105.337	74.706	53.463
6 Sumsel	425.068	713.310	847.045	508.006	384.040
7 Bengkulu	34.519	59.676	94.959	51.547	36.389
8 Lampung	267.012	525.527	661.719	196.820	118.761
Sumatera	2.206.627	3.470.253	4.175.642	2.677.484	2.334.631
			%	%	%
1 DI Aceh			59,08	42,97	34,51
2 Sumut			20,44	13,48	10,90
3 Sumbar			38,76	19,63	14,42
4 Riau			25,78	15,04	14,33
5 Jambi			13,81	8,20	4,88
6 Sumsel			38,05	18,82	11,93
7 Bengkulu			24,78	10,25	5,75
8 Lampung			30,02	7,33	3,72

Catatan: Di 7 daerah pemilihan Sumatra sejak 1982, PPP mengalami penurunan suara, tidak hanya persentasenya tetapi juga jumlah suaranya.

Lampiran 17

PEROLEHAN SUARA GOLKAR DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA
1971, 1977, 1982, 1987, 1992

No. Daerah Pemilihan	1971	1977	1982	1987	1992
1 DI Aceh	483.085	460.992	483.570	798.983	1.063.623
2 Sumut	1.786.028	2.112.550	2.843.427	3.274.533	3.622.891
3 Sumbar	761.165	942.752	959.492	1.504.457	1.787.435
4 Riau	515.505	504.724	769.131	1.078.942	1.311.893
5 Jambi	408.331	500.091	694.591	809.299	992.438
6 Sumsel	885.732	833.804	1.247.287	1.869.635	2.260.716
7 Bengkulu	184.805	208.684	256.485	426.301	544.529
8 Lampung	869.894	1.055.525	1.308.274	2.337.563	2.887.420
Sumatera	5.894.545	6.619.122	8.562.257	12.099.713	14.470.945
			%	%	%
1 DI Aceh			36,97	51,96	58,41
2 Sumut			72,54	72,76	71,29
3 Sumbar			60,41	78,65	82,07
4 Riau			71,69	79,73	76,55
5 Jambi			84,80	88,87	90,69
6 Sumsel			56,02	69,26	70,24
7 Bengkulu			70,62	84,81	86,07
8 Lampung			59,36	87,03	90,46

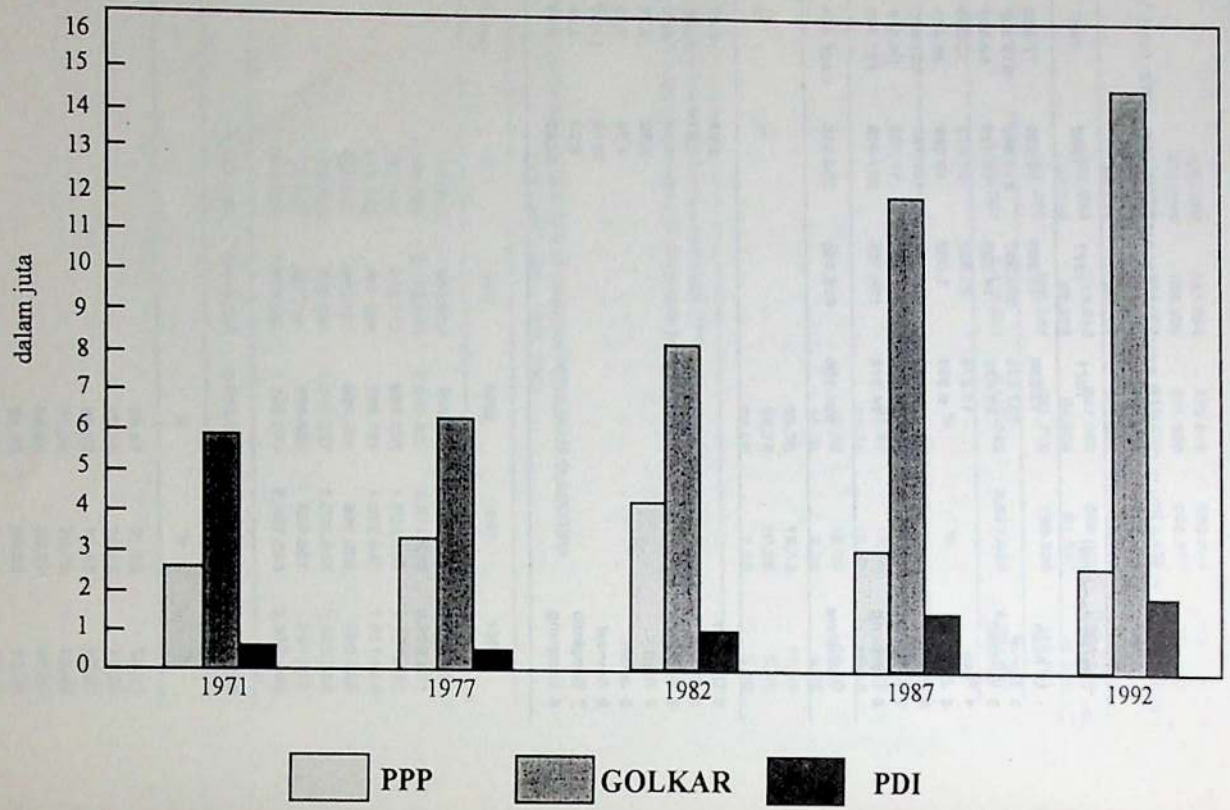
Lampiran 18

PEROLEHAN SUARA PDI DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA 1971, 1977, 1982, 1987, 1992

No. Daerah Pemilihan	1971	1977	1982	1987	1992
1 DI Aceh	13.650	17.390	51.700	77.986	128.896
2 Sumut	357.670	359.937	274.840	619.195	904.966
3 Sumbar	27.075	14.825	13.129	32.883	76.421
4 Riau	18.278	21.922	27.072	70.810	156.227
5 Jambi	6.392	5.062	10.589	26.633	48.469
6 Sumsel	103.646	126.437	131.787	321.625	573.657
7 Bengkulu	4.177	4.627	11.752	24.819	51.728
8 Lampung	74.218	125.755	234.066	151.500	185.823
Sumatera	605.106	675.955	754.935	1.325.451	2.126.187
			%	%	%
1 DI Aceh			3,95	5,07	7,08
2 Sumut			7,01	13,76	17,81
3 Sumbar			0,83	1,72	3,51
4 Riau			2,52	5,23	9,12
5 Jambi			1,34	2,93	4,43
6 Sumsel			5,92	11,92	17,82
7 Bengkulu			3,24	4,94	8,18
8 Lampung			10,62	5,64	5,82

Lampiran 19

PEROLEHAN SUARA OPP DI SUMATERA DALAM PEMILU 1992



Lampiran 20

TATA CARA, SUASANA DAN PANDANGAN TENTANG KAMPANYE PEMILU 1992

MENSESNEG Moerdiono ketika menyerahkan 15 buah mobil kepada ketiga OPP atas nama Presiden tanggal 9 Mei 1992 di Jakarta mengungkapkan, Presiden Soeharto telah menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Pembangunan V yang dicalonkan oleh OPP untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Selain itu selama melakukan kampanye para Menteri diberikan cuti. Selama masa kampanye tidak ada Menteri yang meresmikan proyek. Yang meresmikan proyek adalah Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara itu Mendagri/KETUA LPU Rudini melalui RRI/TVRI tanggal 9 Mei 1992 menegaskan, dalam penyelenggaraan kampanye ketiga OPP mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat. Artinya ketiga OPP mempunyai kedudukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang sama dalam melaksanakan kampanye di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga OPP mempunyai kewajiban yang sama pula untuk mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye yang diselenggarakan ketiga OPP. Tentu saja dengan memperhatikan keamanan, ketertiban dan kepentingan umum. Semua yang hadir dalam kampanye dan juga ketiga OPP yang menyelenggarakan kampanye agar menciptakan suasana demokratis yang penuh kebersamaan, kekeluargaan, keamanan dan ketertiban. Penyelenggaraan Pemilu hendaknya semakin berkualitas (*Kompas*, 10 Mei 1992).

Sementara itu pelanggaran kampanye mulai terjadi pada putaran ketiga. Di Jakarta, pelanggaran terjadi ketika berlangsung kampanye

PDI. Sebagian kendaraan massa PDI digiring ke Polda Metro Jaya karena melanggar ketentuan lalu lintas, dan diberi pengarahan seperlunya. Hal yang sama terjadi juga di Yogyakarta. Aparat keamanan setempat mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan disiplin berlalu lintas (*Kompas*, 19 Mei 1992).

Ketiga OPP di DKI Jakarta, masing-masing Ketua DPW PPP dr. Djufrie AS, Ketua DPD Golkar Basofi Sudirman, dan Ketua DPD PDI Alex Asmasoebrata, tanggal 19 Mei 1992 mengakui bahwa sampai putaran ketiga kampanye banyak terjadi pelanggaran atas tata cara kampanye serta kesepakatan bersama yang telah diputuskan. Antara lain, pelanggaran lalu lintas, melakukan intimidasi kepada masyarakat yang berupa tindakan pemaksaan, melawan dan menganiaya petugas keamanan, merusak alat peraga OPP milik sendiri atau OPP lain, serta pelanggaran oleh jurkam yang mengeluarkan nada-nada tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengakuan tersebut merupakan hasil pertemuan Muspida DKI dan ketiga OPP di ruang rapat Pangdam Jaya K. Harseno selaku Pangkolakop Pam (Pengamanan) Pemilu 1992 di Jakarta Raya tanggal 19 Mei 1992.

Atas pelanggaran itu ketiga OPP sepakat untuk mentaati dan mematuhi seluruh peraturan perundangan dan tata cara kampanye sebagaimana yang tertuang dalam Keppres No. 8 Tahun 1992 dan SK Gubernur No. 009 Tahun 1992; sepakat pada setiap acara kampanye para jurkam masing-masing OPP mengajak massa yang hadir untuk mengikuti acara kampanye secara tertib; menghimbau seluruh jajarannya beserta para simpatisan dapat bersama-sama mengendalikan diri agar dapat menciptakan suasana kampanye yang meriah dan berkualitas.

Menjawab pertanyaan wartawan di Jayapura, 19 Mei 1992, Jaksa Agung Singgih SH, selaku Ketua Panwaslakpus Pemilu, menilai pelaksanaan kampanye Pemilu pada minggu kedua cenderung brutal, terutama di Jakarta. Batas toleransi telah terlampaui. Oleh karena itu petugas akan menindak lebih tegas para pelanggar peraturan kampanye. Tindakan melawan hukum dalam kampanye tidak dapat dibenarkan. OPP agar mempersiapkan kampanye secara matang dan berusaha menghindari terjadinya penyimpangan.

Kadispen Polda Metro Jaya Letkol (Pol.) Latief Rabar mengatakan di Jakarta, 19 Mei 1992, petugas telah menindak tegas para pelanggar kampanye. Setidaknya 820 pengemudi kendaraan roda empat dan dua yang mengangkut massa kampanye ditilang. Dari jumlah itu 201 kendaraan di antaranya terpaksa ditahan (*Media Indonesia*, 20 Mei 1992). Sedangkan kasus pengeroyokan polisi oleh massa pendukung salah satu OPP di Klender, Jakarta Timur, 18 Mei 1992, tengah diusut pihak berwajib, dan bila terbukti akan diproses sesuai hukum yang berlaku (*Kompas*, 20 Mei 1992).

Sementara itu, Ir. Sarwono Kusumaatmadja (Golkar), H. Hamzah Haz (PPP) dan Drs. Kwik Kian Gie (PDI) yang dihubungi secara terpisah di ruang kerjanya tanggal 18 Mei 1992, menginginkan dibukanya forum dialogis OPP di media elektronik. Forum dialogis itu dimaksudkan untuk melengkapi kampanye di lapangan dan kampanye OPP di RRI dan TVRI. Mereka menyatakan tidak keberatan berdebat atau berdiskusi politik dengan sesama kontestan Pemilu dalam media elektronik. Bila ide itu tidak dapat dilaksanakan, masing-masing OPP bersedia mengadakan diskusi dengan pengamat politik, wartawan dan kalangan teoretisi dari kampus.

Mereka mengemukakan hal tersebut menanggapi penilaian Mendagri Rudini selaku Ketua LPU tentang kampanye (*Kompas*, 15 Mei 1992). Dikatakan, kampanye sekarang ini bukanlah kampanye yang ideal. Kampanye yang baik adalah yang dilakukan melalui diskusi atau debat-debat politik, termasuk melalui media elektronik dan pers (*Kompas*, 20 Mei 1992).

Menjawab pertanyaan wartawan seusai mengikuti kampanye Golkar di Tanjung Priok Jakarta Utara, 20 Mei 1992, fungsionaris Golkar Sudomo menilai cara-cara kampanye seperti sekarang ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan politik di masyarakat. Mungkin pada Pemilu 1997 cara-cara kampanye itu akan berubah, dilakukan di ruang terbatas yang dihadiri semua OPP, adu program dan diskusi. Ini mungkin yang efektif (*Pelita*, 21 Mei 1992).

Sementara itu melalui Sekwilda DIY Suprastowo di Kepatihan Yogyakarta, 20 Mei 1992, Gubernur DIY Paku Alam VIII selaku Ketua DPD I DIY mengeluarkan keputusan yang melarang penggunaan se-

peda motor roda dua untuk kegiatan kampanye Pemilu 1992, serta penggunaan segala bentuk kendaraan untuk pawai dalam rangka kampanye. Larangan ini dikeluarkan setelah mengamati jalannya kampanye selama ini yang masih kurang tertib dengan terjadinya beberapa pelanggaran sehingga menimbulkan kerawanan-kerawanan dalam masyarakat. Keputusan ini merupakan hasil rapat antara PPD, Panwaslak, dan ketiga OPP, yang juga dihadiri Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Hariyoto P.S. dan Kapolda Jateng/DIY Mayjen (Pol.) Aji Komaruddin.

Dalam pada itu Sekjen DPP PDI Nico Daryanto menyerukan kepada seluruh warga pendukung partainya di seluruh Indonesia agar mematuhi peraturan kampanye (*Kompas*, 21 Mei 1992).

Di Semarang, 20 Mei 1992, empat orang mahasiswa diciduk petugas gabungan dari Poltabes dan Kodim 0733 karena memimpin ratusan mahasiswa dalam sebuah prosesi anti Pemilu di halaman Fakultas Sastra Undip (*Suara Karya*, 21 Mei 1992). Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 1992, Panwaslak Tingkat II Semarang mengumumkan bahwa mulai tanggal 23 Mei 1992 penggunaan kaos bertanda gambar OPP hanya diperbolehkan di tempat kampanye. Juga dilarang meneriakkan yel-yel yang menghina nama pejabat, pemerintah atau OPP lainnya maupun perorangan (*Media Indonesia*, 23 Mei 1992).

Tanggal 22 Mei 1992, kota Yogyakarta "berkabung". Ribuan bendera putih memenuhi jalan-jalan di seluruh pelosok kota, menggantikan bendera PPP dan PDI yang diturunkan warga kedua OPP itu, menyusul protes atas pelarangan berkampanye menggunakan kendaraan sepeda motor di jalan raya. Aksi pemasangan bendera putih itu merembet ke Gunung Kidul. Sekitar 5.000 warga PPP berkendaraan sepeda motor menuju lokasi kampanye, sambil mengibarkan bendera putih.

Dalam pertemuan antara ketiga OPP dengan PPD I serta Panwaslak DIY di Kepatihan Yogyakarta malam harinya dicapai beberapa kesepakatan, antara lain kesamaan pandangan tentang pelaksanaan peraturan kampanye, dan masing-masing pihak menghormati hak, fungsi dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan kampanye; ketiga OPP sepakat akan mengendalikan massanya, khususnya mereka yang ketakutan agar semangat berkampanye dapat dibangkitkan kembali.

Menurut Ketua DPD PDI DIY Soetardjo Soerjogoeritno, pertemuan tersebut menyusul ancaman PDI untuk tidak ikut kampanye jika warga PDI diperlakukan secara tidak adil oleh aparat keamanan. Dikatakan, bagi PDI lebih penting memelihara keamanan warganya daripada keselamatan mereka harus terancam.

Pada hari yang sama, Ketua DPD Golkar DIY Sri Sultan Hamengkubuwono menghimbau PPP dan PDI DIY mempertimbangkan aksi penurunan benderanya. Ini dapat menurunkan citra Yogya secara nasional dan internasional.

Sementara itu, menyusul penurunan bendera PPP dan PDI tersebut, pada hari yang sama sekitar 3.000 mahasiswa berbaris dari kampus IAIN Sunan Kalijaga membawa bendera putih dan mengacungkan empat jari. Mereka menamakan dirinya sebagai "golongan putih". Mereka menolak tawaran dialog Kapolwil Yogyakarta Kol. (Pol.) Drs. Nana Permana. Aksi baru berakhir setelah Kapolwil mengizinkan mereka bertemu dengan Ketua DPRD tanggal 23 Mei 1992.

Dalam pada itu tujuh organisasi kemasyarakatan pemuda-mahasiswa (PMII, HMI, GAMKI, PMKRI, GAKARI, Pemuda Muhammadiyah dan Gemabudhi) dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan di Jakarta 22 Mei 1992, menyesalkan pelaksanaan kampanye yang cenderung brutal dan tidak memperhatikan peringatan hari raya keagamaan. Mereka menuntut agar pelaksanaan kampanye yang masih beberapa hari lagi dapat berjalan lebih baik dan lebih tertib. Sementara itu Ketua DPRD DKI Jakarta Suparno Wuryosubroto menilai tindakan massa semakin brutal dan meresahkan masyarakat. Hal ini tercermin dari takutnya masyarakat ke luar rumah saat iringan kampanye lewat, dan beberapa pemilik toko di beberapa wilayah menutup tokonya. Ia meminta aparat lebih tegas menindak peserta kampanye yang menyalahi ketentuan (*Media Indonesia*, 23 Mei 1992).

Pangab Jenderal TNI Try Sutrisno ketika menutup kursus singkat angkatan II Lemhannas tanggal 23 Mei 1992 di Jakarta mengemukakan, aksi protes puluhan pemuda berupa penempatan belasan keranda jenazah tanggal 22 Mei 1992 di halaman gedung DPRD DI Yogyakarta dan aksi pencopotan bendera/tanda gambar PPP dan PDI sehari sebelumnya yang dikenal dengan nama "Peristiwa Yogya", merupakan

tanggung jawab semua pihak. Dalam menyelesaikan peristiwa itu hendaknya jangan ada yang saling menyalahkan. Semua pihak agar kembali kepada niat, tekad dan semangat untuk menyukseskan Pemilu 1992.

Sementara itu Ketua PPI Menteri Rudini menginstruksikan kepada aparat PPD Tingkat I DI Yogyakarta untuk menyelesaikan "Peristiwa Yogya" dengan cepat pada tingkat daerah, baik melalui jalur hukum atau musyawarah. Siapa saja yang melanggar Keppres mengenai kampanye agar ditindak lebih tegas. Peristiwa itu terjadi menyusul diberlakukannya keputusan PPD I Yogyakarta yang melarang pawai dengan sepeda motor sejak 21 Mei 1992. Keputusan PPD itu tak bertentangan dengan Keppres mengenai kampanye.

Mendagri/Ketua PPI Rudini tanggal 26 Mei 1992 mengadakan pertemuan dengan ketiga pucuk pimpinan OPP, juga dihadiri oleh Ketua Panwaslakpus Jaksa Agung Singgih SH dan Kasospol ABRI Letjen TNI Harsudiono Hartas. Usai pertemuan Rudini mengemukakan bahwa data nasional sampai tanggal 20 Mei 1992 menunjukkan korban yang meninggal dunia dalam kegiatan kampanye tercatat 15 orang dan 25 orang lainnya menderita luka-luka. Mereka umumnya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Korban-korban kampanye itu timbul sebagai akibat perilaku tidak tertib dalam menggunakan kendaraan bermotor dan tindakan yang mengarah kepada kebrutalan. Ketiga OPP juga sepakat untuk serius berkampanye agar tidak ada nanti rakyat yang menjadi Golput. Mereka juga berjanji untuk mentaati jadwal kampanye dan peraturan yang telah dan selalu dimusyawarahkan lebih dahulu di tiap daerah. Berdasarkan kesepakatan ketiga OPP itu, Mendagri minta kepada jajaran ABRI untuk bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran.

Mengenai kasus Yogya, Mendagri mengemukakan bahwa situasi sudah kembali normal. PPD I, Panwaslakda I dan pimpinan ketiga OPP di Yogya selalu mengadakan pertemuan rutin pada pukul 21.00 WIB untuk mengevaluasi pelaksanaan kampanye. Dalam pertemuan mereka tanggal 22 Mei 1992, diperoleh kesimpulan bahwa ketiga OPP Yogya dapat memahami isi dan jiwa SK Gubernur DIY yang melarang penggunaan kendaraan roda dua untuk kampanye. Hanya mereka minta agar pelaksanaannya lebih arif. PPP dan PDI menyatakan bahwa sejak semula tidak ada niat untuk tidak melanjutkan kampanye Pemilu.

Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol. M.H. Ritonga usai memantau situasi kampanye PDI tanggal 24 Mei 1992, memerintahkan kepada Kepala Direktorat Intelijens dan Pengamanan Kol. (Pol.) Ign. Kussuyudono untuk memanggil Ketua DPD DKI Jakarta Alex Asmasoebrata, sehubungan dengan tidak tertibnya kampanye PDI di hampir seluruh wilayah Jakarta tanggal 24 Mei 1992. Alex sebagai Ketua DPD PDI harus mempertanggungjawabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ribuan massa pendukung PDI. Kalau hanya satu atau dua kelompok masih bisa dimengerti bahwa pelanggaran itu spontanitas, tetapi yang terlihat seluruhnya melakukan pelanggaran (*Kompas*, 25 Mei 1992).

Kapolda Metro Jaya melalui Kadispen Metro Jaya Letkol (Pol.) A. Latif Rabar tanggal 25 Mei 1992 menegaskan, selaku Komandan Satuan Tugas Pengamanan Langsung Pemilu dan sebagai Wakil Panglima Komando Pelaksana Operasi Pemilu di Jakarta, Kapolda berhak dan berwenang memanggil Ketua DPD PDI Jakarta dan dua OPP lainnya. Pemanggilan tersebut hendaknya diartikan untuk mengkonsultasikan serta membicarakan setiap permasalahan yang terjadi, berkaitan dengan pengamanan langsung kampanye dan Pemilu di Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu Ketua DPD PDI Jakarta mengatakan, dengan senang hati akan memenuhi panggilan Kapolda Metro Jakarta untuk berdialog, asal cara pemanggilan itu baik (*Kompas*, 27 Mei 1992).

Sesbid I Bakorstanasda DKI Jakarta Kol. Inf. Agum Gumelar selaku Panwaslak Pemilu Dati I tanggal 25 Mei 1992 minta kepada para pimpinan PDI dan segenap jajarannya di wilayah ibukota untuk menyajikan penampilan yang cantik dalam sisa pelaksanaan kampanyenya. Sudah cukup *show of force* pada kampanye tanggal 24 Mei 1992. Secara umum pelanggaran yang dilakukan OPP selama pelaksanaan kampanye bisa ditolerir sejauh menyangkut pelanggaran klasik, seperti mengendarai sepeda motor tanpa helm, berdiri di atas kap mobil atau di bak truk, berboncengan tiga orang atau lebih. Khusus pelanggaran kampanye PDI tanggal 24 Mei 1992 di Jakarta sudah di luar batas toleransi. Di antaranya *clash* fisik antara pendukung OPP, pelanggaran kriminal seperti penjambretan serta berbagai tindakan yang merugikan kepentingan umum (rumah dilempar, mobil digedor-gedor dan mengisi bensin tanpa bayar). Hendaknya setiap OPP menjadi wahana yang mampu mendidik kesadaran politik masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan upaya mengendalikan massa sehingga dapat sekali-

gus mencegah masuknya kelompok ketiga yang bermaksud memperburuk situasi dan mengganggu ketertiban.

Menko Polkam Sudomo tanggal 26 Mei 1992 mengungkapkan, Presiden sangat prihatin dengan cara-cara kampanye OPP yang membawa korban jiwa belakangan ini. Diingatkan sebenarnya peristiwa semacam itu tak perlu terjadi, kalau saja semua pihak yang terlibat dalam kampanye patuh dan taat kepada aturan yang sudah disepakati bersama.

Di tengah kegiatan kampanye itu, Ketua DPW NU DKI Jakarta Drs. H. Asmawi Manaf SH mengeluarkan seruan tertulis pengurus wilayah NU DKI Jakarta yang menyatakan, DPW NU DKI Jakarta menyadari kegiatan kampanye sebagai bagian dari upaya pembangunan. Karena itu kampanye agar tidak dijadikan ajang bagi retaknya kesatuan dan persatuan bangsa, dan tidak latah dalam tingkah laku brutal yang akan merugikan diri sendiri. Warga agar menaruh kepercayaan kepada aparat keamanan dalam mengatasi setiap permasalahan, tidak membawa-bawa atribut keluarga besar NU.

Sementara itu dua buah truk sarat muatan massa PDI setelah menghadiri putaran akhir kampanye PDI d Garut, 3 Juni 1992, terguling di sekitar daerah Nagrek mengakibatkan 35 orang luka ringan, dan di Cicalengka mengakibatkan 19 luka ringan dan 2 orang luka berat. Sebelumnya, dalam perjalanan selepas dari Garut menuju daerah asalnya sepanjang jalan mereka melakukan banyak pengrusakan tanda gambar Golkar (*Suara Karya*, 4 Juni 1992).

Pada saat kampanye putaran terakhir dari ketiga OPP di berbagai daerah tetap berlangsung semarak, bendera ketiga OPP mendadak hilang dari Surabaya tanggal 1 Juni 1992. Tidak diketahui siapa yang menurunkan bendera-bendera tersebut. Bahkan kalangan OPP pun menunjukkan keresahannya terhadap kejadian itu (*Merdeka*, 2 Juni 1992).

Sementara itu menjawab pertanyaan wartawan seusai upacara pembukaan Sekolah Calon Tamtama Militer Sukarela gelombang pertama dan tahap pertama tahun ajaran 1992/1993 di Rindam Jaya, Condet, Jakarta Timur 30 Mei 1992, Pangdam Jaya Mayjen TNI K. Harseno menghimbau agar ketiga OPP di DKI Jakarta mematuhi konsensus

bersama untuk tidak mengadakan pawai di jalan-jalan dalam putaran terakhir kampanye tertutup di kecamatan-kecamatan di DKI Jakarta, 1-3 Juni 1992. Pimpinan OPP harus dapat menertibkan massanya. Kalau ada yang melanggar, akan ditangkap, sebab konsensus itu harus dipertanggungjawabkan (*Kompas*, 31 Mei 1992).

Dalam pada itu, setelah bertemu dengan PPD dan Panwaslak Yogyakarta, 30 Mei 1992, Kassospol ABRI Letjen TNI Harsudiono Hartas menilai bahwa sampai dengan 30 Mei 1992, pelaksanaan kampanye Pemilu 1992 masih berjalan dalam batas-batas wajar sekalipun di sana-sini terjadi "senggolan" (*Kompas*, 31 Mei 1992). Dari pertemuan yang juga dihadiri oleh ketiga OPP Tingkat I DIY terungkap bahwa OPP harus mampu menyalurkan keinginan anak muda yang belum memiliki hak pilih, tetapi sudah ingin berpartisipasi dalam kegiatan politik antara lain mengikuti kampanye. Kassospol ABRI menilai hal ini penting, karena ketidakmampuan menyalurkan keinginan anak muda itulah kampanye Pemilu diwarnai berbagai pelanggaran, sekaligus mudah disusupi pelaku tindak kriminal. Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Moh. Ma'roef memperoleh bukti bahwa ketiga OPP selama masa kampanye di daerahnya telah disusupi mereka yang mau mengambil keuntungan dan tindak kriminal. Kassospol ABRI menuturkan, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari penyelenggara, pengawas dan pelaku Pemilu di tingkat daerah, seperti yang telah dilakukannya di daerah-daerah lainnya di IBT, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, guna penyempurnaan pelaksanaan Pemilu di tahun-tahun mendatang. Menurut Kassospol, untuk Pemilu mendatang tiap OPP ternyata menghendaki adanya satu penyempurnaan baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Ini menggembirakaan dan suatu hal yang wajar.

Sementara itu, seusai pertemuan dengan pimpinan ketiga OPP di PPD I Jateng di Semarang, 30 Mei 1992, Gubernur Jateng selaku Ketua PPD I Jateng, H.M. Ismail, yang didampingi Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Hariyoto P.S., Ketua Panwaslak I Jateng, R. Djoko Moelyo SH, dan Kapolda Jateng Mayjen (Pol.) Drs. Ali Komaruddin, meminta pimpinan ketiga OPP agar bertanggung jawab terhadap massa pendukungnya untuk menghindarkan perbuatan dan tindakan yang lepas kendali seperti yang terjadi selama 20 hari kampanye yang menyebabkan masyarakat menjadi takut. Sampai dengan 30 Mei 1992 (putaran ketujuh kampanye) di Jateng, tercatat 6 korban meninggal (3 pen-

dukung Golkar, 2 PDI, dan 1 PPP), 16 simpatisan OPP luka berat, 55 luka ringan. Selain itu tercatat 20 rumah penduduk, 34 mobil serta 2 sepeda motor rusak (*Kompas*, 1 Juni 1992).

Seusai menghadap Kepala Negara di Bina Graha Jakarta, 1 Juni 1992, melaporkan mengenai berlangsungnya kampanye dan kesiapan Pemilu tanggal 9 Juni 1992, Mendagri Rudini mengatakan, Presiden Soeharto menganjurkan agar segera diadakan pembahasan mengenai perubahan cara-cara berkampanye untuk Pemilu mendatang. Sebab, menurut Kepala Negara, dari pelaksanaan kampanye sekarang ini telah terbukti dan semua telah melihat bahwa caranya lebih banyak menimbulkan kerugian daripada hal-hal yang menguntungkan. Menurut Rudini, ditinjau dari presentase secara nasional, sampai dengan 1 Juni 1992, kampanye berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan. Memang ada pelanggaran seperti di Jakarta, Yogya, Semarang, Surabaya, Medan dan kota-kota besar lainnya, tetapi secara presentase termasuk kecil, dan semuanya dapat dikendalikan. Akibat pelanggaran itu, telah jatuh korban karena kecelakaan lalu lintas. Jumlah korban terbanyak sampai saat ini berasal dari kampanye PDI. Menurut Rudini, setelah Pemilu nanti akan segera diadakan pembahasaan dengan instansi-instansi terkait mengenai cara-cara kampanye untuk waktu mendatang. Setelah itu diadakan pembicaraan dengan OPP. Hal pembahasan itu dapat diseminarkan dengan para pakar politik, hukum, dan sebagainya. Karena itu perlu diadakan inventarisasi mengenai pelanggaran yang terjadi selama kampanye dan apa sebabnya (termasuk apakah karena aturannya tidak cocok). Rudini membenarkan pendapat yang mengatakan sampai sekarang kampanye Pemilu yang diselenggarakan belum merupakan sarana pendidikan politik yang efektif, yang membuat rakyat sadar akan hak dan kewajibannya, belum dapat membuat mereka menggunakan daya nalarnya. Dalam kampanye sekarang, rakyat hanya diajak untuk ramai-ramai atau bahkan hanya dihasut untuk fanatik terhadap salah satu tanda gambar. Program OPP yang diajukan dalam kampanye sekarang belum mencapai yang diinginkan. Artinya, sampai sekarang OPP belum dapat mencapai program konkret. Mereka hanya dapat mengatakan ini atau itu salah, ini dan itu harus begitu, tetapi mereka tidak mengatakan bagaimana caranya untuk memperbaiki. Ini karena mereka terlalu mementingkan pidato yang bersemangat, yang isinya hanya "hidup ... hidup ..."

Sependapat dengan Rudini, Ketua DPP Golkar A.E. Manihuruk, yang dihubungi tanggal 1 Juni 1992, menilai cara kampanye yang dilaksanakan ketiga OPP khususnya kampanye di lapangan terbuka dengan pengerahan massa sebesar-besarnya, sebaiknya ditinjau kembali karena kurang bermanfaat, kurang efisien dan kurang efektif. Kampanye di lapangan terbuka di tengah hingar-bingarnya massa bukan forum yang tepat untuk menyampaikan program OPP. program yang disampaikan hanya sepotong-sepotong, kecuali kalau jurkam itu seorang orator atau menjadi idola masyarakat (*Kompas*, 2 Juni 1992). Hal senada dikemukakan pula oleh fungsionaris Golkar Ir. Sarwono Kusumaatmadja seusai acara dialog tertutup di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 2 Juni 1992. Diharapkannya agar pada Pemilu 1997 pelaksanaan kampanye dialogis diberi porsi lebih banyak, dibanding kampanye berupa rapat akbar yang masih juga tetap diperlukan mengingat ada kebutuhan psikologis yang hanya dapat dipenuhi oleh model kampanye ini yaitu terciptanya rasa solidaritas dan pengenalan pemimpin kepada massanya. Di masa datang sangat mungkin dilaksanakan dialog antara OPP asal memenuhi syarat antara lain tidak dilaksanakan oleh OPP dan isinya tidak agitatif. Di masa datang juga sangat mungkin sebuah Ormas menawarkan program kepada salah satu OPP untuk dijadikan program OPP itu. Sebab UU No. 5/1985 tentang Ormas tidak melarang Ormas bekerja sama dengan OPP (*Kompas*, 3 Juni 1992).

Sementara itu, seusai pertemuan dengan pimpinan tiga OPP DKI Jakarta tanggal 1 Juni 1992, Pangdam Jaya Mayjen TNI K. Harseno selaku Pangkolakops Pengamanan Jakarta, Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol.) Drs. M.H. Ritonga selaku Komadan Satuan Tugas Pengamanan langsung Pemilu, dan Jaksa Tinggi BTP Siregar SH selaku Ketua Panwaslak PPD DKI Jakarta, menilai kampanye Pemilu di DKI Jakarta tahun 1992 ini lebih bermutu dan lebih aman dibandingkan kampanye lima tahun lalu. Menurut Harseno, hasilnya di luar dugaan. Pimpinan OPP mau menjalankan himbauan aparat keamanan, mampu menguasai massa masing-masing. Kebersamaan petugas keamanan dan tiga OPP ini merupakan keberhasilan yang patut disyukuri bersama.

Menjawab pertanyaan, Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol.) M.H. Ritonga menjelaskan pada hari terakhir kampanye terbuka tanggal 31 Mei 1992, terdapat 20 kejadian, di antaranya penganiayaan (*dibacok*) terhadap seorang anggota FKPPI yang sedang mengendarai motor di Tanjung Priok. Pelakunya, seorang ditangkap, seorang lagi kabur;

dan pengrusakan sebuah sedan Starlet di Jalan Hang Tuah, Jakarta Selatan. Selama tiga pekan kampanye di lapangan terbuka (10-21 Mei 1992) di Jakarta, tercatat 10 orang tewas, dan puluhan luka-luka berat/ringan, yang semuanya akibat kecelakaan lalu lintas (*Kompas*, 2 Juni 1992).

Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Sospol Depdagri Harisoegiman selaku Wakil Sekretaris LPU mengemukakan, sampai 31 Mei 1992, tercatat 23 orang tewas dalam kampanye, semuanya karena kecelakaan lalu lintas. Masing-masing 4 dari PPP, 7 dari Golkar dan 12 dari PDI. Selain itu, 194 luka-luka (3 PPP, 98 Golkar, dan 66 PDI, 5 petugas Polri dan 22 anggota masyarakat di luar massa kampanye). Sebagian besar karena kecelakaan lalu lintas, sedangkan sisanya karena penganiayaan dan pengeroyokan (*Merdeka*, 2 Juni 1992).

Guna mengevaluasi pelaksanaan kampanye yang berlangsung sejak 10 Mei dan berakhir 3 Juni 1992, dalam tiga hari ini *Kompas* secara terpisah menghubungi A. Malik Fadjar MSc. (Rektor Universitas Muhammadiyah, Malang), Dr. Ramlan Surbakti (Dosen Unair, Surabaya), Dr. Amir Santoso (Ketua Jurusan Ilmu Politik UI), Dr. Afan Gaffar MA dan Dr. Riswandha Imawan MA (keduanya Dosen UGM), serta Drs. Hotman M. Siahaan (Sosiolog Unair). Rangkuman pendapat yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut: Kampanye Pemilu 1992 ternyata belum menunjukkan lahirnya budaya politik baru karena masih didominasi praktek mengaduk-aduk emosi massa dengan simbol-simbol tradisi politik lama. Selain itu, kampanye juga masih berisi bahan informasi, belum benar-benar berorientasi kepada program. Akibatnya, masyarakat pemilih belum mampu membedakan kekuatan dan kelemahan OPP masing-masing sehingga pilihan mayoritas akan jatuh berdasarkan tradisi atau mengikuti pilihan kelompok-kelompok tertentu. Pengerahan massa dalam kampanye itu pun terbukti telah meminta korban jiwa dan lebih menjurus kepada tindakan anarkis. Sebab itu, forum dialogis akan menjadi pilihan terbaik pada kampanye 1997 sebagai realisasi sosialisasi politik. Kampanye dialogis akan memberikan kesempatan kepada OPP dan massa untuk saling menjelaskan, mendengar, mengerti, menganalisa, dan akhirnya mempengaruhi pilihan individu (*Kompas*, 3 Juni 1992).

Pendapat senada dikemukakan pula oleh Dr. Franz Magnis Suseno SJ, Burhan Magenda, Prof. Sutan Takdir Alisyahbana dan Dwi

Soesanto yang dihubungi *Media* secara terpisah. Dari pendapat yang mereka kemukakan disimpulkan bahwa sebagai pelepasan saluran politik yang tersumbat, wajar bila kampanye diwarnai hura-hura. Secara keseluruhan kualitas kampanye Pemilu 1992 tak meningkat dari lima tahun lalu. Karena itu perlu perbaikan pada Pemilu mendatang (*Media Indonesia*, 3 Juni 1992).

Dalam percakapan dengan wartawan di Manado, 3 Juni 1992, Menpen Harmoko mengharapkan agar kampanye dialogis melalui media elektronik seperti TV dan radio sudah dapat diwujudkan pada kampanye Pemilu 1997. Perlunya kampanye seperti itu lebih dikarenakan daya nalar masyarakat Indonesia sekarang sudah cukup berkembang. Model kampanye dialogis itu perlu dituangkan dalam UU atau PP tentang kampanye. Untuk itu ketiga OPP dan LPU diminta membicarakan dan mendiskusikannya (*Suara Karya*, 4 Juni 1992).

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Gubernur Jatim Soelarso, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI R. Hartono, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Yunan Sawidji, selaku Ketua Panwaslak di Surabaya, 1 Juni 1992, Kassospol ABRI Letjen TNI Harsoediono Hartas mengungkapkan, dari berbagai pendapat para pengamat politik serta keinginan ketiga OPP maka jadwal pelaksanaan kampanye selama 25 hari sekarang ini dinilai terlalu lama dan perlu ditinjau kembali untuk pelaksanaannya di masa mendatang sesuai dengan semakin tingginya tingkat kesadaran kehidupan berpolitik (*Suara Pembaruan*, 2 Juni 1992).

Anggota Komisi I DPR-RI, Marzuki Darusman (FKP), mengatakan kepada *Merdeka* di Jakarta, 1 Juni 1992, Pemilu 1992 ini tidak banyak menjanjikan perubahan dalam pemerintahan. Sebab, tema-tema kampanye justru mengukuhkan keberadaan pemerintah sekarang. PPP menonjolkan pencalonan kembali Presiden Soeharto sebagai pimpinan pemerintahan mendatang. Golkar dalam kampanyenya menawarkan kesinambungan dan perubahan, sedangkan PDI melemparkan isu pembatasan masa jabatan presiden. Isu yang dilontarkan PDI ini lebih cenderung ditafsirkan sebagai pengukuhan terhadap pemerintahan sekarang, karena pembatasan itu baru berlaku setelah tahun 1993 (*Merdeka*, 2 Juni 1992).

Fungsionaris Golkar, Ir. Sarwono Kusumaatmadja mengatakan di Jakarta baru-baru ini, keberadaan Golput diperkirakan tidak akan

menurunkan perolehan suara Golkar dalam Pemilu 9 Juni 1992. Justru sebaliknya menguntungkan Golkar. Dengan kondisi infrastruktur politik yang memadai, dan adanya pemilih tetap dari tingkat desa hingga pusat, kian meyakinkan Golkar memperoleh suara yang lebih baik. Golkar telah memiliki pemilih tetap yang cukup besar. Dan ini jelas tidak akan terpengaruh dengan kehadiran Golput. Justru adanya Golput itu merugikan OPP lain. Pemilih tetap itu merupakan hasil binaan melalui berbagai forum yang berlangsung sejak lama, sehingga mereka kini sudah sangat mempercayai politiknya. Dan langkah ini suatu cara Golkar membangun infrastruktur yang mantap. Kampanye seperti sekarang ini lebih didasari pada keinginan memperoleh suara tambahan. Karena itu, dengan besarnya warga yang Golput, berarti semakin memperbesar peluang Golkar memperoleh suara terbanyak (*Media Indonesia*, 3 Juni 1992).

Seusai pertemuan dengan pimpinan tiga OPP DKI Jakarta tanggal 1 Juni 1992, Pangdam Jaya Mayjen TNI K. Harseno selaku Pangkolakops Pemilu di Jakarta dan Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol.) Drs. M.H. Ritonga selaku Komandan Satuan Tugas Pengamanan Langsung Pemilu, menjamin tidak akan ada kecurangan dalam perhitungan suara di pemungutan suara (TPS) pada hari pelaksanaan Pemilu 9 Juni 1992. Jumlah petugas yang akan diterjunkan di Jakarta Raya pada hari Pemilu itu sekitar 49.000 orang, terdiri dari 16.000 polisi, 5.800 personil Kodam Jaya dan 27.000 Kamra (Keamanan Rakyat). Mereka akan mengamankan sekitar 10.000 TPS di seluruh Jakarta (*Kompas*, 2 Juni 1992).

Sementara itu, dalam pertemuan silaturahmi antara PPI (Menpen Harmoko, Menkeh Ismail Saleh, Jaksa Agung Singgih, dan Pangab Jenderal TNI Try Sutrisno) dengan wakil-wakil OPP seperti Darussamin, Yusuf Syakir (PPP), Wahono, Rachmat Witoelar, A.E. Manihuruk (Golkar) dan Nico Daryanto (PDI) di kediaman resmi Mendagri di Jakarta, 4 Juni 1992, Mendagri Rudini selaku Ketua LPU mengharapkan unsur OPP tidak menyimpan kecurigaan terhadap pelaksanaan penghitungan suara Pemilu 1992, karena mekanisme penghitungan suara telah diatur untuk mencegah kecurangan. Dikatakan, pihaknya telah berusaha secara maksimal untuk menjadikan Pemilu 1992 lebih berkualitas sesuai dengan amanat GBHN, yakni dengan menyiapkan sistem berikut dengan segala perangkatnya. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi kalau semua perangkat PPI berfungsi sebagaimana mestinya, dapat mewujudkan peningkatan kualitas Pemilu. Rudini juga

menghimbau agar semua pihak menciptakan suasana tenang pada masa tenang 4-8 Juni 1992, dan tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan kampanye terbuka maupun terselubung, serta menjaga ketertiban dan keamanan pada hari pemilihan 9 Juni 1992 dilanjutkan dengan acara penghitungan suara.

Dalam kesempatan itu Rudini juga mengaku ada laporan bahwa di Sumbar terjadi salah paham aparat pemerintah di tingkat kelurahan dengan saksi dari OPP ketika akan meminta surat keterangan domisili yang oleh aparat setempat diartikan sebagai rekomendasi. Dari laporan ada beberapa kesalahan termasuk di PPD I, dan ia berjanji akan meluruskan secepatnya (*Pelita*, 5 Juni 1992).

Sementara itu, pada pertemuan dengan Mendagri Rudini dengan PPD I Kaltim di Lamin Etan, 5 Juni 1992, Gubernur/Ketua PPD I Kaltim H.M. Ardans SH mengemukakan, sampai dengan hari itu, 2.218 jiwa transmigran di Kaltim masih kebingungan karena mereka hanya memiliki kartu model A yang hanya memungkinkan mereka memberikan suara di daerah asal, yaitu Jabar, NTT, NTB, dan Jatim. Atas laporan ini Mendagri langsung meminta Gubernur Kaltim menyelesaikan secepatnya melalui koordinasi dengan Ditsospol dan Dinas Transmigrasi.

Karo Humas Depdagri Amur Muchasin SH yang dua hari sebelumnya menyertai Mendagri Rudini mencek persiapan penyelenggaraan Pemilu di Riau dan Irja, mengungkapkan, jumlah transmigran yang belum memiliki kartu AB di Riau mendekati 2.000 orang, sedangkan di Irja hampir mencapai 1.500 orang (*Kompas*, 6 Juni 1992).

Lampiran 21

RINGKASAN KAMPANYE **GOLKAR** DALAM PEMILU 1992

KETUA UMUM DPP Golkar Wahono dalam kampanye perdana di Surabaya tanggal 10 Mei 1992, mengajak segenap lapisan masyarakat untuk bahu-membahu mempercepat gerak kemajuan mendatang, lebih cepat dari percepatan pembangunan yang telah dilaksanakan 25 tahun ini. Golkar di masa datang akan selalu menempatkan diri sebagai motor percepatan pembangunan agar tak ada lagi anggota masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan (*Suara Karya*, 11 Mei 1992).

Sekjen DPP Golkar, Rachmat Witoelar, tanggal 11 Mei 1992 di Dili berpendapat, bahwa pengungkapan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam suatu kampanye sebagaimana dilakukan PPP tidak etis, tidak edukatif dan bahkan dapat menyesatkan masyarakat pemilih, bahwa seolah-olah prosesnya harus begitu. Golkar sendiri tetap konsisten dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu melalui mekanisme yang telah ditetapkan MPR. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi kewenangan MPR. Pengungkapan calon itu hak siapa pun. Bahkan untuk pencalonan itu perlu ada pendekatan, yang bersangkutan perlu ditanya apakah bersedia atau tidak. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat hanya asal-usul saja, apalagi hanya dengan tujuan untuk mendahului orang lain. Cara demikian hanyalah upaya untuk mencari suara (*Suara Karya*, 12 Mei 1992).

Ketua Umum DPP Golkar, Wahono, mengemukakan pada kampanye Golkar di Kendari, Sulawesi Tenggara, tanggal 11 Mei 1992, Golkar menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembangunan dewasa ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, karena itu dalam program

pembangunan mendatang upaya untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Golkar. Dalam kaitan itu, Golkar mengharapkan dukungan dari seluruh rakyat dalam Pemilu 1992. Golkar belum merasa puas terhadap hasil pembangunan dewasa ini, terutama yang menyangkut aspek pemerataan kesejahteraan rakyat. Karena itu Golkar bertekad akan memperbaikinya secara maksimal pada pembangunan tahap mendatang (*Kompas*, 12 Mei 1992).

Tokoh cendekiawan Dr. Alfian mengatakan bahwa dalam upaya pengembangan budaya politik, Golkar terbukti tidak sekedar janji, bahkan secara konkret telah mempeloporinya dan intensitas kepeloporan itu akan ditingkatkan dalam era pembangunan yang akan datang. Golkar kini telah berupaya membuat terobosan-terobosan baru untuk mengembangkan budaya politik baru yang berdasarkan pada demokrasi Pancasila. Golkar telah mengembangkan diri sebagai forum komunikasi seluruh lapisan masyarakat, yang maknanya Golkar telah berusaha mengembangkan keterbukaan di bidang politik. Upaya Golkar itu terlihat pada bagaimana Golkar menghimpun aspirasi dari bawah untuk menyusun pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan dalam PJPT II. Dalam hubungan itu Golkar mengajak para ilmuwan dan cendekiawan untuk membicarakan pokok-pokok pikiran itu melalui sarasehan uji kesahihan serta pendalaman pemikiran atas masukan yang telah terhimpun. Selanjutnya Golkar akan berusaha keras menuangkannya menjadi naskah GBHN yang benar-benar berasal dari kekuatan sospol. Golkar juga berupaya meniadakan Tap VI MPR/1988 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Presiden Mandataris. Tekad Golkar itu mengandung makna bahwa masyarakat sudah berada pada posisi untuk bersikap dan bertingkah politik secara terbuka dan bertanggung jawab. Sikap kedewasaan juga diungkapkan Golkar dengan peniadaan rekayasa-rekayasa politik melalui berbagai kegiatan yang dinamakan kebulatan tekad. Oleh karena Golkar menyadari bahwa bukan budaya politik semacam itu yang akan diterapkan. Golkar bertekad menghilangkan budaya kultus individu dalam budaya politik. Dalam pencalon Presiden pun Golkar tetap berpegang teguh pada aturan permainan yang berlaku. Dengan ini Golkar menginginkan agar masyarakat menyadari bahwa dalam sistem ketatanegaraan kita, orang tidak memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Dalam kampanye di Dili tanggal 12 Mei 1992, Ketua Umum DPP Golkar Wahono menegaskan, Golkar akan terus mendukung dan

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, segala bentuk pendekatan dengan cara paksaan atau intimidasi harus dijauhkan dari kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebab pendekatan dengan cara demikian tidak saja mengangkangi hak asasi manusia tetapi juga tidak lagi sesuai dengan perkembangan alam demokrasi politik di Indonesia. Masyarakat Indonesia telah mampu bersikap kritis, berpikiran analitis dan bertindak realistis yang merupakan hasil dari pembangunan. Oleh karena itu jangan terpengaruh oleh intimidasi dan jangan melakukan intimidasi (*Suara Karya*, 13 Mei 1992). Juga dalam kampanyenya di Kupang, NTT, tanggal 12 Mei 1992, Wahono mengemukakan, pembangunan telah melahirkan orang-orang yang berpikir kritis dan analitis. Orang-orang inilah yang meneropong dan mengungkapkan kekurangan-kekurangan pembangunan yang sedang berlangsung. Munculnya orang-orang kritis dan analitis itu, justru merupakan hasil pembangunan itu sendiri. Golkar belum puas dengan hasil pembangunan selama ini. Ketimpangan sosial, lapangan kerja, tenaga kerja, pertanahan dan berbagai persoalan lain masih menjadi pekerjaan rumah bagi Golkar. PR itu tidak akan dilimpahkan kepada orang lain. Untuk menyelesaikan pekerjaan rumah itu Golkar membutuhkan dukungan rakyat. Tanpa rakyat, Golkar bukan apa-apa, dan tekad Golkar adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menempatkan rakyat pada posisi sentral dalam mengendalikan pembangunan (*Kompas*, 13 Mei 1992).

Dalam kampanye TVRI tanggal 13 Mei, Ketua Umum DPP Golkar Wahono menegaskan, bagi Golkar menyukseskan pemilu adalah suatu kewajiban dan tugas suci dalam rangka membuktikan kesetiaan yang teramat dalam terhadap "Tekad Orde Baru" untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Komitmen Golkar yang sangat dalam itu bersumber dari kenyataan bahwa Golkar adalah pemrakarsa dan pelopor utama dalam melahirkan tekad yang bersejarah itu. Semenjak lahirnya hingga sekarang, tekad Orde Baru telah menjadi pengikat sambung rasa dan sambung nalar antara Golkar dengan seluruh rakyat. Melalui itu Golkar mengikuti denyut hati nurani rakyat, menyerap perkembangan aspirasi mereka, merasakan keluh kesah dan harapan mereka. Golkar menghimpun, merumuskan, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat yang majemuk dan beraneka ragam dari satu tahap pembangunan ke tahap berikutnya. Dia juga menyatakan rasa syukur dan terima kasih Golkar atas kepercayaan rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilu-pemilu terdahulu. Dari keme-

nangan-kemenangan Golkar pada pemilu-pemilu yang lalu itu, telah terjadi suatu ikatan batin yang kuat antara Golkar dengan rakyat. Dalam Pemilu 1992 ini Golkar ingin mempersegar dan memperkuat ikatan batin tersebut dengan program-program yang telah disiapkannya. Program-program itu disusun melalui proses yang panjang dari bawah sampai ke atas untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka merealisasi Tekad Orde Baru.

Selanjutnya dalam kampanye Golkar di NTB dan Bali tanggal 13 Mei 1992, Ketua Umum DPP Golkar Wahono mengatakan, Golkar secara konsisten akan tetap menjaga tegaknya negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, serta menolak dan menghindarkan terjadinya polarisasi, yang dapat mengancam persatuan dan wawasan kebangsaan Indonesia. Untuk menghindarkan hal tersebut, Golkar menganggap perlu memberikan haluan yang tepat kepada pemerintah dan seluruh rakyat. Adanya polarisasi dalam pembangunan menyulitkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang menjadi dambaan bersama. Karena itu kendati Golkar besar, polarisasi tidak muncul karena tidak ada organisasi massa atau kelompok yang tidak tercermin dalam kebesaran Golkar. Sudah banyak program dan hal nyata dilakukan Golkar. Namun Golkar juga mengakui masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan dibenahi lagi. Golkar telah mempersiapkan diri untuk mengatasi pertentangan dan perpecahan yang membahayakan keselamatan bangsa karena polarisasi. Karena itu sejak dahulu Golkar mempersiapkan program pembangunan jangka panjang dalam bentuk GBHN yang kesemuanya mencerminkan kesinambungan pembangunan dengan titik berat peningkatan kesejahteraan masyarakat (*Kompas*, 14 Mei1992).

Jurkam Golkar Prof. Dr. Suhardiman dalam kampanyenya di Jakarta tanggal 14 Mei 1992 mengusulkan agar bangsa Indonesia sekali lagi dipimpin oleh "pilot" yang berpengalaman yaitu Presiden Soeharto. Sementara Wakil Presiden diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Soeharto dengan catatan harus bisa bekerja sama dengan Pak Harto. Sementara jurkam Golkar Chalid Mawardi berpendapat, lembaga legislatif akan efektif jika ada satu organisasi politik yang mayoritas di sana (*Kompas*, 15 Mei 1992).

Sementara itu, dalam kampanye Golkar di Singaraja, Bali, 15 Mei 1992, Drs. Moerdiono mengatakan, dalam hal memilih presiden

dan wakilnya, Golkar tidak mau seperti membeli kucing dalam karung. Karenanya yang dipilih adalah pemimpin yang benar-benar sudah dekat dengan hati rakyat. Sementara di Los Palos, Timtim, 16 Mei 1992, jurkam Golkar Salvador J. Ximenes Soares (yang juga anggota DPR-RI) menyatakan Golkar mendukung sepenuhnya kegiatan pelaksanaan operasi teritorial ABRI di Timtim, dan Golkar akan berjuang demi tegaknya keadilan di propinsi tersebut. Sebagai kekuatan sospol yang besar, Golkar akan tetap berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan taraf hidup rakyat kecil. Golkar menjanjikan untuk memberi kesempatan yang lebih luas kepada pemuda Timtim untuk menuntut ilmu di luar daerah, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri (*Kompas*, 17 Mei 1992).

Di Jakarta Selatan, 17 Mei 1992, Jurkam Golkar Sudomo mengemukakan, Golkar akan berupaya keras mengurangi jumlah rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, mengembangkan sektor informal, mencegah monopoli, dan industri yang terintegrasi. Untuk itu, Golkar akan mengupayakan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang selama ini rata-rata 6% per tahun, dan penyebaran hasil-hasil pembangunan secara merata. Golkar juga akan meningkatkan pendidikan politik, demokrasi Pancasila dan implementasinya, stabilitas nasional yang dinamis, serta mempercayakan pimpinan pemerintahan ke tangan seorang putera terbaik yang mendapat kepercayaan masyarakat, mempunyai integritas tinggi, memiliki kemampuan untuk mewujudkan kemajuan, memiliki pengalaman mengatasi berbagai krisis dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan keamanan.

Pada hari yang sama, para jurkam Golkar juga berkampanye di berbagai wilayah ibukota (*Kompas*, 18 Mei 1992).

Dalam kampanye di Pontianak Kalbar, 18 Mei 1992, Ketua Umum DPP Golkar, Wahono menegaskan lagi, sebagai salah satu kekuatan sospol, Golkar tidak akan menutup mata terhadap kekurangan dalam proses pembangunan selama ini, melainkan senantiasa mendengar keluh kesah rakyat dan bangsa Indonesia, serta berjanji akan memperjuangkannya.

Sementara itu Sekjen DPP Golkar Rachmat Witoelar mengungkapkan kepada wartawan, bahwa dalam sisa kampanye 10 hari mendatang, seluruh jajaran jurkam Golkar akan diinstruksikan untuk me-

laksanakan aktivitas kampanyenya dengan cara dan gaya yang baru sama sekali. Tidak sekedar ramai-ramai, tetapi memuat isian yang dapat menampung aspirasi rakyat, lebih substansial, dengan metode dialogis agar lebih komunikatif. Sedangkan dalam kampanye di daerah-daerah para jurkam Golkar mengangkat tema-tema tentang pemberantasan korupsi dan penyelewengan serta pembukaan lapangan kerja bagi generasi muda (*Suara Karya*, 19 Mei 1992).

Dalam kampanye di Jakarta Pusat, 20 Mei 1992, fungsionaris Golkar Ir. Azwar Anas mengemukakan tema tentang keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan semakin mantapnya persatuan. Tema senada dikemukakan pula olehnya dalam kampanye di Bogor, Jabar, seraya mengingatkan generasi muda untuk memahami perjalanan sejarah bangsa agar tidak terhasut atau terpancing oleh pihak-pihak yang mengiming-imingi dengan janji muluk (*Pelita*, 21 Mei 1992). Di Jakarta Pusat, R. Soeprapto mengemukakan tentang tekad Golkar untuk melanjutkan pembangunan dengan sasaran meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Sedangkan Sudomo di Jakarta Utara menjanjikan bahwa setelah Pemilu, Golkar dengan dana Rp 1 milyar dari para pengusaha Golkar akan melancarkan operasi Esok Penuh Harapan Tahap Kedua. Di Jakarta Barat Suhardiman SE mengemukakan program dan strategi Golkar menyongsong era kebangkitan nasional kedua, Pelita VI, dan seterusnya. Di Jakarta Timur, Cosmas Batubara mengemukakan tentang tekad Golkar untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya terutama yang berkaitan dengan industri untuk memperkuat sektor pertanian.

Di Jatibening, Bekasi, Jabar, jurkam Marzuki Darusman SH mengemukakan, perjuangan Golkar bukan hanya menjaga kesinambungan pembangunan, namun juga bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan. Ny. Nani Soedarsono di Denpasar, Bali, mengangkat tema tentang peningkatan kesejahteraan dan peranan wanita. Sementara di Rejosari, Semarang, jurkam Tjahja Kumolo SH mengemukakan penilaiannya tentang belum konsistennya pelaksanaan demokrasi Pancasila sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam sila-sila tersebut. Sementara kampanye Golkar lewat TVRI putaran kedua tanggal 19 Mei 1992 yang disampaikan Ny. Mien Sugandhi, salah satu Ketua DPP Golkar, lebih memfokuskan pembicaraannya pada berbagai program Golkar di bidang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan (*Kompas*, 21 Mei 1992).

Fungsionaris Golkar Ali Alatas, dalam kampanyenya di Dili, Timtim, 21 Mei 1992, antara lain berjanji bahwa Golkar akan mengatasi masalah pengangguran yang selama ini menjadi masalah paling serius di Timtim. Golkar akan memprioritaskannya dalam program kerja Golkar. Ia juga berjanji akan konsisten menerapkan peraturan di bidang pertanahan dengan tetap memperhatikan kondisi riil yang ada di daerah tersebut. Golkar juga akan terus-menerus memperhatikan sektor pendidikan agar seimbang dengan yang dicapai propinsi lainnya. Sedangkan di bidang ekonomi, Golkar akan mengundang investor swasta agar tingkat kesejahteraan rakyat semakin meningkat (*Media Indonesia*, 22 Mei 1992).

Di Blitar, Jatim, 21 Mei 1992, jurkamnas Golkar Harmoko menegaskan, dalam Pemilu 1992 Golkar bertekad meraih kemenangan minimal sama dengan Pemilu 1987, karena prinsip kampanye adalah untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dan merupakan hak politik rakyat untuk menentukan pilihannya. Golkar harus menang karena sudah empat kali Pemilu Golkar tampil mendapat kepercayaan rakyat. Berarti rakyat pemilih Golkar merasakan manfaat dari program-program yang diperjuangkan Golkar. Selain itu, Golkar tetap konsisten untuk melanjutkan pembangunan guna mewujudkan kesehjahteraan rakyat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Di Bengkulu, Ketua DPP Golkar Wahono mengatakan ada tiga tantangan utama yang dirasakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang perlu dan harus dipecahkan dalam PJPT II yaitu lapangan kerja, peningkatan kualitas demokrasi, dan kesenjangan sosial ekonomi. Untuk itu, Golkar mengusulkan perlunya meningkatkan pembangunan industri yang kuat dan pembangunan pertanian yang tangguh. Sementara di Cilegon, Jabar, 20 Mei 1992, jurkam Golkar T. Ariwibowo mengatakan, Golkar akan memperjuangkan ditingkatkannya mutu pendidikan, agar semua anak Indonesia menjadi anak pintar dan tahu teknologi. Golkar juga memperjuangkan dihapuskannya kemiskinan dan kebodohan, dan memerangi keterbelakangan. Sedangkan di Cirebon, 20 Mei 1992, dalam suatu kampanye dialogis, Ir. Sarwono Kusumaatmadja menegaskan bahwa dalam PJPT II Golkar menyiapkan program untuk makin mendorong peningkatan mutu sumber daya manusia. Sehingga bangsa Indonesia yang maju, akan tercipta dengan landasan kemampuan daya saing dan *competitive advantages* yang memadai, terutama di kalangan generasi muda. Golkar semakin memantapkan upaya menguasai iptek serta pengembangan daya nalar. Oleh karena itu Gol-

kar menempatkan pendidikan sebagai prioritas programnya (*Berita Buana*, 22 Mei 1992).

Di Bandar Lampung, 22 Mei 1992, Ketua Umum DPP Golkar Wahono mengemukakan bahwa kehadirannya di sana tidak membawa janji, tetapi mengajak mereka berpartisipasi mendukung Golkar. Massa Golkar agar tidak terpancing dengan cara-cara kampanye murahan yang membakar emosi rakyat, menciptakan sikap konfrontatif, menghembuskan rasa pertentangan, perselisihan dan pertengkaran. Sementara di Palembang pada hari yang sama, ia menyatakan keyakinannya bahwa warga dan simpatisan Golkar semakin matang dan mantap dalam menghadapi Pemilu 1992. Menjawab pertanyaan pers seusai berkampanye, Wahono menjelaskan bahwa kampanye bukanlah tujuan, karena itu memasuki kampanye hari ke-13 ini Golkar tinggal memantapkan saja (*Media Indonesia*, 23 Mei 192).

Fungsionaris Golkar Drs. Moerdiono di lapangan Parkir Timur Senayan tanggal 23 Mei 1992 mengemukakan, kampanye Pemilu tak dimaksudkan untuk membuat orang takut. Sebab itu Golkar dengan sadar melaksanakan kampanye secara baik dan tertib. Pelaksanaan pembangunan nasional masih memiliki kekurangan. Golkar bertekad untuk memperbaiki kekurangan pembangunan itu bersama-sama dengan rakyat. Dengan dukungan rakyat, Golkar akan mengupayakan peningkatan demokrasi politik, ekonomi dan sosial. Sementara itu fungsionaris Golkar Harmoko dalam kampanyenya di Blok S Jakarta Selatan kembali menegaskan bahwa kendati belum menyebutkan calonnya, Golkar telah memiliki kriteria bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Antara lain harus bisa mempersatukan rakyat, serta tunduk dan mampu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Ia juga tokoh yang mengerti tentang pembangunan serta dapat mengayomi dan berpendirian teguh terhadap Orde Baru. Calon Presiden harus memiliki pengalaman dan bisa mengatur negara serta melaksanakan GBHN.

Sementara itu, dalam sarasehan santiaji Pemantapan Pemilih bagi karyawan PT Rekayasa Industri di Jakarta, 20 Mei 1992, Sekjen DPP Golkar Ir. Rachmat Witoelar menegaskan, Golkar memandang tidak perlu untuk melakukan pembatasan masa jabatan Presiden karena hal itu tidak diminta oleh UUD 1945. Meskipun demikian, pembatasan masa jabatan Presiden itu boleh-boleh saja, karena memang tidak ada yang melarang. Sesuai dengan perundang-undangan masalah pemilih-

an Presiden telah dilimpahkan kepada MPR, sedangkan berapa kali Presiden itu menjabat terserah pada MPR itu. Oleh karena itu yang menjadi kunci dalam masalah penetapan masa jabatan Presiden itu adalah kualitas MPR itu sendiri (*Angkatan Bersenjata*, 21 Mei 1992).

Tanggal 23 Mei 1992 Ir. Sarwono Kusumaatmadja mengadakan kampanye dialogis di Yogyakarta dan Semarang. Di kedua tempat itu masing-masing dihadiri oleh 500 dan 700 orang peserta dari kalangan mahasiswa, pemuda dan cendekiawan. Pada kesempatan itu Sarwono mengatakan betapa sulitnya mengadakan perubahan tanpa mengakibatkan risiko bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang penting bagaimana mengelola perubahan itu. Masalah yang paling penting adalah membentuk basis ekonomi yang kuat. Tanpa itu, perubahan atau pembaruan akan menjadi titik rawan. Oleh karena itu pada masa mendatang pembangunan ekonomi tetap menjadi prioritas, di samping bidang lain yang mampu meningkatkan kualitas bangsa, seperti peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan.

Dia juga menegaskan bahwa pembangunan politik merupakan hal yang paling sulit dan rawan. Perubahan politik tanpa didahului perubahan ekonomi dan budaya, akan menyebabkan kehancuran. Tak cukup hanya bermodalkan idealisme dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Ada gejala positif berupa kerja sama antara kelompok usaha Summa dan Lippo dengan NU dan Muhammadiyah dalam membentuk BPR. Ini merupakan hubungan horisontal yang perlu dikembangkan, karena kelak akan memberikan dampak kepada kehidupan budaya politik kita. Kerja sama ini akan menghapus pola pikir vertikalisme, di mana seseorang tak usah menjadi NU untuk bekerjasama dengan NU, berkiprah bersama NU. Di sini komitmen kemanusiaan dijunjung tinggi. Budaya vertikalisme memang berkembang dalam kalangan birokrasi dan itu tak dapat disalahkan. Oleh karena telah berjasa mendisiplinkan jajaran birokrasi sehingga mampu menjadi tulang punggung pembangunan. Vertikalisme ala birokrasi jangan menjadi ciri dalam kehidupan kemasyarakatan. Dalam kehidupan kemasyarakatan justru harus dikembangkan pola hubungan dan komunikasi horisontal yang egaliter.

Di samping itu, dia menegaskan bahwa kegunaan keterbukaan itu terbatas. Dalam bidang politik, basis kita belum cukup kuat untuk sangat terbuka di bidang politik. Banyak negara hancur ketika menyelenggarakan keterbukaan. Sebagai bangsa yang majemuk, keterbu-

kaan kita juga dibatasi oleh kondisi kemajemukan yang mengandung benih-benih disintegrasi. Sikap ABS tidak dapat diatasi dengan alih kepemimpinan. Tanpa perubahan budaya, siapa pun yang menjadi pemimpin, mental ABS akan tetap berkembang. Mengenai kepemimpinan nasional, mengapa perlu ada pembatasan masa jabatan Presiden? Menurut ketentuan perundang-undangan, kalau Presiden sungguh-sungguh melanggar UUD dan GBHN, tak usah menunggu dua tahun, di tengah perjalanan pun dapat diganti. Yang penting menumbuhkan budaya politik dan basis ekonomi yang kuat. Adanya pembatasan masa jabatan Presiden, tetapi kulturnya sama, juga akan sama saja. Justru masalah yang paling urgen adalah membuat MPR berperan sesuai dengan harapan rakyat dan menjadi lembaga yang wibawa politiknya kuat. MPR yang kuat inilah yang nanti akan memilih Presiden. Sedangkan mengenai hutang luar negeri, justru dimanfaatkan untuk membangun basis ekonomi yang kuat. Dalam era globalisasi, tak ada negara yang bebas dari hutang. Tentang kampanye, Golkar mengembangkan budaya kampanye dialogis, di samping kampanye yang sifatnya rapat umum.

Jurkam Golkar Mar'ie Muhammad mengemukakan pada kampanye dialogis di Jember tanggal 23 Mei, inflasi merupakan perampok terbesar, karena secara tak langsung mengurangi nilai uang yang diterima terutama oleh golongan masyarakat yang berpendapatan tetap. Gaji pegawai negeri, termasuk guru-guru saat ini memang masih kecil. Tetapi uang yang terbatas jumlahnya dalam APBN sulit sekali dibagi sesuai dengan prinsip anggaran berimbang. Kita tak menganut prinsip anggaran defisit, karena hal itu sangat rawan terhadap inflasi. Pembangunan yang dicapai sekarang bukan semata-mata hasil Golkar, melainkan hasil usaha seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan itu sudah membawa kemajuan, tetapi juga banyak mengandung kekurangan. Untuk itu marilah kita memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pembangunan. Golkar juga minta dikritik, karena merupakan bagian dari demokrasi Pancasila. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia dalam PJPT II ialah kesenjangan dan kesempatan kerja. Kesempatan kerja hanya dapat diperluas dengan peningkatan pembangunan. Masalah lain adalah globalisasi, suatu proses yang tak mungkin dihindari. Untuk itu diperlukan penyesuaian-penyesuaian dan pembaruan-pembaruan. Demokrasi memang mempunyai nilai universal, tetapi penerapannya tak mungkin berlaku sama untuk semua bangsa dan negara. Melainkan harus disesuaikan dengan pengalaman sejarah, kebudayaan dan tatanan nilai yang ada di setiap negara itu (*Suara Karya*, 25 Mei 1992).

Anggota DPP Golkar Djoko Sudyatmiko mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 25 Mei 1992, dalam kehidupan politik sebenarnya sudah terbuka peluang yang sangat lebar untuk berkembangnya kehidupan demokrasi. Tidak ada masalah dengan sistem dan mekanisme demokrasi, karena suprastruktur politik dan infrastruktur politik telah tertata sesuai dengan amanat UUD 1945. Platform yang sama bagi semuanya telah ditetapkan, yaitu Pancasila. Yang justru diperlukan adalah pengembangan budaya demokrasi. Sikap dan perilaku politik semua pihak, seringkali belum bersikap demokratis. Misalnya sikap paternalistik. Banyak dari kita saat mengalami kesulitan ramai-ramai menghadap pemerintah agar ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Ada yang mengatakan Tata Tertib DPR menghambat lahirnya RUU Inisiatif. Masalahnya bukan terletak pada hambatan Tata Tertib, tetapi sampai sekarang belum ada yang mencobanya. Demokrasi dapat berkembang apabila semua pihak sadar dan setia kepada ciri-ciri dasar dan falsafah bangsa, tidak berpikir terkotak-kotak dan primordial. Demokrasi akan berkembang kalau semua pihak mempunyai ketaatasasan yang jelas dalam pola pikir. Misalnya ada parpol yang minta duduk dalam kabinet, tetapi di lain pihak membuat "kabinet bayangan". Ini kerancuan berpikir yang sulit dipahami. Kabinet bayangan berangkat dari pemikiran yang sama sekali bertentangan dengan pemikiran untuk beramai-ramai duduk dalam kabinet. Mengenai istilah massa mengambang tidak pernah menjadi nama yang resmi. Yang benar adalah massa yang bebas dan tidak terikat secara permanen kepada kekuatan sospol mana pun, sehingga mereka bebas menilai dan bebas memberikan dukungan terhadap salah satu kekuatan sospol. Ini justru bentuk masyarakat yang paling demokratis dan karenanya tidak menghambat demokrasi. Pendidikan politik dapat dilakukan kapan saja dengan struktur yang ada sekarang. Kalau kita rajin membuat kaderisasi, langkah ini tentu akan menjangkau desa. Usaha ini penting karena sebagian besar anggota masyarakat berada dan tinggal di desa (*Suara Karya*, 26 Mei 1992).

Jurkam Golkar Pusat Sudomo dalam kampanyenya tanggal 26 Mei 1992 di Jakarta menyebutkan empat prioritas program Golkar dalam lima tahun mendatang: (1) peningkatan kualitas di semua bidang melalui pengembangan sumber daya manusia, baik lewat pendidikan, latihan maupun pengembangan. Ada tiga ciri manusia berkualitas yang ingin dicapai Golkar, yaitu manusia yang mempunyai motivasi kuat yang bersumber pada pembangunan nasional, mempunyai profesi dan mempunyai kewajiban sosial; (2) memerangi ekses-ekses sampingan

pembangunan, antara lain pencemaran, penyelewengan, korupsi, pungli, backing-backingan, penggusuran dan monopoli; (3) Golkar mengembangkan keterbukaan dan kebebasan demokrasi Pancasila serta kepastian hukum; (4) Golkar sudah mengelus-elus jagonya untuk menjadi Presiden lima tahun mendatang, yaitu Pak Soeharto.

Fungsionaris Golkar Moerdiono dalam forum dialog tanggal 26 Mei 1992 di Jakarta mengemukakan, meskipun Golkar menganggap tidak relevan jika masa jabatan seorang Presiden dibatasi sampai dua periode saja, Golkar juga tidak akan pernah melanggar UUD 1945 dengan mencalonkan seseorang menjadi Presiden seumur hidup. Kalau seseorang kinerjanya baik, mengapa ia tidak dipilih kembali. Kriteria Golkar tentang seorang calon Presiden antara lain mampu mempersatukan bangsa, mengayomi rakyat serta mengerti seluk-beluk pembangunan, memiliki keseimbangan mental dan intelektual pada saat mengambil keputusan di saat-saat kritis. Golkar tidak menyatakan calon Presidennya, juga secara prinsipiil ingin menghormati lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat.

Dalam kampanye dialogis di Surabaya tanggal 26 Mei 1992, Sekjen DPP Golkar Rachmat Witoelar memandang perlu dibangunnya suatu sistem kehidupan berbangsa yang secara operasional terkait dengan tantangan dan tuntutan-tuntutan yang dihadapi dewasa ini. Mekanisme tersebut mesti tanggap terhadap semua tuntutan dan kehendak masyarakat, memperkukuh sistem politik yang telah disepakati dan merujuk kepada Pancasila dan UUD 1945. Generasi muda hendaknya mengambil bagian dalam sistem tersebut. Ketidakhadiran mereka akan menghilangkan gairah dinamika masyarakat. Sistem tersebut menuntut keikutsertaan generasi muda secara aktif dan partisipasif. Karena dari segi jumlah, peranan generasi muda dalam struktur kekuasaan politik dewasa ini sangat besar. Jumlah pemilih muda mencapai 17 juta.

Dalam kampanye di Wonosari, Gunung Kidul, tanggal 26 Mei 1992, Ketua Umum DPP Golkar Wahono menyatakan, Pemilu saat ini memiliki arti khusus, karena jatuh tepat pada saat kita akan memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. Memang di balik keberhasilan pemerintah Orde Baru, masih ada kelemahan-kelemahan yang perlu dibenahi. Masyarakat sekarang memang sudah kritis dalam menilai pembangunan, mampu menganalisis dan mampu bertindak realistis. Itulah sesungguhnya bukti bahwa kekritisan rakyat, pola pikir analitis ma-

syarakat serta tindakan realistis masyarakat adalah merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan sekarang ini. Golkar tak akan melakukan kampanye murahan yang hanya membakar emosi rakyat, menyebarkan sikap konfrontasi dan menghamburkan isu-isu yang bisa menimbulkan pertentangan (*Kompas*, 27 Mei 1992).

Sekjen DPP Golkar Rachmat Witoelar dalam kampanye dialogis di Banjarmasin tanggal 27 Mei 1992 menegaskan, kader Golkar yang tidak aspiratif atau kurang menyuarakan aspirasi rakyat, tak akan mendapat izin duduk di kursi DPR. Golkar tak segan-segan akan menarik anggotanya dari kursi DPR, apabila ternyata mereka terbukti kurang memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Sedangkan Ketua Umum DPP Golkar Wahono dalam kampanye di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Palu tanggal 28 Mei 1992 menegaskan pendirian Golkar untuk tidak ikut latah OPP lain menyebutkan calon Presiden selama masa kampanye, karena hal itu melanggar UUD 1945 dan Tap MPR No. 2 Tahun 1973.

Jurkam Golkar Mar'ie Muhammad mengatakan dalam kampanye dialogis di Bandung tanggal 27 Mei 1992, memasuki era PJPT II tiba saatnya bagi pemerintah melakukan rileksisasi stabilitas dengan menerapkan pelonggaran-pelonggaran di berbagai bidang. Artinya pemerintah tak perlu bersikap terlalu kaku karena khawatir stabilitas politik, ketertiban, keamanan terganggu. Misalnya orang ingin berhalal bihalal tidak lagi perlu minta izin kepada yang berwajib. Pemerintah cukup memberitahukan syarat-syaratnya. Jika ternyata dalam halal bihalal itu dibicarakan soal-soal politiknya tinggal membawa penanggung jawab, ke pengadilan dan disidang secara terbuka. Rileksisasi stabilitas itu perlu dilakukan apabila tiga syarat pokok terpenuhi: (1) rileksasi tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 demi terjaminnya integrasi nasional dan rileksisasi stabilitas itu tidak justru menimbulkan ketidakstabilan; (2) rileksisasi harus tetap menjaga keutuhan negara kesatuan yang berwawasan kebangsaan; (3) rileksisasi jangan sampai mengganggu hasil-hasil pembangunan. Rileksisasi yang tepat dengan dosis yang cukup justru harus meningkatkan dinamika dan sikap kritis masyarakat dalam membangun. Kondisi ini dengan sendirinya meningkatkan partisipasi rakyat.

Fungsionaris Golkar Emil Salim mengatakan di Jakarta tanggal 29 Mei 1992, bahwa kampanye massal yang selama ini berlangsung

masih wajar. Kampanye dialogis yang dikembangkan Golkar cukup baik. Yang paling baik adalah debat politik melalui layar TV. Karena tiap OPP akan mengajukan programnya dengan cara-cara pemecahannya lalu terjadi perdebatan untuk mempertahankan konsepsi masing-masing. Dengan demikian masyarakat akan jelas apa yang dijual oleh OPP masing-masing. Tetapi sistem kampanye tersebut perlu dipikirkan untuk waktu mendatang. Golkar memang sejak dahulu memerangi kemiskinaan dan hasilnya telah dinikmati masyarakat. Hasil pembangunan itu akan tetap dipertahankan dan ada kontinuitasnya. Kontinuitas itu bukan berarti pembangunan tak mengalami perubahan. Perubahan harus ada, karena tahapan pembangunan itu sendiri menuntut adanya perubahan. Kalau 25 tahun pertama problema yang dihadapi adalah masalah kebutuhan pokok dan telah berhasil diatasi, maka 25 tahun tahap ke-2 masalah yang dihadapi adalah lapangan kerja, kualitas penduduk dan kualitas masyarakat yang akan mengarah ke pola industrialisasi. Demikian pun masyarakat yang dihadapi adalah masyarakat yang telah mapan akibat perkembangan pembangunan 25 tahun tahap ke-1. Karenanya Golkar sendiri telah siap dengan perubahan-perubahan dengan tetap menjaga kontinuitasnya.

Dalam kampanye dialogis bertema: "Strategi Pembangunan Demokrasi Politik dalam Menghadapi PJPT II" di Ujungpandang tanggal 29 Mei 1992, jurkam Golkar Sarwono Kusumaatmadja mengatakan, dalam pembangunan politik diperlukan sikap kehati-hatian karena bidang ini tergolong yang paling sulit dalam pembangunan di Indonesia. Karena kehati-hatian itu Golkar sering dituduh paling konservatif. Kemajuan ekonomi, tanpa diikuti dengan kemajuan budaya, belum cukup untuk mendukung suatu sistem politik yang demokratis. Sistem distrik bisa menjamin politik demokratis, jika didahului proses desentralisasi di bidang pemerintahan. Dengan makin kuatnya daerah tingkat II sebagai akibat desentralisasi, maka akan terjadi aliran sumber daya manusia maupun modal. Jika kondisi seperti itu sudah tercipta, barulah sistem distrik akan demokratis. Sistem distrik untuk kondisi sekarang ini tidak akan menjamin kehidupan politik yang demokratis di Indonesia. Sementara Sekjen DPP Golkar Rachmat Witoelar mengatakan, kehidupan yang lebih demokratis untuk waktu mendatang akan lebih dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa kita, seiring dengan makin meningkatnya kesadaran politik mereka. Dengan kata lain kehidupan politik yang lebih demokratis merupakan tuntutan rakyat yang

makin sadar hukum, sebagai dampak hasil pembangunan, yakni masyarakat yang kritis dan dinamis. Golkar telah mempersiapkan rancangan GBHN yang dapat mewadahi dan menggairahkan kehidupan demokrasi dengan ciri-ciri lebih rasional partisipasif daripada kehidupan demokrasi yang emosional indoktrinatif (*Suara Karya*, 30 Mei 1992).

Kampanye terbuka putaran terakhir Golkar di Jakarta, 30 Mei 1992, yang dipusatkan di Parkir Timur Senayan berlangsung semarak dan tertib. Kepada massa yang begitu banyak yang hadir pada kampanye itu, Ketua Umum DPP Golkar Wahono menyatakan kebanggaannya kepada warga Golkar yang mendukung budaya Pancasila. Selanjutnya Wahono mengemukakan, "kalau Saudara ingin pembangunan diteruskan, maka ia mengimbau untuk mendukung Golkar, karena pembangunan mengandung dimensi sejarah. Itu berarti mereka berkepentingan dengan rakyat banyak". Peringatan serupa disampaikan oleh jurkam Basofi Sudirman yang mengemukakan bahwa kampanye bukan arena adu otot. Karena itu kalau ada yang menantang berkelahi, harus sabar. Perlihatkan persatuan dan kesatuan dan bina keamanan yang sudah diupayakan selama ini.

Di depan ratusan mahasiswa di gedung DPD Golkar Jatim di Surabaya, 30 Mei 1992, fungsionaris Golkar Prof. Dr. B.J. Habibie yang mengenakan jaket kuning Golkar tetapi menyatakan kegiatannya itu bukan kampanye, mengemukakan, manusia beriman dan bertaqwa serta mampu menguasai teknologi adalah sasaran perjuangan bangsa Indonesia. Dengan penguasaan teknologi akan mampu meningkatkan kualitas berpikir yang pada gilirannya mampu meningkatkan derajat hidup bangsa (pendapat senada juga dinyatakan di depan sekitar 100 ulama/kiai, pimpinan pondok pesantren di Jatim). Menurut Habibie, yang dikehendaki rakyat Indonesia bukan pertumbuhan ekonomi yang mencolok, tetapi pertumbuhan pembangunan. Hanya dari hasil pembangunan terjadi pemerataan pendapatan, karena itu manusia harus mampu mengendalikan teknologi dan disiplin terhadap rekayasa apabila mau menerima nilai tambah.

Sementara itu, dalam dialog dengan pemuda, pelajar dan mahasiswa di gedung Pingkan Matindas, Manado, 30 Mei 1992, masalah perubahan, keterbukaan, demokrasi, kebebasan mahasiswa, rekrutmen calon legislatif, fasilitas bisnis, calon Presiden, sistem kampanye, hak pilih, massa mengambang, kebijakan moneter, fungsi dan efektivitas

serta akses legislatif terhadap kekuasaan, mendapat sorotan tajam. Dalam dialog ini tampil enam tokoh muda Golkar dari Jakarta, yakni Drs. Theo Sambuaga MA, Chris Kanter, Peter Gontha, Peter Sondakh, Firmansyah Wuisan MBA, dan Drs. Tonny Waworuntu (*Kompas*, 31 Mei 1992).

Ketua DPP Golkar Octoyo Oesman mengatakan pada kampanye Golkar melalui TVRI tanggal 31 Mei 1992, tentang keberhasilan pembangunan selama Orde Baru. Namun semuanya itu terwujud karena adanya dukungan masyarakat terhadap Golkar khususnya dalam empat Pemilu. Kemenangan mayoritas Golkar telah memungkinkan sistem demokrasi Pancasila dibangun bersama-sama, yang kini telah mantap kerangka dan landasannya. Tugas selanjutnya, menuntaskan pembangunan sistem demokrasi Pancasila yang mantap, kukuh, dan tangguh sebagai wadah berkiprah seluruh rakyat dalam membangun kehidupan bersama yang bersatu padu, demokratis, adil dan makmur. Saat ini ada sementara orang yang menilai demokrasi di Indonesia sedang sakit atau lesu. Itu tidak benar sama sekali. Mungkin mereka khilaf, karena melihatnya dari kacamata lain yang tidak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dikemukakan juga, Golkar berpendapat bahwa pembangunan hukum harus dapat menjawab kebutuhan berbagai bidang terutama di bidang ekonomi dan teknologi yang berkembang dengan pesat. Upaya pembangunan hukum berarti sekaligus memberikan kemampuan mengikuti globalisasi di bidang ekonomi. Hukum dalam kehidupan ini tidak boleh sekedar alat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, tetapi harus pula diarahkan sebagai sarana yang merekayasa masyarakat sejahtera.

Sementara itu dalam kampanye dialogis dengan generasi muda Dati I Riau di Pekanbaru, 30 Mei 1992, fungsionaris Golkar Arifin Siregar mengungkapkan, salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan adalah menciptakan pemerataan usaha, khususnya di bidang kesempatan berusaha, termasuk di bidang jalur distribusi barang-barang dan jasa. Untuk memperkuat missi ini Departemen Perdagangan sudah lama menggodog RUU tentang Perlindungan Usaha Kecil. RUU ini kini sedang dibahas Menko Ekuin. Di Bojonegoro, fungsionaris Golkar H. Harmoko dalam kampanyenya merangkum program Golkar dalam pembangunan jangka panjang kedua menjadi program 4 W. Yakni, *Wareg* (kenyang), bukan saja kenyang makanan tetapi juga kenyang mental; *Waras* (sehat), sehat rohani dan jasmani; *Wasis* (cer-

das), yakni berjuang untuk meningkatkan kecerdasan bangsa; dan *Waspada*, yakni waspada terhadap menyusupnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sementara di Palembang, jurkam Hutomo Mandala Putra (Tommy) mengajak seluruh rakyat untuk memberikan suaranya pada 9 Juni 1992. Jika ada rakyat yang tidak memberikan suara, apalagi mereka yang menamakan diri sebagai Golput, maka mereka tidak berhak menuntut haknya di negeri ini. Sedangkan di Sorong Irja, jurkam Rachmat Witoelar mengemukakan, massa mengambang jangan dijadikan kambing hitam penyebab munculnya ekses dalam pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. Untuk itu, perlu dipikirkan bersama pelaksanaan kampanye dialogis dengan mengurangi acara rapat umum di masa mendatang. Dalam pelaksanaan kampanye mendatang, dapat diawali rapat umum, kemudian dengan forum dialog dan diakhiri dengan rapat umum (*Kompas*, 1 Juni 1992). Sementara itu di Lapangan Peurelak Aceh Timur, 31 Mei 1992, jurkam Golkar Pusat dr. Abdul Gafur mengatakan, kalau ada parpol yang mengklaim sebagai parpol yang berdasarkan agama, itu adalah kebohongan dan penipuan, karena klaim seperti itu bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 1985 tentang Parpol dan Golkar. Berdasarkan UU ini semua parpol dan Golkar terbuka untuk semua agama. Masyarakat Aceh agar waspada terhadap isu-isu seperti itu (*Pelita*, 2 Juni 1992).

Kampanye Golkar di Bandung, 1 Juni 1992, berlangsung semarak. Lautan kuning pendukung Golkar hampir menguasai kota Bandung. Jurkam yang tampil di sini antara lain Harmoko dan Ketua Umum DPP Golkar Wahono. Di Serang, jurkam Ir. Azwar Anas mengatakan, pelaksanaan pembangunan tidak cukup hanya dengan janji-janji, melainkan perlu tindakan nyata seperti yang dilakukan Golkar selama ini. Di Karawang dan Purwakarta, jurkam Ny. Sulasikin Moerpratomo mengatakan, Golkar tetap konsisten memperjuangkan hak-hak wanita untuk bisa tampil sebagai pendukung pembangunan. Sementara di Lhokseumawe pada waktu yang sama, jurkam Prof. Dr. Saleh Afif menjelaskan, bila kita menginginkan pembangunan terus berlanjut, maka diperlukan dukungan dan kepercayaan kepada Golkar. Sedangkan di Padang jurkamnas Prof. Syarifuddin Baharsyah mengajak kaum muda untuk mencoblos tanda beringin pada hari Pemilu (*Pelita*, 2 Juni 1992). Dalam dialog tertutup di Pasar Minggu Jakarta Selatan, 2 Juni 1992, fungsionaris Golkar Ir. Sarwono Kusumaatmadja mengemukakan, Golkar tidak pernah memaksa pegawai negeri untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Golkar, melainkan atas kesadaran masing-

masing. Dalam acara serupa di Balai Kemanunggalan ABRI-Rakyat di Ujungpandang, 2 Juni 1992, jurkam DPP Golkar Drs. H.M. Parawansa, yang juga Dirjen Bangda, mengatakan, sangat keliru jika ada orang yang mengatakan demokrasi kita tidak berkembang. Padahal, dahulu kita tidak boleh kritik pemerintah, tetapi sekarang boleh asal tetap sesuai dengan aturan dan etika yang benar. Di Pemangkat pada waktu yang sama, fungsionaris Golkar H. Ismail Saleh SH menyatakan, gagasan memisahkan salah satu OPP dari birokrasi sehingga birokrasi tidak dijadikan ujung tombak dalam kegiatannya tidak dapat diterima. Bila hal itu dilakukan berarti mengajak kita kembali ke era Orde Lama di mana pegawai negeri dan birokrasi terkotak-kotak. Tugas pegawai negeri dan birokrasi adalah bekerja. Mereka merupakan pelaksana pembangunan. Jika mereka terpecah loyalitasnya, yakni antara loyalitas partai dengan tugasnya sebagai pegawai negeri dan birokrasi akan mengakibatkan terganggunya kelancaran pembangunan. Di Gorontalo, Sulut, Drs. Radius Prawiro menegaskan, jangan ragu sedikit pun kepada Golkar karena Golkar tak pernah bergeser dari tekad asalnya untuk membangun kesejahteraan rakyat. Dalam kampanye di Bukittinggi, Ir. H. Azwar Anas mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak kehilangan "tongkat" kedua atau ketiga kalinya dan tetap setia pada Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu, perlu dihindari janji-janji politik sebagaimana dilakukan partai-partai politik zaman dahulu yang justru mengakibatkan pergolakan-pergolakan politik. Sedangkan di Kotamubagu, Sulut, 2 Juni 1992, fungsionaris Golkar Harmoko mengingatkan, kader muda Golkar jangan goyah terhadap isu yang mendiskreditkan dan memberi kemunduran kepada Golkar (*Kompas*, 3 Juni 1992).

Sementara itu Ketua Umum DPP Golkar Wahono mengakhiri kampanye Golkar di Surabaya, di kota mana ia mengawali kampanye Golkar dari seluruh rangkaian kampanye Golkar di 27 propinsi. Dalam kampanye putaran terakhir di Jayapura, 3 Juni 1992, fungsionaris Golkar Prof. Dr. J.B. Sumarlin menegaskan, di mana pun di dunia ini tidak ada negara yang tidak menghadapi masalah kesenjangan dalam proses pembangunannya, tidak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu ia menyesalkan suara-suara yang membesar-besarkan masalah kesenjangan, karena hal tersebut dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengatasinya harus bijaksana dengan konsep yang jelas dan kerja keras serta karya nyata, bukan hanya sekedar janji. Untuk itu Golkar memiliki konsep serta tenaga ahli dan pelaksana

yang memadai. Di Manado, jurkam Harmoko menyinggung tentang kesadaran politik generasi muda yang makin meningkat sebagai hasil pendidikan politik Golkar sehingga ia optimis para kader Golkar akan siap menjadi pemimpin bangsa untuk melanjutkan pembangunan nasional. Di Palembang, jurkam Ir. Hasjrul Harahap mengajak seluruh masyarakat agar dalam pelaksanaan Pemilu mendatang tetap mengutamakan keutuhan bangsa dan kelanjutan pembangunan. Di Medan, jurkam Akbar Tanjung menyinggung tentang pendidikan politik yang menjadi salah satu titik berat program Golkar sekarang maupun masa mendatang. Sedangkan Probosutedjo yang mendampinginya mengatakan, calon Presiden mendatang adalah figur yang tidak hanya mampu menguasai dan dekat dengan ABRI tetapi juga harus dapat mempersatukan agama dan bangsa Indonesia yang memiliki beragam etnis. Karena itu rasanya kurang pantas dan tidak tepat bila ada seorang pemuda dari salah satu OPP yang berasal dari lingkungan artis mencalonkan diri menjadi Presiden pada Pemilu nanti. Di Banjarnegara dan Purbalingga Jateng, jurkam Ir. Hartarto menyinggung tentang keberhasilan pembangunan yang dikaitkan dengan upaya pemerataan, sementara jurkam Azwar Anas dalam acara silaturahmi dan dialog dengan para alim ulama se-Sumatera Barat di Padang, 2 Juni 1992, menjelaskan tentang demokrasi Pancasila, yang selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat, yang sudah dilaksanakan secara baik sekarang ini, dan perhatian Golkar terhadap pembangunan keagamaan. Di Aceh Utara jurkam Abdul Gafur mengajak warga Golkar untuk membuka diri sekaligus berusaha saling memaafkan warga OPP lainnya. Kampanye Golkar lainnya berlangsung di berbagai daerah lain seperti di Yogyakarta, dengan jurkam Haryati Subadio, Sulasikin Moerpratomo dan Sri Sultan Hamengkubowono X, di Bali dengan jurkam Moerdiono, dan Nani Soedarsono, di Kupang dengan jurkam B.S. Mulyana dan di Maumere dengan jurkam J. Soedradjat Djiwandono (*Suara Karya*, 4 Juni 1992).

Pada kampanye dialogis di Medan, 3 Juni 1992, fungsionaris Golkar, Drs. Mar'ie Muhammad mengemukakan, perlu dibangun sistem yang dapat lebih mendekatkan anggota DPR dengan rakyat pemilih dan daerah pemilihannya, agar anggota DPR dapat menyerap aspirasi rakyat dan daerah pemilikannya. Selain itu, DPR juga harus menggunakan haknya yang dijamin secara konstitusional (*Kompas*, 4 Juni 1992).

Lampiran 22

RINGKASAN KAMPANYE **PPP** DALAM PEMILU 1992

KETUA DPW PPP DKI dr. Djufrie Asmoredjo S.K.M. dalam kampanyenya pada masa PPP di Jakarta tanggal 10 Mei 1992 mengemukakan bahwa pada SU MPR tahun depan PPP akan mencalonkan Soeharto sebagai Presiden dan Jenderal Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden untuk masa bhakti 1993-1998. Sementara itu, Hamzah Haz jurkam PPP mengatakan selama 25 tahun Orde Baru telah banyak pembangunan yang dilaksanakan. Namun tak dapat diingkari beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Yaitu ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi dan pendidikan. Dalam SU MPR yang akan datang PPP akan memperjuangkan Tap MPR yang mengatur demokratisasi ekonomi. Bagaimana nasib pedagang asongan? Mengapa fasilitas selalu diberikan kepada pengusaha besar? Dia juga berjanji, bila PPP mampu memperbanyak wakilnya yang duduk di DPR, lembaga ini tidak akan menjadi "tukang stempel" (*Kompas*, 11 Mei 1992).

Masih kampanye di Jakarta tanggal 10 Mei 1992, Sekjen DPP PPP H. Matori Abdul Djalil mengatakan bahwa dalam budaya politik demokrasi Pancasila tidak diperlukan kabinet bayangan, sedangkan yang diperlukan adalah kabinet kebersamaan, yang berarti wakil-wakil partai betul-betul dapat duduk di dalam kabinet. Kabinet bayangan mengesankan pola demokrasi liberal, sedangkan demokrasi Pancasila mengutamakan harmoni ketimbang oposisi. Sifat kebersamaan ini agar menjadi salah satu pertimbangan Presiden dalam penyusunan kabinet mendatang (*Kompas*, 11 Mei 1992).

Jurkam H. Aisyah Amini menegaskan bahwa bila pemerintah mempunyai rencana menghapus SPP hingga SLTP, PPP justru ingin

menghapuskan SPP hingga tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Di samping itu, PPP ingin meningkatkan keadilan dan membela kaum lemah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian (*Suara Karya*, 11 Mei 1992).

Kampanye PPP di hari pertama masih ditandai dengan slogan-slogan, dan mengingatkan bahwa PPP merupakan fusinya partai-partai Islam. Di samping itu, janji-janji klasik masih didengungkan, seperti misalnya: penghapusan SDSB, peniadaan SPP, pemberantasan korupsi, upaya memperluas kesempatan kerja, upaya menghindari penggusuran ataupun pengejaran terhadap para pedagang asongan.

Jurkam PPP Ir. Saleh Khalid dalam pidato kampanye di TVRI tanggal 11 Mei 1992 mengemukakan, PPP bertekad mengembangkan budaya politik baru yang lebih emansipatif, partisipatif dan terbuka bersama-sama dengan berbagai kalangan dan organisasi sospol yang memiliki keprihatinan dan kepedulian yang sama. Budaya politik emansipatif dimaksudkan sebagai perlakuan yang sama, adil di antara sesama warga negara, tanpa merasakan adanya perlakuan yang diskriminatif karena perbedaan warna kulit, suku bangsa maupun afiliasi partai atau golongan. Banyak di antara kita sekarang ini terjebak pada pola hubungan yang mengandalkan patronase politik, ketimbang persamaan derajat dan martabat manusia warga negara maupun rakyat yang berdaulat. Budaya politik partisipatif masih perlu diperjuangkan bersama, walaupun secara kultural Indonesia memiliki akar budaya partisipatif dalam "musyawarah". Dalam hubungan dengan keterbukaan, kita umumnya masih memiliki sikap dan perasaan berburuk sangka, daripada berbaik sangka sebagai prasyarat musyawarah (*Suara Karya,* 12 Mei 1992).

Jurkam PPP Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas menegaskan dalam kampanyenya di Jakarta tanggal 10 Mei 1992 bahwa: (a) terbatasnya penyediaan lapangan kerja memperbesar pengangguran (*Kompas,* 11-5-1992); (b) pembangunan belum cukup, karena di mana-mana masih terlihat fakir miskin, orang-orang tua dan anak-anak terlantar; (c) kita masih melihat adanya pemuda dan pemudi yang tidak dapat menginjakkan kakinya di sekolah dan para sarjana yang menjadi penganggur; (d) terdapat kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok antara kota dan desa, sehingga kegiatan ekonomi dieksploitasi oleh gemuruhnya industrialisasi perkotaan. Para industriawan dapat menjual hasil industrinya dengan harga tinggi, sedang petani di desa menjual padinya

dengan harga murah; (e) gegap gempitanya pembangunan di kota-kota besar di Jawa telah jauh meninggalkan pembangunan daerah-daerah lain di luar Jawa (*Suara Karya,* 11 Mei 1992).

Sementara itu dalam kampanyenya di Palembang tanggal 13 Mei 1992 Sri Bintang Pamungkas mengusulkan, agar para calon Menteri yang ditunjuk oleh Presiden terpilih dalam SU MPR, dikonsultasikan terlebih dahulu dengan wakil rakyat terpilih. Hal itu perlu dilakukan terutama untuk mengetahui sejauh mana akhlak mulia yang bersangkutan sebagai cermin sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan tingkat kepedulian mereka terhadap rakyat banyak. Mereka yang tak bisa membela rakyat harus turun. Rakyat haruslah di atas segala-galanya. Meski pengangkatan Menteri itu adalah hak prerogatif Presiden, namun sepatutnya para Menteri itu dikonsultasikan dengan wakil rakyat terpilih dan dilitsus. Adalah tak adil untuk menjadi wakil rakyat harus dilitsus, tetapi para menteri-menteri tidak.

Sementara itu Ketua Umum DPP PPP Ismail Hasan Metareum menegaskan dalam kampanye pertamanya di Surabaya tanggal 10 Mei 1992 bahwa PPP akan mengangkat harkat kaum dhufa (kaum lemah dan miskin) dengan membangun sistem ekonomi yang berorientasi kerakyatan dan menciptakan keadilan sosial, karena pembangunan dalam 25 tahun terakhir ini telah meminta pengorbanan dari kaum dhufa dan para politisi. Partainya bertekad memperjuangkan budaya politik yang emansipatif, partisipatif dan terbuka. Imbalan bagi kaum dhufa dan politisi hanya dapat diberikan jika semua kebijakan, peraturan perundang-undangan dan konsepsi-konsepsi disusun sesuai dengan UUD 1945. Di samping itu, ekonomi harus ekonomi kerakyatan. Konglomerat boleh ada tetapi secara keseluruhan orientasinya harus untuk membangun ekonomi rakyat. Jangan sampai konglomerat menjadi semakin kaya, sementara yang lain menjadi semakin melarat. Dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka trauma politik lama dan budaya politik diskriminatif harus ditinggalkan. Birokrasi harus netral dan tidak masuk ke dalam satu golongan tertentu. Semua pejabat negara harus bersikap netral, jujur dan adil (*Kompas*, 11 Mei 1992).

Ketua Umum PPP Ismail Hasan Metareum juga mengemukakan dalam kampanye di Palembang, PPP akan terus memperjuangkan budaya politik baru yang emansipatif, partisipatif dan terbuka. Dalam

Sidang Umum MPR 1993 PPP juga akan memperjuangkan perlunya pembangunan sistem ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial. Sedang Sekjen PPP Matori Abdul Djalil mengatakan dalam kampanyenya di DKI Jakarta, dalam kampanye seyogyanya OPP tak hanya menyampaikan program-programnya, tetapi juga mengemukakan siapa Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan. Karena program dan pelaksanaan program merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Meski Wapres merupakan hak prerogatif Presiden, namun bukan berarti OPP tak mempunyai hak untuk mengusulkannya (*Kompas*, 14 Mei 1992).

Sekjen DPP PPP H. Matori Abdul Djalil mengemukakan dalam kampanyenya di Jawa Barat tanggal 14 Mei 1992, PPP bertekad mengubah UU Perkoperasian No. 12/1967 yang tidak sejiwa dengan pasal 33 UUD 1945. Tekad tersebut sejalan dengan tekad PPP untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Mustahil bangun usaha koperasi akan menjadi besar dan sejiwa dengan pasal 33 UUD 1945 tanpa mengubah UU Perkoperasian yang ada. Koperasi harus sesuai jiwa pasal 33 UUD 1945 agar ia bisa menjadi besar serta mampu menjalankan prinsip-prinsip ekonomi universal. Dalam konteks ini Koperasi bisa *go public* dan bisa menjadi usaha raksasa. Membangun sistem ekonomi koperasi harus dimulai dengan membangun jiwa dan semangat kebersamaan serta semangat kekeluargaan (*Suara Karya*, 15 Mei 1992).

Dalam kampanye PPP di Jakarta, 16 Mei 1992, Hamzah Haz menegaskan janji partainya yang akan tetap memerangi ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan pendidikan. Sedangkan Sekjen DPP PPP H. Matori Abdul Djalil di tempat terpisah menegaskan lagi bahwa PPP mencalonkan Jenderal TNI Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden.

Dalam kampanye PPP melalui TVRI tanggal 17 Mei 1992, Dra. Hj. Mudrikah (anggota MPR) mengatakan antara lain, PPP hendak mengembangkan iklim sosial yang mampu menempatkan posisi wanita sepadan dengan posisi pria dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 UUD 1945 dan GBHN. Dalam konteks ini PPP senantiasa mendorong terwujudnya tatanan sosial yang egaliter, sehingga seluruh potensi masyarakat dapat didayagunakan bagi kepentingan pembangunan untuk mempercepat proses pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Adanya sikap dan perlakuan diskriminatif di tengah-tengah masyarakat ter-

hadap sekelompok warga negara harus dihindari, karena bertentangan dengan Pancasila dan tidak sesuai dengan hakikat kedaulatan rakyat. Untuk itu PPP mengajak untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat khususnya kaum wanita dan generasi muda (*Kompas*, 18 Mei 1992).

Dari kampanye PPP di berbagai daerah, dikemukakan antara lain: (a) Jurkam PPP Sekjen DPP PPP Matori Abdul Djalil di Ujungpandang, 18 Mei 1992: PPP berkepentingan untuk lebih mendorong konsentrasi pembangunan diprioritaskan di Indonesia bagian timur (pemerataan pembangunan); (b) di Manado, 17 Mei 1992, jurkam Drs. Muis A.Y. menyatakan, pembangunan sekarang ini belum berhasil karena masih terlihat kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam masyarakat. PPP akan mengatasinya dengan berupaya meletakkan pembangunan pada wawasan kebenaran dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa; (c) sedangkan jurkamnas PPP Ir. M. Khalid Saleh di Kulon Progo DIY: persoalan pokok sekarang ini, bukan masalah melanjutkan atau tidak melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan selama ini, tetapi apakah demokrasi dan keadilan dapat kita tegakkan atau tidak. Kalau tidak ditegakkan berarti rakyat akan kehilangan tongkat kedaulatannya dua kali. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk menegakkan demokrasi dan keadilan dalam rangka menyelamatkan masa depan bangsa adalah merombak sistem politik yang ada secara mendasar sesuai dengan tuntutan Pancasila dan UUD 1945 (*Suara Karya*, 19 Mei 1992).

Jurkam PPP di berbagai wilayah Jakarta, 19 Mei 1992, antara lain mengemukakan lagi soal calon Presiden dan Wakil Presiden, masalah pembangunan, dan masalah sistem perpajakan yang dirasakan belum adil, serta peningkatan pembangunan politik pada PJPT II (*Media Indonesia*, 20 Mei 1992).

Dalam kampanyenya di Sumbawa Besar NTB, Sekjen DPP PPP Matori Abdul Djalil mengatakan, PPP akan tetap memperjuangkan kemajuan suatu daerah yang menyimpan potensi sumber daya alam tanpa harus mengorbankan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Pembangunan yang dijiwai oleh Pancasila adalah pembangunan yang tidak bertabrakan dengan kedua nilai tersebut. Selain itu, ia juga menyinggung tentang permusyawaratan dalam demokrasi Pancasila yang tidak boleh keluar dari "garis demarkasi" nurani budaya bangsa (*Pelita*, 21 Mei 1992).

Sekretaris Pemenangan Pemilu DPW PPP Jakarta, M. Asikin Kaharuddin mengatakan di Jakarta, 21 Mei 1992, bahwa pada tanggal 22 Mei 1992, DPW PPP Jakarta tidak akan mengadakan kampanye berupa rapat umum, namun sebagai gantinya akan menyebarkan sekitar satu juta tanda gambar PPP dari rumah ke rumah di lima wilayah DKI Jakarta, dan menempelkan sekitar 10 ribu tanda gambar karton di jalan-jalan strategis ibukota. Tujuan kampanye simpatik itu adalah untuk memberikan kesempatan serta informasi kampanye kepada masyarakat yang tidak sempat hadir langsung dalam kampanye berupa rapat terbuka, dan memberikan pendidikan politik kepada rakyat (*Berita Buana*, 22 Mei 1992).

Dalam pidato kampanyenya di Situbondo Jatim, 22 Mei 1992, Sekjen DPP PPP Matori Abdul Djalil mengemukakan, PPP bertekad mengamankan suksesi kepemimpinan nasional, dengan memperjuangkan Jenderal (Purn.) Soeharto menjadi Presiden, dan Jenderal Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden untuk periode 1993-1998 (*Kompas*, 23 Mei 1992).

Sedang Ketua Umum DPP PPP Ismail Hasan Metareum dalam kampanye di Sukabumi tanggal 23 Mei mengharapkan agar dalam PJPT II nanti kaum lemah tidak lagi menjadi korban pembangunan. Dalam pembangunan 25 tahun pertama, Orde Baru memang telah berhasil menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Namun harus diakui pula bahwa pembangunan selama ini masih banyak mengorbankan kaum dhufa, rakyat lemah dan miskin. Karena itu dalam PJPT II PPP menginginkan agar pembangunan lebih berorientasi kepada pemerataan dan kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Jurkam PPP Hamzah Haz dalam pidato kampanye di TVRI tanggal 23 Mei 1992 mengatakan PPP bertekad terus memperjuangkan agar golongan ekonomi lemah diberikan berbagai kemudahan untuk memperoleh kredit dan permodalan serta tempat usaha yang memadai disertai dengan informasi pasar yang akurat. Selama ini realisasi perbankan lebih banyak jatuh kepada golongan ekonomi kuat, sedangkan kredit usaha kecil (KUK), selain bunganya tinggi, jumlahnya masih amat terbatas. Sampai saat ini Indonesia masih menghadapi suatu masalah besar yakni kesenjangan sosial, baik kesenjangan antar golongan pendapatan, antara usaha kecil dan usaha besar, maupun kesenjangan antar daerah.

Sekjen DPP PPP H. Matori Abdul Djalil dalam kampanye tanggal 25 Mei 1992 di Jakarta menilai, UU No. 3/1985 tentang Parpol dan Golkar banyak kekurangan dan kelemahannya. UU ini belum memberikan hak politik yang sama pada orang-orang desa dan orang-orang kota. Dalam masalah ini hak politik baru dimiliki oleh orang-orang kota. Karena ketimpangan tersebut PPP mengusulkan UU No. 3/1985 segera disempurnakan. Beberapa pasal dari UU tersebut telah membatasi kepengurusan organisasi sospol hanya sampai pada daerah tingkat II, kabupaten atau kotamadya. Pembatasan itu secara diametral bertolak belakang dengan jiwa pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Dengan pembatasan itu hak berserikat dalam politik bagi masyarakat desa menjadi terpasung. Inilah yang menyulitkan Orsospol melakukan pendidikan politik kepada rakyat secara langsung. Akibatnya rakyat tidak lagi menggunakan nalar menentukan pilihan politiknya. Di samping itu jurkam PPP yang lain mengkritik TVRI yang lebih banyak menayangkan OPP tertentu. Juga disinggung masalah iuran TV, pencalonan Pak Harto dan Pak Try Sutrisno sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta pembasmian korupsi. Diharapkan ada anggota PPP duduk di Kabinet mendatang, menjadi Gubernur, Walikota dan lurah-lurah. Selanjutnya perlu dibuat undang-undang yang mengatur konglomerat, koperasi, BUMN, pencabutan UU Subversi, masalah penggusuran, pajak dan retribusi di DKI. Budaya telepon kepada pers perlu dihilangkan dan sebaliknya perbaikan nasib nelayan perlu dilakukan (*Kompas*, 26 Mei 1992).

Ketua Umum DPP PPP Ismail Hasan Metareum mengakhiri kampanye di lapangan terbuka tanggal 29 Mei di Jakarta mengatakan, dalam Pemilu 1992 PPP harus merebut kembali kemenangan di Jakarta dengan tetap menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Untuk itu semua warga PPP jangan lupa mencoblos bintang pada Pemilu tanggal 9 Juni 1992 nanti. Jika PPP tetap menjunjung akhlak yang mulia, berarti PPP dapat memperlihatkan diri sebagai partai yang dicintai rakyat. Karena itu anggota PPP harus mematuhi semua peraturan yang berlaku dan jangan bringas di jalan-jalan. PPP akan tetap mengutamakan program-program di bidang pendidikan, di samping program di bidang ekonomi, sosial politik dan pembangunan di bidang hukum. PPP akan tetap memperjuangkan penghapusan SPP untuk anak-anak Sekolah Dasar dan anak rakyat kecil agar bisa mendapat kesempatan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Semua perjuangan dan program PPP merupakan perjuangan demokratisasi di segala bidang. Dalam kampanye

di Ujungpandang tanggal 27 Mei 1992, Ismail Hasan Metareum mengatakan, PPP akan memperjuangkan agar tanah-tanah rakyat yang terkena proyek akan diberikan "ganti untung" bukan ganti rugi, supaya rakyat pemilik tanah tidak tergusur (*Kompas*, 30 Mei 1992).

Seusai kampanye di depan massa di Bandar Lampung, 31 Mei 1992, Sekjen DPP PPP H. Matori Abdul Djalil mengemukakan, keputusan DPP PPP mengenai pencalonan kembali Presiden Soeharto sebagai presiden untuk periode 1993-1998 adalah keputusan yang final. DPP PPP tidak akan mengadakan rapat lagi untuk membicarakan masalah tersebut. Karena itu, peluang untuk mengajukan calon lain selain Presiden Soeharto sudah tertutup.

Dalam kampanye itu, Matori meluruskan pernyataan jurkam PPP Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas kepada wartawan di lapangan Parkir Timur Senayan dua hari sebelumnya, yang menyatakan, PPP bukan mustahil nantinya memunculkan nama baru untuk Presiden, di luar Soeharto (*Kompas*, 1 Juni 1992).

Dalam kampanye di Medan, 30 Mei 1992, Ketua Umum DPP PPP Ismail Hasan Metareum antara lain menyinggung kembali penghapusan SPP di SD yang belum tuntas. Sedangkan di Pekanbaru, Riau pada waktu yang sama, Prof. Dr. Muchtar Naim mengatakan, kendati pelaksanaan pembangunan selama ini telah memperlihatkan berbagai kemajuan terutama di sektor ekonomi, tetapi kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat dan berbicara, yang merupakan sasaran utama perjuangan kemerdekaan, justru masih terbengkalai. Bahkan beberapa faktor menunjukkan kemunduran, antara lain hambatan yang dialaminya ketika berkampanye di daerah kelahirannya di Sumatera Barat (*Kompas*, 31 Mei 1992).

Dalam kampanye di Yogyakarta, 31 Mei 1992, Wakil Sekjen DPP PPP Yusuf Syakir mengajak PDI dan Golkar untuk ikut mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh OPP, dan bukan oleh Pemerintah seperti yang berlaku selama ini. Sementara itu dalam kampanye di Bandung pada waktu yang sama, Wakil Sekjen DPP PPP Syaiful Anwar mengatakan, wujud pembaruan yang terasa mendesak adalah peningkatan kualitas masyarakat melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan di segala bidang atau penciptaan mekanisme sosial ekonomi yang proporsional. Pembaruan yang ideal adalah peningkatan

harga berbagai hasil produksi petani, penyesuaian gaji pegawai negeri dan ABRI, pemapanan usaha koperasi, usaha golongan menengah dan lemah, peniadaan proteksi berikut fasilitas bagi usahawan mapan, sekaligus memberantas nepotisme, kolusi dan korupsi (*Kompas*, 1 Juni 1992).

DPW PPP DKI Jakarta, tanggal 1 Juni 1992 tidak lagi mengadakan kampanye terbuka. Selama tiga hari sisa masa kampanye, PPP akan menggunakannya untuk kegiatan pemantapan saksi yang akan ditempatkan di tiap-tiap TPS di DKI Jakarta. Menurut Wakil Ketua DPC PPP Jakarta Timur Muhammad Umar Bakir, pemantapan saksi di tiap TPS di DKI akan diisi dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban saksi selama pelaksanaan pencoblosan di TPS-TPS.

Sementara itu dalam kampanye putaran terakhir di Tangerang, 1 Juni 1992, Sekjen DPP PPP H. Matori Abdul Djalil menegaskan agar pelaku ekonomi dapat mencegah perilaku kapitalistik. PPP bertekad untuk menghapus sikap kapitalistik yang ditunjukkan majikan kepada para pekerja. Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan selama ini hanya menghasilkan aspek pertumbuhan tanpa diimbangi unsur pemerataan (*Kompas*, 2 Juni 1992).

Mengakhiri putaran terakhir kampanye PPP di Semarang, 3 Juni 1992, Sekjen DPP PPP Matori Abdul Djalil membacakan lima pernyataan politik PPP: (1) Pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilaksanakan secara jujur dan adil (jurdil) sebagai bagian upaya menformat Pemilu yang berkualitas. Dengan Pemilu yang jurdil berarti telah menyelamatkan suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan; (2) perangkat lunak yang dijadikan dasar pijakan hukum pelaksanaan Pemilu harus disempurnakan sesuai dengan dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan berubah, seirama dengan derasnya iptek. Perubahan ini mengarah pada ditempatkannya Orsospol sebagai penyelenggara Pemilu bersama pemerintah; (3) suasana tenang hendaknya benar-benar dijadikan masa perenungan agar pilihan politik masyarakat berdasarkan alasan yang rasional; (4) masyarakat dihimbau untuk secara massal menjadi saksi sukarela di TPS-TPS; (5) perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, perteguh kesamaan dalam dimensi ideologis yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta perkuat komitmen terhadap kelangsungan pembangunan yang berdimensi kerakyatan, pemerataan dan keadilan. Kecuali itu wujudkan pula kesamaan hak dan kewajiban se-

suai dengan ketentuan UUD 1945 serta kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam sistem politik yang berdasarkan Pancasila.

Pada hari yang sama puluhan ribu massa PPP memenuhi Taman Bungkul di Jalan Raya Darmo Surabaya, yang menampilkan jurkam Emha Ainun Najib dan Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas. Sedangkan dalam kampanye di Samarinda sehari sebelumnya, Wakil Sekjen PPP Drs. H. Yusuf Syakir menyatakan, PPP akan terus memperjuangkan demokratisasi sistem penyelenggaraan Pemilu dengan melibatkan seluruh kekuatan Orsospol di DPR hasil Pemilu 1992, dan perubahan terhadap UU tentang Parpol dan Golkar serta peningkatan kualitas pers dan media massa (*Suara Karya*, 4 Juni 1992).

Lampiran 23

RINGKASAN KAMPANYE PDI DALAM PEMILU 1992

KETUA UMUM DPP PDI Soerjadi dalam kampanye di Surabaya tanggal 10 Mei 1992 mengemukakan, Pemilu bertujuan mencegah pemerintahan yang otoriter, melakukan seleksi pimpinan nasional dan membatasi kekuasaan. Pemilu merupakan hak kedaulatan rakyat dan merupakan siklus awal kehidupan demokrasi Pancasila. Rakyat meminta agar Pemilu makin ditingkatkan kualitasnya melalui MPR dan GBHN 1988 (*Suara Karya*, 11 Mei 1992).

Ketua Umum DPP PDI Soerjadi mengemukakan dalam kampanyenya di Jakarta tanggal 12 Mei 1992, meskipun UUD 1945 sama sekali tak ada pembatasan berapa kali Presiden dan Wakil Presiden bisa dipilih kembali, namun PDI mengusulkan perlunya masa jabatan Presiden di masa mendatang dibatasi dua periode saja. Presiden dan Wapres memegang jabatannya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode 5 tahun kedua, bila dinilai baik oleh rakyat. UUD 1945 hanya mengatur bahwa Presiden dan Wapres memegang jabatannya selama masa 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Masalah pembatasan masa jabatan Presiden mendatang itu merupakan hasil penafsiran PDI dan tak ada paksaan bagi pihak lain untuk menerimanya. Sebab PDI pun tak mau dipaksa untuk menerima pandangan pihak lain. Kita harus menghargai adanya perbedaan pendapat. "Warga banteng" hendaknya memilih PDI sebab PDI akan memperjuangkan perubahan atas segala hal yang kurang baik dalam pembangunan selama ini dengan cara-cara yang sah. Melalui Pemilu kita akan melakukan perubahan secara konstitusional, bukan revolusi.

Ketua Umum DPP PDI Soerjadi mengemukakan dalam kampanyenya di Bandung tanggal 13 Mei 1992, PDI berjanji akan memuncul-

kan kabinet bersemangat kekeluargaan jika nanti ada orang dari partai ini yang menjadi Presiden. Selain itu jika berhasil menang dalam Pemilu, PDI akan membersihkan praktek-praktek nepotisme baik yang bersifat tradisional maupun modern. Merupakan hal yang wajar jika wakil-wakil dari OPP sama-sama ikut dalam kabinet. Sebab ketika Negara Kesatuan RI didirikan ditetapkan bahwa RI akan menjadi sebuah negara kekeluargaan. Walaupun demikian PDI tidak akan menuntut agar wakilnya duduk dalam kabinet. PDI hanya mengajukan pertimbangan. Nepotisme yang memberi kesempatan kepada orang yang tidak berhak, harus dibersihkan dari bumi Indonesia karena tidak demokratis. Nepotisme adalah sebuah sistem berdasarkan keluarga. Misalnya kalau menjadi pemimpin, anaknya menjadi pengusaha besar dengan mendapatkan berbagai fasilitas, istrinya menjadi anggota DPR/MPR (*Suara Karya,* 14 Mei 1992).

Dalam pidato kampanye PDI di Pemalang, Jateng, 20 Mei 1992, Ketua Umum DPP PDI Soerjadi mengatakan, membicarakan calon Presiden maupun pembatasan masa jabatannya selama masa kampanye Pemilu merupakan salah satu proses kenegaraan yang memang harus dilakukan. Hal ini akan mendukung proses kenegaraan yang secara resmi akan berlangsung pada SU MPR. Rakyat harus diajak bicara mengenai masalah-masalah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk masa jabatan Presiden. Langkah ini tidak berarti mengurangi fungsi dan peranan MPR yang berwenang menentukan hal tersebut. Rakyat agar memahami pasal 7 UUD 1945 yang menentukan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali. "Ini artinya Presiden tidak untuk dipilih berkali-kali". Maka PDI menginginkan adanya pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden hanya dua kali. Keinginan PDI ini bukan berarti mengebiri UUD 1945, melainkan hanya merupakan penafsiran terhadap konstitusi yang sebelumnya telah dilakukan juga antara lain dalam seminar-seminar, dialog maupun mendengarkan aspirasi masyarakat. Dari dialog PDI, khususnya dengan generasi muda dan mahasiswa, tercermin keinginan adanya perubahan dan pembatasan masa jabatan Presiden.

Sementara itu, jurkam PDI H. Ir. Andjar Siswoyo menegaskan pada kampanye di Jakarta, 15 Mei 1992, harapan partainya, dalam kampanye maupun pada saat dilaksanakannya pemilihan umum, ABRI tidak memihak pada salah satu OPP. Dalam kaitan ini, PDI yakin apabila Pemilu dilaksanakan tanpa tekanan kepada massa pendukung partai tersebut,

OPP ini akan berjaya. Sedangkan di Kudus, Jateng, 16 Mei 1992, jurkam PDI Megawati Soekarno Putri mengungkapkan penilaian partainya, pelaksanaan UUPA belum berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, di berbagai daerah Indonesia muncul berbagai bentuk kasus penggunaan tanah. Padahal tanah merupakan napas kehidupan bagi sebagian besar masyarakat. Salah satu tugas generasi penerus adalah memperbaiki kondisi tersebut.

Dalam kampanye melalui TVRI tanggal 15 Mei 1992, Sekjen DPP PDI Nico Daryanto menandaskan antara lain, PDI menyatakan perlunya dilakukan perubahan-perubahan dalam kaitan menghadapi era tinggal landas, yakni perubahan atau reformasi di tingkat operasional, pelaksanaan, khususnya di mana terdapat penyimpangan-penyimpangan. Sedangkan mengenai hal-hal yang bersifat fundamental, khususnya Proklamasi, UUD 1945 dan Pancasila, PDI menentang setiap upaya untuk mengubahnya. Ditegaskan, PDI akan terus menjadi partai yang menjadi hati nuraninya bangsa Indonesia, hati nuraninya demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi kebudayaan, dan tata kehidupan kemasyarakatan. Hati nuraninya demokrasi Pancasila. Karena itu PDI senantiasa menuntut adanya pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang betul-betul mencerminkan pengamalan Pancasila. Ini berarti baik cara, proses, maupun hasil pembangunan di segala bidang harus mengacu kepada dan dinilai dengan tolok ukur Pancasila. PDI tidak menyetujui segala kebijaksanaan dalam bentuk apa pun yang dapat merugikan kepentingan rakyat kecil dan rakyat miskin, seperti praktek-praktek monopoli, pemberian fasilitas yang berlebihan yang hanya memberi keuntungan kemajuan segelintir manusia.

Dalam kampanye putaran ketiga di wilayah DKI Jakarta, 18 Mei 1992, Sekjen DPP PDI Nico Daryanto yang tampil di Jakarta Utara menegaskan, PDI terus berjuang agar tindak korupsi diberantas dari muka bumi Indonesia. Sementara di hadapan massa PDI di Tangerang Ketua Umum DPP PDI Drs. Soerjadi mengajak rakyat menyoroti masalah pemilikan tanah, upah pekerja yang rendah, dan mengusulkan pembentukan UU Anti Monopoli karena praktek monopoli dinilainya sudah berkembang di Indonesia. Masalah tenaga kerja juga menjadi tema kampanye para jurkam PDI lainnya di berbagai tempat lainnya di Jakarta. Sedangkan Guruh Soekarno Putra di Pontianak, 17 Mei 1992 mengatakan, jika rakyat mengatakan tidak setuju dengan segala bentuk tata niaga cengkeh atau jeruk, PDI akan memperjuangkannya. PDI se-

lalu menyalurkan aspirasi rakyat secara murni. Ia juga mengingatkan, dalam alam keterbukaan ini hendaknya semua pihak membiarkan Pemilu ini berjalan sesuai asas luber dan jurdil. Jika asas ini belum dapat ditegakkan, maka itu berarti demokrasi Pancasila masih "coreng-moreng" (*Suara Karya*, 19 Mei 1992).

Dalam kampanye di DI Yogyakarta, 19 Mei 1992, Soerjadi mendesak Golkar agar menyusun rancangan UU anti monopoli. Jika itu dilakukan, PDI akan mendukungnya secara penuh. Sementara Guruh mengajak seluruh generasi muda PDI dan simpatisan PDI untuk ikut membangun demokrasi di Indonesia yang dinilainya sedang sakit, karena misalnya, masih ada orang takut atau waswas menggunakan hak pilihnya.

Aberson Marle Sihaloho (caleg PDI dari daerah pemilihan Jateng) mengatakan pada kampanyenya di Pemalang, 20 Mei 1992, untuk mewujudkan kehidupan demokrasi di tingkat desa, seharusnya jabatan Kepala Desa dan Ketua LKMD dipisahkan. Ia juga menyinggung masalah kemiskinan dan kebodohan di pedesaan. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang memungkinkan bagi rakyat pedesaan mendapatkan kesempatan yang sama di bidang pendidikan dan usaha (*Pelita*, 21 Mei 1992).

Sementara itu dari para jurkam (antara lain Guruh Soekarno Putra, H. Sinaga, Ny. Nurbani Yusuf, Alex Asmasoebrata, Abdul Hamid Atmowidagdo, Markus Wauran, dan Ir. Andjar Siswoyo) yang berbicara di lima wilayah Jakarta, pada umumnya masih mengangkat tema-tema yang sudah dikemukakan pada kesempatan kampanye sebelumnya di berbagai wilayah negara, yakni tentang masalah demokrasi, ketimpangan pelaksanaan pembangunan, anggaran pendidikan, hak pemilih, dan dukungan terhadap dwifungsi ABRI (*Kompas* dan *Media Indonesia*, 22 Mei 1992).

Dalam kampanye PDI lewat TVRI tanggal 21 Mei 1992, pembicara Drs. Kwik Kian Gie (Ketua Litbang PDI) mengatakan, PDI, Golkar, dan PPP adalah saudara kandung yang lahir dari Orde Baru, sehingga harus saling asah, asih dan asuh. Buang jauh-jauh gengsi-gengsian di dalam kegiatan mengurus negara. Buang jauh-jauh manuver-manuver politik yang hanya berwawasan perpolitikan, tetapi tingkatkan kehidupan bernegara, dan berbangsa menjadi kehidupan yang fi-

losofis mendalam landasannya, kenegarawanan wawasannya, dan teknokratik operasional kemampuannya. Buang jauh-jauh sloganisme, demagogi, dan agitasi. Ia juga mengemukakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan pemerataan dan keadilan (HPH, penguasaan tanah). PDI akan memperjuangkan agar peran pemerintah dengan Depkopnya diubah dari memimpin langsung koperasi menjadi memberi penyuluhan, pemahaman, dan pendidikan yang intensif kepada koperasi agar cepat mandiri. Pada bagian lain ia juga menyinggung tentang belum adanya undang-undang yang mengatur persaingan ekonomi sehingga terjadinya monopoli, kartel, dan caplok-mencaplok (*Kompas*, 22 Mei 1992).

Dalam kampanyenya di Ambon, 22 Mei 1992, Ketua Umum DPP PDI Soerjadi mengatakan, PDI ingin memenangkan Pemilu 1992 karena PDI sekarang semakin dicintai rakyat. Tetapi secara mental PDI juga siap menerima kekalahan asalkan kekalahan itu karena rakyat, bukan karena dicurangi. Masyarakat agar menggunakan hak politiknya dengan baik, sebab Pemilu merupakan satu-satunya kesempatan terbaik bagi rakyat untuk memberikan kedaulatan dan menentukan pilihan politiknya sesuai dengan hati nuraninya. Sementara di Solo pada waktu yang sama, Megawati Soekarno meminta simpatisan PDI tak bersikap seperti bebek dalam berpartisipasi membangun bangsa dan menegakkan inti demokrasi. Ia juga berharap agar mereka tetap berjuang penuh kecermatan tanpa harus keluar dari rel yang sudah digariskan (*Media Indonesia*, 23 Mei 1992).

Ketua Umum DPP PDI Soerjadi mengatakan dalam kampanyenya di Ujungpandang tanggal 23 Mei 1992, kehidupan politik di Indonesia masih loyo. Hal ini karena politik dimasuki birokrat sehingga terjadi birokratisasi politik. Katanya politik, tetapi malah isinya larangan melulu, aturan melulu, ini tidak boleh dan hanya ini boleh dan lain sebagainya (*Kompas*, 24 Mei 1992).

Ketua Umum DPP PDI Soerjadi mengatakan dalam kampanye tanggal 24 Mei 1992 di Jakarta, PDI siap mendukung Golkar, kalau OPP ini mau membantu lahirnya UU Anti Monopoli dan bersedia membantu orang-orang kecil. Selain itu dikemukakan juga keinginan Presiden Soeharto untuk membesarkan PDI, tidak diwajibkannya anggota Korpri bergabung dalam orpol tertentu, pentingnya pemberantasan korupsi, SDSB yang tak pernah diketahui besarnya dana yang ter-

kumpul, perlunya diumumkan daftar kekayaan Menteri dan calon Menteri, pengadilan yang bebas dan tidak memihak, peningkatan anggaran pendidikan dari 6% menjadi 25%, serta penggusuran kemiskinan dan bukan penggusuran orang miskin.

Dalam kampanye Pemilu tanggal 27 Mei 1992 di Jakarta, PDI tidak melakukan pengerahan massa secara besar-besaran. Pada hari itu dimanfaatkan oleh OPP ini melakukan kampanye simpatik berupa membagi-bagikan bunga anggrek dan kartu "Salam Manis PDI" kepada para penanggung jawab keamanan, pejabat-pejabat pemerintahan dan warga ibukota. Sementara itu para simpatisan PDI juga berbondong-bondong memenuhi jalan raya. Di Jln. Matraman Raya, Jakarta Timur terjadi insiden kecil. Di tempat tersebut para peserta pawai simpatik saling lempar batu dengan sementara warga masyarakat yang berdiri di pinggir jalan. Namun petugas keamanan bisa mengendalikan situasi dengan cepat sehingga kejadian lebih buruk bisa dihindarkan (*Kompas*, 29 Mei 1992).

Kampanye terbuka terakhir PDI di Jakarta, 31 Mei 1992 juga dipusatkan di Parkir Timur Senayan. Massa pendukungnya yang diperkirakan sekitar dua juta orang tidak dapat seluruhnya ditampung di lokasi kampanye tersebut sehingga sebagian di antaranya berhenti di jalan-jalan di sekitarnya. Meski demikian kampanye berlangsung tertib.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP PDI Drs. Soerjadi meminta agar OPP memisahkan diri dari birokrasi sehingga pegawai negeri dan birokrasi tidak dijadikan ujung tombak dalam kegiatan salah satu kekuatan sospol. Dalam kaitan ini pula PDI juga ingin melihat ABRI menjadi kekuatan sospol yang bebas, dan tidak terikat pada sospol tertentu. Ia juga menginginkan UU No.3 tahun 1985 tentang Parpol dan Golkar diperbaiki, sehingga parpol dapat berakar di tengah-tengah rakyat. Dan rakyat sendiri dapat melaksanakan hak politiknya (masalah massa mengambang). Tentang pers, jangan lagi ada pembredelan. Jika persnya salah, agar penanggung jawabnya yang ditindak. Koruptor perlu diperberat hukumannya, bahkan bila perlu hukuman mati. Sedangkan tentang praktek monopoli, Soerjadi mengatakan perlu segera diakhiri.

Pada hari yang sama, massa kampanye PDI di Surabaya memenuhi hampir seluruh jalan protokol di kota tersebut sehingga menye-

babkan kemacetan. Lebih semarak lagi karena gerak massa PDI berbenturan dengan massa PPP kemudian bergabung meneriakkan "Hidup Banteng" dan "Hidup Bintang". Kampanye ini sekaligus memperingati HUT ke-699 kota Surabaya.

Jurkam Guruh Soekarno Putra yang sore hari itu juga berkampanye di Medan mengatakan, kalau terjadi kecurangan dalam Pemilu, harus diusut tuntas sebab bertentangan dengan demokrasi Pancasila (*Kompas*, 1 Juni 1992).

Dalam pidato kampanye PDI di TVRI tanggal 2 Juni 1992, jurkam PDI Guruh Soekarno Putra menyatakan, ada tiga permasalahan yang harus bisa diterobos oleh kaum muda untuk meningkatkan kualitas dirinya. Pertama, ada kalangan tertentu yang memandang kaum muda hanya sebagai kelompok pendukung, pengekor, dan obyek politik, ekonomi, maupun budaya, yang menyebabkan kaum muda tidak diperlakukan secara wajar sebagai calon penentu untuk memimpin bangsa dan pemilik masa depan; Kedua, adanya tingkah laku generasi tua yang tidak mencerminkan keteladanan yang baik yakni tingkah laku yang berupa tak satunya kata dengan perbuatan; Ketiga, semakin sulitnya kaum muda terutama yang tinggal di pedesaan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang memadai untuk dapat bekerja dalam suasana kompetisi yang semakin ketat. PDI akan berjuang serius untuk mengatasi persoalan itu. PDI tidak pernah ragu-ragu terhadap peran dan posisi strategis kaum muda Indonesia sebagai pemilik masa depan dan penentu perjalanan kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Untuk menjaga agar tidak terjadi erosi semangat patriotisme, nasionalisme, dan idealisme di kalangan kaum muda, generasi tua hendaknya mengubah pola tingkah lakunya yang tidak mencerminkan satunya kata dengan perbuatan. Itu sebabnya pemberian pendidikan kepribadian bangsa merupakan salah satu kunci yang harus diberikan terus-menerus (*Kompas*, 3 Juni 1992).

Ketika berkampanye di Kisaran Kabupaten Asahan Sumut, 3 Juni 1992, Ketua Umum DPP PDI Drs. Soerjadi mengemukakan lagi tentang kebebasan Korpri yang dikaitkan dengan hakikat kehidupan demokrasi. Dia juga berharap agar rakyat diberikan pendidikan politik yang tepat agar bukan hanya mengetahui berpolitik tetapi jauh lebih penting adalah sadar berpolitik sehingga mereka tidak mudah dibohongi aparat yang buta politik. Di Lhokseumawe, Megawati Soekarno Putri

mengharapkan agar generasi muda bangkit dari ketakutannya. Ditambahkan, PDI akan berjuang melakukan perubahan dan pembaruan. Sebab, kita inginkan agar pemimpin mendatang adalah orang yang arif dan bijaksana, jujur dan mengayomi seluruh rakyat. Jika tidak, Indonesia sulit akan menjadi bangsa yang besar. Di Kupang, NTT, Guruh Soekarno Putra mengatakan, akibat deparpolitisasi rasa takut terhadap parpol telah tumbuh di kalangan rakyat termasuk generasi muda. Ketakutan itu harus diatasi. Sementara di Sambas, Kalbar, jurkam Dimmy Haryanto menghimbau massa PDI untuk secara sukarela menjadi saksi dalam perhitungan suara (*Suara Karya*, 4 Juni 1992).

Dalam kampanye tertutup PDI di Jakarta, 3 Juni 1992, Ketua Litbang PDI Drs. Kwik Kian Gie menyatakan, PDI mengharapkan agar media massa lebih banyak lagi memberikan perhatian kepada keadaan parpol, antara lain untuk menghindarkan kesan bahwa parpol tidak mengerti apa-apa, tidak memiliki program atau hanya bisa "omong kosong" belaka.

Kampanye tertutup 3 Juni 1992 itu semula dirancang sebagai pertemuan antara tiga OPP dengan massa. Namun hanya PPP yang mengirim wakilnya yakni Wakil Sekjen DPP PPP Yusuf Syakir, sedangkan Golkar tidak mengirimkan wakilnya.

Dalam pertemuan ini Kwik dan Yusuf Syakir sepakat mengenai penghapusan pembredelan pers. Menurut Kwik, bila ada kesalahan, sudah selayaknya pemimpin redaksinya yang dipanggil dan dibawa ke pengadilan, bukannya mencabut SIUPP. Upaya ini untuk menghapus budaya takut yang menjadi salah satu program PDI (*Kompas*, 4 Juni 1992).

Kontributor

Amir Santoso. Direktur Eksekutif LPPIS-FISIP Universitas Indonesia.

Hari Soegiman. Dirjen Sospol Depdagri, Kabinet Pembangunan IV dan V, 1983-1992

Harry Tjan Silalahi. Wakil Ketua Dewan Direktur CSIS.

Kwik Kian Gie. Kepala Balitbang PDI, 1989-1994.

H. Matori Abdul Djalil. Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan 1989-1994

Oka Mahendra. Anggota DPP Golkar, 1988-1993.

Riswandha Imawan. Guru Besar Ilmu Politik, Fisipol-UGM, Yogyakarta.

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES, disingkat CSIS, adalah lembaga studi swasta nirlaba yang berdiri secara resmi sejak September 1971. Kegiatan utama CSIS adalah studi yang berorientasi pada kebijakan *(policy oriented studies)*, baik tentang masalah internasional maupun masalah dalam negeri. Tujuan lembaga ini adalah menyediakan hasil-hasil studi agar dimanfaatkan oleh siapa pun yang membutuhkannya.

Untuk menyelenggarakan pengkajian yang berorientasi pada kebijakan itu, CSIS memakai pendekatan interdisipliner, yang melibatkan sarjana-sarjana dari pelbagai bidang studi. Dengan cara ini dapat sejauh mungkin terliput kompleksitas setiap masalah yang dikaji, tetapi tetap dalam keteraturan analisis ilmiah. Dalam batas-batas disiplin yang dituntut ilmu pengetahuan, para peneliti dan pemikir CSIS bekerja dalam suasana dan dengan semangat kebebasan akademik.

CSIS bermula dari kegiatan-kegiatan studi yang dilakukan oleh dua kelompok cendekiawan muda Indonesia sejak tahun 1960, sebelum lembaga ini berdiri secara resmi. Kelompok yang satu terdiri atas mahasiswa-mahasiswa pascasarjana yang sedang belajar di luar negeri, terutama di Eropa Barat. Kelompok yang kedua terdiri atas sarjana-sarjana yang melaksanakan kegiatan studinya di tanah air. Mereka melihat bahwa pengkajian masalah-masalah strategi dan internasional ketika itu belum mendapat perhatian yang memadai di Indonesia. Kontak intelektual antara kedua kelompok inilah yang melahirkan dan menumbuhkan gagasan untuk mendirikan CSIS. Gagasan ini menjadi kenyataan berkat dukungan penuh Bapak Ali Moertopo dan Bapak Soedjono Hoemardani, dan dengan dibentuknya Yayasan Proklamasi pada bulan Juli 1971, yang mensponsori CSIS dan kegiatannya.

Selain menyelenggarakan kegiatan studi yang menghasilkan berbagai karya tulis, sejak tahun 1972 CSIS menyelenggarakan diskusi mengenai berbagai masalah yang bersifat profesional dan untuk umum. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk seminar atau konferensi. Variasi pesertanya berlingkup nasional dan internasional.

Penerbitan CSIS disajikan kepada masyarakat umum atau dikirim kepada yang berkepentingan. Penerbitan CSIS sampai sekarang meliputi:

1. Buku dan monografi yang ditulis oleh para peneliti CSIS atau merupakan kumpulan makalah seminar dan konferensi, meliputi berbagai masalah di bidang hubungan internasional, ekonomi, politik dan sosial budaya.
2. *Analisis CSIS*, jurnal dwiwulanan berbahasa Indonesia.
3. *The Indonesian Quarterly*, jurnal triwulanan berbahasa Inggris.
4. *Dokumentasi*, guntingan berita pers Indonesia tentang dan sekitar masalah tertentu.
5. *Nawala CSIS*, buletin dwiwulanan berbahasa Indonesia berisi berita tentang CSIS dan kegiatannya.